



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



## LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, taufik dan inayah-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan ini adalah perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Balangan periode Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Balangan dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas



kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Parangin, 28 Maret 2024

 **BUPATI BALANGAN,**  
**H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> . . . . .	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> . . . . .	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TELAH DI REVIU</b> . . . . .	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> . . . . .	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> . . . . .	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang . . . . .	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Balangan . . . . .	2
C. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi . . . . .	4
D. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . . . . .	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah . . . . .	6
B. Penetapan Indikator Kinerja Utama . . . . .	8
C. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) . . . . .	11
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) . . . . .	11
E. Perjanjian Kinerja (PK) . . . . .	13
F. Anggaran . . . . .	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Pengukuran Kinerja . . . . .	18
B. Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan . . . . .	22
C. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan . . . . .	35
D. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Murni . . . . .	63
E. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya . . . . .	126
F. Akuntabilitas Keuangan Daerah . . . . .	128
G. Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan . . . . .	136
H. Piagam Penghargaan . . . . .	138



**BAB IV PENUTUP**

**KESIMPULAN**

A. Capaian Kinerja pada IKU 2021-2026 Mengacu RPJMD Periode 2021-2026 . . . . .	141
B. Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi . . . . .	145





# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## INSPEKTORAT

Alamat : Jalan Jend. A. Yani Km. 3,5 Telp. (0526) 2028395 Fax. (0526) 2028248  
Paringin Selatan - Kode Pos 71462

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Balangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Paringin, 26 Maret 2024

Inspektur  
Kabupaten Balangan

**Drs. Urai Nur Iskandar, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730501 199311 1 001

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan	3
Tabel 1.2	Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan	4
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	7
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023	13
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023	15
Tabel 2.6	Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Sebelum dan Setelah Dilakukan Perubahan	16
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan	18
Tabel 3.2	Peringkat Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Baru	19
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama	19
Tabel 3.4	Peringkat Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama	21
Tabel 3.5	Dimensi IPM Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022	25
Tabel 3.6	Peringkat Kemiskinan Kab/Kota Se Kalsel 2019-2023	29
Tabel 3.7	Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.8	Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tahun 2022	32
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	35
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	39
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	40
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	41
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	44
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	44
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	46
Tabel 3.16	Angka Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	47
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	48
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	55
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	63
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	65



Tabel 3.21	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	66
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	68
Tabel 3.23	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	79
Tabel 3.24	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Pendidikan	83
Tabel 3.25	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Indeks Kesehatan	86
Tabel 3.26	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	95
Tabel 3.27	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya Angka Kemiskinan	102
Tabel 3.28	Peringkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Kalsel 2019-2023	104
Tabel 3.29	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	109
Tabel 3.30	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	113
Tabel 3.31	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	115
Tabel 3.32	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13 Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	119
Tabel 3.33	Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan IV (September-Desember) Tahun 2023 RPJMD 2021-2026	126



## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1	Batas Administrasi Kabupaten Balangan	2
Gambar 1.2	Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km <sup>2</sup>	2
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023	22
Gambar 3.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023	23
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023	24
Gambar 3.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan	24
Gambar 3.5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2023	25
Gambar 3.6	Angka Kemiskinan 2019-2023	28
Gambar 3.7	Jumlah Penduduk Miskin 2019-2023	28
Gambar 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023	30
Gambar 3.9	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023	45
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023	46
Gambar 3.11	Angka Kemiskinan 2019-2023	103
Gambar 3.12	Jumlah Penduduk Miskin 2019-2023	103





# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## BAB I PENDAHULUAN



- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
- C. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Balangan adalah salah satu dari 13 Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Balangan mewujudkan *good governance*.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparat pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

LKIP Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 yang disusun pada bulan Januari tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD dan RKPD. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan ini merupakan penyusunan ketiga kali untuk masa RPJMD periode tahun 2021-2026.

Adapun alas hak hukum yang mendasari dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
- c. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

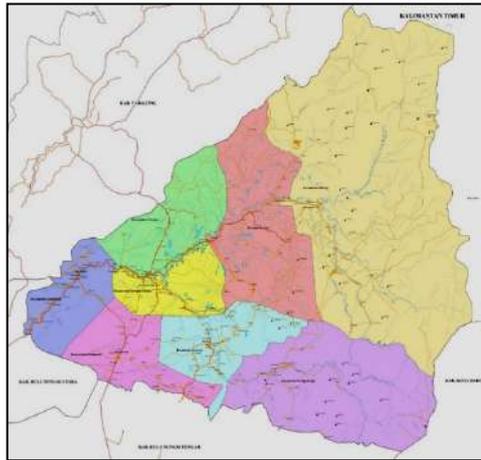


**B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BALANGAN**

**B.1. Luas dan Batas Wilayah**

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 1.878,3 Km<sup>2</sup> secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Batas Administrasi Kabupaten Balangan

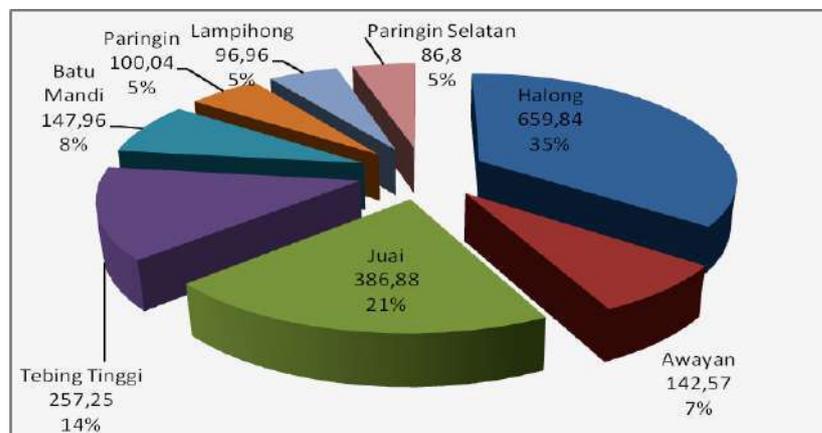


- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peta di atas daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km<sup>2</sup> (35,13 persen). Sedangkan luas wilayah kecamatan lain adalah Kecamatan Juai 386,88 km<sup>2</sup> (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km<sup>2</sup> (13,70 persen), Kecamatan Batu Mandi 147,96 km<sup>2</sup> (7,88 persen), Kecamatan Awayan 142,57 km<sup>2</sup> (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km<sup>2</sup> (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km<sup>2</sup> (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km<sup>2</sup> (4,62 persen).

Kabupaten Balangan terdiri atas 154 Desa dan 3 Kelurahan (berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin dan Kelurahan Batu Piring di Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 berikut ini:

Gambar 1.2  
Luas Masing-masing Kecamatan dalam Satuan Km<sup>2</sup>



Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2017



Tabel 1.1  
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1. Lambahong	-	27
2. Paringin	2	14
3. Juai	-	21
4. Halong	-	24
5. Batumandi	-	18
6. Paringin Selatan	1	15
7. Awayan	-	23
8. Tebing Tinggi	-	12
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>154</b>

*\*)Sumber data : BPS Balangan Dalam Angka Tahun 2017*

## B.2 Aspek Strategis RPJMD Periode 2021-2026

Aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi Bupati untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2021-2026 yang ingin diwujudkan pada masa awal sampai akhir jabatan Bupati Balangan adalah:

- Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan.** Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.
- Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif.** Perekonomian daerah masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.
- Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan.** Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
- Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara.** Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
- Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.** Masih rendahnya angka PPKS yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.



## C. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

### C.1. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian sering kali pelayanan publik dikeluhkan masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan Upaya membangun Mall Pelayanan Publik, melaksanakan standar kepatuhan pelayanan public sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

### C.2. Struktur Organisasi

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Nama Satuan Kerja/Organisasi			
1.	Sekretariat Daerah	13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2.	Sekretariat DPRD	14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.	Inspektorat	15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	19.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	21.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.	Dinas Perhubungan	23.	Kecamatan (8 Kecamatan)
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		

Sumber data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Balangan 2021

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 mengalami perubahan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan mulai diberlakukan dan dilaksanakan pelantikan pejabat struktural dan fungsionalnya pada bulan Januari tahun 2024.



#### D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pelaporan kinerja ini ditekankan kepada capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama atas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan :**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja :**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja :**

###### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

###### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

###### C. Inovasi Daerah dan Piagam Penghargaan

Pada sub bab ini diuraikan inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan serta Penghargaan yang di raih setiap tahunnya.

##### **Bab IV Penutup :**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

##### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu





## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### BAB II PERENCANAAN KINERJA



- A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
- B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
- C. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
- D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
- E. PERJANJIAN KINERJA (PK)
- F. ANGGARAN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam periode RPJMD 2021-2026, yaitu : **"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"**. Visi ini terdiri atas tiga makna pokok, yakni :

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

Ketiga pokok visi tersebut pada dasarnya merujuk pada kondisi akhir tercapainya Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera pada hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu :

#### 1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi Balangan terkait dengan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk pemukiman, ekonomi, transportasi, pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur desa dan perkotaan untuk pemerataan pembangunan.

#### 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

#### 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

Misi ini dilandasi oleh kondisi kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan, dan akses pendidikan dan kesehatan sehingga mengharuskan daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.

#### 4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.



**5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.**

Misi ini dilandasi kondisi masih rendahnya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, upaya dalam pelestarian seni dan budaya, peningkatan angka konflik sosial bernuansa SARA, serta belum maksimalnya kinerja pemerintahan mengharuskan daerah untuk mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah ditetapkan 8 (delapan) tujuan. Adapun matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan sebagaimana tabulasi data berikut:

Tabel 2.1  
Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<b>VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA</b>				
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>	
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	2	3	4	5
1 Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan	1 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Indeks Infrastruktur Wilayah	1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik
			2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman
	2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	3 Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan
2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%) Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa (%) Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
	4 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	5 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka
3 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan	5 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6 Meningkatkan Indeks Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Lama Sekolah
		Usia Harapan Hidup	7 Meningkatkan Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 Kelahiran Hidup



VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA				
Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5
				Prevalensi Stunting
				Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)
4 Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara	6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP
				Nilai Opini BPK
				Nilai EKPPD
				Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5 Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	7 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif	Angka Kemiskinan	9 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
				Angka PPKS yang Tertangani
		Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	10 Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	11 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Indeks Resiko Bencana
Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	12 Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya		
8 Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Indeks Desa Membangun	13 Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Indeks Desa Membangun	

Saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyesuaian terhadap RPJP dan diikuti dengan penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik. Muatan dalam rancangan teknokratik RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyesuaikan dengan Cascading Kinerja Baru berdasarkan *logical framework*. Dokumen rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana lampiran LKIP ini.

## B. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan IKU periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/754/Kum Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Balangan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Balangan periode 2021-2026 terdiri dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama. Penetapan IKU Perubahan terdiri dari 9 (sembilan) sasaran dan 17 (tujuh belas indikator). SK tentang perubahan IKU sebagai dampak adanya RPJMD Penyesuaian tertuang dalam lampiran LKIP ini (pada tahap ini kami hanya menyajikan draft atau rancangan keselarasan RPJMD penyesuaian dan IKU, mengingat RPJMD penyesuaian masih dalam proses penyusunan). Berikut ini kami sajikan IKU mengacu pada dokumen RPJMD sebelum penyesuaian:



Tabel 2.2  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Pemerintah Kabupaten Balangan Periode Tahun 2021-2026

Misi I : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan				
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1 Indeks Infrastruktur Publik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Perhubungan
		2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2 Indeks Infrastruktur Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3 Indeks Kualitas Air	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			4 Indeks Kualitas Udara	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			5 Indeks Kualitas Lahan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Misi II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			7 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa (%)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			8 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			9 Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	5 Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10 Angka Pengangguran Terbuka	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Misi III : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan				
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan	6 Meningkatkan Indeks Pendidikan	11 Angka Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			12 Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7 Meningkatkan Indeks Kesehatan	13 Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			14 Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			15 Angka Kematian Bayi (AKB) / 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			16 Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			17 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi IV : Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara				
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8 Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi	18 Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah; Inspektorat; Bappedalitbang; dan Seluruh SKPD
			19 Nilai Opini BPK	BPKPAD; Inspektorat
			20 Nilai EKPPD	Sekretariat Daerah dan Seluruh SKPD
			21 Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sekretariat Daerah dan UPP
			22 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Daerah dan UPP



Misi V : Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif				
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	9 Menurunnya Angka Kemiskinan	23 Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			24 Angka PPKS Yang Tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10 Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			27 Indeks Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		12 Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28 Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	13 Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29 Indeks Membangun Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### C. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 periode RPJMD 2021-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023. RKPD ini ditujukan untuk memfasilitasi dan menjalankan misi pemerintahan dan pembangunan serta mewujudkan visi daerah secara bertahap.

### D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023 mencakup target kinerja yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1. Indeks Infrastruktur Publik	41,58
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2. Indeks Infrastruktur Permukiman	31,42
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3. Indeks Kualitas Air	50,30
		4. Indeks Kualitas Udara	91,16
		5. Indeks Kualitas Lahan	55,67
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	6. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,14
		7. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,40
		8. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44
		9. Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	600 M
5.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10. Angka Pengangguran Terbuka	2,40
6.	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36
		12. Angka Harapan Lama Sekolah	12,85
7.	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13. Usia Harapan Hidup	68,32
		14. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	132
		15. Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	8,8
		16. Prevalensi Stunting	14
		17. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	18
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18. Nilai SAKIP	72,40 (BB)
		19. Opini BPK	WTP
		20. Nilai EKPPD	3.5900
		21. Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)
		22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
9.	Menurunnya Angka Kemiskinan	23. Angka Kemiskinan	5,2 - 5,0
		24. Angka PPKS yang Tertangani	70,95
10.	Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25. Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0
11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
		27. Indeks Resiko Bencana	126,16
12.	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28. Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	68
13.	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29. Indeks Desa Membangun	0.7293

### E. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023 ditetapkan pada bulan Januari 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/754/Kum Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Balangan. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2023 tergambar dalam tabulasi berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1. Indeks Infrastruktur Publik	41,58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2. Indeks Infrastruktur Permukiman	31,42	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3. Indeks Kualitas Air	50,30	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		4. Indeks Kualitas Udara	91,16	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		5. Indeks Kualitas Lahan	55,67	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	6. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		7. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		8. Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		9. Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	600 M	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10. Angka Pengangguran Terbuka	2,40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6.	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		12. Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
7.	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13. Usia Harapan Hidup	68,32	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		14. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	132	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		15. Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	8,8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		16. Prevalensi Stunting	14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		17. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	18	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18. Nilai SAKIP	72,40 (BB)	Sekretariat Daerah; Inspektorat; Bappedalitbang; dan Seluruh SKPD
		19. Opini BPK	WTP	BPKPAD; Inspektorat
		20. Nilai EKPPD	3.5900	Sekretariat Daerah dan Seluruh SKPD
		21. Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	Sekretariat Daerah dan UPP
		22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Sekretariat Daerah dan UPP
9.	Menurunnya Angka Kemiskinan	23. Angka Kemiskinan	5,2 - 5,0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		24. Angka PPKS yang Tertangani	70,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25. Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		27. Indeks Resiko Bencana	126,16	BPBD
12.	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28. Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29. Indeks Membangun Desa	0,7293	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Balangan pada Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada September 2023. Ada beberapa Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mengalami perubahan dan perubahan pada alokasi anggaran. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah adanya penyesuaian strategi perubahan sistem kerja, antara lain perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.



Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	5,57
		2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,53
		3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	1,35
		4. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,45
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5. Persentase Peningkatan Investasi Daerah	48,88%
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6. Usia Harapan Hidup	68,32
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7. Angka Harapan Lama Sekolah	12,85
		8. Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,36
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9. Pengeluaran Perkapita	1308553
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10. Indeks Gini Rasio	0,285
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11. Pengangguran Terbuka	2,40
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12. Nilai SAKIP	72,40 (BB)
		13. Opini BPK	WTP
		14. Nilai EKPPD	3,5900
		15. Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)
		16. Indeks Kepuasan Masyarakat	85
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17. Indeks Desa Membangun	0,7293

## F. Anggaran

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah beberapa program dan anggaran yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) program dengan jumlah total anggaran murni **Rp. 1.209.911.606.591** dan total anggaran perubahan sebesar **Rp. 868.733.819.486** yang secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.6  
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023  
Sebelum dan Setelah Dilakukan Perubahan

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Jalan	186.964.276.950	77.913.633.500
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.073.883.550	11.016.624.950
3.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	26.102.635.100	14.756.534.300
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.744.745.900	1.744.745.900
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	36.384.126.200	32.262.673.000
6.	Penataan Bangunan Gedung	95.665.486.600	9.379.936.400
7.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.021.794.152	4.021.794.152
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.044.640.000	4.428.870.000
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.925.982.200	1.206.469.200
10.	Kawasan Permukiman	4.577.050.400	688.469.700
11.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78.698.886.700	48.359.069.950
12.	Pengelolaan Persampahan	12.121.265.400	6.185.535.400
13.	Perencanaan Lingkungan Hidup	211.860.000	211.860.000
14.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	979.009.200	894.009.200
15.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.227.823.700	2.928.553.700
16.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	67.145.700	67.145.700
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.479.700	84.479.700
18.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.957.361.000	3.814.037.500
19.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	287.346.200	137.346.200
20.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	283.697.700	262.704.700
21.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.787.174.774	6.534.359.300
22.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	45.834.260.410	16.365.510.300
23.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	869.044.600	736.008.000
24.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.468.808.650	757.118.350
25.	Penyuluhan Pertanian	5.247.434.900	3.462.884.900
26.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	648.655.600	451.953.800
27.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.111.863.100	632.877.600
28.	Penanganan Kerawanan Pangan	188.132.700	178.132.700
29.	Pengawasan Keamanan Pangan	32.636.800	32.636.800
30.	Pengembangan UMKM	993.259.000	403.446.800
31.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	39.046.400	39.046.400
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	433.370.400	285.370.400
33.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	446.141.800	196.141.800
34.	Pengendalian Izin Usaha Industri	99.758.300	79.758.300
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.065.995.800	936.995.800
36.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.105.855.500	949.088.500
37.	Pengembangan Ekspor	2.205.017.000	467.513.800
38.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	133.810.000	46.210.000
39.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	421.864.000	114.664.100



No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)
40.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	57.010.000	57.010.000
41.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.306.682.700	839.242.700
42.	Pemasaran Pariwisata	1.004.998.500	710.528.500
43.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	349.152.500	242.154.600
44.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	82.437.400	82.437.400
45.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	87.980.800	87.980.800
46.	Pelayanan Penanaman Modal	426.926.800	426.926.800
47.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	106.140.000	106.140.000
48.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.414.732.500	1.922.640.000
49.	Penempatan Tenaga Kerja	1.191.123.700	966.106.500
50.	Pengelolaan Pendidikan	76.283.011.136	60.586.819.213
51.	Pengembangan Kurikulum	115.951.000	115.951.000
52.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	731.300.000	731.300.000
53.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	73.020.000	73.020.000
54.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.202.917.039	49.255.784.993
55.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.101.476.600	6.907.426.600
56.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	82.828.200	82.828.200
57.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	383.297.600	333.799.600
58.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.382.948.500	278.948.500
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.184.481.293	227.927.945.007
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	4.913.270.000	3.265.760.000
61.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.643.029.200	1.443.030.500
62.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.629.293.900	2.229.293.700
63.	Pengelolaan Keuangan Daerah	309.853.037.350	225.942.195.034
64.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.203.370.400	2.243.230.400
65.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.024.252.400	794.032.400
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	63.278.489.200	1.602.573.000
67.	Pemberdayaan Sosial	302.605.200	289.405.200
68.	Rehabilitasi Sosial	368.028.200	328.979.000
69.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.474.881.837	5.454.881.837
70.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.262.478.000	684.451.000
71.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	255.675.100	358.507.100
72.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.405.330.000	5.128.907.700
73.	Penanggulangan Bencana	4.893.704.050	3.765.528.900
74.	Pengembangan Kesenian Tradisional	1.858.957.000	1.040.777.000
75.	Pembinaan Sejarah	3.803.682.000	361.482.000
76.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	659.441.000	619.441.000
77.	Administrasi Pemerintahan Desa	4.442.834.500	4.010.937.600
78.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.352.644.900	4.401.204.900
	<b>Jumlah</b>	<b>1.209.911.606.591</b>	<b>868.733.819.486</b>





## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



- A. PENGUKURAN KINERJA
- B. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
- C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
- E. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
- F. INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
- G. PIAGAM PENGHARGAAN

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 periode RPJMD 2021-2026 ini merupakan capaian kinerja tahun ketiga RPJMD periode 2021-2026. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran tahun ketiga RPJMD di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Perubahan**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1.1 Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan						
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%	5,57	4,01	72,03	Sedang
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	%	6,53	15,54	237,97	Sangat Tinggi
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	%	1,35	8,74	648	Sangat Tinggi
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	6,45	9,85	152,73	Sangat Tinggi
1.2 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi						
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persentase	48,88	16,76	34,28	Sangat Rendah
2.1 Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
6.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,32	73,69	107,86	Sangat Tinggi
2.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
7.	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,85	12,82	99,77	Sangat Tinggi
8.	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,36	8,03	96,05	Sangat Tinggi
2.3 Sasaran : Meningkatnya Pengeluaran Perkapita						
9.	Pengeluaran Perkapita	Angka	1308553	990.667	75,71	Sedang
3.1 Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan						
10.	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,285	0,258	109,47	Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
3.2 Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
11.	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	2,40	2,70	87,50	Tinggi
4.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
12.	Nilai SAKIP	Angka	72,40 (BB)	70,17 (BB)	96,92	Sangat Tinggi
13.	Opini BPK	Perdikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
14.	Nilai EKPPD	Angka	3,5900	2,8600	79,67	Tinggi
15.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51 (B)	4,01 (A Minus)	114	Sangat Tinggi
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85,07	100,08	Sangat Tinggi
4.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas SDGS Desa						
17.	Indeks Membangun Desa	Indeks	0,7293	0,7527	103,21	Sangat Tinggi

**Tabel 3.2**  
**Peringkat Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan**

No.	Predikat	Jumlah	Indikator Utama
1.	Sangat Tinggi	12	2, 3, 4, 6, 7, 8,10, 12, 13, 15,16 dan 17
2.	Tinggi	2	11 dan 14
3.	Sedang	2	1 dan 9
4.	Rendah	0	-
5.	Sangat Rendah	1	5

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja utama sangat rendah adalah Persentase Peningkatan Investasi Daerah, indikator kinerja utama yang sedang adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan dan Pengeluaran Perkapita indikator kinerja utama yang tinggi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Nilai EKPPD sedangkan sisa indikator lainnya berada pada kategori sangat tinggi.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1.1 Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik						
1.	Indeks Infrastruktur Publik	Indeks	41,58	43,69	105,07	Sangat Tinggi
1.2 Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman						



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
2.	Indeks Infrastruktur Permukiman	Indeks	31,42	29,87	95,07	Sangat Tinggi
2.1 Sasaran : Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan						
3.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,30	50	99,40	Sangat Tinggi
4.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,16	93,97	103,08	Sangat Tinggi
5.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	55,67	51,94	93,30	Sangat Tinggi
3.1 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi						
6.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	13,14	7,68	58,45	Rendah
7.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	%	6,40	4,16	65	Rendah
8.	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,44	0,24	55	Rendah
9.	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Milyar	600 M	471,227	78,54	Tinggi
4.1 Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
10.	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	2,40	2,70	87,50	Tinggi
5.1 Sasaran : Meningkatnya Indeks Pendidikan						
11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,36	8,03	96,05	Sangat Tinggi
12.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,85	12,82	99,77	Sangat Tinggi
5.2 Sasaran : Meningkatnya Indeks Kesehatan						
13.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,32	73,69	107,86	Sangat Tinggi
14.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	Angka	132	207	43,18	Sangat Rendah
15.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran)	Angka	8,8	15,54	23,41	Sangat Rendah
16.	Prevalensi Stunting	Angka	14	14,61	95,64	Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
17.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Angka	18	20,8	84,44	Tinggi
6.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
18.	Nilai SAKIP	Angka	72,40 (BB)	70,17 (BB)	96,92	Sangat Tinggi
19.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
20.	Nilai EKPPD	Angka	3,5900	2,8600	79,67	Tinggi
21.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.51 (B)	4,01 (A Minus)	114	Sangat Tinggi
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85,07	100.08	Sangat Tinggi
7.1 Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan						
23.	Angka Kemiskinan	Angka	5,2 – 5,0	5,22	99,62	Sangat Tinggi
24.	Angka PPKS yang tertangani	Angka	70,95	59,40	83,72	Tinggi
7.2 Sasaran : Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif						
25.	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka	0	0	100	Sangat Tinggi
7.3 Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum						
26.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	Sangat Tinggi
27.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	126,16	115,21	108,68	Sangat Tinggi
7.4 Sasaran : Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan						
28.	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	%	68	70,97	104,37	Sangat Tinggi
8.1 Sasaran : Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						
29.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7293	0,7527	103,21	Sangat Tinggi

**Tabel 3.4**  
**Peringkat Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Lama**

No.	Predikat	Jumlah	Indikator Utama
1.	Sangat Tinggi	19	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29



2.	Tinggi	5	9, 10, 17, 20, 24
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	3	6, 7 dan 8
5.	Sangat Rendah	3	14, 15

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja utama yang masih sangat rendah adalah Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran) dan Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran), indikator kinerja utama rendah adalah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan, Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, indikator kinerja utama yang tinggi adalah Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah), Angka Pengangguran Terbuka, Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR), Nilai EKPPD dan Angka PPKS yang Tertangani sedangkan sisa indikator lainnya berada pada kategori sangat tinggi.

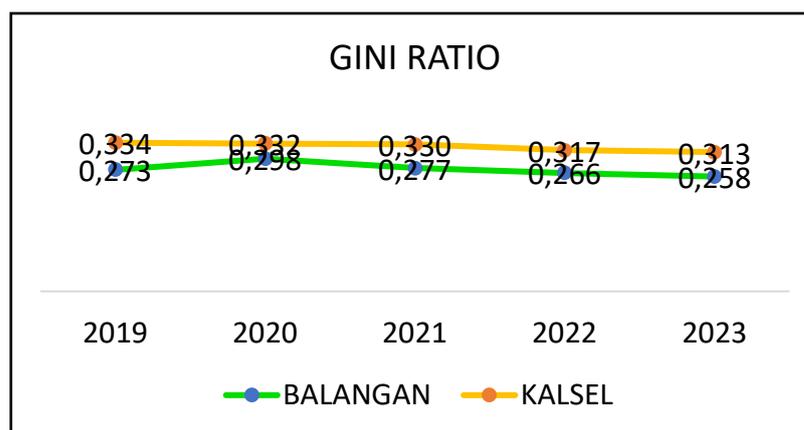
## B. Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan

### 1. Indeks Gini Ratio

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Gambar 3.1  
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata.



Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

**Faktor pendorong :**

- a. Mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula;
- b. Adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya bantuan uang tunai, permakanan, peralatan kerja, bedah rumah, dan sebagainya;
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja;
- d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi di angka 72,97 poin (2023) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata;
- e. Semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait;
- f. Pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh.

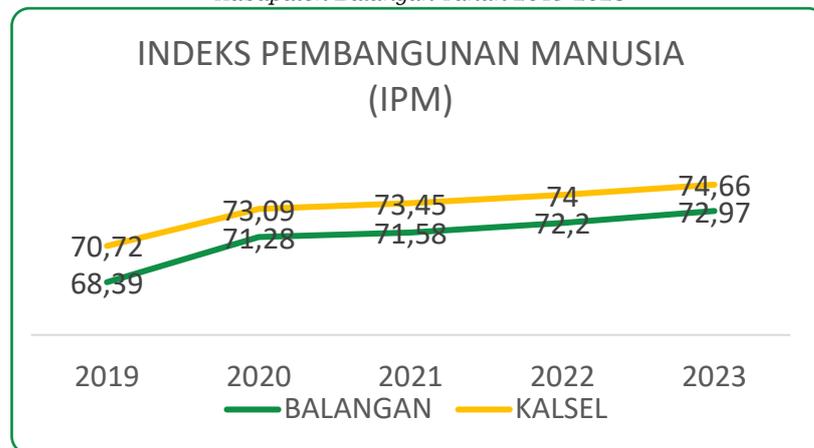
**Faktor penghambat :**

- a. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal;
- b. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan sehingga perlu kontribusi lebih dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

**2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Report* (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk).

Gambar 3.2  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023



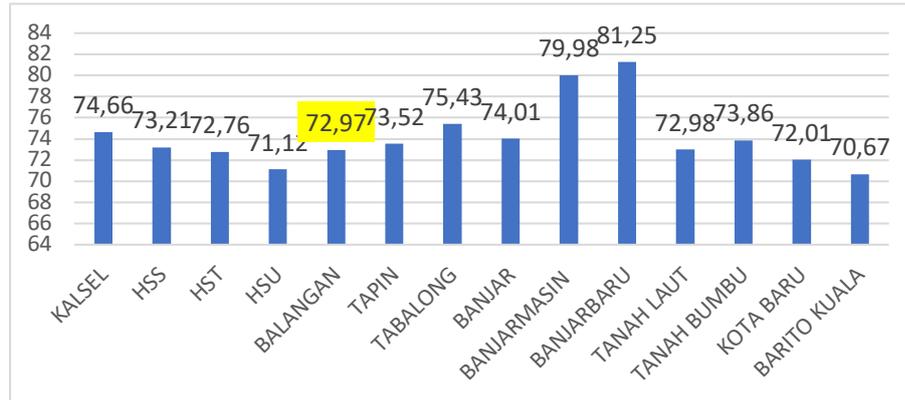
Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi



72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada kategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Gambar 3.3  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di  
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

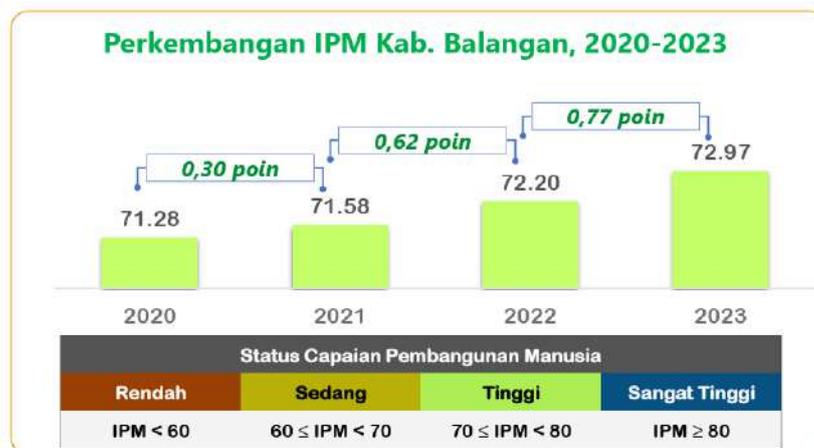


Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan semua indikator pembentuk, yaitu Angka harapan Hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita. Khusus data Tahun 2020-2023 menggunakan data hasil LF SP 2020 yang lebih berkualitas sehingga nilai IPM semua Kab/Kota jauh meningkat. Adanya update sumber data berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang lebih berkualitas dimana adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir, penggunaan statistik yang terbaru sehingga meningkatkan kualitas data dan tersedianya data parameter kependudukan terbaru. Dari hasil long form Sensus Pendudukan 2020 inilah nilai Angka Harapan Hidup meningkat yaitu 73,69 tahun.

Perkembangan IPM Kabupaten Balangan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan sumber data Long Form Sensus Penduduk 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4  
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan

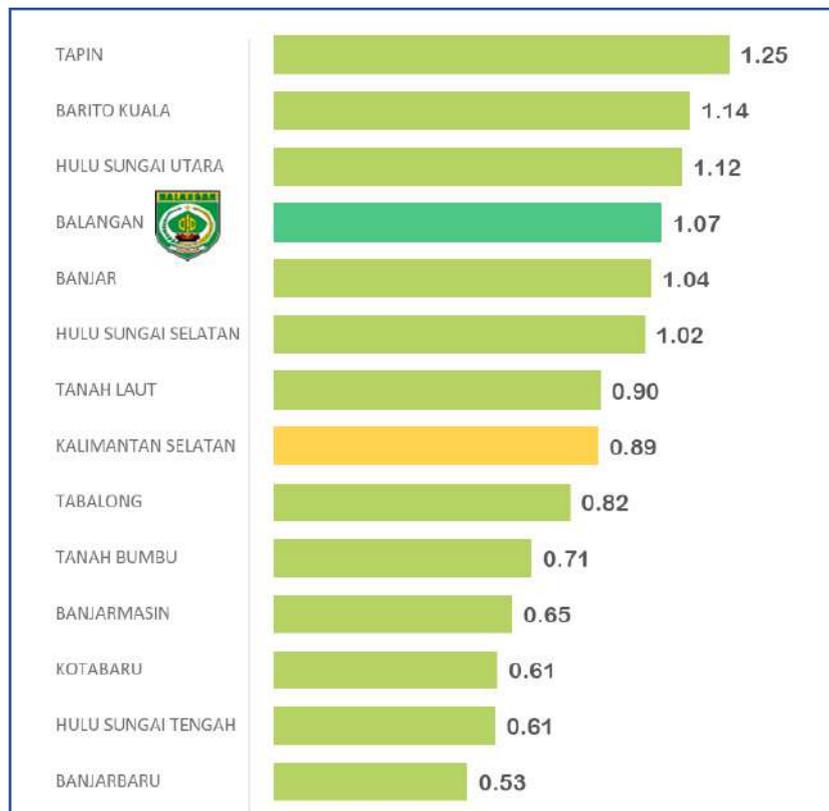


Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 202



Perkembangan IPM pada tahun 2023 adalah 0,77 poin, lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2022 yaitu 0,62 poin dan tahun 2021 sebesar 0,30 poin. IPM Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 9 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Adanya perubahan sumber data angka harapan hidup pada tahun 2023 berpengaruh terhadap dinamika peringkat IPM. Berdasarkan perhitungan lama pada tahun 2022 posisi Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 10. Pertumbuhan IPM Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Gambar 3.5  
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota  
Se-Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2023 berada di posisi ke-4 yakni sebesar 1,07%. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2023 terjadi di Kab. Tapin (1,25%), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kota Banjarbaru (0,53%).

Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan semua indikator pembentuk, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran Perkapita.

Tabel 3.5  
Dimensi IPM Kabupaten Balangan Tahun 2017-2022

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun						Dimensi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Harapan Hidup	Balangan	67,37	67,59	67,72	67,85	68,13	73,69	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13	73,97	



Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun						Dimensi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Harapan Lama Sekolah	Balangan	12,36	12,37	12,46	12,47	12,61	12,82	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82	12,86	
Rata-rata Lama Sekolah	Balangan	7,04	7,27	7,55	7,69	7,85	8,03	
	Kalimantan Selatan	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	8,55	
Pengeluaran Perkapita (ribu/tahun)	Balangan	11.442	11.557	11.452	11.500	11.659	11.888	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469	12.953	

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

#### Faktor Penghambat

1. Dalam pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah terbatasnya kewenangan urusan pada Pemerintah Daerah hanya pada Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan RLS tidak terbatas hanya pada jenjang PAUD, SD dan SMP namun sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan hanya bisa maksimal melaksanakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.
2. Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah adalah masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga serta letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.
3. Dalam pencapaian Angka Harapan Hidup :
  - Kegiatan monitoring penyelenggaraan SPM belum berjalan optimal.
  - Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masih belum terpenuhi secara jumlah maupun kompetensinya.
  - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan atau pos pelayanan kesehatan di Desa seperti Posbintu PTM maupun pelayanan kesehatan layanan dasar lainnya.
  - Masih kurangnya skrining saat awal kehamilan dan masih rendah nya deteksi risiko pada saat hamil baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat.
  - Kurangnya kelengkapan dari sarana dan parasarana yang di miliki bidan.
4. Dalam Pencapaian Pengeluaran Perkapita :
  - Distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata karena masih didominasi oleh sektor pertambangan.
  - Masih rendahnya penggunaan produk lokal.
  - Masih rendahnya konektivitas untuk distribusi produk dan bahan baku antar wilayah.
  - Sebagian besar desa belum memiliki produk unggulan UMKM/Pertanian/Pariwisata.
  - Belum adanya peta potensi hasil pertanian dan perikanan dalam mendukung perekonomian daerah.
  - Belum adanya pasar agro yang mendukung perputaran ekonomi daerah.

#### Faktor Pendorong

1. Dalam pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah serta Adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering berkoordinasi melaksanakan perpanjangan Program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah seperti Program Sekolah Penggerak, Program Kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan.



2. Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah serta adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
3. Dalam pencapaian Angka Harapan Hidup :
  - Adanya Dukungan anggaran yang menjadi prioritas terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan dasar (SPM) dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar tersebut.
  - Tersedianya sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dasar serta adanya dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa yang menyelenggarakan Posbindu PTM aktif.
4. Dalam Pencapaian Pengeluaran Perkapita :
  - Meningkatnya pendapatan masyarakat Balangan.
  - Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 sehingga berdampak pada tumbuhnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
  - Adanya event-event yang melibatkan usaha lokal.
  - Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan produk lokal.
  - Bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat diberbagai sektor diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan UKM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan tahun 2023 dapat di lihat pada data di bawah ini:

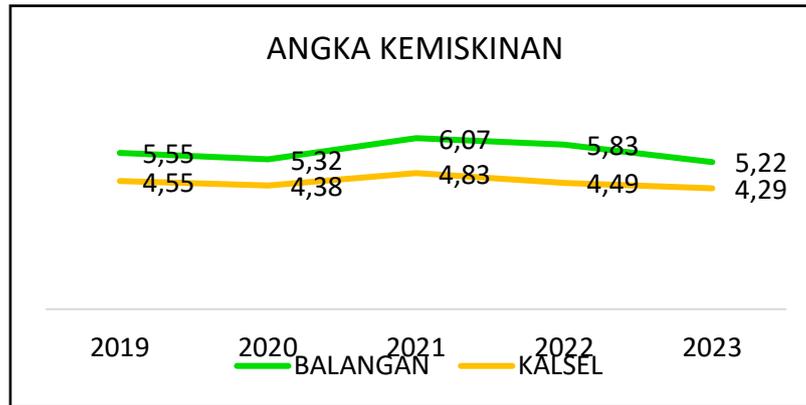


### 3. Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2023 Penduduk Balangan dikatakan miskin jika pengeluaran per orang per bulan kurang dari Rp 508.157.



Gambar 3.6  
Angka Kemiskinan 2019-2023



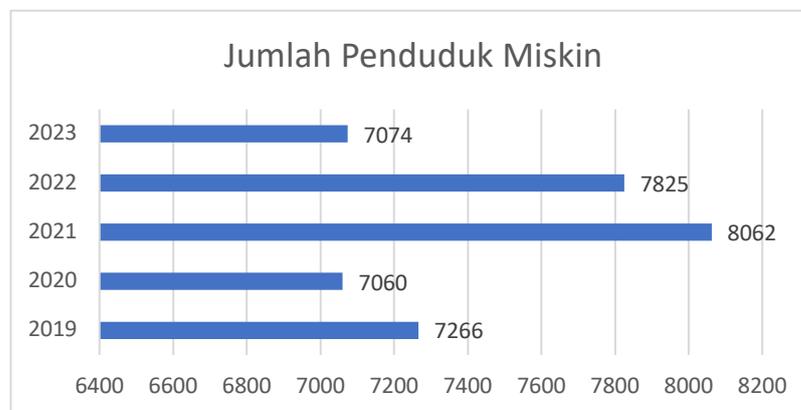
Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Angka kemiskinan Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin menurun positif (lebih baik) dari tahun ke tahun kecuali ditahun 2021 yang cukup meningkat tajam di angka 6,07% akibat pandemi covid-19 dan hingga tahun 2023 menurun menjadi 5,22% karena berbagai intervensi dari pemerintah daerah diantaranya bantuan sosial, bantuan permodalan usaha, pelatihan kerja, serta penciptaan peluang lapangan kerja baru. Meskipun mengalami penurunan, Kabupaten Balangan harus berusaha lebih maksimal untuk semakin menggenjot penurunan angka kemiskinan daerah karena Balangan masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalsel.

**Faktor penghambat :**

1. Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal.
2. Belum adanya media updating yang mumpuni untuk mengelola data kemiskinan.
3. Masih adanya kepala keluarga perempuan tanpa suami yang memerlukan pemberdayaan untuk ekonomi yang mandiri.
4. Masih adanya PPKS di Kabupaten Balangan sejumlah 34.256 PPKS.
5. Masih adanya rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 810 KK pada Desil 1.
6. Tingkat pendidikan yang masih rendah.
7. Masih adanya pernikahan dini yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah sehingga menjadi penyumbang angka kemiskinan.
8. Harga jual produk pertanian yang masih rendah

Gambar 3.7  
Jumlah Penduduk Miskin 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023



Apabila dilihat berdasarkan grafik diatas, menunjukkan terdapat penurunan penduduk miskin dari 7.825 menjadi 7.074 jiwa. Tentu saja hal ini masih menjadi pekerjaan yang cukup serius bagi Kabupaten Balangan mengingat kemiskinan juga merupakan isu dari berbagai SKPD yang terlibat dan bertanggung jawab mengintervensinya agar tercipta akselerasi penurunan angka kemiskinan pada tahun kedepan. Sejatinya, intervensi kemiskinan dibutuhkan dengan pola yang holistic, integrative, tematik, dan spasial. Menilik kembali perkembangan angka kemiskinan daerah cukup baik terjadi dari tahun 2019 di angka 7266 orang menjadi 7074 orang di tahun 2023. Pada level Kalsel, Balangan masih cukup tinggi diperingkat 10 besar dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2023.

Tabel 3.6  
Peringkat Kemiskinan Kab/Kota Se Kalsel 2019-2023

PERINGKAT	KAB	PO
	KALIMANTAN SELATAN	4.29
1	BANJAR	2.44
2	TAPIN	3.19
3	TANAH LAUT	3.73
4	BANJARBARU	3.92
5	HSS	4.01
6	TANAH BUMBU	4.12
7	KOTABARU	4.32
8	BATOLA	4.60
9	BANJARMASIN	4.63
10	BALANGAN	5.22
11	TABALONG	5.77
12	HST	5.84
13	HSU	6.25

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Peringkat 10 besar memberikan gambaran dibutuhkan akselerasi intervensi dengan mengedepankan pola kerja yang integratif, spasial atau memiliki data wilayah yang jelas, dan terdiri dari berbagai *stakeholder* yang terlibat contohnya bagaimana infrastuktur yang baik dapat membuka berbagai kesempatan masyarakat miskin untuk mengakses mulai dari kebutuhan dasar, membuka peluang meningkatkan perekonomian, hingga terbentuknya arus sosial ekonomi pada lingkungan pedesaan. Program Karya Bakti TNI yang bekerjasama dengan DinsosP3APMD pada tahun 2023 yaitu membangun ruas jalan Mamigang – Ruuk – Sawang diharapkan mampu memberi multi dampak pada wilayah yang dibangun. Keterlibatan Dinas Kesehatan, PPKB dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan dengan mendatangi kerumah-rumah (*homecare*), pelayanan ke daerah terpencil juga membantu dalam rangka meningkatkan layanan terhadap masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Tidak kalah penting, juga mengakui keberadaannya dengan mencatatkan dokumen kependudukannya, Disdukcatpil Balangan berupaya memberikan layanan jemput bola/*home service* bagi kelompok rawan dokumen kependudukan seperti ODGJ, lansia, dan masyarakat terpencil agar mereka juga terjangkau oleh layanan dasar dan bantuan sosial Pemerintah Daerah.



**Faktor pendorong :**

1. Adanya inovasi SIAP-PD (Sistem Informasi Perencanaan-Perangkat Daerah) yang mempermudah verifikasi dan validasi masyarakat miskin ekstrem dari SKPD yang mendekatkan layanan ke masyarakat.
2. Adanya pembukaan kelas non formal untuk menunjang pendidikan masyarakat utamanya masyarakat miskin.
3. Meluasnya cakupan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia dan keluarga miskin ekstrem.

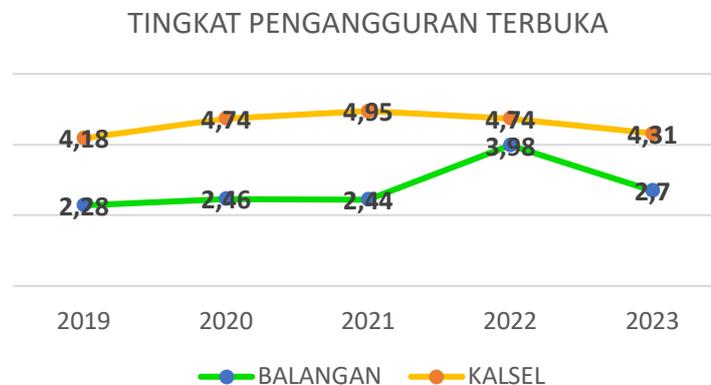
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Balangan, Maret 2023 dapat dilihat pada grafik data di bawah ini:



**4. Angka Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan sebesar 3,98% menjadi 2,7% di tahun 2023, bahkan jika dibandingkan Provinsi Kalsel kita jauh lebih baik dan menjadi penyumbang positif angka pengangguran di Kalsel.

Gambar 3.8  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023



**Adapun Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pengangguran terbuka, diantaranya :**

- a. Dilihat dari Jumlah penduduk Angkatan Kerja mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 71.143 orang menjadi 72.350 orang pada tahun 2023 atau meningkat 1.207 orang. Peningkatan Jumlah angkatan kerja sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Meningkatnya angkatan kerja ini akibat beralihnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja ini terlihat dengan menurunnya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2022 sebanyak 26.929 orang menjadi 26.542 orang pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, akibat kondisi ekonomi yang kian membaik dan pandemi yang telah berakhir.
- b. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan PPPK dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2023.
- c. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang.
- d. Meningkatnya kualitas pencari kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.
- e. Tersedianya LPK Swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- f. Kebijakan Padat Karya pada setiap proyek pekerjaan di desa-desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
- g. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan.
- h. Berkembangnya teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mempermudah penjualan dan pemasaran produk dan menciptakan peluang kerja baru.

**Faktor Penghambat :**

- a. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- b. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar.
- c. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/menyampaikan informasi pasar kerja.
- d. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
- e. Mindset Pekerja lokal masih belum siap bila ditempatkan jauh dari domisili.
- f. Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja lokal.
- g. Potensi pekerjaan non formal sektor jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	4.31
1	HULU SUNGAI SELATAN	2.12
2	BALANGAN	2.7
3	BANJAR	2.73
4	HULU SUNGAI TENGAH	3.26
5	BARITO KUALA	3.42
6	TANAH LAUT	3.58
7	TABALONG	3.6
8	HULU SUNGAI UTARA	3.85



No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
9	TAPIN	3.93
10	KOTA BANJAR BARU	5.01
11	KOTABARU	6.08
12	TANAH BUMBU	6.56
13	KOTA BANJARMASIN	6.7

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Pada tabel 3.5 menunjukkan tingkat pengangguran Kabupaten Balangan berada di posisi nomor 2 (dua) terendah se-provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2,7 persen dan dibawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada posisi nomor 1 (satu) yaitu sebesar 2,12 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Balangan menjadi penyumbang positif menurunnya angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan.

## 5. PDRB

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 5,24. PDRB Kabupaten Balangan tahun 2022 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 19.540,39 Milyar rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 9.974,65 Milyar rupiah. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2022, terbesar pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu 74,52% disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,54%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 3,84%, konstruksi 2,98%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 2,93%, jasa Pendidikan 2,28% dan industri pengolahan 1,29%.

Tabel 3.8  
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	5.11
1	HULU SUNGAI SELATAN	4.02
2	BANJAR	4.48
3	HULU SUNGAI TENGAH	3.93
4	BARITO KUALA	3.59
5	BALANGAN	5.24
6	TAPIN	4.91
7	TANAH LAUT	5.12
8	TABALONG	5.30
9	HULU SUNGAI UTARA	4.09
10	KOTA BANJAR BARU	7.93
11	KOTABARU	4.58
12	TANAH BUMBU	5.45
13	KOTA BANJARMASIN	5.69

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Balangan adalah meningkatnya produksi batubara dan tingginya harga serta peningkatan permintaan. Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Peran subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi ini adalah masih fluktuatif dan tidak stabilnya bantalan ekonomi daerah yang masih bergantung besar pada pertambangan serta



rendahnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang mana sebagian besar masyarakat bekerja disektor ini. Upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian baru. Sehingga secara bertahap Kabupaten Balangan dapat bertransformasi dan tidak bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian semata khususnya sektor pembangunan ekonomi berbasis pertanian.
2. Disamping pengembangan ekonomi berbasis pertanian sektor industri juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena potensinya sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka mendukung upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Angka PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 11.027,66 miliar rupiah (2019), 10.722,30 miliar rupiah (2020), 12.361,61 miliar rupiah (2021), 19.847,84 miliar rupiah (2022), dan 20.876,19 miliar rupiah (2023).

Sementara angka PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun lima tahun terakhir adalah masing-masing 9.409,83 miliar rupiah (2019), 9.177,87miliar rupiah (2020), 12.361,61 miliar rupiah (2021), dan 9.974,65 miliar rupiah (2022), dan 10.390,60 miliar rupiah (2023).

Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha tahun 2023, terbesar pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu 73,73 persen disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,68 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2023 terutama didukung oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,11 persen, Jasa Perusahaan sebesar 8,59 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,19 persen.

Distribusi persentasi PDRB ADHB menurut pengeluaran tahun 2023, terbesar pada kategori Net Ekspor Barang dan Jasa dengan nilai 13.124,55 miliar rupiah, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai 3.236,01 miliar rupiah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai 3.088,17 miliar rupiah.

**Tabel 12.3** Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Balangan, 2019–2023  
*Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Balangan Regency, 2019–2023*

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	12,03	12,23	11,38	7,43	7,68
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	60,58	58,92	62,62	74,92	73,73
C Industri Pengolahan/Manufacturing	1,93	1,98	1,87	1,27	1,26
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,26	0,28	0,25	0,16	0,16
F Konstruksi/Construction	4,53	4,68	4,25	2,94	3,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5,81	5,97	5,43	3,78	4,16
H Transportasi dan Perhubungan/Transportation and Storage	1,99	2,02	1,79	1,25	1,44
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,36	0,38	0,34	0,23	0,24
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1,35	1,47	1,34	0,90	0,92
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,35	0,38	0,33	0,23	0,23

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.3

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L Real Estat/Real Estate Activities	1,01	1,08	0,98	0,64	0,66
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,08	0,08	0,07	0,05	0,06
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	4,72	5,15	4,41	2,88	3,00
P Jasa Pendidikan/Education	3,43	3,70	3,37	2,25	2,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,94	1,03	0,99	0,67	0,69
R,S,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,58	0,61	0,54	0,37	0,40
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan/Note: –  
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources



**6. Pendapatan Per kapita**

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Kabupaten Balangan sebagai salah satu daerah penghasil batubara menumpukan perekonomiannya pada sektor pertambangan.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2022 mencapai Rp. 145,27 juta. Artinya, pendapatan setiap penduduk Balangan mencapai Rp145,27 juta per tahun atau sebesar 12,10 juta per bulan. Membaiknya pendapatan penduduk Balangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Balangan yang meningkat menjadi 5,24% pada tahun 2022 meningkat dari 3,27% pada tahun 2021. Untuk data 2023 masih belum rilis oleh BPS yang nantinya akan update tertanggal 28 Februari 2024.

Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I Kabupaten Balangan seperti data di bawah ini:



**C. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Perubahan**

**1. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan**

Tabel 3.9  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	n/a	5,57	4,01	72,03	8,57	46,81	-	-	-
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	n/a	6,53	15,54	237,97	9,53	163,06	-	-	-
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	n/a	1,35	8,74	648	4,35	201,02	-	-	-
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	n/a	6,45	9,85	152,73	9,45	104,25	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

**1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan**

Realisasi dari target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 adalah 4,01 dengan capaian 72,03% dengan capaian kategori sedang. Sektor industri pengolahan meliputi semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, Perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik:

- Industri makanan dan minuman *manufacture of food product and beverages*.
- Industri tekstil dan pakaian jadi *manufacture of textile and wearing apparel*.
- Industri kayu barang dari kayu / *manufacture wood and products wood*.
- Industri kertas dan barang dari kertas / *manufacture paper and paper products*.
- Industri kimia dan barang dari kimia / *manufacture chemicals and chemical products*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan berada pada kategori sedang adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan modal yang masih terbatas pada setiap sektor industri.
- Ketersediaan tenaga kerja yang belum memenuhi permintaan pasar.
- Masih bergantungnya bahan mentah atau bahan baku di luar lokasi industry.
- Transportasi yang masih terbatas karena ada beberapa sarana prasarana jalan yang sering mengalami bencana seperti banjir.
- Pemasaran yang belum optimal menjangkau pada seluruh aspek baik pada pemasaran online ataupun pemasaran offline.

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan terletak pada perkembangan jumlah tenaga kerja dan bantuan modal usaha. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah bekerjasama dengan Bank Kalsel melalui inovasi



pinjaman kredit tanpa Bunga (Sanggam Babungas) untuk para pelaku usaha di Balangan termasuk pelaku usaha industri.

### 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Realisasi dari target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan 15,54 dengan capaian 237,97% termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor :

Peningkatan Volume Perdagangan = Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)

Peningkatan Volume Perdagangan= 867,76 Milyar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 867,76 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2023.

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Peningkatan Volume Perdagangan  
Tahun 2021 s/d 2023**

Realisasi 2021 (Milyar Rupiah)	Realisasi 2022 (Milyar Rupiah)	Realisasi 2023 (Milyar Rupiah)
671,41	751,05	867,76

Sumber data BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target pada IKU ini adalah adanya revitalisasi dan penataan serta perluasan pasar-pasar tradisional Pasar Modern Adaro, Pasar Halong, Pasar Uren, dan Pasar Mauya. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengembangan sentra IKM, pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM.

Hal yang menjadi penyebab peningkatan kinerja ini adalah adanya minat UMKM untuk mengembangkan pemasaran melalui digital marketing disebabkan banyaknya konsumen yang berbelanja secara elektronik (*online*), adanya UMKM yang menjual oleh-oleh khas Balangan di Desa Riwa yang merupakan jalan lintas Provinsi sehingga perlu penataan tempat berusaha agar terlihat seragam dan lebih menarik minat para pengguna jalan, keingintahuan pelaku UMKM mengenai bagaimana mengelola keuangan yang baik, dukungan dana APBD yang tersedia karena komitmen Kepala Daerah beserta DPRD dalam pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Balangan, sumber bahan baku produk yang banyak tersedia di daerah, tingginya antusias pelaku IKM untuk meningkatkan keterampilan baik teknik maupun kreatifitas, dan tingginya tingkat kesadaran pelaku IKM untuk mendapatkan izin usaha/NIB.

Adapun yang sudah dilakukan oleh Pemda Balangan melalui SKPD terkait adalah telah terlaksananya kegiatan pelatihan pemasaran produk UKM melalui IT, sudah terealisasi tempat berusaha berupa *booth container* dan sudah diserahkan kepada pelaku UKM di Desa Riwa Kecamatan Baumandi, telah terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM, terlaksananya bantuan berupa hibah barang yang diserahkan kepada pelaku UMKM dalam menunjang peningkatan usaha, evaluasi teknik dan sistem pendataan tahun 2023 telah dilaksanakan, penyaluran Bansos UMKM (500 UKM) telah terlaksana pada triwulan IV, memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang manajemen usaha, memberikan motivasi saling kerjasama kepada anggota sentra IKM, memberikan pelatihan-pelatihan sesuai bidang usahanya di sentra IKM, dan saling berbagi pengalaman antara pelaku IKM dalam sentra IKM.



### 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan

Realisasi dari target Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan tahun 2023 adalah 8,74 dengan capaian 648% dengan capaian kategori sangat tinggi.

Faktor pendukung Peningkatan produksi pertanian antara lain:

- 1) Adanya pergantian varietas benih bermutu yang digunakan oleh petani. Petani sebelumnya secara umum menggunakan varietas Ciherang dan IR 64, namun saat ini lebih banyak menggunakan varietas unggul baru seperti Inpari 32 dan Inpari 30;
- 2) Dukungan bantuan pemerintah pada kegiatan budidaya padi berupa benih padi unggul dan saprodi yang berkontribusi besar untuk peningkatan produktifitas padi.
- 3) Adanya bantuan alsintan sebagai upaya membantu petani dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
- 4) Peningkatan produksi hortikultura terutama buah-buahan unggul lokal yang menambah kenaikan secara signifikan produksi tanaman pangan dan hortikultura di banding tahun 2022.

Meskipun mengalami peningkatan, pencapaian kinerja produksi pertanian juga mengalami beberapa hambatan, antara lain:

- 1) Kemarau Panjang tahun 2022 lebih lama dibanding tahun 2022, di beberapa wilayah sentra terjadi kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan mundur jadwal tanam yang berakibat pada penurunan produktivitas.
- 2) Luas pertanaman padi yang puso akibat banjir dan kekeringan seluas 33.483 ha dari 166.657 ha yang terkena.
- 3) Adanya alih fungsi lahan sawah sehingga terjadi penurunan luas panen 21.731 ha untuk tanaman padi
- 4) Penerapan teknologi budidaya jagung oleh petani yang semakin baik.
- 5) Harga jual jagung yang cukup tinggi di tingkat petani sehingga petani terdorong untuk menanam jagung.
- 6) Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan Target Pengembangan Budidaya

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Perbaiki tata Kelola air untuk ketersediaan air yang mencukupi sepanjang tahun, mendorong untuk melakukan percepatan tanam, perluasan areal tanam padi baik di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
- 2) Pembentukan Brigade La Nina (OPT dan DPI) sebagai bentuk pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering).
- 3) Mapping wilayah rawan banjir dan rutin pantau informasi BMKG sebagai bentuk Early Warning System.
- 4) Menyiagakan alsintan, seperti pompa air untuk membuang air dan alat pengering padi (pascapanen) di daerah rawan banjir.
- 5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan lainnya berkoordinasi Pusat dan Daerah.
- 6) Penggunaan benih tahan genangan dan menyiapkan bantuan benih akibat puso.
- 7) Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti AUTP, terutama bagi petani di wilayah yang rawan banjir.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian adalah :

- 1) Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
- 2) Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/kelompok tani baik secara offline maupun online;
- 3) Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
- 4) Pengembangan kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
- 5) Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System komoditas strategis;
- 6) Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas;
- 7) Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
- 8) Bersinergi dengan stakeholder terkait agar kegiatan pengembangan kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.



- 9) Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima bantuan serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi hortikultura ; dan
- 10) Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja *perikanan* adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan untuk perikanan budidaya masih belum maksimal dikarenakan kelompok pembudidaya ikan masih melaksanakan perikanan budidaya hanya sebagai sampingan.
2. Pendampingan untuk pembudidaya ikan masih belum maksimal.
3. Terbatasnya pengetahuan anggota kelompok pembudidaya ikan dalam melaksanakan budidaya.
4. Semakin berkurangnya luasan perairan untuk produksi perikanan tangkap.
5. Adanya musim kemarau elnino yang panjang mengakibatkan perkembangbiakan ikan di perairan sungai, rawa berkurang.
6. Penangkapan ikan di perairan oleh masyarakat nelayan juga berkurang.

Faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya bantuan sarana produksi untuk perikanan budidaya berupa keramba, kolam ikan, bioflok dan bibit serta pakan ikan.
2. Sumber daya alam yang mendukung untuk perikanan budidaya.
3. Kebutuhan masyarakat akan protein ikan.
4. Sistem budidaya perikanan yang memberikan keuntungan/tambahan penghasilan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai persentase peningkatan produksi sektor perikanan adalah :

1. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan yang sudah menerima bantuan sarana produksi perikanan budidaya.
2. Melaksanakan restocking ikan untuk perikanan tangkap di wilayah perairan lepas.

#### 1.4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Realisasi dari target Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata tahun 2023 adalah 9,85 dengan capaian 152,73% dengan capaian kategori sangat tinggi.

PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Balangan, didapatkan dari perhitungan kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Pada Tahun 2023 ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata. Diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku dan pengelola destinasi wisata. Dan juga melakukan pendataan awal kepada para penggerak usaha kuliner atau makan dan minum di Kabupaten Balangan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Survey Akomodasi (Penginapan dan Rumah Makan) untuk data SISPARNAS (Sistem Informasi Kepariwisata Nasional) Tahun 2023, Rapat Kerja (Raker) Pokdarwis Kab. Balangan Tahun 2023, Ekspose Akhir Pendampingan Pokdarwis Bontar Batarius di Desa Mamigang oleh Tim Nusapada.

Hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten.
2. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
3. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten.
4. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
5. Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata kabupaten.
6. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
7. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten.



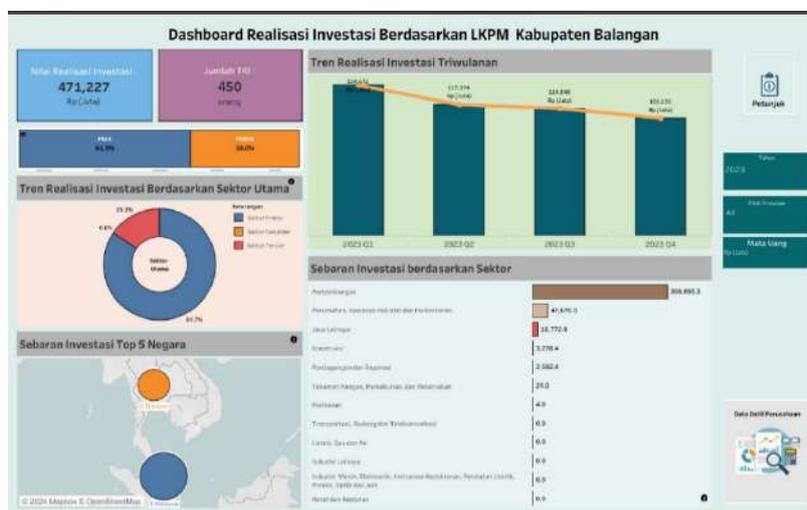
2. Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi

Tabel 3.10  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	250,59	48,88	16,76	34,28	75	22	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi dari target 48,88% indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 16,76%, dengan capaian 34,28%. Dari data tersebut diketahui bahwa capaian dari indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 48,88%, dan masuk dalam kategori sangat rendah. Berikut Dashboard realisasi Investasi berdasarkan LKPM Kabupaten Balangan:



Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah

1. Peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM pada Tahun 2023 setelah dilakukan Bimtek Pengawasan LKPM kepada Pelaku Usaha.
2. Iklim Investasi di Kabupaten Balangan yang semakin kondusif.
3. Keberhasilan pembinaan, pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan aparaturnya DPMPSTP serta peran pemerintah daerah melalui berbagai Inovasi.
4. Upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem aplikasi Si Cantik Cloud dan Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
5. Fasilitasi Kemitraan bagi Pelaku Usaha melalui Inovasi dan Aplikasi BATUTUKAR.
6. Akselerasi percepatan realisasi keberadaan Mal pelayanan Publik
7. Penyusunan/Pembaharuan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Balangan.
8. Penyusunan Dokumen *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* yaitu potensi Investasi pasar Agrobisnis.
9. Pengawasan Penanaman Modal bagi 41 Pelaku Usaha.
10. Bimtek OSS/Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah.



11. Bimtek Service Excellence bagi pelaku pelayanan perizinan.
12. Bimtek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
13. Pengusulan Produk Hukum tentang Kemudahan Berusaha/ Penanaman Modal
  - Hal-hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk peningkatan investasi
1. Peningkatan kepastian hukum atau regulasi dan jaminan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan.
2. Pemangkasan birokrasi yang terlalu panjang dalam pemberian pelayanan perizinan berinvestasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi SKPD yang melakukan urusan pelayanan dan perizinan dengan melakukan restrukturisasi dari jabatan struktural ke fungsional sesuai amanah perundang-undangan.
3. Keadaan politik dan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan harus dalam kondisi yang stabil dan kondusif.
4. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia harus dalam kondisi yang semakin baik sehingga menarik minat investor untuk menyuntikkan dana ke pihak penyedia sarana dan prasarana.

### 3. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.11  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
6.	Usia Harapan Hidup	100,01	68,32	73,69	107,86	68,92	106,92	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Umur Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai perkiraan lama hidup rata-rata seorang penduduk sejak ia dilahirkan. Pada tahun 2023, usia harapan hidup saat lahir di Kabupaten Balangan sebesar 68,4 tahun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,27 tahun dari tahun sebelumnya dimana UHH pada tahun 2022 sebesar 68,13 tahun. Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Secara perlahan terjadi peningkatan UHH selama kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat, meskipun masih lebih rendah dibanding angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang mencapai 67,72 tahun. Umur Harapan Hidup Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi peningkatan signifikan yakni sebesar 67,07 pada tahun 2016 menjadi 67,85 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 68,4. Usia Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, dari data di atas pada tahun 2021 tumbuh 0,13 persen atau meningkat dari tahun 2020, sedangkan tahun 2022 tumbuh 0,28 persen atau meningkat dari tahun 2021. Usia Harapan Hidup tahun 2022 di Kabupaten Balangan adalah 68,13 tahun, angka ini berada di urutan 8 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

UHH juga dipengaruhi oleh aktivitas kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) merupakan salah satu program prioritas Nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi serta sering mengakibatkan kematian. Pengendalian penyakit tidak menular juga merupakan salah satu indikator utama dalam 12 indikator SPM kesehatan, sehingga menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan untuk berupaya agar angka penyakit tidak menular menurun atau tidak mengalami peningkatan.

Pemerintah Kabupaten Balangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dan hal ini



merupakan salah satu faktor urgen dalam peningkatan UHH. Sasarannya adalah penduduk 15 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi : monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan *farmakologis*. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Jika tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi makan penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi atau orang dengan keluhan hipertensi sesuai standar adalah 100%. Dengan perhitungan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%.

Penduduk dengan DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Upaya ini juga merupakan langkah vital dalam peningkatan UHH di Kabupaten Balangan. Penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. Target pelayanan kesehatan kepada penyandang DM sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/Kota adalah 100 persen. Dengan perhitungan persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.

Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara umum serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Serta berp[engaruh pada peningkatan UHH. Kesehatan jiwa membuat perkembangan fisik, intelektual dan emosional seseorang berkembang optimal selaras dengan perkembangan orang lain ( UU No 36 Tahun 2009). Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja, baik yang berusia muda, dewasa maupun lansia. Gangguan jiwa dapat juga terjadi pada orang yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Meningkatnya kasus gangguan jiwa di Kabupaten Balangan di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan antara lain faktor biologis, faktor psikologis dan faktor lingkungan. Disamping itu, beberapa orang dengan kondisi tertentu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan jiwa antara lain : genetik dan riwayat kesehatan jiwa keluarga, pengalaman hidup yang tidak baik seperti stres, cedera otak dan lain-lain. Selain itu adanya program PISPK pada tahun 2019 dimana Puskesmas melakukan pendataan dari rumah ke rumah sehingga ODGJ yang selama ini tidak terdata/terekspose dapat diketahui.

**4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan**

Tabel 3.12  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4  
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	99,14	12,85	12,82	99,77	13,24	96,83	12,91 (tabalong)	12,86	-
8.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	97,03	8,36	8,03	96,05	9,17	87,57	9,14 (Tabalong)	8,55	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah



#### 4.1 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun dan dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah Kabupaten Balangan mencapai 12,82. Ini berarti secara rata-rata penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,82 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yang hanya mencapai 12,61 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia 7 tahun yang mengenyam pendidikan formal di tahun tertentu pada masa mendatang. HLS Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada pada peringkat 9 sebesar 12,82 tahun, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,82 tahun atau setara dengan Diploma.

Pada tahun 2023 capaian **HLS** yang di rilis oleh BPS pada Desember 2023 dalam Berita Resmi BPS adalah 12,82 tahun dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 12,85 tahun ini berarti persentase capaian adalah sebesar 99,77 persen dan ini merupakan kategori sangat tinggi. Dan jika dibanding dengan capaian pada tahun 2022 pada tahun 2023 ini ada peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,21.

Pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan capaian HLS antara lain

- peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 192 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana.
- peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai pemberi motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama di luar Kalimantan).
- pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.
- peningkatan kemampuan kompetensi guru dengan mengadakan kerjasama dengan Lembaga Luar.
- pemerataan sebaran guru pada sekolah sekolah didaerah.
- aktif menjangking minat bakat siswa melalui lomba-lomba didaerah dan diprovinsi.
- menaikkan kesejahteraan para PTK (Kenaikan Insentif dan Honor).

**Faktor Penghambat** dalam mencapai AHLS adalah masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.

**Faktor Pendorong** dalam mencapai AHLS adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah, AHLS ini termasuk dalam faktor pendorong target capaian Visi Misi Kepala Daerah. Faktor geografi Kabupaten Balangan yang dekat dengan dan berbatasan langsung dengan daerah tetangga, bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi terdekat serta adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan sebesar Rp. 7.000.000.000,00.



#### 4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai perkiraan rata-rata lamanya waktu yang ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 8,03 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP/ sederajat atau masih belum bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Pada tahun 2023 capaian ARLS yang di rilis oleh BPS pada Desember 2023 dalam Berita Resmi BPS adalah 8,03 tahun, berada pada peringkat 7 di kab/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, secara rata-rata penduduk Balangan usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 hanya menempuh pendidikan hingga kelas VIII SMP.

Dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 pada tahun 2023 ini ada peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,18. Secara progres kenaikan capaian, capaian ARLS Kabupaten Balangan termasuk dalam 5 Kabupaten tertinggi dengan Progres Kenaikannya dibanding Kabupaten Kota lainnya.

Pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan capaian ARLS antara lain.

- peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 192 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- peningkatan pelaksanaan SKB : membuka kelas dan pelatihan pengembangan kreatifitas warga belajar, bukan hanya melaksanakan ditempat bahkan sampai ke Kecamatan dan sekolah keagamaan/pesantren non formal.
- peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan : pemberian dan dukungan Dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk Operasional Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan Kelompok Belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 3 Pokjar, Paket B ,21 Pokjar dan Paket C ada 33 Pokjar).
- peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai memberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama di luar Kalimantan)
- pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

**Faktor Penghambat** dalam mencapai ARLS adalah terkait terbatasnya dengan kewenangan urusan pada Pemerintah Daerah hanya pada Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan target dari ARLS ini adalah tidak terbatas hanya pada jenjang PAUD, SD dan SMP tapi sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Jadi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan hanya bisa maksimal melaksanakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.

**Faktor Pendorong** dalam mencapai ARLS adalah dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah, ARLS ini termasuk dalam faktor pendorong target capaian Visi Misi Kepala Daerah. Adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering berkoordinasi melaksanakan perpanjangan Program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah seperti Program Sekolah Penggerak, Program Kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan.



**5. Sasaran Meningkatkan Pengeluaran Perkapita**

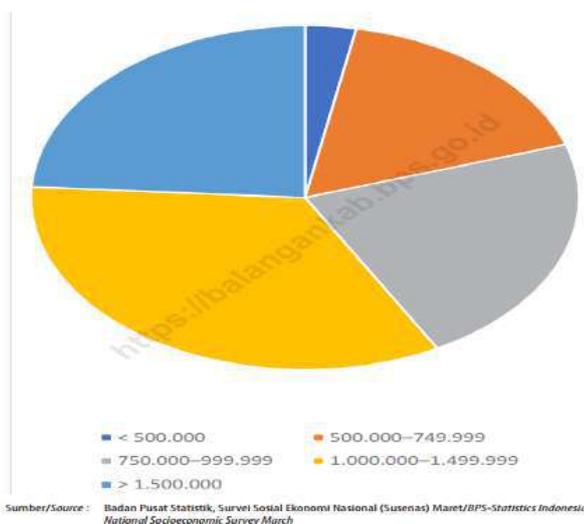
Tabel 3.13  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5  
Meningkatnya Pengeluaran Perkapita

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
9.	Pengeluaran Perkapita	76,10	1308553	990.667	75,71	1409168	70,30	-	-	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.239.916 rupiah. Angka ini lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan tahun 2022 yakni sebesar Rp. 1.246.111. Rata-rata pengeluaran perkapita untuk komoditas makanan sebesar Rp 654.043 sedangkan, untuk nonmakanan sebesar Rp 585.873.



**6. Sasaran Menurunnya Ketimpangan Pendapatan**

Tabel 3.14  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6  
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
10.	Indeks Gini Rasio	108,28	0,285	0,258	109,47	0,247	104,45	-	-	-

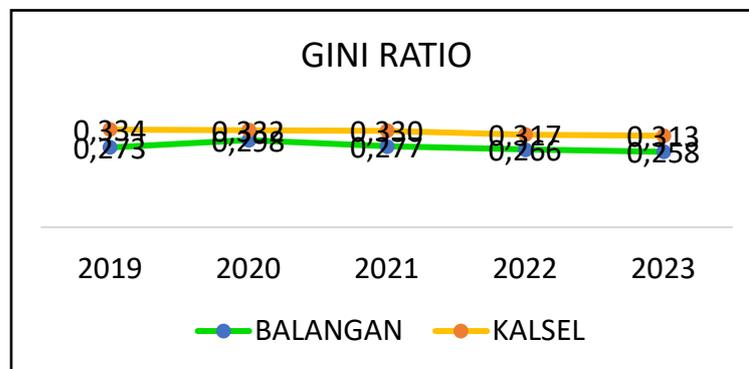
Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah



Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Balangan yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,258. Angka ini menurun 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio 2022 yang sebesar 0,266. Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Gambar 3.9  
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata.

Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

**Faktor pendorong :**

- Mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula;
- Adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya bantuan uang tunai, permakanan, peralatan kerja, bedah rumah, dan sebagainya ;
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja;
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi di angka 72,97 poin (2023) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata;
- Semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait;
- Pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh.



**Faktor penghambat :**

- a. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal;
- b. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan sehingga perlu kontribusi lebih dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

**7. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tabel 3.15  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7  
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	1	2
11.	Angka Pengangguran Terbuka	36,21	2,40	2,70	87,50	14	19,29	4,46 (Tabalong)	4,74	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

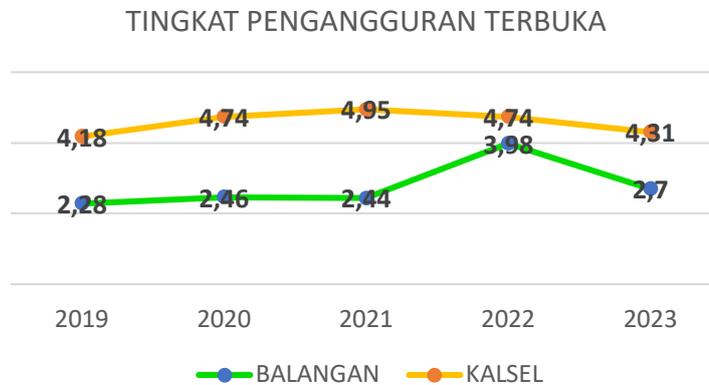
Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 2,7 persen, artinya 2 hingga 3 dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Balangan termasuk kategori pengangguran. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan tahun 2022 lalu yang berkisar 3,98 persen.

Angkatan kerja dengan kondisi sebagai berikut:

- 1. mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2. mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3. mereka yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); dan atau
- 4. mereka yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan sebesar 3,98% menjadi 2,7% di tahun 2023, bahkan jika dibandingkan Provinsi Kalsel kita jauh lebih baik dan menjadi penyumbang positif angka pengangguran di Kalsel.

Gambar 3.10  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kalsel, data diolah 2023



**Adapun Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pengangguran terbuka, diantaranya :**

- a. Dilihat dari Jumlah penduduk Angkatan Kerja mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 71.143 orang menjadi 72.350 orang pada tahun 2023 atau meningkat 1.207 orang. Peningkatan Jumlah angkatan kerja sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Meningkatnya angkatan kerja ini akibat beralihnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja ini terlihat dengan menurunnya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2022 sebanyak 26.929 orang menjadi 26.542 orang pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, akibat kondisi ekonomi yang kian membaik dan pandemi yang telah berakhir.
- b. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan PPPK dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2023.
- c. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang.
- d. Meningkatnya kualitas pencari kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.
- e. Tersedianya LPK Swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
- f. Kebijakan Padat Karya pada setiap proyek pekerjaan di Desa-Desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
- g. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan.
- h. Berkembangnya teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mempermudah penjualan dan pemasaran produk dan menciptakan peluang kerja baru.

**Faktor Penghambat :**

- a. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- b. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar.
- c. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/menyampaikan informasi pasar kerja.
- d. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
- e. Mindset Pekerja lokal masih belum siap bila ditempatkan jauh dari domisili.
- f. Masih belum maksimalnya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja lokal.
- g. Potensi pekerjaan non formal sektor jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16  
Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	4.31
1	HULU SUNGAI SELATAN	2.12
2	BALANGAN	2.7
3	BANJAR	2.73
4	HULU SUNGAI TENGAH	3.26
5	BARITO KUALA	3.42
6	TANAH LAUT	3.58
7	TABALONG	3.6
8	HULU SUNGAI UTARA	3.85
9	TAPIN	3.93



No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
10	KOTA BANJAR BARU	5.01
11	KOTABARU	6.08
12	TANAH BUMBU	6.56
13	KOTA BANJARMASIN	6.7

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Pada tabel 3.5 menunjukkan tingkat pengangguran Kabupaten Balangan berada di posisi nomor 2 (dua) terendah se-provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2,7 persen dan dibawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada posisi nomor 1 (satu) yaitu sebesar 2,12 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Balangan menjadi penyumbang positif menurunnya angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan.

## 8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Tabel 3.17  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8  
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
18.	Nilai SAKIP	95,23	72,40 (BB)	70,17	96,92	78,20 (BB)	89,73	67,48 (B) (Tabalong)	81,21 (A)	-
19.	Opini BPK	100,00	WTP	WTP	100	WTP	100	WTP (tabalong)	WTP	-
20.	Nilai EKPPD	99,36	3,5900	2,8600	79,67	3,600	79,44	3,206 (Tabalong)	3,4653	-
21.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	104,00	3,51 (B)	4,01(A-)	114	4,91(A)	72,51	4,25 (Tabalong)	4,03	-
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,18	85	85,07	100,08	85	100,08	84,47 (Tabalong)	88,96	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

### 8.1 Nilai SAKIP

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Balangan tahun 2023 berdasarkan Surat Nomor : B/494/AA.05/2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 tanggal 27 Nopember 2023 adalah 70,17 (Kategori BB). Hasil capaian realisasi target nilai SAKIP 70,17 ini memang belum mencapai target nilai SAKIP yang diperjanjikan yaitu 72,40 (Kategori BB), akan tetapi hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 96,92% dibandingkan dengan hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2022 yaitu 67,04 (Kategori B) dengan capaian sebesar 95,23% mengalami kenaikan capaian sebesar 1,69%. Dan telah memenuhi kategori penilaian (BB).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa nilai SAKIP Balangan yakni 70,17 dengan predikat BB bernilai sangat baik dimana Pemda Balangan sudah mengimplementasikan SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :



Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,16	23,19
b. Pengukuran Kinerja	30	19,35	20,21
c. Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,99
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	15,78
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>67,04</b>	<b>70,17</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>BB</b>

Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah dengan melakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Kementerian PANRB sebagaimana secara rinci terjabarkan pada tabulasi Bab IV huruf C.

## 8.2 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2023, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini ini adalah yang ke-10 (sepuluh) kali secara berturut turut dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

- 1) Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dengan adanya rekonsiliasi baik itu di internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban untuk komponen belanja dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk komponen Aset serta Bidang Penagihan dan Pelaporan untuk komponen pendapatan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 2) Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sesungguhnya.
- 3) Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat pada peraturan administrasi perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat dieliminasi.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik.
- 5) Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.



Faktor hambatan utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

1. Faktor pertama belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya.
2. Faktor kedua adalah masih kurangnya tenaga dibidang keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai.
3. Faktor ketiga adalah kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan, hal ini tergambar Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal.

Dalam mempertahankan capaian dan solusi dalam mengatasi hambatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terus-menerus melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan, dan sebagainya), juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
3. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi FMIS, SIPD-RI, Sipanda BMD Kabupaten Balangan, Sicaper (Sistem Pencatatan Persediaan), Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online.
4. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah).
5. Menyusun kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

### 8.3 Nilai EKPPD

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2022 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 Kabupaten Balangan memperoleh nilai 2,86 dengan kategori sedang dan menduduki peringkat 3 (tiga) se Provinsi Kalimantan Selatan dan peringkat 48 (empat puluh delapan) secara Nasional, kriteria tersebut didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Nilai tersebut di peroleh dari indikator kinerja kunci *outcome* seperti indikator makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Dari beberapa urusan masih terdapat kekurangan yang berakibat tidak maksimalnya nilai EKPPD, diantaranya :

1. Kendala yang sering dihadapi dalam penilaian EKPPD adalah ketidaksesuaian data dukung yang disampaikan dengan nilai capaian kinerja atau tidak adanya data dukung yang menguatkan nilai capaian kinerja pelaksanaan urusan, sehingga sebagian besar SKPD hanya menunjukkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa indikator kinerja kunci (*outcome*) pada EKPPD tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Yang harus diperhatikan, surat keterangan ini cukup berpengaruh dalam penilaian EKPPD, karena nilai yang didapat dengan data dukung hanya surat keterangan tidak dapat maksimal.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, terutama terkait anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.



Adanya perbedaan yang jauh jika dilihat dari target dan realisasi nilai EKPPD di karenakan perubahan aturan, dimana sebelumnya penilaian EKPPD di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di ganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### 8.4 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik**

Range Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Adapun locus penilaian pelayanan publik telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PAN RB yakni Kecamatan, Dinas Sosial dan RSUD.

Tabulasi Data Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik melalui PEKPP Kementerian PAN RB antar Kabupaten / Kota se Kalsel adalah sebagai berikut:

NO	Propinsi/Kabupaten/Kota	Kategori	Nilai	Keterangan
1	Propinsi Kalsel	A-	4,03	
2	Kabupaten HST	A	4,52	
3	Kabupaten Tapin	A-	4,29	
4	Kota Banjarmasin	A-	4,27	
5	Kabupaten Tabalong	A-	4,25	
6	Kabupaten Tanah Laut	A-	4,10	
7	Kabupaten Balangan	A-	4,01	RSUD, Dinas Sosial dan Kecamatan Juai
8	Kabupaten Barito Kuala	B	3,88	
9	Kabupaten HSS	B-	3,67	



NO	Propinsi/Kabupaten/Kota	Kategori	Nilai	Keterangan
10	Kabupaten Banjar	B-	3,46	
11	Kota Banjarbaru	B-	3,23	
12	Kota Baru	B-	3,20	
13	Kabupaten Tanah Bumbu	B-	3,20	
14	Kabupaten HSU	B-	3,07	

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat peringkat 112 dari 514 Kabupaten/Kota dan rangking 6 dari 13 Kabupaten/Kota se-Propinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Balangan. Dimana kita ketahui bahwa Ombudsman adalah Lembaga Negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN, BUMD dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

**Hasil Penilaian Ombudsman untuk Seluruh Pemda se Kalimantan Selatan**



**HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN 2023**  
**Kategori Pemerintah Daerah**

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Zona	Kategori
1	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95.07	Hijau	A
2	Pemerintah Kabupaten Banjar	90.96	Hijau	A
3	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	90.61	Hijau	A
4	Pemerintah Kabupaten Tapin	90.25	Hijau	A
5	Pemerintah Kabupaten Tabalong	90.05	Hijau	A
6	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	88.68	Hijau	A
7	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	88.62	Hijau	A
8	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	87.59	Hijau	B
9	Pemerintah Kabupaten Balangan	87.23	Hijau	B
10	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	87.14	Hijau	B
11	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	71.66	Kuning	C

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah

1. Melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap SKPD pemangku pelayanan publik secara umum dan khususnya pada locus penilaian PEKPP.
2. Melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD locus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping.



3. Melakukan monitoring tindak lanjut pelayanan public melalui aplikasi elektronik kinerja organisasi atau e-Kino. Monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan.
4. Rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait prioritas penganggaran SKPD locus dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

**8.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

**REKAP NILAI SKM SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

No	SKPD	2023		Tahun 2023
		Semester 1	Semester 2	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	89,34	89,20	89,27
a	Bagian Umum	90,51	92,36	91,44
b	Bagian Prokopim	86,32	89,40	87,86
c	Bagian Tata Pemerintahan	88,41	88,42	88,42
d	Bagian Kesejahteraan Rakyat	84,44	84,55	84,50
e	Bagian Organisasi	94,36	90,06	92,21
f	Bagian Hukum	95,22	88,46	91,84
g	Bagian Perekonomian & SDA	88,33	94,74	91,54
h	Bagian PBJ	88,84	92,48	90,66
i	Bagian Administrasi Pembangunan	87,62	82,30	84,96
2	Sekretariat DPRD	82,87	84,98	83,92
3	Inspektorat	87,79	99,00	93,40
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	82,69	85,06	83,88
5	Dinas Kesehatan, PPKB	88,32	83,92	86,12
6	DPUPRPerkim	82,58	82,91	82,75
7	Satpol PP	81,63	81,91	81,77
8	Dinsos, P3A, Pemdes	82,71	86,83	84,77
9	Dinas Pertanahan & LH	76,84	80,44	78,64
10	Disdukcapil	Tahunan	86,95	86,95
11	Dinas Perhubungan	84,25	84,75	84,50
12	Diskominfo, Statistik & Persandian	93,27	89,34	91,31
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	84,05	88,37	86,21
14	DPMPTSPTTK	Tahunan	92,25	92,25
15	Disporapar	84,08	86,90	85,49
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak melaporkan	82,66	82,66
17	Dinas Ketapang Pertanian & Perikanan	87,75	85,75	86,75
18	Bappedalitbang	86,20	86,20	86,20
19	BPKPAD	84,39	84,07	84,23
20	BKPSDM	87,45	87,45	87,45
21	Bakesbangpol	84,70	87,73	86,21
22	BPBD	86,47	87,63	86,47
23	Kec. Paringin	83,46	86,78	85,12
24	Kec. Paringin Selatan	87,19	87,91	87,55
25	Kec. Lampihong	92,52	95,07	93,80



26	Kec. Batumandi	85,69	88,22	<b>86,96</b>
27	Kec. Awayan	87,66	83,81	<b>85,74</b>
28	Kec. Halong	87,89	83,81	<b>85,85</b>
29	Kec. Juai	87,51	87,73	<b>87,62</b>
30	Kec. Tebing Tinggi	88,23	82,01	<b>85,12</b>
31	RSUD	Tahunan	86,16	<b>86,16</b>
32	Puskesmas Awayan	77,49	79,46	<b>78,47</b>
33	Puskesmas Batumandi	83,70	83,03	<b>83,36</b>
34	Puskesmas Paringin	86,02	86,42	<b>86,22</b>
35	Puskesmas Parsel	84,50	88,72	<b>86,61</b>
36	Puskesmas Tebing Tinggi	87,63	85,11	<b>86,37</b>
37	Puskesmas Juai	84,16	84,26	<b>84,21</b>
38	Puskesmas Halong	84,84	84,16	<b>84,50</b>
39	Puskesmas Lokbatu	87,70	86,97	<b>87,34</b>
40	Puskesmas Tanah Habang	81,50	83,06	<b>82,28</b>
41	Puskesmas Uren	85,56	85,99	<b>85,77</b>
42	Puskesmas Pirsus	80,84	79,75	<b>80,30</b>
43	Puskesmas Lampihong	82,09	86,40	<b>84,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3323,56</b>	<b>3522,29</b>	<b>3422,93</b>
<b>NILAI IKM Kabupaten</b>		<b>83,63</b>	<b>86,50</b>	<b>85,07</b>

Nilai IKM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 85,07. Pada tahun 2023 ini SKM dilakukan oleh hampir seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Balangan baik UPP ataupun non UPP. Dari Tabel di atas terlihat masih ada beberapa SKPD/UPP yang menyelenggarakan Survey SKM bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan survey masih dilakukan dalam 1 Tahun sekali. Selain itu, ada satu SKPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak melaporkan capaian SKM semester 1. Sebagai bentuk evaluasi SKPD pelaku SKM harus melakukan input data kinerja dan data realisasi kinerja atas janji perbaikan layanan yang mereka lakukan melalui E-Kino (Aplikasi Kinerja Organisasi) yang memuat *feedback* hasil perbaikan janji layanan atas laporan IKM tahun sebelumnya dan janji perbaikan tersebut dilakukan pemantauan oleh Bagian Organisasi secara online.

Untuk melakukan peningkatan Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan beberapa kinerja yakni adanya beberapa kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009, adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area perubahan, adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada anggaran tahun 2023 ini telah dianggarkan pembangunan Mall Pelayanan Publik, adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis dan adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari ombudsman.

Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain adalah masih banyak sarana prasarana yang belum memadai pada SKPD UPP sesuai standar dalam IPP sehingga belum bisa memberikan pelayanan prima seperti tersedianya ruangan khusus pengaduan layanan, ruangan khusus laktasi, dan lain-lain, masih belum terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP), masih belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi perbaikan janji layanan sesuai indeks kepuasan masyarakat khususnya pada unsur layanan yang masih rendah, masih belum terlaksananya evaluasi internal SKPD atas SOP pelayanan publik masing-masing SKPD secara triwulan dan masih belum banyak SKPD yang memiliki inovasi yang kontinue dan direplikasi oleh unit pelayanan publik lainnya di Balangan. Akan tetapi dengan adanya gagasan Kepala Daerah dalam pemberian reward atas inovasi ASN baik dalam bentuk uang



pembinaan ataupun piagam penghargaan akan memberikan efek positif untuk lebih meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	91	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	132	94,46	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	95	97,41	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>4</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	107,07	94,36	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	90,5	62,82	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	90,01	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>7</b>	<b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	84,51	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>8</b>	<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	75	94,73	Efisien
	Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

## 9. Sasaran Meningkatnya Kualitas SDGS Desa

Tabel 3.18  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13  
Meningkatnya Kualitas SDGS Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Indeks Desa Membangun	110,58	0,7293	0,7527	103,21	0,6995	107,61	0,7877 (Tabalong)	0,7480	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

1. Indeks ketahanan sosial terdiri dari : Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
2. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan Kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan Kesehatan);
3. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke Pendidikan dasar dan menengah, akses Pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);



4. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi akses ke listrik dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks ketahanan ekonomi terdiri dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdaganga, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikator yang menjadi indikator kinerja utama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagaimana tersebut secara ringkas pada tabel berikut:

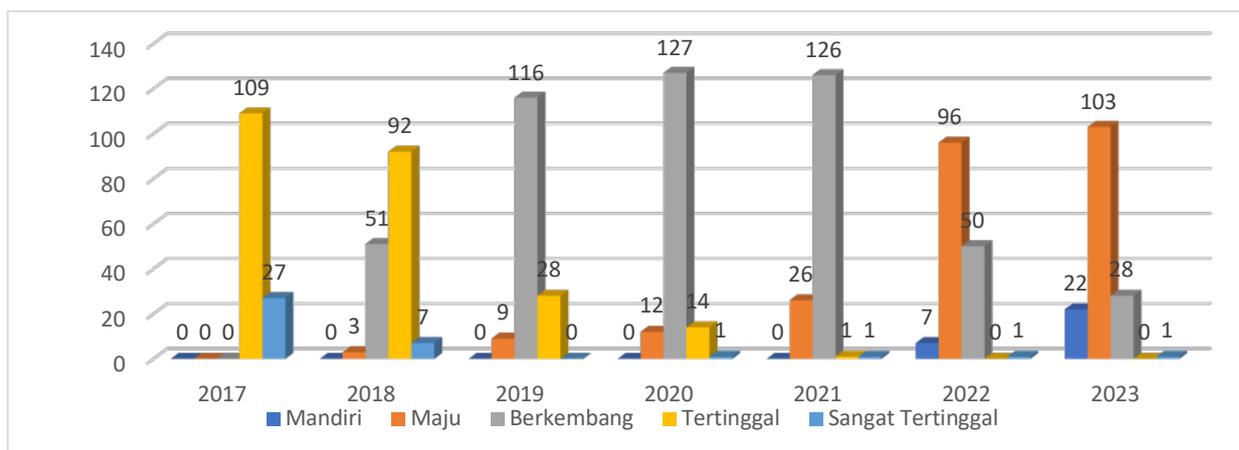
Sasaran :Meningkatnya Klasifikasi Desa							
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)	Kategori Capaian
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju	286,06%	28,57%	81,16%	284,07%	183,79%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>					284,07%	<b>Sangat Tinggi</b>	

Berdasarkan Indikator kinerja utama yaitu Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju. Pada tahun 2023 Kabupaten Balangan menargetkan 28,57% dengan realisasi 81,16%. Dalam mengukur realisasi dan capaian terhadap indikator berdasarkan indeks desa membangun (IDM) yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan dan 154 Desa. Pada tahun 2023 capaian dari indikator persentase desa dengan klasifikasi maju adalah 284,07%, pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya.

Data Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2023

Tahun	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	JUMLAH
2017	0	0	18	109	27	154
2018	0	3	51	92	7	154
2019	0	9	116	28	0	154
2020	0	12	127	14	1	154
2021	0	26	126	1	1	154
2022	7	96	50	0	1	154
2023	22	103	28	0	1	154





Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan diatas bahwa pada tahun 2023 desa dengan klasifikasi maju berjumlah 103 Desa atau meningkat sebanyak 7 Desa dari keadaan tahun 2022. Selain itu juga terjadinya peningkatan dari status desa mandiri pada tahun 2023 terdapat 22 desa dari keadaan tahun 2021 sebanyak 7 Desa dan mengalami peningkatan sebanyak 15 Desa.

Selanjutnya, dapat diketahui pada saat ini jumlah desa dengan klasifikasi minimal maju di Kabupaten Balangan sebanyak 103 Desa dan untuk Desa Mandiri sebanyak 22 Desa. Dalam menghitung realisasi terhadap indikator tersebut adalah jumlah desa dengan klasifikasi maju ditambah dengan klasifikasi desa yang berstatus mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Balangan dikali dengan seratus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

Selanjutnya dengan adanya peningkatan dari status desa yang telah mengalami peningkatan menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai tahun 2023, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal sudah tidak ada dan untuk sangat tertinggal masih terdapat 1 Desa yaitu Desa Wonorejo di Kecamatan Juai dimana desa tersebut sedang dalam proses penggabungan desa dengan Desa Sumber Rejeki.

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA BERKEMBANG**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	MUARA NINIAN	JUAI	BERKEMBANG
2	HAMARUNG	JUAI	BERKEMBANG
3	JUAI	JUAI	BERKEMBANG
4	BATA	JUAI	BERKEMBANG
5	GALUMBANG	JUAI	BERKEMBANG
6	SUNGAI BATUNG	JUAI	BERKEMBANG
7	TIGARUN	JUAI	BERKEMBANG
8	PAMURUS	JUAI	BERKEMBANG
9	MARIAS	JUAI	BERKEMBANG
10	Lalayau	JUAI	BERKEMBANG
11	MIHU	JUAI	BERKEMBANG
12	TAWAHAN	JUAI	BERKEMBANG
13	PANIMBAAN	JUAI	BERKEMBANG
14	ANIUNGAN	HALONG	BERKEMBANG
15	MARAJAI	HALONG	BERKEMBANG
16	MAMIGANG	HALONG	BERKEMBANG
17	BAKUNG	BATUMANDI	BERKEMBANG



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
18	KARUH	BATUMANDI	BERKEMBANG
19	TANAH HABANG KIRI	LAMPIHONG	BERKEMBANG
20	PANAITAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
21	KUSAMBI HULU	LAMPIHONG	BERKEMBANG
22	MATANG LURUS	LAMPIHONG	BERKEMBANG
23	PIMPING	LAMPIHONG	BERKEMBANG
24	PUPUYUAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
25	PARINGIN	PARINGIN	BERKEMBANG
26	DAYAK PITAP	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
27	AJUNG	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
28	KAMBIYAIN	TEBING TINGGI	BERKEMBANG

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MAJU**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	BUNTU KARAU	JUAI	MAJU
2	TELUK BAYUR	JUAI	MAJU
3	GULINGGANG	JUAI	MAJU
4	MUNGKUR UYAM	JUAI	MAJU
5	PANIMBAAN	JUAI	MAJU
6	SUMBER REZEKI	JUAI	MAJU
7	HAUWAI	HALONG	MAJU
8	BANGKAL	HALONG	MAJU
9	MANTUYAN	HALONG	MAJU
10	PUYUN	HALONG	MAJU
11	BUNTU PILANDUK	HALONG	MAJU
12	GUNUNG RIUT	HALONG	MAJU
13	MAMANTANG	HALONG	MAJU
14	BINJAI PUNGGAL	HALONG	MAJU
15	LIYU	HALONG	MAJU
16	BINUANG SANTANG	HALONG	MAJU
17	BINJU	HALONG	MAJU
18	KARYA	HALONG	MAJU
19	UREN	HALONG	MAJU
20	MAUYA	HALONG	MAJU
21	SUMBER AGUNG	HALONG	MAJU
22	BIHARA	AWAYAN	MAJU
23	MERAH	AWAYAN	MAJU
24	PUDAK	AWAYAN	MAJU
25	BADALUNGA	AWAYAN	MAJU
26	SIKONTAN	AWAYAN	MAJU
27	PULANTAN	AWAYAN	MAJU
28	TUNDI	AWAYAN	MAJU
29	MUARA JAYA	AWAYAN	MAJU
30	BARU	AWAYAN	MAJU
31	AWAYAN HILIR	AWAYAN	MAJU



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
32	SEI PUMPUNG	AWAYAN	MAJU
33	BADALUNGGGA HILIR	AWAYAN	MAJU
34	NUNGKA	AWAYAN	MAJU
35	TANGALIN	AWAYAN	MAJU
36	KEDONDONG	AWAYAN	MAJU
37	BARAMBAN	AWAYAN	MAJU
38	AMBAKIANG	AWAYAN	MAJU
39	PIYAIT	AWAYAN	MAJU
40	TARIWIN	BATU MANDI	MAJU
41	MUNJUNG	BATU MANDI	MAJU
42	PELAJAU	BATU MANDI	MAJU
43	RIWA	BATU MANDI	MAJU
44	MAMPARI	BATU MANDI	MAJU
45	BUNGUR	BATU MANDI	MAJU
46	BANUA HANYAR	BATU MANDI	MAJU
47	GUHA	BATU MANDI	MAJU
48	GUNUNG MANAU	BATU MANDI	MAJU
49	KASAI	BATU MANDI	MAJU
50	TANAH HABANG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
51	BATU MERAH	LAMPIHONG	MAJU
52	LAMPIHONG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
53	LAMPIHONG SELATAN	LAMPIHONG	MAJU
54	LAMPIHONG KIRI	LAMPIHONG	MAJU
55	LAJAR	LAMPIHONG	MAJU
56	KUSAMBI HILIR	LAMPIHONG	MAJU
57	LOK HAMAWANG	LAMPIHONG	MAJU
58	KUPANG	LAMPIHONG	MAJU
59	TAMPANG	LAMPIHONG	MAJU
60	LOK PANGINANGAN	LAMPIHONG	MAJU
61	JUNGKAL	LAMPIHONG	MAJU
62	SUNGAI TABUK	LAMPIHONG	MAJU
63	JIMAMUN	LAMPIHONG	MAJU
64	HILIR PASAR	LAMPIHONG	MAJU
65	TELUK KARYA	LAMPIHONG	MAJU
66	SUNGAI AWANG	LAMPIHONG	MAJU
67	KANDANG JAYA	LAMPIHONG	MAJU
68	MUNDAR	LAMPIHONG	MAJU
69	BALANG	PARINGIN	MAJU
70	KALAHIAN	PARINGIN	MAJU
71	PARAN	PARINGIN	MAJU
72	LAYAP	PARINGIN	MAJU
73	MURUNG ILUNG	PARINGIN	MAJU
74	MANGKAYAHU	PARINGIN	MAJU
75	LOK BATUNG	PARINGIN	MAJU
76	LAMIDA BAWAH	PARINGIN	MAJU



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
77	DAHAI	PARINGIN	MAJU
78	HUJAN MAS	PARINGIN	MAJU
79	BABAYAU	PARINGIN	MAJU
80	BALIDA	PARINGIN	MAJU
81	SUNGAI KETAPI	PARINGIN	MAJU
82	BARUH BAHINU LUAR	PARINGIN SELATAN	MAJU
83	INAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
84	BARUH BAHINU DALAM	PARINGIN SELATAN	MAJU
85	PANGGUNG	PARINGIN SELATAN	MAJU
86	GALUMBANG	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
95	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
96	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
79	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
80	MAYANAU	TEBING TINGGI	MAJU
81	SIMPANG BUMBUAN	TEBING TINGGI	MAJU
82	AUH	TEBING TINGGI	MAJU
83	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	MAJU
84	LANGKAP	TEBING TINGGI	MAJU
85	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	MAJU
86	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
95	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
96	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
97	MAYANAU	TEBING TINGGI	
98	SIMPANG BUMBUAN	TEBING TINGGI	
99	AUH	TEBING TINGGI	
100	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	
101	LANGKAP	TEBING TINGGI	
102	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	
103	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	



**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MANDIRI**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	SIRAP	JUAI	MANDIRI
2	HUKAI	JUAI	MANDIRI
3	TABUAN	HALONG	MANDIRI
4	HALONG	HALONG	MANDIRI
5	KAPUL	HALONG	MANDIRI
6	SURYATAMA	HALONG	MANDIRI
7	BARUH PANYAMBARAN	HALONG	MANDIRI
8	PADANG RAYA	HALONG	MANDIRI
9	PEMATANG	AWAYAN	MANDIRI
10	AWAYAN	AWAYAN	MANDIRI
11	TUNDAKAN	AWAYAN	MANDIRI
12	BIHARA HILIR	AWAYAN	MANDIRI
13	PUTAT BASIUN	AWAYAN	MANDIRI
14	BATU MANDI	BATU MANDI	MANDIRI
15	MANTIMIN	BATU MANDI	MANDIRI
16	TELUK MESJID	BATU MANDI	MANDIRI
17	TIMBUN TULANG	BATU MANDI	MANDIRI
18	HAMPARAYA	BATU MANDI	MANDIRI
19	SIMPANG TIGA	LAMPIHONG	MANDIRI
20	MATANG HANAU	LAMPIHONG	MANDIRI
21	BUNGIN	PARINGIN SELATAN	MANDIRI
22	MARADAP	PARINGIN SELATAN	MANDIRI

**DATA DESA DENGAN STATUS SANGAT TERTINGGAL**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	WONOREJO	JUAI	SANGAT TERTINGGAL

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

- a. Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan pada tahun 2023 mendukung capaian tersebut yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan PKK dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa didukung dengan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.



- b. Adanya dukungan pemerintah pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan penguncuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa.
- c. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- d. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial), Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan tersebut diatas Kabupaten Balangan pada tahun 2023 memiliki kenaikan di beberapa status desa serta akan berdampak baik untuk desa tersebut. Secara khusus dan baik bagi Kabupaten Balangan secara umum.

Berikut sampel dari ketahanan sosial yang mengalami kenaikan status desa nya:

1. Kecamatan Awayan Desa Tangalin
  - a. Peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat;
  - b. Kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi;
  - c. Layanan air bersih membaik dan murah
  - d. Jaringan komunikasi lancar dikarenakan pemdes memfasilitasi penyediaan wifi
2. Kecamatan Awayan Desa Pulantan
  - a. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat nilai kesejahteraan meningkat
  - b. Adanya peningkatan Akses pada aspek-aspek ekonomi
  - c. Akses informasi dan komunikasi lancar
  - d. Peningkatan tahap kesehatan masyarakat
  - e. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih makin membaik
  - f. Ketertiban lingkungan membaik karena aktifnya kegiatan linmas
3. Kecamatan Awayan Desa Muara Jaya
  - a. Dengan adanya perbaikan akses pendidikan maka hampir semua anak2 wajib sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang putus sekolah melanjutkan pada tahap kelas paket sesuai jenjang.
  - b. Keberdayaan perempuan meningkat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga.
  - c. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dikarenakan tersedianya jaringan air bersih dan sadarnya masyarakat terhadap perilaku hidup bersih



Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
1	<b>Administrasi Pemerintahan Desa</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	95,94	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	94,74	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

#### D. Analisis Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Murni

##### 1. Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik

Tabel 3.19  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Indeks Infrastruktur Publik	109,73	41,58	43,69	105,07	52,71	82,89	-	-	-

Sumber Data Dinas PUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Balangan Tahun 2023, data diolah

Capaian kinerja indeks infrastruktur publik pada tahun 2023 mencapai 105,07% dari target dan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan di tahun ketiga target RPJMD. Capaian kinerja indeks infrastruktur publik didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah akses jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jembatan dalam kondisi mantap, terbangunnya infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang menjadi kewenangan daerah, tersedianya jaringan daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, tersedianya bangunan gedung/publik dalam kondisi baik dan tersedianya luasan RTH.

Adapun data jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebagaimana tabulasi data berikut:

Kondisi Jalan	Realisasi Tahun						
		2022		2023			
		Panjang Jalan (Km)	%	Panjang Jalan (Km)	%		
BAIK	MANTAP	185,300	27,564	72,616	292,494	52,41	61,55
SEDANG		302,860	45,051		51,009	9,14	
RUSAK RINGAN	TIDAK MANTAP	89,630	13,333	27,384	17,99	3,22	38,43
RUSAK BERAT		94,463	14,052		196,482	35,21	
TOTAL		672,253			557,975		

Total panjang jembatan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah sebesar 3.619,40 meter dengan rincian panjang kondisi jembatan yang mantap 3.280,90 meter dan tidak mantap 338,5 meter. Pada tahun 2023 panjang tebing sungai yang ditangani berjumlah 19.917,05-meter sedangkan total panjang tepi sungai yang rawan longsor sebesar 120.554 meter. Pada tahun 2023 kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan irigasi adalah peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan. Adapun daerah yang menjadi lokus adalah DI Marias, DI Baruh Panyambaran, DI Bungur Rawa, DIR Lajar dan DIR Matang Hanau. Pada tahun 2023, kondisi luas jaringan daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 2.074,50 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan daerah sebesar 6.234 ha. Pada tahun 2023 persentase bangunan gedung atau publik dalam kondisi baik adalah 92,34%. Pada tahun 2023, target yang telah ditetapkan untuk persentase tersedianya luasan RTH sebesar 4,05% dan realisasinya 4,58% artinya capaian kinerja 98%. Penyediaan RTH adalah penyediaan RTH yang



dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil analisis kinerja pembangunan tahun 2023 dijelaskan bahwa prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan infrastruktur perkotaan. Adapun faktor pendorong adalah adanya penguatan program pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan, tersedianya forum SKPD untuk koordinasi, adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga terampil, dan tersedianya SDM dengan motivasi kerja yang tinggi dan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut yakni (1) belum optimalnya sistem pengawasan terhadap kualitas bangunan infrastruktur, rendahnya profesionalisme mitra kerja kontraktor, (2) belum optimalnya koordinasi antar SKPD, (3) tingginya tuntutan masyarakat terhadap bangunan infrastruktur berkualitas, (4) ketersediaan bahan material alam semakin terbatas, (5) kualitas dan kuantitas SDM Dinas masih kurang memadai, (6) tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan struktur jalan.

Tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan infrastruktur perkotaan adalah optimalisasi pengawasan terhadap kualitas bangunan infrastruktur, mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait pengadaan barang dan jasa, melakukan FGD antar SKPD yang terkait, melakukan sosialisasi terhadap para penyedia atau pihak ketiga.

Dalam rangka mewujudkan kinerja peningkatan infrastruktur dari aspek perhubungan, Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki beberapa potensi faktor pendukung yakni (1) adanya kepastian penyedia pengadaan sarpras perlengkapan jalan, (2) Visi Misi Bapak Bupati untuk pembangunan terminal tipe C yang baru, (3) adanya ketersediaan anggaran dan kebutuhan sesuai dengan target yang direncanakan, (4) adanya dukungan Bappedalitbang di dalam mengakomodir usulan kajian terminal tipe C.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	90,99	76,32	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	57,08	96,42	Efisien
	Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	83,33	83,66	Efisien
	Predikat Kinerja		Tinggi	Tinggi	
<b>4</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	91,48	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	163,45	96,56	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>6</b>	<b>Penataan Bangunan Gedung</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	103,06	77,78	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>7</b>	<b>Aplikasi Informatika</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	90,41	75,71	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah



2. Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman

Tabel 3.20  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.	Indeks Infrastruktur Permukiman	98,73	31,42	29,87	95,07	33,11	90,21	-	-	-

Sumber Data Dinas PUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Capaian kinerja indeks infrastruktur permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak, rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik, cakupan ketersediaan rumah layak huni, perumahan yang sudah dilengkapi PSU, luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani.

Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 39.977 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 45.540 KK.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN															
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
BASELINE DATA AKSES AIR MINUM															
KECAMATAN	Jumlah Penduduk 2023			Penduduk akses AM 2023			Bukan Jaringan Perpipaan			Jaringan Perpipaan			Penduduk belum akses AM		
	Rumah	KK	Jiwa	Rumah	Jumlah KK	%	Rumah	KK	%	Rumah	KK	%	Rumah	Jumlah KK	%
PARINGIN	6.488	6.687	19.833	6.239,00	5.431	96,16	109	111,00	1,68	6.130,00	5.320,00	94,48	249	256	3,84
PARINGIN SELATAN	5.027	5.391	16.265	4.597,00	4.934	91,45	436	470,00	8,67	4.161,00	4.464,00	82,77	430	457	8,55
HALONG	6.558	7.019	20.739	5.255,00	5.623	80,13	1.898	2.029,00	28,94	3.357,00	3.594,00	51,19	1.303	1.396	19,87
TEBING TINGGI	2.371	2.416	7.305	1.953,00	1.990	82,37	1.139	1.159,00	48,04	814,00	831,00	34,33	418	426	17,63
AWAYAN	4.852	5.029	14.444	4.356,00	4.516	89,78	1.062	1.100,00	21,89	3.294,00	3.416,00	67,89	496	513	10,22
JUAI	5.560	5.778	17.286	4.875,00	5.070	87,68	1.199	1.247,00	21,56	3.676,00	3.823,00	66,12	685	708	12,32
BATUMANDI	6.585	6.730	19.665	5.406,00	5.527	82,10	2.135	2.183,00	32,42	3.271,00	3.344,00	49,67	1.179	1.203	17,90
LAMPHONG	6.066	6.490	19.317	5.499,00	5.886	90,65	282	299,00	4,65	5.217,00	5.587,00	86,00	567	604	9,35
Jumlah	43.507	45.540	134.854	38.180	39.977	87,78	8.260	8.598	18,99	29.920	31.379	68,77	5.327	5.563	12,24

Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestik adalah sekitar 98,75%. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 38.423 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 35.425 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 40,40 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 ha.

Dalam upaya peningkatan kinerja infrastruktur permukiman Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan multisharing dana APBD dan APBDes. Tahapan ini bisa dimulai melalui Musrenbang tingkat desa dan Musrenbang tingkat kecamatan.



Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	101	91,65	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	98,77	94,6	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	96,39	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>4</b>	<b>Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100,7	98,58	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	93,35	97,05	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

### 3. Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan

Tabel 3.21  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
3.	Indeks Kualitas Air	102,25	50,3	50	99,40	50,60	98,81	55,19	55,64	54,59
4.	Indeks Kualitas Udara	100,97	91,16	93,97	103,08	91,49	102,71	93,79	92,85	88,67
5.	Indeks Kualitas Lahan	95,57	55,67	51,94	93,30	60,74	85,51	69,85	52,08	61,79

Sumber Data Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan berada di no urutan 336 dengan realisasi IKA 50, realisasi IKU 93,97, realisasi IKL 51,94 dan realisasi IKLH 68,24 dengan rating Sedang. Dibandingkan dengan realisasi Kabupaten/Kota tentangga yaitu Kabupaten Tabalong untuk realisasi IKA 55,19, IKU 93,79 dan IKL 69,85 realisasi IKA, IKU dan IKL Pemerintah Kabupaten Balangan masih dibawah realisasi Kabupaten Tabalong.

Dibandingkan dengan realisasi IKLH Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan IKA 55,64 IKU 92,85 dan IKL 52,08 realisasi IKA dan IKL Pemerintah Kabupaten Balangan lebih rendah dari Pemerintah Provinsi sedangkan realisasi IKU Pemerintah Kabupaten Balangan lebih tinggi dari realisasi IKU Pemerintah Provinsi. Sedangkan nilai IKA, IKU dan IKL Pemerintah Kabupaten Balangan di bandingkan dengan realisasi IKLH Nasional IKA 54,59, IKU 88,67 dan IKL 61,79 realisasi IKA dan IKL Nasional lebih tinggi dari IKA dan IKL Pemerintah Kabupaten Balangan sedangkan realisasi IKU Pemerintah Kabupaten Balangan lebih tinggi dari realisasi Nasional. Data realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran SK Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di bawah ini:



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

IKLH NASIONAL TAHUN 2023

Keterangan	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
Nasional	54,59	88,67	61,79	78,84	72,54
Rating	Sedang	Baik	Sedang	Baik	Baik

IKLH PROVINSI TAHUN 2023

No	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH	Rating
1	Nanggroe Aceh Darussalam	61,3	90,94	76,51	86,75	78,53	BAIK
2	Bangka Belitung	60,27	90,0	49,77	68,35	72,8	BAIK
3	Sumatera Barat	57,05	90,53	68,98	86,19	76,85	BAIK
4	Riau	50,84	90,89	51,69	74,39	70,42	BAIK
5	Kepulauan Riau	54,93	90,13	66,97	81,81	74,26	BAIK
6	Kepulauan Bangka Belitung	57,43	90,15	40,99	82,37	71,62	BAIK
7	Jambi	46,06	90,57	50,51	70,69	68,15	SEDANG
8	Bengkulu	48,98	92,49	35,8	85,23	72,1	BAIK
9	Sumatera Selatan	58,16	87,76	44,38	70,37	70,2	BAIK
10	Lampung	55,56	88,04	38,42	83,78	89,91	SEDANG
11	Banten	58,93	66,67	43,13	89,95	62,52	SEDANG
12	DKI Jakarta	40,76	68,46	27,17	78,74	54,57	SEDANG
13	Jawa Barat	46,87	81,39	41,99	85,03	64,77	SEDANG
14	Jawa Tengah	51,23	86,35	46,34	81,39	68,59	SEDANG
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	40,28	89,01	48,68	81,11	66,29	SEDANG
16	Jawa Timur	55,86	84,73	49,7	77,99	69,59	SEDANG
17	Efl	55,17	86,99	45,22	86,05	71,38	BAIK
18	Nusa Tenggara Barat	47,78	90,21	66,6	82,88	71,92	BAIK
19	Nusa Tenggara Timur	34,65	92,03	59,32	84,04	74,18	BAIK
20	Kalimantan Barat	52,97	92,03	60,62	83,52	73,73	BAIK
21	Kalimantan Tengah	53,9	91,47	75,68	77,12	75,17	BAIK
22	Kalimantan Selatan	55,64	92,85	82,08	79,94	73,5	BAIK
23	Kalimantan Timur	52,54	89,64	83,86	81,36	75,47	BAIK
24	Diorentalo	58,7	94,43	80,24	85,54	79,52	BAIK
25	Sulawesi Selatan	57,95	90,58	56,22	84,3	74,3	BAIK
26	Sulawesi Tenggara	61,28	92,83	74,86	79,64	78,41	BAIK
27	Sulawesi Tengah	63,63	91,88	83,19	79,81	79,93	BAIK
28	Sulawesi Utara	52,12	93,52	62,33	79,19	73,87	BAIK
29	Sulawesi Barat	58,82	93,33	73,68	83,88	78,05	BAIK
30	Maluku	55,87	92,47	90,73	81,88	78,75	BAIK
31	Maluku Utara	61,05	93,19	86,54	82,77	80,36	BAIK
32	Papua Barat	59,52	96,22	100	86,83	83,31	BAIK
33	Papua	54,73	95,87	100	84,56	81,31	BAIK

IKLH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH	Rating
319	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	54,62	95,83	62,22	72,97	72,97	BAIK
320	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	51,4	81,76	37,75	60,71	66,69	SEDANG
321	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	58,33	89,65	38,59	66,69	66,69	SEDANG
322	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	50,8	91,19	73,81	71,98	71,98	BAIK
323	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	54	91,02	42,12	66,59	66,59	SEDANG
324	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	55,71	91,5	81,89	75,94	75,94	BAIK
325	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	50	89,64	70,66	70,58	70,58	BAIK
326	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	50	92,66	74,07	72,55	72,55	BAIK
327	Kabupaten Kutating	Kalimantan Tengah	48,62	90,03	87,36	73,86	73,86	BAIK
328	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	62	94,51	66,7	76,19	76,19	BAIK
329	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	52,67	91,05	52,2	68,11	68,11	SEDANG
330	Kabupaten Lambung	Kalimantan Tengah	66,84	91,02	76,58	78,77	78,77	BAIK
331	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	53,53	91,99	100	70,28	70,28	BAIK
332	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	48,87	93,41	67,80	70,96	70,96	BAIK
333	Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	56,67	91,89	66,83	73,09	73,09	BAIK
334	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	59,09	93,21	47,85	70,45	70,45	BAIK
335	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	46,92	86,97	76,73	69,67	69,67	SEDANG
336	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	50	93,97	51,94	68,24	68,24	SEDANG
337	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	58,8	92,68	54,60	71,62	71,62	BAIK
338	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	52,55	93,87	24,42	63,12	63,12	SEDANG
339	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	64,4	91,24	32,99	68,39	68,39	SEDANG
340	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	57,5	93,46	46,23	69,59	69,59	SEDANG
341	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	50,67	92,13	38,25	64,74	64,74	SEDANG
342	Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan	60,67	93,36	63,23	74,47	74,47	BAIK
343	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	55,19	93,79	69,85	74,03	74,03	BAIK

### 3.1 Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 50, dimana mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 51,33. Penurun nilai IKA karena adanya penambahan penduduk dan kebiasaan masyarakat yang melakukan aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) di sungai serta adanya kotoran binatang yang ikut larut di sungai, sehingga pencemaran air sungai meningkat.

### 3.2 Indeks Kualitas Udara

Untuk indeks kualitas udara pada tahun 2023 adalah 93,97 yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 91,93. Nilai IKU dapat di pengaruhi oleh sumber emisi udara, kondisi cuaca, suhu, curah hujan, dan aktivitas manusia. Sedangkan untuk indeks tutupan lahan pada tahun 2023 adalah 51,94. Angka tersebut kurang lebih sama dengan indeks tutupan lahan pada tahun 2022 yaitu 51,60 atau tidak mengalami perubahan signifikan. Hal itu karena belum ada penambahan lokasi *ruang terbuka hijau*.

### 3.3 Indeks Kualitas Lahan

Perhitungan IKL Tahun 2023, nilai IKL Kab. Balangan tahun 2023 adalah **51.94**, jika dibandingkan dengan tabel penentuan kategori IKL diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami kenaikandari tahun 2022 yaitu 51,60. Hal itu karena adanya inventarisasi ulang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2022 tetapi belum mencapai target karena adanya pengurangan lahan RTH, perluasan jalan dan pembangunan gedung.

Faktor pendorong peningkatan kinerja indeks kualitas lahan adalah tutupan lahan masih terjaga. Sedangkan factor penghambat indeks kualitas lahan adalah tidak ada penambahan luas ruang terbuka hijau.

Dalam rangka peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait langsung dan tidak langsung dengan lingkungan hidup.
2. Memasukkan program atau kegiatan langsung yang berkaitan dengan perhitungan IK, IKU dan IKL.
3. Melaksanakan program reboisasi pada daerah-daerah yang teridentifikasi adanya penangan reboisasi.



4. Mengatur dan mengelola sampah.
5. Membuat regulasi tentang pembuangan limbah.
6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bijaksana sehingga mengurangi dampak negative IPTEK terhadap lingkungan alam karena seperti diketahui bahwa IPTEK dapat mempengaruhi percepatan proses penguraian limbah.
7. Membuat konsep wacana desa digital hijau.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Perencanaan Lingkungan Hidup</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,77	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100,32	90,82	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	82,1	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>4</b>	<b>Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	99,47	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>5</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,93	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

#### 4. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.22  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4  
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
6.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	125,68	13,14	7,68	58,45	13,89	55,29	-	7,79	-
7.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Pengolahan dan Jasa	108,73	6,40	4,16	65	6,70	62,09	-	9,66	-
8.	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	362	0,44	0,24	55	0,50	48	-	1,86	-
9.	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	127,35	600	471,227	78,54	1,546	30,48	3,753 (Tabalong)	2,204	-

Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PMPTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah



#### 4.1 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Realisasi kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan tahun 2023 adalah 7,68 dengan capaian 58,45% dengan capaian rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemarau Panjang tahun 2022 lebih lama dibanding tahun 2022, di beberapa wilayah sentra terjadi kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan mundur jadwal tanam yang berakibat pada penurunan produktivitas.
2. Luas pertanaman padi yang puso akibat banjir dan kekeringan seluas 33.483 ha dari 166.657 ha yang terkena.
3. Adanya alih fungsi lahan sawah sehingga terjadi penurunan luas panen 21.731 ha untuk tanaman padi
4. Penerapan teknologi budidaya jagung oleh petani yang semakin baik.
5. Harga jual jagung yang cukup tinggi di tingkat petani sehingga petani terdorong untuk menanam jagung.
6. Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan Target Pengembangan Budidaya

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan produksi pertanian adalah:

1. Perbaiki tata Kelola air untuk ketersediaan air yang mencukupi sepanjang tahun, mendorong untuk melakukan percepatan tanam, perluasan areal tanam padi baik di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
2. Pembentukan Brigade La Nina (OPT dan DPI) sebagai bentuk pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering).
3. Mapping wilayah rawan banjir dan rutin pantau informasi BMKG sebagai bentuk Early Warning System.
4. Menyiagakan alsintan, seperti pompa air untuk membuang air dan alat pengering padi (pascapanen) di daerah rawan banjir.
5. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan lainnya berkoordinasi Pusat dan Daerah.
6. Penggunaan benih tahan genangan dan menyiapkan bantuan benih akibat puso.
7. Sosialisasi dan himbauan kepada petani untuk mengikuti AUTP, terutama bagi petani di wilayah yang rawan banjir.
8. Perbanyak/ pengembangan Kampung Hortikultura secara berkesinambungan.
9. Perbanyak Bimbingan-bimbingan teknis untuk para petani/kelompok tani baik secara offline maupun online;
10. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas strategis;
11. Pengembangan kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;
12. Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta pengembangan Early Warning System komoditas strategis;
13. Melanjutkan Pengembangan Kawasan komoditas strategis dalam skala luas;
14. Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat stimulan;
15. Bersinergi dengan stakeholder terkait agar kegiatan pengembangan kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
16. Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi penerima bantuan serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam dan produksi hortikultura ; dan
17. Mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga, khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi fluktuasi harga.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja utama persentase peningkatan produksi sektor perikanan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi perikanan untuk perikanan budidaya masih belum maksimal dikarenakan kelompok pembudidaya ikan masih melaksanakan perikanan budidaya hanya sebagai sampingan.
2. Pendampingan untuk pembudidaya ikan masih belum maksimal.
3. Terbatasnya pengetahuan anggota kelompok pembudidaya ikan dalam melaksanakan budidaya.
4. Semakin berkurangnya luasan perairan untuk produksi perikanan tangkap.



5. Adanya musim kemarau elnino yang panjang mengakibatkan perkembangbiakan ikan di perairan sungai, rawa berkurang.

6. Penangkapan ikan di perairan oleh masyarakat nelayan juga berkurang.

Faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya bantuan sarana produksi untuk perikanan budidaya berupa keramba, kolam ikan, bioflok dan bibit serta pakan ikan.
2. Sumber daya alam yang mendukung untuk perikanan budidaya.
3. Kebutuhan masyarakat akan protein ikan.
4. Sistem budidaya perikanan yang memberikan keuntungan/tambahan penghasilan bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai persentase peningkatan produksi sektor perikanan adalah :

1. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan untuk kelompok pembudidaya ikan yang sudah menerima bantuan sarana produksi perikanan budidaya.
2. Melaksanakan restocking ikan untuk perikanan tangkap di wilayah perairan lepas.

#### 4.2 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa

Realisasi kontribusi PDRB sektor perdagangan, pengolahan dan jasa tahun 2023 adalah 4,16 dengan capaian 65% termasuk dalam kategori rendah.

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor :

Peningkatan Volume Perdagangan = Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)

Peningkatan Volume Perdagangan= 867,76 Milyar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 867,76 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2023.

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

#### Peningkatan Volume Perdagangan Tahun 2021 s/d 2023

Realisasi 2021 (Milyar Rupiah)	Realisasi 2022 (Milyar Rupiah)	Realisasi 2023 (Milyar Rupiah)
671,41	751,05	867,76

Sumber data BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2023

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian target pada IKU ini adalah adanya revitalisasi dan penataan serta perluasan pasar-pasar tradisional Pasar Modern Adaro, Pasar Halong, Pasar Uren, dan Pasar Mauya. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengembangan sentra IKM, pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM.

Hal yang menjadi penyebab peningkatan kinerja ini adalah adanya minat UMKM untuk mengembangkan pemasaran melalui digital marketing disebabkan banyaknya konsumen yang berbelanja secara elektronik (*online*), adanya UMKM yang menjual oleh-oleh khas Balangan di Desa Riwa yang merupakan jalan lintas Provinsi sehingga perlu penataan tempat berusaha agar terlihat seragam dan lebih menarik minat para pengguna jalan, keingintahuan pelaku UMKM mengenai bagaimana mengelola keuangan yang baik, dukungan dana APBD yang tersedia karena komitmen Kepala Daerah beserta DPRD dalam pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Balangan, sumber bahan baku produk yang banyak tersedia di daerah, tingginya antusias pelaku IKM untuk meningkatkan



keterampilan baik teknik maupun kreatifitas, dan tingginya tingkat kesadaran pelaku IKM untuk mendapatkan izin usaha/NIB.

Adapun yang sudah dilakukan oleh Pemda Balangan melalui SKPD terkait adalah telah terlaksananya kegiatan pelatihan pemasaran produk UKM melalui IT, sudah terealisasi tempat berusaha berupa *booth container* dan sudah diserahkan kepada pelaku UKM di Desa Riwa Kecamatan Baumann, telah terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM, terlaksananya bantuan berupa hibah barang yang diserahkan kepada pelaku UMKM dalam menunjang peningkatan usaha, evaluasi teknik dan sistem pendataan tahun 2023 telah dilaksanakan, penyaluran Bansos UMKM (500 UKM) telah terlaksana pada triwulan IV, memberikan penyuluhan dan pendampingan tentang manajemen usaha, memberikan motivasi saling kerjasama kepada anggota sentra IKM, memberikan pelatihan-pelatihan sesuai bidang usahanya di sentra IKM, dan saling berbagi pengalaman antara pelaku IKM dalam sentra IKM.

Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik:

1. Industri makanan dan minuman *manufacture of food product and beverages*.
2. Industri tekstil dan pakaian jadi *manufacture of textile and wearing apparel*.
3. Industri kayu barang dari kayu / *manufacture wood and products wood*.
4. Industri kertas dan barang dari kertas / *manufacture paper and paper products*.
5. Industri kimia dan barang dari kimia / *manufacture chemicals and chemical products*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan berada pada kategori sedang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan modal yang masih terbatas pada setiap sektor industri.
2. Ketersediaan tenaga kerja yang belum memenuhi permintaan pasar.
3. Masih bergantungnya bahan mentah atau bahan baku di luar lokasi industri.
4. Transportasi yang masih terbatas karena ada beberapa sarana prasarana jalan yang sering mengalami bencana seperti banjir.
5. Pemasaran yang belum optimal menjangkau pada seluruh aspek baik pada pemasaran online ataupun pemasaran offline.

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan terletak pada perkembangan jumlah tenaga kerja dan bantuan modal usaha. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah bekerjasama dengan Bank Kalsel melalui inovasi pinjaman kredit tanpa Bunga (Sanggam Babungas) untuk para pelaku usaha di Balangan termasuk pelaku usaha industri.

#### **4.3 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Realisasi kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2023 adalah 0,24 dengan capaian sebesar 55% termasuk dalam kategori capaian rendah.

Adapun faktor keberhasilan peningkatan penyediaan akomodasi dan makan minum dipengaruhi oleh peningkatan faktor pariwisata antara lain seiring pandemi Covid-19 sudah berkurang sehingga pelanggaran persyaratan bagi penumpang pada setiap jasa angkutan umum dan kendaraan pribadi menyebabkan peningkatan arus penumpang terutama pada saat *week end* dan hari libur sekolah atau libur nasional. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap kunjungan masyarakat ke Balangan terutama objek wisata baik objek wisata buatan seperti taman hijau, water park dan rancah mampulang, objek wisata religi seperti makam Datu Kandang Haji yang pengunjungnya membeludak pada saat haulan, dan objek wisata alam watu badinding, arus deras nanai, air terjun bainngi dan lain-lain. Disamping itu juga adanya promosi wisata yang dilakukan melalui pamflet, spanduk, website dan media sosial seperti youtube dan facebook serta pemasangan videotron di Bandara Syamsudinor. Kemudian juga telah dilakukan pagelaran/even yang diikuti dan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah Pasar Ramadhan, bagarakan sahur, *event* tahunan

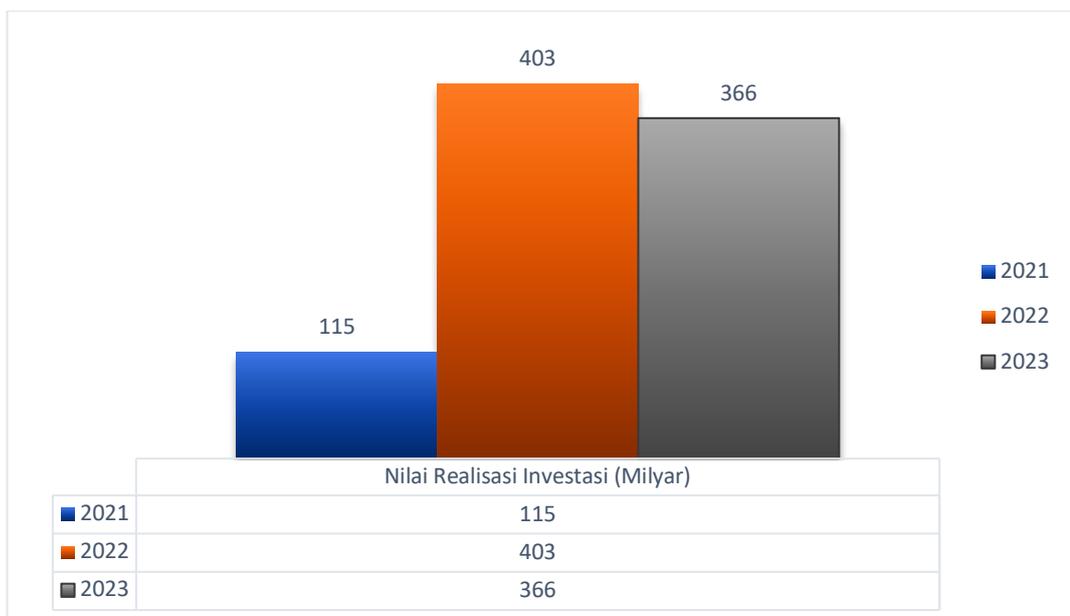


mesiwah pare gumbuh yang merupakan salah satu acara adat suku Dayak di Desa Liyu Kecamatan Halong, pemilihan putra/putri pariwisata, Festival Pasar Terapung (disini disediakan *stand* untuk mengenalkan destinasi wisata daerah dan adanya pagelaran seni dari masing-masing daerah), pemilihan nanang dan galuh Kal-Sel dan *Launching Calender of Event Tourism*.

Pada tahun 2021 dan 2022 beberapa sarana untuk lebih meningkatkan kenyamanan pengunjung di objek wisata telah dibangun seperti *Gazebo*, *Home Stay*, pintu gerbang dan tempat MCK. Selain itu telah tersedia *Glamping (Glamor Camping)* untuk menunjang *Camping Ground* terutama di Desa Liyu. Disamping itu keberhasilan pariwisata Balangan juga dipengaruhi oleh adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sangat mendukung terhadap promosi lokasi wisata, dukungan CSR dan Badan Pertanahan Nasional dalam reformasi agraria terutama di Desa Liyu Kecamatan Halong dan adanya Tim Jadesta Desa telah meningkatkan kualitas portofolio untuk mengikuti Anugerah Duta Wisata Indonesia tahun 2023. Tahun 2023 upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan adalah menjalin kerja sama lintas sektor terkait, pengoptimalan pembangunan sarana dan prasarana menuju daya tarik wisata, efektivitas media promosi, dan melaksanakan pelatihan mengenai kepariwisataan.

**4.4 Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)**

Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2023 yang didapat berdasarkan data pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp 366.091.937.519,26 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas koma Dua Puluh Enam Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi investasinya sebesar Rp 403.601.380.621,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Pulu Satu Rupiah). Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja nilai investasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 37.518.443.101,74 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Satu koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Berikut grafik Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023.



**Perbandingan**

Grafik perbandingan Realisasi Investasi Kabupaten Balangan dengan 13 Kabupaten Kota se Kalsel  
Berikut Rekap Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Balangan menurut PMDN dan PMA Tahun 2023:

Nama Perusahaan	Status	Negara	Triwulan	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
ADARO INDONESIA	PMA	Thailand	1	Pertambangan	Rp 17.162.053.173,22	5
			2	Pertambangan	Rp 9.362.471.025,81	3
			3	Pertambangan	Rp 26.835.331.023,78	5
ADARO PERSADA MANDIRI	PMDN	Indonesia	1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 45.000.000.000,00	0
			2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
			3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
ADARO SARANA TIRTA	PMDN	Indonesia	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp 26.631.100.000,00	0
ALTIN BORNEO ABADI	PMDN	Indonesia	1	Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
ANUGERAH BALANGAN	PMDN	Indonesia	3	Jasa Lainnya	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Industri Lainnya	Rp -	0
ARGA KUKUSAN KENCANA	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp 500.000.000,00	22
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
BAKTI PUTRA MERATUS	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp 326.100.000,00	67
				Jasa Lainnya	Rp 55.000.000,00	25
				Perdagangan dan Reparasi	Rp 46.200.000,00	1
				Jasa Lainnya	Rp 35.000.000,00	30
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	9
BALANGAN ANUGERAH SEMESTA	PMA	Malaysia	1	Pertambangan	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
BERSAMA AHMAD AWAN	PMDN	Indonesia	1	Jasa Lainnya	Rp 76.500.000,00	0
			2	Jasa Lainnya	Rp -	0



Nama Perusahaan	Status	Negara	Triwulan	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
BINA PERTIWI	PMDN	Indonesia	1	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			2	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	Rp 1.178.800.000,00	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp 348.700.000,00	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp 215.800.000,00	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
BORNEO ANUGRAH INSANINDO	PMDN	Indonesia	2	Perdagangan dan Reparasi	Rp 80.300.000,00	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	Rp 88.600.000,00	0
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
CAHAYA JAYA	PMDN	Indonesia	1	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Perikanan	Rp -	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0				
CHANDRA BATUAH MUSTIKA LESTARI	PMDN	Indonesia	1	Jasa Lainnya	Rp -	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Pertambangan	Rp 4.937.600.000,00	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp 15.500.000.000,00	21
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp 1.763.000.000,00	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Jasa Lainnya	Rp -	0
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0				
Konstruksi	Rp -	0				
	Konstruksi	Rp -	0			
GALUMBANG JAYA	PMDN	Indonesia	2	Konstruksi	Rp 10.000.000,00	0



## LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Nama Perusahaan	Status	Negara	Triwulan	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
GUNA SARANA TEKNIK	PMDN	Indonesia	1	Konstruksi	Rp -	0
			2	Konstruksi	Rp -	0
			3	Konstruksi	Rp -	0
GUNUNG CAHAYA BERSAMA	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
HJ ROHANA	PMDN	Indonesia	2	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
INDO INTI SEJAHTERA	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
			3	Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	4
JAYA GORDEN	PMDN	Indonesia	1	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Perikanan	Rp -	0
				Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Pternakan	Rp -	0
KURNIA JUNJUNG PERKASA	PMDN	Indonesia	1	Jasa Lainnya	Rp 3.568.700.000,00	50
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			2	Jasa Lainnya	Rp 3.853.200.000,00	4
				Jasa Lainnya	Rp -	0
				Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			3	Jasa Lainnya	Rp 4.336.400.000,00	6
				Jasa Lainnya	Rp -	0
Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0				
LANCARJAYA MANDIRI ABADI	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
LASKAR SEMESTA ALAM	PMA	Malaysia	1	Pertambangan	Rp 20.644.487.729,67	13
			2	Pertambangan	Rp 7.710.792.608,99	12
			3	Pertambangan	Rp 15.383.103.389,65	8



Nama Perusahaan	Status	Negara	Triwulan	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
PARAMITHA CIPTA SARANA	PMA	Malaysia	1	Pertambangan	Rp 23.312.923.558,52	1
			2	Pertambangan	Rp 17.327.823.390,80	0
			3	Pertambangan	Rp 30.542.727.020,61	0
PERBATASAN	PMDN	Indonesia	1	Konstruksi	Rp 700.000.000,00	0
				Konstruksi	Rp 250.000.000,00	0
				Konstruksi	Rp 500.000,00	0
				Perikanan	Rp -	0
				Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	PMDN	Indonesia	1	Konstruksi	Rp -	0
			3	Konstruksi	Rp 396.900.000,00	0
REKA INSTINCT CONSULTANT	PMDN	Indonesia	2	Jasa Lainnya	Rp -	10
				Konstruksi	Rp -	10
				Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
RIZKY BUMI BALANGAN	PMDN	Indonesia	1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
			2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
			3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 1.690.000.000,00	3
SAPTAINDRA SEJATI	PMDN	Indonesia	1	Jasa Lainnya	Rp 526.400.000,00	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			2	Jasa Lainnya	Rp -	0
				Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			3	Jasa Lainnya	Rp 1.180.400.000,00	0
Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0				
SARIBUMI SINARKARYA	PMDN	Indonesia	1	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
			2	Pertambangan	Rp -	0
				Pertambangan	Rp -	0
			3	Pertambangan	Rp -	0
SATRIA PRAMITHA RARA	PMDN	Indonesia	1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0				
SEMESTA CENTRAMAS	PMA	Malaysia	1	Pertambangan	Rp 18.020.451.831,42	9
			2	Pertambangan	Rp 36.857.884.670,69	5
			3	Pertambangan	Rp 29.546.688.096,11	6
TRAKINDO UTAMA	PMDN	Indonesia	2	Perdagangan dan Reparasi	Rp 40.000.000,00	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	Rp 40.000.000,00	0
TRAKINDO UTAMA PALEMBANG	PMDN	Indonesia	1	Perdagangan dan Reparasi	Rp 10.000.000,00	0



Nama Perusahaan	Status	Negara	Triwulan	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING	PMDN	Indonesia	2	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
			3	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
VIMELDA BINTANG MANDIRI	PMDN	Indonesia	1	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
				Konstruksi	Rp -	0
WANDA JAYA PROPERTY	PMDN	Indonesia	1	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
			2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
			3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
Grand Total					Rp 366.091.937.519,26	329

Faktor -Faktor yang mempengaruhi pencapaian:

1. Peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM pada Tahun 2023 setelah dilakukan Bimtek Pengawasan LKPM kepada Pelaku Usaha.
2. Iklim Investasi di Kabupaten Balangan yang semakin kondusif.
3. Keberhasilan pembinaan, pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan aparatatur DPMPSTP serta peran pemerintah daerah melalui berbagai inovasi.
4. Upaya secara terus menerus menyederhanakan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui sistem aplikasi Si Cantik Cloud dan Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sesuai Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
5. Fasilitasi Kemitraan bagi Pelaku Usaha melalui Inovasi dan Aplikasi BATUTUKAR.
6. Akselerasi percepatan realisasi keberadaan Mal pelayanan Publik
7. Penyusunan/Pembaharuan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Balangan.
8. Penyusunan Dokumen Investmen Project Ready to Offer (IPRO) yaitu potensi Investasi pasar Agrobisnis.
9. Pengawasan Penanaman Modal bagi 41 Pelaku Usaha.
10. Bimtek OSS/Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
11. Bimtek Service Excellence bagi pelaku pelayanan perizinan.
12. Bimtek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
13. Pengusulan Produk Hukum tentang Kemudahan Berusaha/ Penanaman Modal

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	112,5	94,47	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	95,66	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	94,77	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>4</b>	<b>Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	60	88,36	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
<b>5</b>	<b>Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	345,5	94,29	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>6</b>	<b>Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	88,37	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>7</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	94,05	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>8</b>	<b>Penyuluhan Pertanian</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,36	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	150	99,58	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>10</b>	<b>Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	102,4	95,32	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>11</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	138,8	91,74	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>12</b>	<b>Pengawasan Keamanan Pangan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	99,32	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>13</b>	<b>Pengembangan UMKM</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	101,37	99,12	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>14</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	99,81	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>15</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	153,85	98,86	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>16</b>	<b>Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	103,25	91,99	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>17</b>	<b>Pengendalian Izin Usaha Industri</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	50,43	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
<b>18</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	85,35	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>19</b>	<b>Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	0	91,13	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
<b>20</b>	<b>Pengembangan Ekspor</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	33,33	87,6	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
<b>21</b>	<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	0	38,14	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah	



No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>22</b>	<b>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	98,82	98	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>23</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	140	88,18	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>24</b>	<b>Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	87,5	94,16	Efisien
	Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>25</b>	<b>Pemasaran Pariwisata</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	50	91,82	Efisien
	Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Tinggi	
<b>26</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	94,23	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>27</b>	<b>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	25	80,52	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
<b>28</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	25	74,31	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Tinggi	
<b>29</b>	<b>Pelayanan Penanaman Modal</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	97,28	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>30</b>	<b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,74	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

### 5. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka

Tabel 3.23  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5  
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
10.	Angka Pengangguran Terbuka	36,21	2,40	2,70	87,50	2,30	82,61	4,46 (Tabalong)	4,74	-

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

### Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja dengan 13 Kabupaten/Kota se Kalsel Tahun 2023

Kabupaten/Kota	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan
6301 Tanah Laut	95,83	96,42	+ 0,59
6302 Kota Baru	93,3	93,92	+ 0,62
6303 Banjar	97,28	97,27	+ 0,01
6304 Barito Kuala	96,37	96,58	+ 0,21
6305 Tapin	95,85	96,07	+ 0,22
6306 Hulu Sungai Selatan	97,71	97,88	+ 0,17
6307 Hulu Sungai Tengah	96,65	96,74	+ 0,09
6308 Hulu Sungai Utara	95,36	96,15	+ 0,79
6309 Tabalong	95,54	96,4	+ 0,86
6310 Tanah Bumbu	93,11	93,44	+ 0,33



6311 Balangan	96,02	97,3	+ 1,28
6371 Banjarmasin	93,04	93,3	+ 0,26
6372 Banjar Baru	94,53	94,99	+ 0,46
Kalimantan Selatan	95,26	95,69	+ 0,43

Upaya yang telah dilakukan untuk Menurunkan Pengangguran Terbuka adalah

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Potensi Daerah
2. Sertifikasi bagi Tenaga Kerja
3. Pembayaran Premi BPJS Bagi Pekerja Rentan
4. Mou Pelaksanaan Pelatihan dengan Perusahaan Swasta
5. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
6. Perluasan Kesempatan Kerja melalui penciptaan wirausaha baru

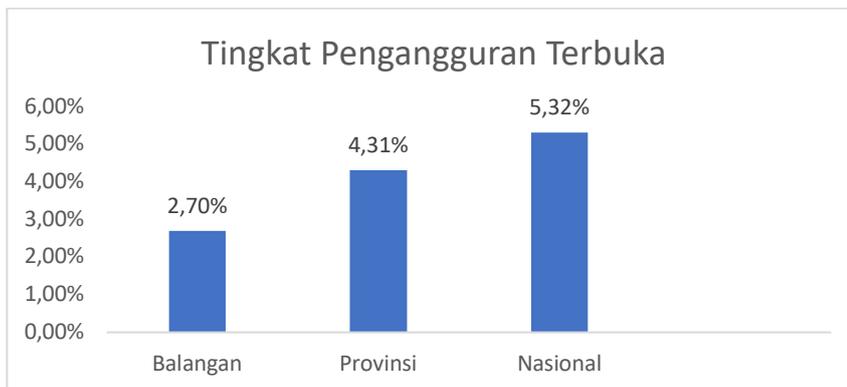
Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,28% dibanding Tahun 2022 yang realisasi sebesar 3,98%. Menurut Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dimana angka Pengangguran Terbuka di bawah 3% mendapatkan bobot maksimal/dikategorikan sangat baik.

Berikut grafik perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja/Angkatan Kerja yang bekerja di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023.

**Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Balangan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional**

Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten Balangan terhadap Pemerintah Provinsi berdasarkan data yang didapat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 2,70% : 4,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa TPT di Kabupaten Balangan masih lebih rendah.

Berikut grafik perbandingan persentase angkatan kerja yang bekerja Kabupaten Balangan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2023



**Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan 13 Kabupaten/Kota se Kalsel Tahun 2023**

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)					
	2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	4,33	4,95	4,20	4,74	3,95	4,31
TANAH LAUT	-	3,52	-	4,17	-	3,58



Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)					
	2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
KOTABARU	-	5,57	-	6,70	-	6,08
BANJAR	-	3,98	-	2,72	-	2,73
BARITO KUALA	-	3,22	-	3,63	-	3,42
TAPIN	-	4,96	-	4,15	-	3,93
HULU SUNGAI SELATAN	-	2,44	-	2,29	-	2,12
HULU SUNGAI TENGAH	-	3,76	-	3,35	-	3,26
HULU SUNGAI UTARA	-	4,80	-	4,64	-	3,85
TABALONG	-	3,43	-	4,46	-	3,60
TANAH BUMBU	-	6,83	-	6,89	-	6,56
BALANGAN	-	2,44	-	3,98	-	2,70
KOTA BANJARMASIN	-	8,47	-	6,96	-	6,70
KOTA BANJAR BARU	-	5,70	-	5,47	-	5,01

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dilihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan PPPK dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2023. Adapun data lowongan PPPK tahun 2023 sebanyak 119 orang. Sedangkan data lowongan kerja dari perusahaan sebanyak 245 orang. (Adapun data lowongan kerja terlampir).
2. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang sebagaimana tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
1	Januari	139	6	90
2	Februari	71	34	42
3	Maret	81	17	57
4	April	49	9	32
5	Mei	339	50	215
6	Juni	163	5	98
7	Juli	139	10	91
8	Agustus	354	18	235



No	Bulan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
9	September	120	27	78
10	Oktober	78	46	53
11	November	81	15	42
12	Desember	55	8	23
<b>Tahun 2023</b>		<b>1.669</b>	<b>245</b>	<b>1.056</b>

- Penempatan lulusan PPPK Pemerintah Kabupaten Balangan hasil seleksi Tahun 2022 sebanyak 371 orang yang terdiri dari 66 Tenaga Kesehatan, 16 Tenaga Teknis dan 289 Tenaga Kependidikan.
- Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki.

Berikut jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan DPMPSTPTTK Tahun 2023

NO	JUDUL KEGIATAN PELATIHAN	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH PESERTA PELATIHAN (ORG)
		APBN	APBD	CSR	
1	COMPUTER OPERATOR ASSISTANT	2	-	-	32
2	MENJAHIT PAKAIAN WANITA DEWASA	3	-	-	48
3	DESAINER GRAFIS MUDA	1	-	-	16
4	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA	1	-	-	16
5	SERVICE SEPEDA MOTOR INJEKSI	1	-	-	16
6	LAS SMAW 3G UP-PF	1	-	-	16
7	MENJAHIT PAKAIAN WANITA DEWASA	-	4	-	64
8	BASIC OFFICE	-	1	-	16
9	TEKNIK OTOMOTIF	-	2	-	32
10	TATA RIAS	-	1	-	16
11	DESAINER GRAFIS MUDA	-	1	-	16
12	TEKNIK LAS PABRIKASI	-	1	-	16
13	TEKNIK LISTRIK	-	1	-	16
14	OPERATOR EXCAVATOR	-	1	-	43
15	OPERATOR TRONTON	-	1	-	32
16	MENGEMUDI MOBIL	-	1	-	16
17	TEKNIK LAS PABRIKASI BUMA	-	-	1	11
18	Pelatihan Excavator		<b>2</b>		43
19	Pelatihan tronton Roda 10		1		32
20	Operator Dozer		1		75
21	Operator Excavator		1		75
22	Operator Miini HD		1		10
23	Operator Tronton R10		1		75
24	Operator Sarana		1		150
25	Sertifikasi		1		761



NO	JUDUL KEGIATAN PELATIHAN	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH PESERTA PELATIHAN (ORG)
		APBN	APBD	CSR	
26	Pelatihan Sertifikasi Bidang Teknik Tambang		1		60
27	Pelatihan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi		1		252
28	Cleaning Service		1		50
29	Security		1		89
30	Tenaga Keamanan		1		75
31	Psikotest		1		256
32	Babershop		2		30
<b>Jumlah</b>					<b>2455</b>

Sumber : DPMPSTPTK Kabupaten Balangan Tahun 2023

5. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sector pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan. Seperti yang tertera pada data BPS Kabupaten Balangan tahun 2023. (Adapun data terlampir).

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,08	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Penempatan Tenaga Kerja</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	97,34	99,66	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

## 6. Sasaran Meningkatnya Indeks Pendidikan

Tabel 3.24  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6  
Meningkatnya Indeks Pendidikan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
11.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	97,03	8,36	8,03	96,05	9,17	87,57	9,14 (Tabalong)	8,55	-
22.	Angka Harapan Lama Sekolah	99,14	12,85	12,82	99,77	13,24	96,83	12,91 (Tabalong)	12,86	-

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan tahun 2023, data diolah



### 6.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Pada tahun 2023 capaian ARLS yang di rilis oleh BPS pada Desember 2023 dalam Berita Resmi BPS adalah 8,03 tahun, berada pada peringkat 7 di kab/kota Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya, secara rata-rata penduduk Balangan usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 hanya menempuh pendidikan hingga kelas VIII SMP.

Dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 pada tahun 2023 ini ada peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,18. Secara progres kenaikan capaian, capaian ARLS Kabupaten Balangan termasuk dalam 5 Kabupaten tertinggi dengan Progres Kenaikannya dibanding Kabupaten Kota lainnya.

Pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan capaian ARLS antara lain.

- peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 192 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- peningkatan pelaksanaan SKB : membuka kelas dan pelatihan pengembangan kreatifitas warga belajar, bukan hanya melaksanakan ditempat bahkan sampai ke Kecamatan dan sekolah keagamaan/pesantren non formal.
- peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan : pemberian dan dukungan Dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk Operasional Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan Kelompok Belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 3 Pokjar, Paket B ,21 Pokjar dan Paket C ada 33 Pokjar).
- peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai memberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama di luar Kalimantan)
- pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.

**Faktor Penghambat** dalam mencapai ARLS adalah terkait terbatasnya dengan kewenangan urusan pada Pemerintah Daerah hanya pada Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan target dari ARLS ini adalah tidak terbatas hanya pada jenjang PAUD, SD dan SMP tapi sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Jadi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan hanya bisa maksimal melaksanakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.

**Faktor Pendorong** dalam mencapai ARLS adalah dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah, ARLS ini termasuk dalam faktor pendorong target capaian Visi Misi Kepala Daerah. Adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering berkoordinasi melaksanakan perpanjangan Program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah seperti Program Sekolah Penggerak, Program Kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan.

### 6.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia 7 tahun yang mengenyam pendidikan formal di tahun tertentu pada masa mendatang. HLS Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada pada peringkat 9 sebesar 12,82 tahun, artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,82 tahun atau setara dengan Diploma.



Pada tahun 2023 capaian **AHLS** yang di rilis oleh BPS pada Desember 2023 dalam Berita Resmi BPS adalah 12,82 tahun dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 12,85 tahun ini berarti persentase capaian adalah sebesar 99,77 persen dan ini merupakan kategori sangat tinggi. Dan jika dibanding dengan capaian pada tahun 2022 pada tahun 2023 ini ada peningkatan kenaikan capaian sebesar 0,21.

Pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan capaian AHLS antara lain

- peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 192 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
- penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana.
- peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai pemberi motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahaan ternama di luar Kalimantan).
- pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.
- peningkatan kemampuan kompetensi guru dengan mengadakan kerjasama dengan Lembaga Luar.
- pemerataan sebaran guru pada sekolah sekolah didaerah.
- aktif menjangring minat bakat siswa melalui lomba-lomba didaerah dan diprovinsi.
- menaikkan kesejahteraan para PTK (Kenaikan Insentif dan Honor).

**Faktor Penghambat** dalam mencapai AHLS adalah masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.

**Faktor Pendorong** dalam mencapai AHLS adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah, AHLS ini termasuk dalam faktor pendorong target capaian Visi Misi Kepala Daerah. Faktor geografi Kabupaten Balangan yang dekat dengan dan berbatasan langsung dengan daerah tetangga, bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi terdekat serta adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan sebesar Rp. 7.000.000.000,00.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	83,78	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pengembangan Kurikulum</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	91,2	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	86,08	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>4</b>	<b>Pengendalian Perizinan Pendidikan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	35,51	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah



7. Sasaran Meningkatkan Indeks Kesehatan

Tabel 3.25  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7  
Meningkatnya Indeks Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
13.	Usia Harapan Hidup	100,01	68,32	73,69	107,86	68,92	106,92	-	-	-
14.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	116,95	132	207	43,18	130,00	40,77(-)	-	-	-
15.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran)	137,00	8,8	15,54	23,41	10,00	44,60	-	-	-
16.	Prevalensi Stunting	118,97	14	14,61	95,64	14,00	95,64	-	-	-
17.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	114,29	18	20,80	84,44	13,00	40,00	-	-	-

Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

7.1 Usia Harapan Hidup

Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. UHH tahun 2022 adalah 68,13 tahun dan terjadi peningkatan sebesar 5,56 tahun atau menjadi 73,69 tahun pada tahun 2023.

Walau terjadi peningkatan kinerja UHH dari 68,13 tahun pada 2022 menjadi 73,69 tahun di 2023, namun jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,97 tahun maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Balangan berada di urutan ke 8 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan sehingga berda di urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut.

Sehubungan UHH Kabupaten Balangan masih dibawah capaian rata-rata Propinsi Kalimantan Selatan dan berada diperingkat ke 8 se Propinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Balangan perlu meningkatkan kinerjanya. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja UHH pada tahun 2024 antara lain:

1. Menurunkan AKB dan AKI antara lain:



- a. Kunjungan dokter spesialis anak dan kandungan ke seluruh puskesmas sebanyak 1 kali setahun untuk pemeriksaan ibu hamil dan Balita resiko tinggi.
  - b. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) untuk bidan sebanyak 60 orang untuk meningkatkan kompetensi bidan.
  - c. Pelatihan puskesmas mampu PONED untuk Puskesmas Halong.
  - d. Pelatihan penggunaan alat USG untuk dokter di puskesmas sebanyak 9 orang untuk peningkatan kompetensi dalam penggunaan alat USG untuk deteksi dini resiko tinggi dan tindak lanjutnya ditingkat pelayanan primer.
  - e. Pelatihan penanganan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia untuk bidan dalam rangka peningkatan kompetensi bidan.
  - f. Pelaksanaan kelas balita sebanyak 93 kelas dan kelas ibu hamil sebanyak 115 kelas untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terkait kesehatan ibu dan anak.
  - g. Optimalisasi pelayanan bayi baru lahir, bayi, balita dan ibu hamil serta ibu bersalin sesuai standar di RS, puskesmas dan jaringannya.
  - h. Kemitraan bidan dan paraji untuk 50 orang persalinan.
  - i. Pelaksanaan Scrining Hipoterial Kongenital (SHK) pada seluruh bayi-bayi baru lahir.
  - j. Optimalisasi sarana dan prasarana antara lain pengadaan oksigen konsentrat sebanyak 78 buah, ambubek sebanyak 50 buah, dopler 160 buah, bidan kit 18 buah, roda dua untuk bidan di desa dan koordinator sebanyak 45 buah, petugas imunisasi dan surveilans sebanyak 24 buah, dokter sebanyak 31 buah.
  - k. Pembangun dan rehabilitasi poskesdes sebanyak 30 buah.
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui :
- a. Pelaksanaan homecare diseluruh puskesmas.
  - b. Pelaksanaan posbindu sebanyak 132 posbindu.
  - c. Pelaksanaan posyandu Lansia diseluruh desa.
  - d. Optimalisasi pelayanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar di RS, puskesmas dan jaringannya.
  - e. Pembinaan untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor dan sekolah.
  - f. Optimalisasi Germas di SKPD dan desa.
  - g. Optimalisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS).
  - h. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk petugas kesehatan.
3. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk ibu hamil dan dan Balita
- b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan ibu hamil anemia, balita gizi buruk dan kurang.
  - c. Optimalisasi sarana dan prasarana antara lain pengadaan antropometri sebanyak 12 buah untuk seluruh puskesmas, pengadaan roda dua untuk petugas gizi sebanyak 12 buah.
  - d. Pelayanan kesehatan Balita, ibu hamil, dan Pasangan Usia Subur (PUS) di seluruh posyandu.

## 7.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)

Indikator kinerja ini digunakan untuk Angka Kematian Ibu. AKI atau Maternal Mortality Rate (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu, Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab itu apapun yang berkaitan dengan atau diperberatnya oleh kehamilan atau pengelolaannya bukan akibat kecelakaan.

Kematian ibu banyak penyebabnya, antara lain penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung karena di sebabkan perdarahan, eklamsi, infeksi, partus macet, komplikasi keguguran, sedangkan penyebab tidak langsung karena tingkat pendidikan ibu rendah, tingkat sosial ekonomi rendah, kedudukan dan peranan wanita



tidak mendukung, sosial budaya tidak mendukung, status gizi ibu hamil rendah, kondisi geografis, transportasi tidak mendukung sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rendah, kualitas dan efektif pelayanan kesehatan ibu belum memadai sistem rujukan kesehatan maternal belum mantap, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

AKI di tahun 2023 sebesar 207/100.000 KH dengan capaian kinerja 43,18% dan dikategorikan kinerja sangat rendah. Kematian ibu tahun 2023 di Kabupaten Balangan jika di absolutkan berjumlah 4 orang yang di sebabkan oleh 2 orang puskesmas Halong 1 orang di sebabkan Post SC cito Impending Ekalmasia H6 + Hipertyroid on terapi dan 1 orang di sebabkan Salpingectomy + ALo + Severe sepsis + Iskemik Hepatitis. 1 orang puskesmas Lampihong dengan penyebab Post Apendectomy + realease adhion a.i peritoninis, generalisate e.c perforasi appendix POD 6 + post partum IUFD H0, 1 dari puskesmas Paringin Dengan penyebab post SC Cito a.i impending eklasmasia rawatan H1 + Hipoalbuminemia.

AKI di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Tahun 2022 AKI sebesar 147/100.000 KH KH, sedangkan pada tahun 2023 AKI sebesar 247/100.000 KH. AKI di tahun 2023 sebesar 207/100.000 KH dengan capaian kinerja 43,18% dan dikategorikan kinerja sangat rendah.

AKI di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target masih jauh dari realisasi yang di dapat tahun 2023 yaitu 207/100.000,- KH. Dan target akhir RPJMD 130/100.000 KH masih perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut karena banyak faktor yang menyebabkan kematian ibu yaitu 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda,terlalu sering dan terlalu banyak) gizi, penyakit menular, penyakit lain, sehingga menyebabkan komplikasi maternal dan faktor detrminan, Pendidikan, ekonomi, geografi, gender bidaya, keterlambatan merujuk, terlambat dalam pertolongan yang adekuat (tenaga, sarana, obat, manajerial).

Penyebab kematian ibu di kabupaten Balangan tahun 2023 di lihat dari hasil pengakajian kasus maternal adalah masih kurangnya skrining saat awal kehamilan dan masih rendah nya deteksi risiko pada saat hamil baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat, masih kurang nya kesadaran masyarakat untuk mengerti dan memahami deteksi risiko ibu hamil serta tindak lanjut setelah mengetahui bahwa kehamilannya berisiko, belum semua masyarakat atau ibu hamil ketika di nyatakan tidak layak hamil tapi tetap hamil. Kalau di lihat dari capaian propinsi 179/100.000 KH, atau 111 orang kematian ibu, kabupaten Balangan masih di bawah capaian propinsi, kalau di bandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara absolut sama 8 orang atau kabupaten Balangan masih rendah jika di bandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 225/100.000 KH, dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kematian 6 orang atau 197/100.000 KH, Kabupaten Balangan masih tinggi di banding Kabupaten Hulu Sungai Utara, kalau di bandingkan dengan Kabupaten Tabalong jumlah kematian 4 orang dengan prevalensi 86/100.000 KH, Kabupaten Balangan masih tinggi Kabupaten Tabalong.

Cakupan deteksi risiko ibu hamil tahun 2023 yaitu 696 orang, terdiri dari cakupan risiko masyarakat 321 orang dan cakupan risiko nakes 375 orang, komplikasi maternal 726 orang, salah satu penyebab dari kematian ibu di kabupaten Balangan adalah skrining deteksi risiko komplikasi maternal oleh bidan yang masih kurang, untuk itu di tahun 2023 adanya kegiatan kunjungan dokter spesialis Obygn ke 12 puskesmas untuk mendeteksi risiko maternal di tingkat puskesmas, sehingga ibu hamil berisiko lebih terdeteksi sedini mungkin.

Permasalahan masih kurangnya kelengkapan dari sarana dan parasarana yang di miliki bidan, dari data yang ada tahun 2023, pengadaan sarana dan prasarana bidan kit 12 buah, Oxygen Consentrat 46 buah UGG 3 unit ada penambahan poskesdes atau sebanyak 9 buah polindes jadi total jumlah poskesdes atau polindes 143 buah sedang jumlah desa 154 desa dan 3 kelurahan, dengan adanya poskesdes akan memudahkan akses ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan apabila ada risiko tinggi maka sedini mungkin dapat diintervensi, semua desa sudah ada bidan di desa, tahun 2022 pengadaan kendaraan bermotor untuk bidan di desa 91 buah dan tahun 2023 adalah 26 buah sehingga mempermudah bidan untuk jemput bola ke sasaran.

Masih banyaknya ibu hamil yang anemia yaitu 469 orang dan ibu hamil KEK 269 orang ibu hamil merupakan kehamilan yang berisiko terjadinya perdarahan saat persalinan dan kekurangan Gizi Kronis, untuk menaggulangi dengan pemberian biskuit untuk semua ibu hamil KEK dan PMT susu ibu hamil lokal untuk 322 ibu hamil KEK dan Anemia.



Masih adanya persalinan yang ditolong oleh paraji/dukun kampung tahun 2023 berjumlah 6 orang ini terjadi di daerah puskesmas Tebing Tinggi dan Uren, karena masih kuatnya sosial budaya masyarakat dapat memicu kematian ibu antara lain komplikasi persalinan seperti perdarahan sehingga diterbitkan PERDA KIBBLA (Kesehatan Ibu bayi dan Balita) pada tahun 2017 dan berlanjut ke tahun 2023 sebagai dasar kemitraan bidan dan dukun bayi dimana di dalam pasal 31 berbunyi tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan dan ayat selanjutnya berbunyi tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk non medis lainnya kepada bayi baru lahir sehingga kematian ibu karena keterlambatan penanganan persalinan dengan komplikasi dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi kematian ibu.

Bidan sebagai ujung tombak dan garda terdepan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak pengetahuan dan keterampilannya harus selalu di asah dalam mendeteksi kasus risiko dan pertolongan kegawatadaruratan persalinan tahun 2023 ada 45 orang yang di latih APN (Asuhan Persalinan Normal) di P2KS RS Ulin Banjarmasin .

Berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tidak hanya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana namun jua perlu meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas serta risiko tinggi ibu hamil dan bersalin karena di Kabupaten Balangan tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan dan tidak semua persalinan di fasilitas kesehatan karena kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas. Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga melalui seksi kesehatan keluarga dan gizi yang dengan puskesmas tahun 2022 melaksanakan kelas ibu hamil sebanyak 115 kelas, ini di danai oleh DAK dan dana Desa. Walaupun sudah ada kelas ibu hamil di Kabupaten Balangan namun tidak dapat maksimal meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarganya karena kelas ibu hamil yang dibentuk belum semua sasaran ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil.

Pada tahun 2023 semua puskesmas sudah tersedia USG yang di peruntukan untuk skrining risiko pada ibu hamil. Upaya lain yang dilakukan untuk penurunan AKI Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui APBD II yang diakomodir oleh Dinas Kesehatan, PPKB membayar premi asuransi kesehatan ke BPJS antara lain jaminan tersebut dapat digunakan untuk ibu hamil, ibu bersalin dan nifas agar memeriksakan dirinya dan bersalin ke fasilitas kesehatan, sehingga tidak ada lagi ibu yang tidak memeriksakan dirinya karena alasan keterbatasan finansial.

Mengadakan pengkajian kasus-kasus kematian ibu mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten dengan tim manajemen, pengkaji, dan tim komunitas pelayanan SPOG juga merupakan upaya untuk menurunkan kematian ibu oleh seksi kesehatan keluarga dan gizi, karena dengan adanya pengkajian kasus *Audit Maternal Perinatal* (AMP) dapat dimanfaatkan untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian ataupun *morbiditas* yang berakar pada pasien dan keluarga, petugas kesehatan manajemen pelayanan serta kebijakan pelayanan. Melalui kegiatan ini diharapkan para pengelola program KIA di kabupaten kota dan pemberi pelayanan di tingkat dasar (puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat rujukan dapat menetapkan prioritas untuk mengatasi faktor yang berpengaruh tersebut.

*Sajikan bagan pohon masalah, masalah kompetensi bidan, perlengkapan yang kurang, Kenapa terjadi penurunan AKI?*

### 7.3 Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran)

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur AKB (Angka Kematian Bayi). AKB banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi ada 2 (dua) macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen biasa disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen



atau kematian bayi post natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

AKB di Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 15,54/1.000 KH atau sebanyak 30 orang bayi. Kasus tertinggi AKB di kabupaten Balangan dengan di dominasi kasus BBLR yaitu ber jumlah 12 orang, Asfiksia 6, Diare 6 orang, sepsis 2 orang kelainan bawaan 1 orang, lain -lain 3 orang. Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator AKB tersebut adalah sebesar 23,42% dan target realisasi sebesar 8,8/1.000 KH.

AKB di tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, tahun 2022 8,8/1000 KH atau 18 orang dan tahun 2023 adalah 15,54/1000 KH atau sebanyak 30 orang, banyak faktor yang menyebabkan kematian bayi atau kematian lebih banyak pada saat neonatal yaitu 21 orang dan kematian neonatal masih erat kaitannya dengan kondisi ibu saat hamil, faktor penyebab kematian bayi yaitu frekwensi hamil, jarak hamil, Anemia dan KEK, cakupan dan kualitas ANC, infeksi dll. Dari 30 orang kematian bayi 25 kematian terjadi di rumah sakit 4 orang terjadi di rumah 1 orang di perjalanan menuju RS, Kalau di lihat dari capaian propinsi Kalimantan Selatan, jumlah kematian bayi 819 orang atau 13,2/1000 KH, kematian bayi, Kabupaten Balangan di bawah capaian capaian propinsi, kalau di bandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara absolut sama 71 orang atau 20,0/1000 KH, dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah kematian 71 orang atau 23,3/1000 KH, Kabupaten Balangan masih diatas di 2 kabupaten tersebut.

Kalau di bandingkan dengan Kabupaten Tabalong jumlah kematian 45 orang dengan prevalensi 13,01/1000 KH, Kabupaten Balangan di bawah Kabupaten Tabalong.

Kematian bayi ber jumlah 30 orang sebagian besar disebabkan oleh kasus BBLR tidak semua murni karena kasus dengan BBLR, melainkan disertai dari faktor ibu, komplikasi maternal, kekurangan gizi (KEK) atau pun disebabkan karena anemia dan juga disebabkan faktor dari ibu sendiri misalnya infeksi. Dengan adanya faktor tersebut sehingga seksi kesehatan keluarga dan Gizi masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) semua ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan biskuit dan 269 ibu hamil KEK mendapat PMT bahan pangan lokal, untuk ibu hamil yang mengalami KEK dengan harapan tidak melahirkan BBLR yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian bayi di Kabupaten Balangan, kematian bayi yang juga cukup besar di sebabkan oleh diare.

Ruang Perinatologi RSUD yang masih terbatas dalam menanganani bayi dengan komplikasi, untuk mengurangi kematian karena tanpa didukung sarana prasarana yang lengkap maka penanganan bayi komplikasi tidak dapat ditangani dengan komprehensif dan pada akhirnya kematian tidak dapat dicegah.

Faktor kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan, persalinan maupun pola asuh bayi selain itu perlunya peningkatkan pengetahuan ibu tentang tanda bahaya kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, juga memberikan kontribusi terhadap kematian bayi sehingga seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan berkoordinasi dengan puskesmas mengadakan kelas ibu hamil 115 kelas dan kelas ibu bayi dan balita 93 kelas. Dengan adanya kelas ibu hamil dan balita tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan untuk ibu hamil dan keluarga dalam merawat kehamilannya, persiapan persalinan serta ibu dan keluarga juga tahun bagaimana pola asuh yang benar untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya.

Peningkatan pengetahuan bidan serta ibu hamil dan keluarga dalam mengetahui komplikasi ibu hamil karena komplikasi pada ibu hamil sebagai salah satu penyebab kematian bayi terutama di masa neonatal, sehingga perlu adanya update ilmu dan keterampilan karena bidan sebagai garda terdepan dalam menangani kasus-kasus komplikasi maternal dengan mengadakan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) untuk bidan di Kabupaten Balangan sebanyak 45 orang, orientasi penanganann bayi berat badan lahir rendah 24 orang, orientasi asfiksia 24 orang, monitoring MTBS terintegrasi Gizi buruk ke 12 puskesmas, peningkatan kapasitas kader dengan guru PAUD, E kohort, tahun 2023 adanya kerja sama dengan CSR Adaro, untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan (Dokter, Petugas Gizi dan Bidan) dalam penanganan kasus BBLR sebanyak 175 orang.

Selain upaya diatas untuk menurunkan AKB juga melaksanakan kunjungan dokter spesialis Anak di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Lampihong, Tebing Tinggi, Pirsus, Halong, Juai Batumandi, Awayan, guna



mendeteksi komplikasi neonatal sedini mungkin, pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi baik di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sehingga dapat mencegah kematian bayi akibat penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemberian vitamin A dosis tinggi sesuai usia untuk usia dibawah 59 bulan setiap bulan Februari dan Agustus pada tahun berjalan juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mencegah rabun senja bahkan kebutaan akibat kekurangan vitamin A dan pemberian pelayanan kepada balita di posyandu balita untuk memantau tumbuh kembang balita serta pelayanan kesehatan balita.

**7.4 Prevalensi Stunting**

Kejadian Baita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang di hadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur penurunan angka kejadian stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik- pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) balita pendek dan sangat pendek tahun 2023 sebesar 14,61 %, dari 9.236 balita yang di entry di aplikasi E-PPGBM terdapat 1.349 balita yang pendek dan sangat pendek, hal ini memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat kronis.

Stunting Tingkat Kecamatan Kabupaten Balangan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN BALITA 2022	DATA TAHUN 2022					JUMLAH SASARAN BALITA 2023	DATA TAHUN 2023					STATUS STUNTING	
			SGT PEN DEK	PENDEK	NORMAL	TINGGI	STUNTING		SGT PEN DEK	PEN DEK	NORMAL	TINGGI	STUNTING	%	Status
1	AWAYAN	1110	20	101	989	0	10,90%	1069	39	86	944	0	11,69%	0,79%	Naik
2	BATUMANDI	1321	38	94	1184	2	9,99%	1309	46	93	1169	1	10,62%	0,63%	Naik
3	HALONG	1382	42	157	1170	9	14,40%	1374	52	156	1156	10	15,14%	0,74%	Naik
4	JUAI	1264	40	190	1034	0	18,20%	1219	59	162	997	1	18,13%	-0,07%	Turun
5	PARINGIN	996	20	63	899	14	8,33%	1167	21	75	1066	5	8,23%	-0,11%	Turun
6	PARINGIN SELATAN	1028	45	134	848	0	17,41%	1192	44	154	994	0	16,61%	-0,80%	Turun
7	LAMPIHONG	1356	76	213	1040	3	21,31%	1374	75	200	1098	1	20,01%	-1,30%	Turun
8	TEBING TINGGI	550	28	82	440	0	20,00%	532	14	73	445	0	16,35%	-3,65%	Turun
TOTAL KABUPATEN		9007	309	1034	7604	28	14,91%	9236	350	999	7869	18	14,61%	-0,30%	Turun



Walaupun capaian ini masih jauh dari target Rpjmd dan Rpjmn yang menargetkan prevalensi stunting adalah 14%. Intervensi gizi spesifik untuk penurunan stunting oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan hanyalah sebesar 30%, yaitu intervensi khusus dengan sasaran remaja putri, Pus, ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sedangkan 70% adalah sektor lain yang terkait.

Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1000 HPK dari anak Balita. Intervensi anak stunting memerlukan konvergensi program / intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha serta masyarakat. Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Balangan sebesar 42.7% dan pada tahun 2018 berdasarkan hasil (Riskesdas) Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Balangan sebesar 36.22%. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 prevalensi stunting 32,3% dan pada tahun 2022 hasil SSGI 29,8% ada penurunan sekitar 3%, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan 55 desa lokus untuk intervensi spesifik dan sensitive dalam penanganan stunting pada desa tersebut. Berdasarkan E-PPGBM Data Tarik 15 September 2023 perbandingan dua tahun terakhir capaian stunting Kabupaten Balangan tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang sebesar 0,3% di mana tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 14,9% dan tahun 2023 sebesar 14,61%.

Penyebab stunting antara lain dari faktor gizi yaitu rendahnya asupan makanan bergizi pada anak, kurangnya keragaman menu makanan, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak, sedangkan dari faktor ibu yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan sehingga ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK) dan Anemia yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan Antenatal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), masih kurangnya akses kepada makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

Penyebab dari stunting salah satunya adalah bayi berat badan lahir rendah, total BBLR tahun 2023 yaitu 218 orang ini lebih banyak dari tahun 2022 yaitu 178 orang. Pemberian PMT susu untuk bayi BBLR adalah sebanyak 31 paket sesuai rekomendasi dokter spesialis anak.

Selain hal yang disebutkan diatas sampai dengan saat ini faktor determinan yang masih menjadi perhatian dalam perbaikan status gizi (stunting) pola asuh, untuk data Kabupaten, JKN 92,7%, ketersediaan air bersih 97,4%, ketersediaan jamban 95,31% sedangkan riwayat saat hamil atau ibu yang pada saat hamil KEK ada 14,37% dan adanya anak stunting dengan penyakit penyerta 3,39 %. Adapun faktor determinan yang terbesar adalah ada pada kebiasaan merokok di rumah tangga yaitu sebesar 60,54 %.

Di Kabupaten Balangan yang menjadi kelompok berisiko adalah wilayah daerah pegunungan, masyarakat adat terpencil, status ekonomi yang rendah dan status pendidikan rata-rata setingkat SLTP (berdasarkan data BPS rata-rata lama sekolah 7,85). Kemungkinan kawin muda tinggi, ibu hamil KEK dan ibu hamil Anemia, ibu hamil dengan komplikasi bayi bayi BBLR akan menjadikan balita stunting kalau tidak di intervensi sedini mungkin.

Pada Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari bulan Januari sampai September 2023 sudah tercatat oleh Tim Pendamping Keluarga yang melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting yaitu Calon Pengantin yang mendapatkan pendampingan sejumlah 229 orang, ibu hamil 913 orang, ibu bersalin 688 orang dan Baduta 1.588 orang.

Calon Pengantin terutama perempuan yang akan menjadi calon ibu tentu akan menjadi fokus dalam pemberian tablet tambah darah dan edukasi gizi bagi calon pengantin. Untuk calon pengantin laki-laki, juga menjadi perhatian sendiri yaitu perilaku merokok. Merokok dan asap rokok menjadi momok bagi resiko terjadi stunting baik bagi ibu hamil maupun baduta nantinya. Calon pengantin yang didampingi 28,38% terpapar asap rokok atau perokok aktif, Calon Pengantin dengan KEK 22,70% dan Anemia 15,28%.

Pendampingan pada ibu hamil berisiko dimana ibu hamil usia diatas 35 tahun 11,93%, hamil pada usia 15-19 tahun 10.29%. Menilik kepada Audit Kasus Stunting dengan sasaran ibu hamil di lokus stunting yaitu Tundakan, Bungin, Lingsir, Inan, Bata dan Telaga Purun, hampir 90% ibu hamil yang diaudit terpapar asap rokok. Hal ini juga menjadi perhatian karena efek asap rokok kepada ibu hamil dan baduta tentu berpengaruh kepada proses



pertumbuhan dan perkembangan anak dimana kita ketahui waktu crucial pertumbuhan dan perkembangan anak pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Pendampingan pada ibu bersalin dimana bersalin dengan seksio sesaria 17.58% dan komplikasi nifas 5.95%. Tim Pendamping Keluarga memastikan ibu bersalin melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini, tetap memberikan ASI Eksklusif dan menggunakan KB Pascasalin diutamakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang agar jarak kelahiran tidak terlalu dekat.

Pendampingan pada Baduta 61.52% tidak ASI Eksklusif, baduta sangat pendek 10.88% dan baduta pendek 10.51%. Baduta yang tidak ASI Eksklusif menjadi perhatian dalam pelaksanaan pendampingan karena pentingnya ASI Eksklusif dalam mendukung asupan gizi optimal dan meningkatkan imunitas bagi bayi usia 0-6 bulan. Paparan Asap rokok juga menjadi perhatian dalam pendampingan jika dilihat dari Audit Kasus Stunting yang sudah dilaksanakan, semua baduta yang mejadi sasaran audit juga terpapar asap rokok sehingga rentan menderita ISPA sehingga berpengaruh pada nafsu makan dan asupan ASI nya.

Intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting yang merupakan penyebab tidak langsung terjadinya stunting dengan mengatasi kekurangan zat besi pada ibu hamil yang dapat menyebabkan anemia melalui pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama hamil sehingga nutrisi terhadap zat besi dapat terpenuhi, pemberian tablet tambah darah untuk 4.751 remaja putri atau sekitar 75,16% di Kabupaten Balangan, terus mendorong inisiasi menyusui dini dan pemberian asi eksklusif, mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 24 bulan, pemberian vitamin A dosis tinggi pada bulan Februari dan Agustus yang bertujuan untuk mencegah rabun senja dan meningkatkan daya tahan tubuh anak sehingga tidak mudah sakit yang pada akhirnya secara tidak langsung karena anak sering sakit dapat menyebabkan kekurangan gizi.

Balita yang kekurangan asupan gizi seperti BGM (status gizi pada KMS berada dibawah garis merah) dapat jatuh kedalam status kekurangan gizi kronis (wasting) yang pada akhirnya sebagai pemicu menjadi stunting. Untuk mencegah balita BGM menjadi stunting maka melalui Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi berkoordinasi dengan puskesmas memberikan PMT bahan pangan local sebanyak 322 Balita dan 269 paket bahan pangan lokal untuk ibu hamil KEK, selain itu juga memberikan MP ASI berupa biskuit selama 90 hari yang mana biskuit tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan untuk seluruh balita wasting balita. Selain itu Dinas Kesehatan juga memberikan intervensi kepada orang balita yang mengalami buruk sebanyak 20 paket berupa susu dan paket balita gizi kurang / gizi buruk pasca perawatan di Rumah Sakit.

Intervensi dengan sasaran ibu hamil telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan KEK berubah statusnya menjadi tidak KEK lagi sehingga tidak melahirkan BBLR maupun premature yang kedepannya berpotensi stunting yaitu 283 paket bahan pangan lokal dan seluruh ibu hamil KEK mendapat biskuit, 294 paket untuk balita gizi kurang dan 31 paket untuk PMT bayi BBLR sesuai rekomendasi dokter spesialis Anak.

Kegiatan lain yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2022 yaitu, Surveilans kasus gizi kurang dan gizi buruk, dan orientasi tatalaksana Gizi Buruk untuk petugas gizi, bidan. Dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan BBLR ( Bayi Berat Badan Lahir Rendah)

Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi (miskin), kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak yang benar khususnya untuk asupan nutrisi terhadap anak, kesehatan lingkungan memberi andil terhadap kejadian stunting di Kabupaten Balangan.

Pemerintah Kabupaten Balangan sudah berkomitmen untuk mengurangi stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/277/Kum tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023, Desa lokus stunting tahun 2024 di tetapkan 55 desa lokus, pada tahun 2022 terbentuk Tim Kelompok kerja Balangan Lawan Stunting yang melibatkan pihak 3 sesuai Keputusan Bupati Balangan No 188.45/207/Kum/Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Balangan No 188.45/317/Kum/Tahun 2022 tentang pembentukan POKJA Balanting (Balangan Lawan Stunting) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Adaro Group. Dalam upaya penurunan



stunting di Kabupaten Balangan, untuk mencegah dan penurunan stunting di kabupaten Balangan dengan daerah binaan 40 desa.

#### 7.5 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)

Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak adalah status umur saat hamil dan bersalin pada seorang ibu. Kehamilan dan persalinan pada usia muda merupakan kehamilan yang berisiko, diantaranya dapat mengakibatkan kematian ibu, kematian bayi/anak, dan kekurangan gizi pada bayi/anak.

Apabila kekurangan gizi berlangsung lama pada janin dan bayi sampai dengan usia anak dua tahun, maka akan terjadi stunting. Indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur muda ini dapat dilihat melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun. Pada tahun 2022, ASFR 15-19 tahun di Kabupaten Balangan 18 per 1000 penduduk perempuan.

Jumlah pernikahan usia muda sedikit tapi yang hamil usia muda banyak seperti di Kecamatan Halong yang tercatat di elsimil untuk catin usia 15-19th 0 tetapi jumlah ibu hamil yang didampingi sejumlah 61 orang. Beberapa hasil audit stunting yang memang sarannya usia 15-19th itu sudah hamil pertama bahkan kedua. Disini lebih banyak faktor ekonomi dan putus sekolah.

Terdapat hubungan positif (hubungan langsung) antara ASFR 15-19 tahun dengan prevalensi stunting. Artinya apabila di suatu daerah memiliki ASFR 15-19 tahun yang tinggi maka daerah tersebut cenderung memiliki prevalensi stunting yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya, maka upaya penurunan stunting di daerah haruslah dibarengi dengan upaya penurunan ASFR 15-19 tahun, diantaranya melalui program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) atau lebih dikenal Generasi Berencana.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
1	<b>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	91,25	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	125	94,51	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	<b>Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	62,98	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Rendah	
4	<b>Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	88,84	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
5	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	98,93	88,67	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber Data E Movev Bappedalitbang Kab. Balangan 2023, data diolah



**8. Sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi**

Tabel 3.26  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8  
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
18.	Nilai SAKIP	95,23	72,40 (BB)	70,17	96,92	78,20 (BB)	89,73	67,48 (B) (Tabalong)	81,21 (A)	-
19.	Opini BPK	100,00	WTP	WTP	100	WTP	100	-	-	-
20.	Nilai EKPPD	99,36	3,5900	2,8600	79,67	3,600	79,44	3,206 (Tabalong)	3,4653	-
21.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	104,00	3,51 (B)	4,01(A-)	114	4,91(A)	72,51	4,25 (Tabalong)	4,03	-
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,18	85	85,07	100,08	85	100,08	84,47 (Tabalong)	88,96	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

**8.6 Nilai SAKIP**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Balangan tahun 2023 berdasarkan Surat Nomor : B/494/AA.05/2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 tanggal 27 Nopember 2023 adalah 70,17 (Kategori BB). Hasil capaian realisasi target nilai SAKIP 70,17 ini memang belum mencapai target nilai SAKIP yang diperjanjikan yaitu 72,40 (Kategori BB), akan tetapi hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 96,92% dibandingkan dengan hasil evaluasi nilai SAKIP tahun 2022 yaitu 67,04 (Kategori B) dengan capaian sebesar 95,23% mengalami kenaikan capaian sebesar 1,69%. Dan telah memenuhi kategori penilaian (BB).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa nilai SAKIP Balangan yakni 70,17 dengan predikat BB bernilai sangat baik dimana Pemda Balangan sudah mengimplementasikan SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,16	23,19
b. Pengukuran Kinerja	30	19,35	20,21
c. Pelaporan Kinerja	15	10,73	10,99
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,80	15,78
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>67,04</b>	<b>70,17</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>BB</b>

Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah dengan melakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi



ke Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Kementerian PANRB sebagaimana secara rinci terjabarkan pada tabulasi Bab IV huruf C.

### 8.7 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2023, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini ini adalah yang ke-10 (sepuluh) kali secara berturut turut dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

- 1) Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dengan adanya rekonsiliasi baik itu di internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban untuk komponen belanja dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk komponen Aset serta Bidang Penagihan dan Pelaporan untuk komponen pendapatan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 2) Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sesungguhnya.
- 3) Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat pada peraturan administrasi perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat dieliminasi.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik.
- 5) Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Faktor hambatan utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

1. Faktor pertama belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya.
2. Faktor kedua adalah masih kurangnya tenaga dibidang keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai.
3. Faktor ketiga adalah kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan, hal ini tergambar Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal.

Dalam mempertahankan capaian dan solusi dalam mengatasi hambatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terus-menerus melakukan upaya sebagai berikut:



1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan, dan sebagainya), juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
3. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi FMIS, SIPD-RI, Sipanda BMD Kabupaten Balangan, Sicaper (Sistem Pencatatan Persediaan), Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online.
4. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah).
5. Menyusun kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
6. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

### 8.8 Nilai EKPPD

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2022 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 Kabupaten Balangan memperoleh nilai 2,86 dengan kategori sedang dan menduduki peringkat 3 (tiga) se Provinsi Kalimantan Selatan dan peringkat 48 (empat puluh delapan) secara Nasional, kriteria tersebut didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Nilai tersebut di peroleh dari indikator kinerja kunci *outcome* seperti indikator makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Dari beberapa urusan masih terdapat kekurangan yang berakibat tidak maksimalnya nilai EKPPD, diantaranya :

3. Kendala yang sering dihadapi dalam penilaian EKPPD adalah ketidaksesuaian data dukung yang disampaikan dengan nilai capaian kinerja atau tidak adanya data dukung yang menguatkan nilai capaian kinerja pelaksanaan urusan, sehingga sebagian besar SKPD hanya menunjukkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa indikator kinerja kunci (*outcome*) pada EKPPD tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Yang harus diperhatikan, surat keterangan ini cukup berpengaruh dalam penilaian EKPPD, karena nilai yang didapat dengan data dukung hanya surat keterangan tidak dapat maksimal.
4. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, terutama terkait anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Adanya perbedaan yang jauh jika dilihat dari target dan realisasi nilai EKPPD di karenakan perubahan aturan, dimana sebelumnya penilaian EKPPD di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di ganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 8.9 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan



pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui kuesioner yang dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik dan aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik**

Range Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	D	Buruk
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 - 4,00	B	Baik
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Adapun locus penilaian pelayanan publik telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PAN RB yakni Kecamatan, Dinas Sosial dan RSUD.

Tabulasi Data Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik melalui PEKPP Kementerian PAN RB antar Kabupaten / Kota se Kalsel adalah sebagai berikut:

NO	Propinsi/Kabupaten/Kota	Kategori	Nilai	Keterangan
1	Propinsi Kalsel	A-	4,03	
2	Kabupaten HST	A	4,52	
3	Kabupaten Tapin	A-	4,29	
4	Kota Banjarmasin	A-	4,27	
5	Kabupaten Tabalong	A-	4,25	
6	Kabupaten Tanah Laut	A-	4,10	
7	Kabupaten Balangan	A-	4,01	RSUD, Dinas Sosial dan Kecamatan Juai
8	Kabupaten Barito Kuala	B	3,88	
9	Kabupaten HSS	B-	3,67	
10	Kabupaten Banjar	B-	3,46	
11	Kota Banjarbaru	B-	3,23	
12	Kota Baru	B-	3,20	
13	Kabupaten Tanah Bumbu	B-	3,20	
14	Kabupaten HSU	B-	3,07	

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat peringkat 112 dari 514 Kabupaten/Kota dan rangking 6 dari 13 Kabupaten/Kota se-Propinsi Kalimantan Selatan.

Disamping itu, Ombudsman juga melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Balangan. Dimana kita ketahui bahwa Ombudsman adalah Lembaga Negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di



pusat maupun di daerah, termasuk BUMN, BUMD dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

**Hasil Penilaian Ombudsman untuk Seluruh Pemda se Kalimantan Selatan**



**HASIL PENILAIAN KEPATUHAN TAHUN 2023**  
**Kategori Pemerintah Daerah**

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Zona	Kategori
1	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95.07	Hijau	A
2	Pemerintah Kabupaten Banjar	90.96	Hijau	A
3	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	90.61	Hijau	A
4	Pemerintah Kabupaten Tapin	90.25	Hijau	A
5	Pemerintah Kabupaten Tabalong	90.05	Hijau	A
6	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	88.68	Hijau	A
7	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	88.62	Hijau	A
8	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	87.59	Hijau	B
9	Pemerintah Kabupaten Balangan	87.23	Hijau	B
10	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	87.14	Hijau	B
11	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	71.66	Kuning	C

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik adalah

- Melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap SKPD pemangku pelayanan publik secara umum dan khususnya pada locus penilaian PEKPP.
- Melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD locus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping.
- Melakukan monitoring tindaklanjut pelayanan public melalui aplikasi elektronik kinerja organisasi atau e-Kino. Monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan.
- Rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait prioritas penganggaran SKPD locus dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.



8.10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

REKAP NILAI SKM SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

No	SKPD	2023		Tahun 2023
		Semester 1	Semester 2	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	89,34	89,20	89,27
a	Bagian Umum	90,51	92,36	91,44
b	Bagian Prokopim	86,32	89,40	87,86
c	Bagian Tata Pemerintahan	88,41	88,42	88,42
d	Bagian Kesejahteraan Rakyat	84,44	84,55	84,50
e	Bagian Organisasi	94,36	90,06	92,21
f	Bagian Hukum	95,22	88,46	91,84
g	Bagian Perekonomian & SDA	88,33	94,74	91,54
h	Bagian PBJ	88,84	92,48	90,66
i	Bagian Administrasi Pembangunan	87,62	82,30	84,96
2	Sekretariat DPRD	82,87	84,98	83,92
3	Inspektorat	87,79	99,00	93,40
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	82,69	85,06	83,88
5	Dinas Kesehatan, PPKB	88,32	83,92	86,12
6	DPUPRPerkim	82,58	82,91	82,75
7	Satpol PP	81,63	81,91	81,77
8	Dinsos, P3A, Pemdes	82,71	86,83	84,77
9	Dinas Pertanahan & LH	76,84	80,44	78,64
10	Disdukcapil	Tahunan	86,95	86,95
11	Dinas Perhubungan	84,25	84,75	84,50
12	Diskominfo, Statistik & Persandian	93,27	89,34	91,31
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan	84,05	88,37	86,21
14	DPMPTSPTTK	Tahunan	92,25	92,25
15	Disporapar	84,08	86,90	85,49
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak melaporkan	82,66	82,66
17	Dinas Ketapang Pertanian & Perikanan	87,75	85,75	86,75
18	Bappedalitbang	86,20	86,20	86,20
19	BPKPAD	84,39	84,07	84,23
20	BKPSDM	87,45	87,45	87,45
21	Bakesbangpol	84,70	87,73	86,21
22	BPBD	86,47	87,63	86,47
23	Kec. Paringin	83,46	86,78	85,12
24	Kec. Paringin Selatan	87,19	87,91	87,55
25	Kec. Lamingong	92,52	95,07	93,80
26	Kec. Batumandi	85,69	88,22	86,96
27	Kec. Awayan	87,66	83,81	85,74
28	Kec. Halong	87,89	83,81	85,85
29	Kec. Juai	87,51	87,73	87,62



30	Kec. Tebing Tinggi	88,23	82,01	<b>85,12</b>
31	RSUD	Tahunan	86,16	<b>86,16</b>
32	Puskesmas Awayan	77,49	79,46	<b>78,47</b>
33	Puskesmas Batumandi	83,70	83,03	<b>83,36</b>
34	Puskesmas Paringin	86,02	86,42	<b>86,22</b>
35	Puskesmas Parsel	84,50	88,72	<b>86,61</b>
36	Puskesmas Tebing Tinggi	87,63	85,11	<b>86,37</b>
37	Puskesmas Juai	84,16	84,26	<b>84,21</b>
38	Puskesmas Halong	84,84	84,16	<b>84,50</b>
39	Puskesmas Lokbatu	87,70	86,97	<b>87,34</b>
40	Puskesmas Tanah Habang	81,50	83,06	<b>82,28</b>
41	Puskesmas Uren	85,56	85,99	<b>85,77</b>
42	Puskesmas Pirsus	80,84	79,75	<b>80,30</b>
43	Puskesmas Lampihong	82,09	86,40	<b>84,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3323,56</b>	<b>3522,29</b>	<b>3422,93</b>
<b>NILAI IKM Kabupaten</b>		<b>83,63</b>	<b>86,50</b>	<b>85,07</b>

Nilai IKM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 85,07. Pada tahun 2023 ini SKM dilakukan oleh hampir seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Balangan baik UPP ataupun non UPP. Dari Tabel di atas terlihat masih ada beberapa SKPD/UPP yang menyelenggarakan Survey SKM bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan survey masih dilakukan dalam 1 Tahun sekali. Selain itu, ada satu SKPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak melaporkan capaian SKM semester 1. Sebagai bentuk evaluasi SKPD pelaku SKM harus melakukan input data kinerja dan data realisasi kinerja atas janji perbaikan layanan yang mereka lakukan melalui E-Kino (Aplikasi Kinerja Organisasi) yang memuat *feedback* hasil perbaikan janji layanan atas laporan IKM tahun sebelumnya dan janji perbaikan tersebut dilakukan pemantauan oleh Bagian Organisasi secara online.

Untuk melakukan peningkatan Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan beberapa kinerja yakni adanya beberapa kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009, adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area perubahan, adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada anggaran tahun 2023 ini telah dianggarkan pembangunan Mall Pelayanan Publik, adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis dan adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari ombudsman.

Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain adalah masih banyak sarana prasarana yang belum memadai pada SKPD UPP sesuai standar dalam IPP sehingga belum bisa memberikan pelayanan prima seperti tersedianya ruangan khusus pengaduan layanan, ruangan khusus laktasi, dan lain-lain, masih belum terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP), masih belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi perbaikan janji layanan sesuai indeks kepuasan masyarakat khususnya pada unsur layanan yang masih rendah, masih belum terlaksananya evaluasi internal SKPD atas SOP pelayanan publik masing-masing SKPD secara triwulan dan masih belum banyak SKPD yang memiliki inovasi yang kontinue dan direplikasi oleh unit pelayanan publik lainnya di Balangan. Akan tetapi dengan adanya gagasan Kepala Daerah dalam pemberian reward atas inovasi ASN baik dalam bentuk uang pembinaan ataupun piagam penghargaan akan memberikan efek positif untuk lebih meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat.



Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	91	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	132	94,46	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	95	97,41	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>4</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	107,07	94,36	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	90,5	62,82	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	90,01	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>7</b>	<b>Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	84,51	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>8</b>	<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	75	94,73	Efisien
	Predikat Kinerja		Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

## 9. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

Tabel 3.27  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9  
Menurunnya Angka Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
23.	Angka Kemiskinan	90,00	5-2-5,0	5,22	99,62	4,9-4,7	76,12	5,77 (Tabalong)	4,29	-
24.	Angka PPKS yang Tertangani	130	70,95	59,40	83,70	76,95	77,19	-	-	-

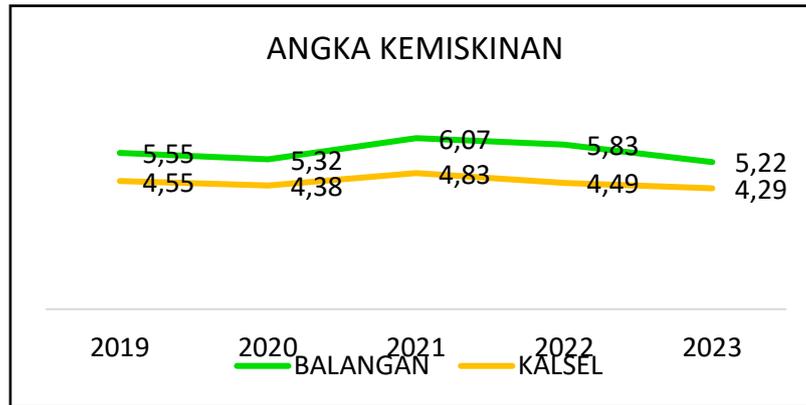
Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

### 9.1 Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2023 Penduduk Balangan dikatakan miskin jika pengeluaran per orang per bulan kurang dari Rp 508.157.



Gambar 3.11  
Angka Kemiskinan 2019-2023



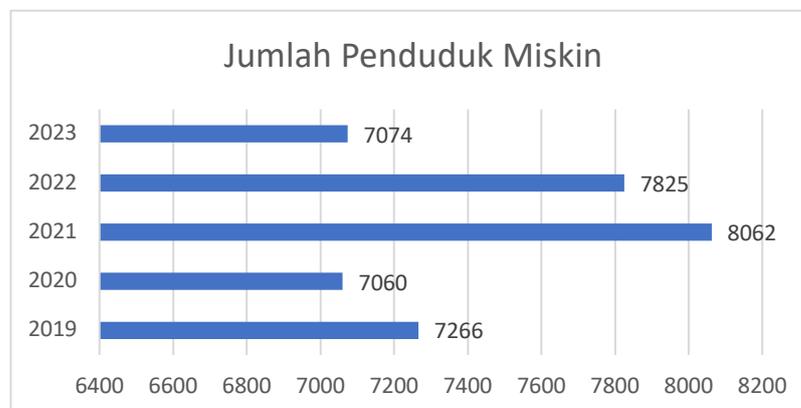
Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov Kal Sel, data diolah 2023

Angka kemiskinan Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin menurun positif (lebih baik) dari tahun ke tahun kecuali ditahun 2021 yang cukup meningkat tajam di angka 6,07% akibat pandemi covid-19 dan hingga tahun 2023 menurun menjadi 5,22% karena berbagai intervensi dari pemerintah daerah diantaranya bantuan sosial, bantuan permodalan usaha, pelatihan kerja, serta penciptaan peluang lapangan kerja baru. Meskipun mengalami penurunan, Kabupaten Balangan harus berusaha lebih maksimal untuk semakin menggenjot penurunan angka kemiskinan daerah karena Balangan masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalsel.

**Faktor penghambat :**

1. Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal.
2. Belum adanya media updating yang mumpuni untuk mengelola data kemiskinan.
3. Masih adanya kepala keluarga perempuan tanpa suami yang memerlukan pemberdayaan untuk ekonomi yang mandiri.
4. Masih adanya PPKS di Kabupaten Balangan sejumlah 34.256 PPKS.
5. Masih adanya rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 810 KK pada Desil 1.
6. Tingkat pendidikan yang masih rendah.
7. Masih adanya pernikahan dini yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah sehingga menjadi penyumbang angka kemiskinan.
8. Harga jual produk pertanian yang masih rendah.

Gambar 3.12  
Jumlah Penduduk Miskin 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023



Apabila dilihat berdasarkan grafik diatas, menunjukkan terdapat penurunan penduduk miskin dari 7.825 menjadi 7.074 jiwa. Tentu saja hal ini masih menjadi pekerjaan yang cukup serius bagi Kabupaten Balangan mengingat kemiskinan juga merupakan isu dari berbagai SKPD yang terlibat dan bertanggung jawab mengintervensinya agar tercipta akselerasi penurunan angka kemiskinan pada tahun kedepan. Sejatinya, intervensi kemiskinan dibutuhkan dengan pola yang holistic, integrative, tematik, dan spasial. Menilik kembali perkembangan angka kemiskinan daerah cukup baik terjadi dari tahun 2019 di angka 7266 orang menjadi 7074 orang di tahun 2023. Pada level Kalsel, Balangan masih cukup tinggi diperingkat 10 besar dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2023.

Tabel 3.28  
Peringkat Kemiskinan Kab/Kota Se Kalsel 2019-2023

PERINGKAT	KAB	PO
	KALIMANTAN SELATAN	4.29
1	BANJAR	2.44
2	TAPIN	3.19
3	TANAH LAUT	3.73
4	BANJARBARU	3.92
5	HSS	4.01
6	TANAH BUMBU	4.12
7	KOTABARU	4.32
8	BATOLA	4.60
9	BANJARMASIN	4.63
10	BALANGAN	5.22
11	TABALONG	5.77
12	HST	5.84
13	HSU	6.25

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Peringkat 10 besar memberikan gambaran dibutuhkannya akselerasi intervensi dengan mengedepankan pola kerja yang integratif, spasial atau memiliki data wilayah yang jelas, dan terdiri dari berbagai *stakeholder* yang terlibat contohnya bagaimana infrastuktur yang baik dapat membuka berbagai kesempatan masyarakat miskin untuk mengakses mulai dari kebutuhan dasar, membuka peluang meningkatkan perekonomian, hingga terbentuknya arus sosial ekonomi pada lingkungan pedesaan. Program Karya Bakti TNI yang bekerjasama dengan DinsosP3APMD pada tahun 2023 yaitu membangun ruas jalan Mamigang – Ruuk – Sawang diharapkan mampu memberi multi dampak pada wilayah yang dibangun. Keterlibatan Dinas Kesehatan, PPKB dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan dengan mendatangi kerumah-rumah (*homecare*), pelayanan ke daerah terpencil juga membantu dalam rangka meningkatkan layanan terhadap masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Tidak kalah penting, juga mengakui keberadaannya dengan mencatatkan dokumen kependudukannya, Disdukcatpil Balangan berupaya memberikan layanan jemput bola/*home service* bagi kelompok rawan dokumen kependudukan seperti ODGJ, lansia, dan masyarakat terpencil agar mereka juga terjangkau oleh layanan dasar dan bantuan sosial Pemerintah Daerah.



**Faktor pendorong :**

1. Adanya inovasi SIAP-PD (Sistem Informasi Perencanaan-Perangkat Daerah) yang mempermudah verifikasi dan validasi masyarakat miskin ekstrem dari SKPD yang mendekatkan layanan ke masyarakat.
2. Adanya pembukaan kelas non formal untuk menunjang pendidikan masyarakat utamanya masyarakat miskin.
3. Meluasnya cakupan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia dan keluarga miskin ekstrem.

**9.2 Angka PPKS yang Tertangani**

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 59,40% dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 58,95% sudah tercapai sebesar lebih dari 100%. Pada tahun 2022 jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 36.202 Orang dari 9 Jenis PPKS dibandingkan dengan populasi jumlah PPKS di Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebanyak 60.942 Orang sudah tercapai sebesar 59,40% PPKS yang tertangani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PKS terdiri dari 26 jenis dan salah satu kriterianya adalah miskin. Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar;
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air
- e. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah 12 jenis. Untuk Kabupaten Balangan dari 26 Jenis PPKS yang ditangani hanya 9 Jenis PPKS, dan hasil Pemuktahiran Data PPKS Tahun 2023 berjumlah 60.942 Orang disajikan pada data berikut:

**Jumlah PPKS dan Jumlah PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2023**

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PPKS	Jumlah PPKS yang Tertangani
1	Anak Terlantar	59 Orang	33 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	8 Orang	8 Orang
3	Lanjut Usia	3.701 Orang	284 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.129 Orang	39 Orang
5	Korban bencana Alam	21 Orang	21 Orang
6	Korban bencana Sosial	37 Orang	37 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	62 Orang	52 Orang
8	Fakir Miskin	54.289Orang	35.578 Orang
9	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang	150 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>60.942 Orang</b>	<b>36.202 Orang</b>

Penurunan dari jumlah PPKS tahun 2022 terhadap tahun 2023 sebanyak 7.392. Hal tersebut akan disajikan pada data berikut:

**Keberadaan PPKS di Kabupaten Balangan**

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah 2023	Jumlah 2022
1	Anak Terlantar	59 Orang	191 Orang
2	Anak yang berhadapan Dengan Hukum	8 Orang	18 Orang
3	Lanjut Usia	3.701 Orang	4.442 Orang
4	Penyandang Disabilitas	1.129 Orang	1.240 Orang
5	Korban bencana Alam	21Orang	22 Orang
6	Korban bencana Sosial	37 Orang	146 Orang
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	62 Orang	54 Orang



No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah 2023	Jumlah 2022
8	Fakir Miskin	54.289 Orang	60.585 Orang
9	Komunitas Adat Terpencil	1.636 Orang	1.636 Orang
	Jumlah	60.942 Orang	68.334 Orang

Upaya-upaya yang telah dilakukan:

- Memberikan pelayanan kepada anak terlantar. Anak terlantar merupakan anak yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh dan kebutuhan dasar dan pendidikannya yang tidak dapat terpenuhi. Jumlah anak terlantar di Kabupaten 59 orang bukan tanpa pengasuh namun hanya Pendidikan anak tersebut yang tidak diperhatikan oleh orangtuanya atau keluarganya. Tahun 2023 yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan sebanyak 33 Orang yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan Pelatihan Keterampilan dan mendapatkan pembinaan dan fasilitas pendampingan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPR SAR) Mulia Satria. Dalam memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang terlantar terutama dari belum terpenuhinya akses Pendidikan yang mereka peroleh, pihak dinas memberikan pelayanan dengan bekerjasama dengan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) agar bisa menjadi perpanjangan tangan pihak Kabupaten untuk dapat melakukan penelusuran terhadap anak terlantar yang terdapat di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Selain itu juga langkah yang dilakukan oleh pihak dinas dengan lahirnya inovasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk dapat melaporkan secara segera terkait pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada dilingkungan mereka tanpa perlu datang ke Dinas. Inovasi tersebut diberi nama Layar Sibalang atau Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan. Peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lainnya memberikan dukungan berupa uang saku dan pemberian laptop sebanyak 7 (tujuh) buah terhadap anak-anak yang mendapatkan akses Pendidikan dan tinggal di panti tersebut.
- Memberikan layanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur dibawah 18 Tahun dan tidak memiliki tempat tinggal yang memadai serta tidak ada orangtua atau pengasuh serta mempunyai permasalahan dengan hukum di Kabupaten Balangan berjumlah 8 Orang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memberikan pendampingan dan membantu untuk dapat menyelesaikan kasus hukum tersebut, yang mana berupa kasus pelecehan seksual, perilaku menyimpang, dan laka lantak. Dalam memberikan pendampingan tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh Pekerja Sosial (Sakti Peksos).
- Memberikan layanan terhadap Lanjut Usia Terlantar. Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk Kabupaten Balangan Lanjut Usia terlantar 3.701 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan berupa pemberian sembako kepada 18 orang dari pemerintah daerah, dan 29 Orang dari Kementerian Sosial dan total yang mendapatkan bantuan sembako sebanyak 47 orang. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah pemberian alat bantu lansia yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat lansia sebanyak 8 Buah dari Pemerintah Daerah dan 2 Buah dari Kementerian Sosial yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 10 orang. Selanjutnya pemberian sarana kamar kepada 4 Orang dari Pemerintah Daerah dan 223 Orang dari Kementerian Sosial. Sehingga lansia yang mendapatkan bantuan berupa sembako dan alat bantu lansia sebanyak 284 orang.
- Memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau norma. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten



Balangan yaitu 1.240 Orang, selanjutnya layanan yang diperoleh berupa bantuan alat disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk, dan tongkat netra yang mana 48 Buah berasal dari pemerintah daerah dan 10 Buah berasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya layanan yang diberikan berupa bantuan permakanan sebanyak 600 orang yang berasal dari pemerintah daerah. Sehingga penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan berupa bantuan alat bantu dan permakanan berjumlah 658 orang dengan capaian 53,06%.

- Memberikan layanan kepada korban bencana alam. Korban bencana alam orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia yang terjadi karena alam berupa banjir, longsor, dan puting beliung di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 21 orang, semuanya mendapatkan bantuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
- Memberikan layanan korban bencana sosial. Korban bencana sosial orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa sosial yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa terjadinya kebakaran di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 berjumlah 37 orang semuanya mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan ini didukung oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu Tagana Kabupaten Balangan.
- Memberikan layanan terhadap rawan sosial ekonomi seorang wanita yang karena fakta kemiskinannya, keterbelakangan dan kebodohnya mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya, di Kabupaten Balangan berjumlah 52 Orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 6 Orang mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti sosial bina wanita dan 46 orang menerima bantuan usaha ekonomi produktif sehingga jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang dibantu sebanyak 52 orang.
- Memberikan layanan terhadap fakir miskin. Fakir miskin merupakan orang atau keluarga sangat sengsara yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan jumlah fakir miskin di Kabupaten Balangan 54.289 Orang dan yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari Rehab Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu 15 Buah dari Pemerintah Daerah dan 4 Buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 7 Buah dari Pemerintah Daerah, 11.984 Jiwa mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, 21.868 Jiwa mendapatkan bantuan sembako/BPNT, selanjutnya usaha ekonomi produktif sebanyak 54 orang dari pemerintah daerah. Dan Bantuan Santunan Kematian kepada 919 orang, sehingga jumlah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 35.578 jiwa.
- Memberikan layanan kepada Komunitas adat terpencil (KAT). Komunitas Adat Terpencil merupakan orang atau keluarga menempati suatu wilayah yang sangat terpencil dan sangat sulit untuk mencapai bertempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lain cukup jauh bahkan harus menumpuh waktu yang sangat lama, di Kabupaten Balangan warga Komunitas Adat Terpencil terdapat di Kecamatan Halong yaitu Desa Marajai yang berjumlah sekitar 1.636 jiwa Dinas sosial Kabupaten Balangan memberikan pelayanan yaitu pendampingan terkait sosialisasi komunitas adat terpencil, memberikan pendampingan, pembelian peralatan untuk stimulan sehingga tersedianya sebuah lokasi dan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh komunitas adat terpencil tersebut kepada sebanyak 54 Kepala Keluarga dengan jumlah 150 Orang dengan capaian 9,17%



Dalam pencapaian kinerja terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu:

- Keterbatasan dari Sumber Daya Manusia yang membidangi kesejahteraan sosial sehingga kurang seimbang dengan banyaknya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya dalam ketersediaan data dimana lambatnya data yang terbaru tersedia
- Belum berjalan secara optimal dalam kerjasama yang dijalin dengan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan dalam hal keaktifan dari masing-masing PSKS.
- Kelembagaan yang bergabung dengan urusan lainnya sehingga masih belum optimalnya dalam pelaksanaan penanganan PPKS dikarenakan beban dinas yang besar tidak sebanding dengan dukungan secara materil baik berupa anggaran terutama dalam pemenuhan kegiatan memberikan layanan kepada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan.
- Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan layanan kedaruratan berupa kendaraan khusus rehabilitasi sosial dasar diluar panti serta
- Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam memberikan layanan dukungan psikososial setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana baik alam dan sosial.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait hambatan yang dihadapi yaitu:

- Mengoptimalkan sumber daya manusia yang telah tersedia dengan menyiapkan rencana kegiatan yang terjadwal agar memudahkan pelaksanaan kegiatan serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi bulanan.
- Menyiapkan surat keputusan kepala dinas terkait penunjukkan operator dalam penyediaan data yang terbaru dan menjalin komunikasi dengan pilar-pilar agar dapat menyampaikan data secara akurat.
- Memberikan pelatihan-pelatihan kepada potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) agar lebih baik dan mantap dalam memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Selain itu perlunya dilakukan evaluasi terkait keaktifan setiap triwulan.
- Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi baik lintas organisasi maupun dengan urusan yang ditangani baik dengan Provinsi dan Pusat agar dapat terjalinnya hubungan yang baik sehingga harapannya dapat memberikan dukungan baik secara moril dan materil sehingga pemberian pelayanan terhadap PPKS dapat ditingkatkan dan Indikator SPM yang belum dapat dilakukan secara optimal dapat menjadi perhatian dan pemenuhan SPM bidang sosial.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pemberdayaan Sosial</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	0	99,83	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	84,59	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	
<b>3</b>	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	87,8	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah



10. Sasaran Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif

Tabel 3.29  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10  
Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
25.	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	100	0	0	100	0	100	-	-	-

Sumber Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Capaian Indikator tujuan “Angka Konflik Sosial Bernuansa Sara” pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah 100%, hal ini dikarenakan tidak ada konflik yang terjadi sampai tahun 2023. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk mendukung tercapainya tujuan “meningkatkan rasa aman dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan”, yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat;
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Tidak terjadinya konflik sosial merupakan hasil upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk meredam konflik sosial dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan juga kerjasama yang baik antara seluruh *stakeholder* dan masyarakat.

Kerjasama yang baik dan komprehensif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan instansi terkait (Kodim, Polres, Pemda, Kejaksaan, BIN, BAIS, Kodam dan Organisasi kemasyarakatan) membawa Balangan pada suasana yang kondusif dan harmonis. Capaian kinerja ini diperoleh dari terlaksananya beberapa kebijakan, koordinasi dan monitoring serta pelaporan. Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan kegiatan pengawasan daerah rawan potensi konflik, koordinasi deteksi dini konflik sosial, fasilitas FKDM, dan juga fasilitas terhadap forkopimda serta peran aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di masyarakat.

Potensi konflik yang dipetakan pada tahun 2023 berjumlah 4 potensi konflik dan jumlah potensi konflik sendiri berjumlah 3 potensi konflik sosial yang terindikasi dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Potensi konflik tersebut tidak berkembang menjadi sebuah konflik karena beberapa faktor antara lain adanya kerjasama yang baik dan komprehensif dari Badan Kesbangpol. dan instansi terkait (Kodim, Polres, Pemda, Kejaksaan, BIN, BAIS, Kodam dan Organisasi kemasyarakatan), adanya Surat Keputusan Bupati tentang tentang Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Lintas Sektor yang berkaitan dengan pendeteksian dini terhadap konflik sosial, adanya peran serta masyarakat dalam hal lapor cepat terhadap permasalahan yang berpotensi konflik sosial.

Sedangkan persentase daerah rawan konflik yang terpetakan di targetkan 100%, dimana pada tahun 2023 ini terdapat kejadian yang berpotensi menjadi konflik sosial sebanyak 4 kasus di 8 Kecamatan, jumlah daerah potensi konflik yang dipetakan sepanjang tahun 2023 sebanyak 8 daerah



potensi konflik dan jumlah daerah potensi konflik sendiri berjumlah 8 Kecamatan dan 3 Kasus potensi konflik sosial yang terindikasi dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat semuanya sudah ditangani dan tidak menimbulkan konflik. Oleh sebab itu pemetaan potensi Konflik Sosial di Tahun 2024 dipetakan dengan Konsentrasi pada Cipta Kondisi damai dan Kondusif pada Pra, Pelaksanaan dan Pasca Pemilu dan Pilkada Serantah tahun 2024.

Adapun program-program yang menjadi pendukung dalam pencapaian indikator yaitu :

1. Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di daerah melalui koordinasi Tim Koordinasi Lintas sektoral, semua tim tersebut terdiri dari Pemerintah Kabupaten Balangan, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, BPN, Kemenag, BAIS, BIN dan Keterlibatan Masyarakat yang menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik di daerah dan melakukan penyelesaian terhadap potensi konflik tersebut.

2. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi Bersama Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Tim Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental.

3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan dan pengawasan ormas serta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ormas.

4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan kegiatan sosialisasi Narkotika, Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN dan koordinasi dengan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan.

Meskipun indikator ini dapat dikatakan berhasil akan tetapi karena mempertahankan justru lebih sulit ke depannya, oleh sebab itu Badan Kesbangpol. akan melakukan rencana aksi antara lain lebih meningkatkan lagi koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder*, merumuskan Tim Koordinasi Pendeteksian dan penanganan Potensi Konflik sampai Tingkat Desa, mengupayakan tersedianya anggaran fasilitasi deteksi dini dan penanganan potensi sampai tingkat desa dengan tetap patuh pada mekanisme penyusunan anggaran berbasis PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyelaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020. Disamping itu upaya yang harus dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah menjalankan Operasi Aplikasi SIKANDA sebagai Bank Data Kewaspadaan terhadap Potensi Konflik di wilayah Kabupaten Balangan, perlu di tingkatkan lagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial (KPRM PKS) sampai tingkat desa sebagai *early warning* terhadap kejadian/peristiwa yang akan menimbulkan potensi konflik, perlu ditingkatkan lagi kegiatan Timdu Penanganan Konflik Sosial PKS untuk kedepannya dalam hal lebih memfokuskan rencana aksinya sesuai dengan tupoksi instansinya masing-masing dan melaksanakan koordinasi lebih intens Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat sehingga terjalannya sinkronisasi update data Kewaspadaan/Deteksi Dini serta potensi-potensi konflik dan perumusan serta pengambilan Kebijakan yang terukur di tingkat Daerah baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi dan Pusat.

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian penanganan konflik di Kabupaten Balangan terbagi atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun uraian secara rinci adalah :

#### A. Faktor Internal

1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan secara aturan.
2. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/72/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023
3. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/70/Kum Tahun 2023 tentang Tim Terpadu



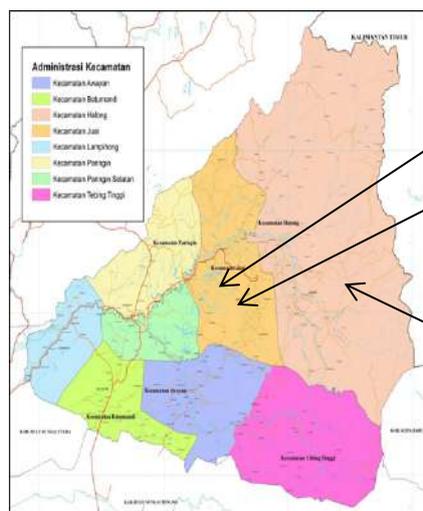
Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

4. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/71/Kum Tahun 2023 tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.
5. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/69/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023
6. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/73/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023
7. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/414/Kum Tahun 2023 tentang Keperguruan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Balangan Periode Tahun 2023-2024.
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/617/Kum Tahun 2023 tentang Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023
9. Adanya dukungan APBD Murni Tahun 2023 dan APBD Perubahan Tahun 2023.
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

B. Faktor Eksternal :

1. Terjalannya kerjasama yang baik dan berkesinambungan dari instansi vertikal sebagai mitra dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam koordinasinya untuk membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan potensi konflik yang akan ataupun yang sudah terjadi dalam tahun 2023.
2. Peran serta masyarakat dalam hal lapor cepat kepada Tim Koordinasi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Daerah terhadap permasalahan, baik yang menyangkut potensi-potensi permasalahan yang berkembang di lingkungannya sehingga akan menimbulkan konflik yang akan meluas.
3. Terjalannya koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan maupun penyampaian laporan hasil kegiatan tersebut.

**PEMETAAN POTENSI KONFLIK KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**



Potensi Konflik Politik/Hukum/Pemerintahan

1. Kasus Tumpang tindih kepemilikan tanah antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Jui
2. Kasus tuntutan pembebasan Lahan Sdr. Ambrah dengan PT. Adaro di wilayah Tutupan Kecamatan Jui
3. Cipta Kondisi Kondusifitas Pra, Pelaksanaan dan Pasca pemilu dan pilkada .

Potensi Konflik Sosial

Kasus Sengketa antar kelompok Masyarakat berkenaan pengelolaan/ pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan di Kec. Halong

Potensi Konflik Pertahanan/Keamanan

Pengamanan Logistik Pemilu dan Pilkada di Seluruh Kecamatan.



Nb :

- Kecamatan Tebing Tinggi
- Kecamatan Lampihong
- Kecamatan Halong
- Kecamatan Paringin Selatan
- Kecamatan Aweyan
- Kecamatan Paringin
- Kecamatan Batumandi
- Kecamatan Juai

**Penanganan Potensi Konflik di Kabupaten Balangan 2023**

No	Tipologi Konflik	Jumlah Potensi Konflik	Uraian	Jenis Penanganan	Keterangan
1.	Konflik Ekonomi	1	1 Kasus tuntutan pembebasan Lahan Sdr. Ambrah dengan PT. Adaro di wilayah Tutupan Kecamatan Juai	Rapat Koordinasi bertahap berkelanjutan dengan Instansi Terkait (Lintas Sektoral)	- Pemantauan Situasi - Lanjutan
2.	Konflik Politik / Hukum / Pemerintahan	1	1 Kasus Tumpang tindih kepemilikan tanah antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Juai	Rapat Koordinasi dan penggalan Informasi dengan Unsur di wilayah setempat	Pemantauan Situasi
3.	Konflik Sosial Budaya	1	1 Kasus Sengketa pengelolaan/ pemanfaatan Lahan di desa mamantang Kec. Halong	Rapat Koordinasi berkelanjutan, mediasi, dan operasi gabungan pengecekan langsung ke lokasi lahan	Pemantauan Situasi
4.	Konflik Pertahanan/Keamanan	1	Pengamanan Logistik Pemilu	Monitoring Pengamanan Logistik Pemilu	Pemantauan Situasi
5.	Konflik Keagamaan	Nihil			
	<b>Jumlah</b>	<b>4 kasus</b>			

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	97,64	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	95,24	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah



11. Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.30  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11  
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
26.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	-	-	-
27.	Indeks Resiko Bencana	109,81	126,16	115,21	108,68	139,89	117,64	-	-	-

Sumber Data Satpol PP dan BPBD Kabupaten Balangan Tahun 20223 data diolah

11.1 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja Indeks Ketenteraman dan ketertiban umum di ukur dengan banyaknya pengaduan kasus Pelanggaran yang di terima berbanding dengan kasus pelanggaran yang ditindak lanjuti, untuk tahun 2023 Indikator Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2022 (KONSTAN), di tahun 2023 jumlah Kasus Pelanggaran yang di tindaklanjuti sebesar 20 Kasus dari jumlah pengaduan pelanggaran yang di terima sebanyak 20 kasus dengan Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban umum sebanyak 100% dan untuk tahun 2022 terdapat 22 Kasus Pelanggaran yang di tindaklanjuti dari 22 kasus Pengaduan Pelanggran yang diterima dengan Capaian 100%, dengan demikian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2023 sebanyak 100% dari capaian tahun 2022 sebesar 100% dengan Capaian strategis sebesar 100% dengan Kategori Sangat Tinggi, dan Capaian 2023 sebesar 100% dari Target akhir RPJMD sebesar 100% dengan Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2023 terhadap Target Akhir RPJMD adalah 100% dengan Kategori “SANGAT TINGGI”.

Data Capaian Kinerja Satuan polisi Pamong Praja tahun 2023 untuk sasaran menurunnya pelanggaran Perda dengan Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti dari jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 20 Kasus dan Jumlah Pelanggaran Perda yang di tindak lanjuti sebanyak 20 kasus dengan Capaian 100% ,ini menggambarkan penekanan jumlah kasus pelanggaran perda dengan menindak lanjuti temuan dan aduan yang di terima supaya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran Perda.

Pencapaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2023 berdasarkan IKU yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyelesaian terhadap Perda dan Perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif serta melaksanakan rapat koordinasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dengan instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka penegakan Perda dan Perkada. Serta pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang rutin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang menyeluruh sampai kepada tingkat kecamatan yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, serta keberadaan Tim Reaksi Cepat Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) yang Siaga 1 x 24 Jam, serta Layanan Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terbuka 1 x 24 jam baik secara langsung ataupun secara online, di samping itu penerapan sosialisasi yang merata ke seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Balangan juga sangat berperan penting dalam menurunkan pelanggaran perda dan perkada yang ada di Kabupaten Balangan.

Namun demikian, disatu sisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan juga memiliki hambatan dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal, yaitu:

1. Kurangnya Sarana Prasarana Penunjang Ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kurangnya SDM Satpol PP yang bersertifikasi Kompetensi PPNS.
3. Masih rendahnya pengetahuan Anggota Satlinmas Desa dalam tehnik penanganan Trantibum.
4. Kurangnya sumber daya aparatur Satpol PP.



Pada tahun mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Beranjak dari analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan di atas, maka diperlukan upaya merumuskan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan ke depan, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat di dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan Sosialisasi tentang Perda dan Perkada secara menyeluruh
2. Meningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melalui pendidikan dan pelatihan formal; dan pembinaan fisik dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
3. Melakukan koordinasi secara intensif bersama instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mensinergikan Penegakan Perda dan Perkada dengan instansi terkait.
4. Memberdayakan Anggota Satlinmas desa dan Kelurahan sebagai tenaga bantu dalam menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang representatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### 11.2 Indeks Resiko Bencana

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sebesar 121% diperoleh dari target angka Indeks Risiko Bencana di 126,16 dan pada tahun 2023 Angka Indeks Risiko Bencana turun menjadi 115,21%, dikarenakan IRB dimaknai indikator Negatif dimana semakin besar realisasinya berarti semakin buruk kinerjanya dan sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya sehingga mencapai kriteria nilai sangat baik.

Program Penanggulangan Bencana :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dimana kegiatan ini berisikan Sosialisasi dan Informasi tentang Penanganan Kebencanaan bagi masyarakat yang berada di wilayah Rawan Bencana, seperti sosialisasi bahaya Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ataupun sosialisasi tentang mitigasi bencana alam lainnya.(SPM), dengan target indikator jumlah desa yang mendapat informasi rawan bencana sejumlah 80 Desa dengan realisasi capaian realisasi kinerja diatas 100% karena jumlah desa yang mendapat informasi dan edukasi mencapai 120 Desa
2. Kegiatan Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dimana kegiatan ini berisikan tentang peningkatan kapasitas TRC BPBD, bimbingan teknis Kebencanaan bagi Aparat Desa dan Perangkat Kecamatan, serta Penambahan Peralatan Evakuasi Bencana seperti pengadaan Mesin Alkon Pemadam Api untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Balangan dan Pengadaan Unit Mobil Damkar di tiap kecamatan sebagai prioritas kepala Daerah, Dengan target indikator prosentase Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan dengan tingkat capaian 100%
3. Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kegiatan ini berisikan penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana seperti bantuan bagi korban banjir dan juga korban bencana kebakaran pemukiman. Dengan target indikator Jumlah logistic yang disalurkan 50 Paket dan terealisasi sejumlah 108 Paket dengan capaian kinerja 100%

Faktor-faktor Pendukung Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Balangan dalam menurunkan angka Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah ( PERDA ) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana (draft Perda PB);
2. Dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
4. Antusias aparat desa dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat tanggap darurat bencana;
5. Keberhasilan evakuasi bencana didukung dengan adanya alat perlindungan diri yang cukup memadai untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan evakuasi korban;



6. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui Program Daerah dan Pusat
7. Penambahan dan Peningkatan Kapasitas Personil TRC melalui program internal BPBD Kabupaten Balangan dan juga BPBD Provinsi

Selain Faktor Pendukung keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat yaitu :

1. Belum terpenuhinya legalisasi regulasi kelembagaan.
2. Sinergisitas secara kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal, karena belum terbentuknya forum PRB;
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Belum terpenuhinya SDM bersertifikasi sesuai standar kompetensi dalam penanggulangan bencana.

Beberapa Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Dengan Melakukan Percepatan regulasi kelembagaan;
2. Membangun koordinasi dengan stakeholder terkait melalui FGD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk peningkatan nilai indeks kapasitas daerah;
3. Membangun koordinasi sinergis dengan aparat di tingkat desa dalam peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang penanggulangan bencana;
4. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Induk dalam peningkatan kapasitas evakuasi korban bencana;
5. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama aparat pemerintah daerah maupun masyarakat.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	98,26	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	85,69	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

## 12. Sasaran Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan

Tabel 3.31  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12  
Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi /Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
29.	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	100,1	68	70,97	104,37	100	70,97	-	-	-

Sumber Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Budaya tak benda merupakan budaya yang terdiri dari tarian tradisional, permainan tradisional, upacara adat dan kesenian daerah. Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase Budaya tak benda yang terlestarikan sebesar 77% dari target yang ditetapkan sebesar 73% sehingga didapat capaian kinerja sebesar 105,48% dengan kategori "**sangat baik**"



Dari target 73% yang telah ditetapkan terdapat 19 budaya tak benda yang ingin dilestarikan dari target budaya tak benda sebanyak 26 budaya. Untuk daftar budaya tak benda yang terlestarikan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**BUDAYA TAK BENDA KABUPATEN  
TAHUN 2023**

NO	BUDAYA TAK BENDA YANG ADA DI KABUPATEN BALANGAN	TARGET BUDAYA TAK BENDA YANG DIKEMBANGKAN / DILESTARIKAN	REALISASI BUDAYA TAK BENDA YANG DIKEMBANGKAN / DILESTARIKAN
1	WADIAN BAWO		
2	TANDIK MERATUS		
3	TARI BAKSA KEMBANG	√	√
4	TARI RADAP RAHAYU	√	√
5	TARI GINTUR	√	√
6	TARI TOPENG	√	√
7	MAMANDA	√	√
8	SASTRA	√	√
9	WAYANG GONG/ORANG	√	√
10	WAYANG KULIT	√	√
11	KUDA GEPANG	√	√
12	KUDA LUMPING	√	√
13	LUKIS TAMENG	√	√
14	ARANGAN	√	√
15	SISINGAAN		
16	MESIWAH PARE GUMBOH	√	√
17	MELATU WINI		
18	BALOGO	√	√
19	BAGASING	√	√
20	SUMPIT	√	√
21	BALASTIK	√	√
22	PERMAINAN BAYASINAN		√
23	KALUM PANJANG	√	√
24	ENGGRANG/BATUNGKAU	√	√



NO	BUDAYA TAK BENDA YANG ADA DI KABUPATEN BALANGAN	TARGET BUDAYA TAK BENDA YANG DIKEMBANGKAN / DILESTARIKAN	REALISASI BUDAYA TAK BENDA YANG DIKEMBANGKAN / DILESTARIKAN
25	TANGLONG		
26	BAGARAKAN SAHUR		
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>20</b>

Budaya benda merupakan budaya yang berupa benda, bangunan yang dapat memberikan nilai budaya. Budaya benda yang dilestarikan pada tahun 2023 di Kabupaten Balangan dalam hal ini adalah cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase Budaya benda yang dilestarikan sebesar 73,33% dari target yang ditetapkan sebesar 73,33% sehingga didapat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “**sangat baik**”

Dari target 73,33% yang telah ditetapkan terdapat 15 budaya benda yang ingin dilestarikan dari target budaya benda sebanyak 15 budaya benda. Untuk daftar budaya benda yang dilestarikan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**BUDAYA BENDA KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2023**

NO	TARGET BUDAYA BENDA YANG DILESTARIKAN	REALISASI BUDAYA BENDA YANG DILESTARIKAN	ALAMAT
1	BENTENG TUNDAKAN	√	DESA TUNDAKAN
2	MAKAM DATU MARTIKA	√	DESA TAMPANG
3	RUMAH KUNO PERDAGANGAN KARET MASA BELANDA	√	DESA SIMPANG TIGA
4	RUMAH BATU	√	DESA MUARA NINIAN
5	RUMAH PALIMBANGAN	√	DESA RIWA
6	DATUK KANDANG HAJI	√	DESA TELUK BAYUR
7	MAKAM RAKSASINA SINGA JAYA	√	KELURAHAN PARINGIN KOTA
8	MAKAM TEMENGGUNG JALIL	√	DESA TUNDAKAN
9	KAWASAN SUMUR MINYAK	√	PARINGIN TIMUR
10	GOA DEBU	√	DESA SUNGSUM
11	GOA SIDABONG	√	DESA KAPUL
12	RUMAH ADAT BANJAR (PANDAM)	√	DESA TELUK MESJID



13	JEMBATAN BESI BELANDA	√	DESA SIMPANG TIGA
14	CUKMAR	√	DESA BUNTU KARAU
15	MERIAM LILA	√	DESA TUNDAKAN

Adapun faktor pendorong pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan belanja pemeliharaan rutin seperti penggajianjuru pelihara cagar budaya di setiap cagar budaya.
2. Adanya penyediaan sarana prasarana cagar budaya.
3. Pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi cagar budaya ke Provinsi yang mengalami kerusakan yang di luar kewenangannya.
4. Adanya kegiatan pembinaan yang masif di berbagai kalangan, baik di sekolah, kelompok seni maupun sanggar kesenian.
5. Adanya kegiatan workshop tari dan musik tradisional.
6. Adanya kegiatan festival budaya Banua Sanggam yang melibatkan semua kalangan seniman dan budayawan. Kegiatan ini juga menjadi wadah ekspresi bagi mereka baik yang dibina maupun yang tidak, semua mendapat andil dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah.
7. Adanya kegiatan lomba permainan rakyat yang diselenggarakan, baik tingkat pelajar sebagai regenerasi ke depan maupun masyarakat umum.

Rencana aksi untuk peningkatan kinerja budaya Balangan yang terlestarikan adalah

1. Melakukan crosscutting kinerja penanganan budaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Melakukan digitalisasi arsip budaya bersama dengan dinas terkait.
3. Menyusun kajian tentang potensi peningkatan pendapatan asli daerah dari segi budaya melalui kunjungan tamu budaya dan festival lainnya.

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kesenian Tradisional</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	99,13	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pembinaan Sejarah</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	89,18	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3</b>	<b>Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	99,01	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah



13. Sasaran Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Tabel 3.32  
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13  
Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Akhir RPJMD	Realisasi/ Capaian Terhadap Kab/Kota	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi/ Capaian Terhadap RPJMN
			Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Indeks Desa Membangun	110,58	0,7293	0,7527	103,21	0,6995	107,61	0,7877 (Tabalong)	0,7480	-

Sumber Data Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023, data diolah

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

5. Indeks ketahanan sosial terdiri dari : Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
6. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan Kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan Kesehatan);
7. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke Pendidikan dasar dan menengah, akses Pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
8. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi akses ke listrik dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks ketahanan ekonomi terdiri dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdaganga, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ekologi terdiri dari dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikator yang menjadi indikator kinerja utama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- b. Persentase Desa dengan Klasifikasi Minimal Maju

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagaimana tersebut secara ringkas pada tabel berikut:

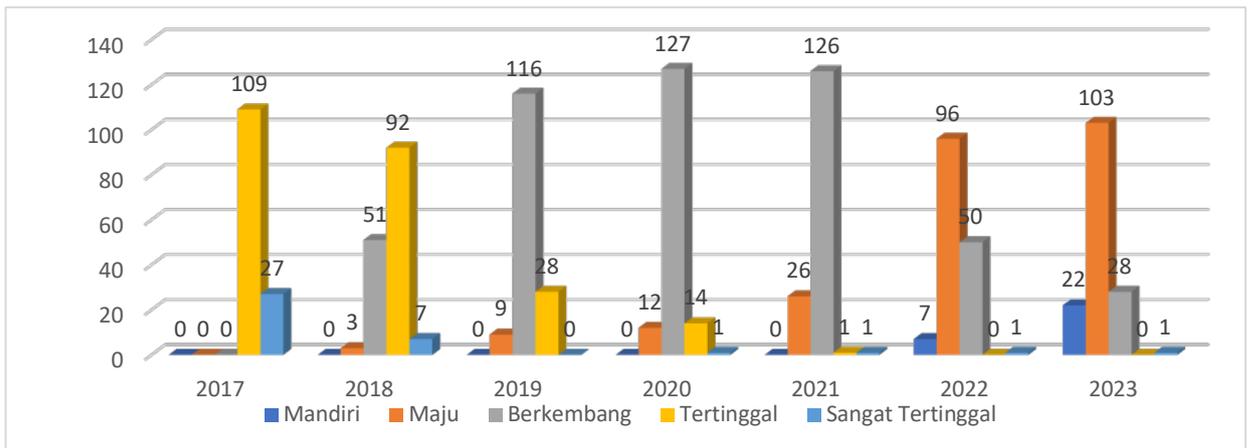
Sasaran :Meningkatnya Klasifikasi Desa							
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)	Kategori Capaian
1	Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju	286,06%	28,57%	81,16%	284,07%	183,79%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>284,07%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	



Berdasarkan Indikator kinerja utama yaitu Persentase Desa dengan Klasifikasi Maju. Pada tahun 2023 Kabupaten Balangan menargetkan 28,57% dengan realisasi 81,16%. Dalam mengukur realisasi dan capaian terhadap indikator berdasarkan indeks desa membangun (IDM) yang dimiliki oleh masing-masing desa di Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan dan 154 Desa. Pada tahun 2023 capaian dari indikator persentase desa dengan klasifikasi maju adalah 284,07%, pencapaian ini dikategorikan sangat tinggi tingkat keberhasilannya.

Data Jumlah Desa Berdasarkan Klasifikasi Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017-2023

Tahun	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	JUMLAH
2017	0	0	18	109	27	154
2018	0	3	51	92	7	154
2019	0	9	116	28	0	154
2020	0	12	127	14	1	154
2021	0	26	126	1	1	154
2022	7	96	50	0	1	154
2023	22	103	28	0	1	154



Berdasarkan tabel dan grafik yang telah disajikan diatas bahwa pada tahun 2023 desa dengan klasifikasi maju berjumlah 103 Desa atau meningkat sebanyak 7 Desa dari keadaan tahun 2022. Selain itu juga terjadinya peningkatan dari status desa mandiri pada tahun 2023 terdapat 22 desa dari keadaan tahun 2021 sebanyak 7 Desa dan mengalami peningkatan sebanyak 15 Desa.

Selanjutnya, dapat diketahui pada saat ini jumlah desa dengan klasifikasi minimal maju di Kabupaten Balangan sebanyak 103 Desa dan untuk Desa Mandiri sebanyak 22 Desa. Dalam menghitung realisasi terhadap indikator tersebut adalah jumlah desa dengan klasifikasi maju ditambah dengan klasifikasi desa yang berstatus mandiri dibagi jumlah desa di Kabupaten Balangan dikali dengan seratus. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

Selanjutnya dengan adanya peningkatan dari status desa yang telah mengalami peningkatan menunjukkan data bahwa upaya pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal juga dapat dikatakan sangat berhasil pencapaiannya sampai tahun 2023, hal ini bisa dilihat dari data jumlah desa tertinggal sudah tidak ada dan untuk sangat tertinggal masih terdapat 1 Desa yaitu Desa Wonorejo di Kecamatan Juai dimana desa tersebut sedang dalam proses penggabungan desa dengan Desa Sumber Rejeki.



**DATA DESA DENGAN STATUS DESA BERKEMBANG**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	MUARA NINIAN	JUAI	BERKEMBANG
2	HAMARUNG	JUAI	BERKEMBANG
3	JUAI	JUAI	BERKEMBANG
4	BATA	JUAI	BERKEMBANG
5	GALUMBANG	JUAI	BERKEMBANG
6	SUNGAI BATUNG	JUAI	BERKEMBANG
7	TIGARUN	JUAI	BERKEMBANG
8	PAMURUS	JUAI	BERKEMBANG
9	MARIAS	JUAI	BERKEMBANG
10	Lalayau	JUAI	BERKEMBANG
11	MIHU	JUAI	BERKEMBANG
12	TAWAHAN	JUAI	BERKEMBANG
13	PANIMBAAN	JUAI	BERKEMBANG
14	ANIUNGAN	HALONG	BERKEMBANG
15	MARAJAI	HALONG	BERKEMBANG
16	MAMIGANG	HALONG	BERKEMBANG
17	BAKUNG	BATUMANDI	BERKEMBANG
18	KARUH	BATUMANDI	BERKEMBANG
19	TANAH HABANG KIRI	LAMPIHONG	BERKEMBANG
20	PANAITAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
21	KUSAMBI HULU	LAMPIHONG	BERKEMBANG
22	MATANG LURUS	LAMPIHONG	BERKEMBANG
23	PIMPING	LAMPIHONG	BERKEMBANG
24	PUPUYUAN	LAMPIHONG	BERKEMBANG
25	PARINGIN	PARINGIN	BERKEMBANG
26	DAYAK PITAP	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
27	AJUNG	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
28	KAMBIYAIN	TEBING TINGGI	BERKEMBANG

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MAJU**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	BUNTU KARAU	JUAI	MAJU
2	TELUK BAYUR	JUAI	MAJU
3	GULINGGANG	JUAI	MAJU
4	MUNGKUR UYAM	JUAI	MAJU
5	PANIMBAAN	JUAI	MAJU
6	SUMBER REZEKI	JUAI	MAJU
7	HAUWAI	HALONG	MAJU
8	BANGKAL	HALONG	MAJU
9	MANTUYAN	HALONG	MAJU
10	PUYUN	HALONG	MAJU
11	BUNTU PILANDUK	HALONG	MAJU
12	GUNUNG RIUT	HALONG	MAJU
13	MAMANTANG	HALONG	MAJU



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
14	BINJAI PUNGGAL	HALONG	MAJU
15	LIYU	HALONG	MAJU
16	BINUANG SANTANG	HALONG	MAJU
17	BINJU	HALONG	MAJU
18	KARYA	HALONG	MAJU
19	UREN	HALONG	MAJU
20	MAUYA	HALONG	MAJU
21	SUMBER AGUNG	HALONG	MAJU
22	BIHARA	AWAYAN	MAJU
23	MERAH	AWAYAN	MAJU
24	PUDAK	AWAYAN	MAJU
25	BADALUNGGGA	AWAYAN	MAJU
26	SIKONTAN	AWAYAN	MAJU
27	PULANTAN	AWAYAN	MAJU
28	TUNDI	AWAYAN	MAJU
29	MUARA JAYA	AWAYAN	MAJU
30	BARU	AWAYAN	MAJU
31	AWAYAN HILIR	AWAYAN	MAJU
32	SEI PUMPUNG	AWAYAN	MAJU
33	BADALUNGGGA HILIR	AWAYAN	MAJU
34	NUNGKA	AWAYAN	MAJU
35	TANGALIN	AWAYAN	MAJU
36	KEDONDONG	AWAYAN	MAJU
37	BARAMBAN	AWAYAN	MAJU
38	AMBAKIANG	AWAYAN	MAJU
39	PIYAIT	AWAYAN	MAJU
40	TARIWIN	BATU MANDI	MAJU
41	MUNJUNG	BATU MANDI	MAJU
42	PELAJAU	BATU MANDI	MAJU
43	RIWA	BATU MANDI	MAJU
44	MAMPARI	BATU MANDI	MAJU
45	BUNGUR	BATU MANDI	MAJU
46	BANUA HANYAR	BATU MANDI	MAJU
47	GUHA	BATU MANDI	MAJU
48	GUNUNG MANAU	BATU MANDI	MAJU
49	KASAI	BATU MANDI	MAJU
50	TANAH HABANG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
51	BATU MERAH	LAMPIHONG	MAJU
52	LAMPIHONG KANAN	LAMPIHONG	MAJU
53	LAMPIHONG SELATAN	LAMPIHONG	MAJU
54	LAMPIHONG KIRI	LAMPIHONG	MAJU
55	LAJAR	LAMPIHONG	MAJU
56	KUSAMBI HILIR	LAMPIHONG	MAJU
57	LOK HAMAWANG	LAMPIHONG	MAJU
58	KUPANG	LAMPIHONG	MAJU



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
59	TAMPANG	LAMPIHONG	MAJU
60	LOK PANGINANGAN	LAMPIHONG	MAJU
61	JUNGKAL	LAMPIHONG	MAJU
62	SUNGAI TABUK	LAMPIHONG	MAJU
63	JIMAMUN	LAMPIHONG	MAJU
64	HILIR PASAR	LAMPIHONG	MAJU
65	TELUK KARYA	LAMPIHONG	MAJU
66	SUNGAI AWANG	LAMPIHONG	MAJU
67	KANDANG JAYA	LAMPIHONG	MAJU
68	MUNDAR	LAMPIHONG	MAJU
69	BALANG	PARINGIN	MAJU
70	KALAHIANG	PARINGIN	MAJU
71	PARAN	PARINGIN	MAJU
72	LAYAP	PARINGIN	MAJU
73	MURUNG ILUNG	PARINGIN	MAJU
74	MANGKAYAHU	PARINGIN	MAJU
75	LOK BATUNG	PARINGIN	MAJU
76	LAMIDA BAWAH	PARINGIN	MAJU
77	DAHAI	PARINGIN	MAJU
78	HUJAN MAS	PARINGIN	MAJU
79	BABYAU	PARINGIN	MAJU
80	BALIDA	PARINGIN	MAJU
81	SUNGAI KETAPI	PARINGIN	MAJU
82	BARUH BAHINU LUAR	PARINGIN SELATAN	MAJU
83	INAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
84	BARUH BAHINU DALAM	PARINGIN SELATAN	MAJU
85	PANGGUNG	PARINGIN SELATAN	MAJU
86	GALUMBANG	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
95	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
96	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
79	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
80	MAYANAU	TEBING TINGGI	MAJU
81	SIMPANG BUMBUAN	TEBING TINGGI	MAJU
82	AUH	TEBING TINGGI	MAJU
83	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	MAJU
84	LANGKAP	TEBING TINGGI	MAJU
85	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	MAJU



NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
86	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	MAJU
87	BINJAI	PARINGIN SELATAN	MAJU
88	MURUNG ABUIN	PARINGIN SELATAN	MAJU
89	HALUBAU UTARA	PARINGIN SELATAN	MAJU
90	MURUNG JAMBU	PARINGIN SELATAN	MAJU
91	TELAGA PURUN	PARINGIN SELATAN	MAJU
92	LINGSIR	PARINGIN SELATAN	MAJU
93	TARANGAN	PARINGIN SELATAN	MAJU
94	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	MAJU
95	SUNGSUM	TEBING TINGGI	MAJU
96	JU'UH	TEBING TINGGI	MAJU
97	MAYANAU	TEBING TINGGI	
98	SIMPANG BUMBUAN	TEBING TINGGI	
99	AUH	TEBING TINGGI	
100	GUNUNG BATU	TEBING TINGGI	
101	LANGKAP	TEBING TINGGI	
102	SIMPANG NADONG	TEBING TINGGI	
103	HALUBAU	PARINGIN SELATAN	

**DATA DESA DENGAN STATUS DESA MANDIRI**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	SIRAP	JUAI	MANDIRI
2	HUKAI	JUAI	MANDIRI
3	TABUAN	HALONG	MANDIRI
4	HALONG	HALONG	MANDIRI
5	KAPUL	HALONG	MANDIRI
6	SURYATAMA	HALONG	MANDIRI
7	BARUH PANYAMBARAN	HALONG	MANDIRI
8	PADANG RAYA	HALONG	MANDIRI
9	PEMATANG	AWAYAN	MANDIRI
10	AWAYAN	AWAYAN	MANDIRI
11	TUNDAKAN	AWAYAN	MANDIRI
12	BIHARA HILIR	AWAYAN	MANDIRI
13	PUTAT BASIUN	AWAYAN	MANDIRI
14	BATU MANDI	BATU MANDI	MANDIRI
15	MANTIMIN	BATU MANDI	MANDIRI
16	TELUK MESJID	BATU MANDI	MANDIRI
17	TIMBUN TULANG	BATU MANDI	MANDIRI
18	HAMPARAYA	BATU MANDI	MANDIRI
19	SIMPANG TIGA	LAMPIHONG	MANDIRI
20	MATANG HANAU	LAMPIHONG	MANDIRI
21	BUNGIN	PARINGIN SELATAN	MANDIRI
22	MARADAP	PARINGIN SELATAN	MANDIRI



**DATA DESA DENGAN STATUS SANGAT TERTINGGAL**

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS IDM
1	WONOREJO	JUAI	SANGAT TERTINGGAL

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja indikator ini adalah:

- e. Ada beberapa program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan pada tahun 2023 mendukung capaian tersebut yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota didukung dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pembinaan Teknologi Tepat Guna, Pembinaan PKK dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa didukung dengan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Pengelolaan Aset Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- f. Adanya dukungan pemerintah pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan penguncuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa.
- g. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa.
- h. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IDM dilihat dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKEI, dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yakni diuraikan sebagai berikut:

4. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial), Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
5. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
6. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Berdasarkan 3 (tiga) pilar ketahanan tersebut diatas Kabupaten Balangan pada tahun 2023 memiliki kenaikan di beberapa status desa serta akan berdampak baik untuk desa tersebut. Secara khusus dan baik bagi Kabupaten Balangan secara umum.

Berikut sampel dari ketahanan sosial yang mengalami kenaikan status desa nya:

4. Kecamatan Awayan Desa Tangalin
  - e. Peningkatan terhadap layanan kesehatan masyarakat;
  - f. Kemudahan akses terhadap layanan masyarakat dan dalam peningkatan ekonomi;



- g. Layanan air bersih membaik dan murah
- h. Jaringan komunikasi lancar dikarenakan pemdes memfasilitasi penyediaan wifi
- 5. Kecamatan Awayan Desa Pulantan
  - g. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat nilai kesejahteraan meningkat
  - h. Adanya peningkatan Akses pada aspek-aspek ekonomi
  - i. Akses informasi dan komunikasi lancar
  - j. Peningkatan tahap kesehatan masyarakat
  - k. Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih makin membaik
  - l. Ketertiban lingkungan membaik karena aktifnya kegiatan linmas
- 6. Kecamatan Awayan Desa Muara Jaya
  - d. Dengan adanya perbaikan akses pendidikan maka hampir semua anak2 wajib sekolah memperoleh pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang putus sekolah melanjutkan pada tahap kelas paket sesuai jenjang.
  - e. Keberdayaan perempuan meningkat dalam hal peningkatan ekonomi keluarga.
  - f. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat dikarenakan tersedianya jaringan air bersih dan sadarnya masyarakat terhadap perilaku hidup bersih

Capaian Kinerja Program Tahun 2023 tercermin dalam tabulasi data berikut :

No	Program	Efektif	% Kinerja	% Serapan Anggaran	Efisien
<b>1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan Desa</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	95,94	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>				
	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	Efektif	100	94,74	Efisien
	Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber Data E Monev Bappedalitbang Kabupaten Balangan 2023, data diolah

### E. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Kinerja seluruh SKPD (30 SKPD) pada triwulan IV (September sampai Desember) tahun 2023 adalah realisasi Sub Kegiatan sebesar 101,84% kategori Sangat Tinggi, realisasi Kegiatan sebesar 96,62% kategori Sangat Tinggi sedangkan realisasi Program adalah sebesar 95,69% kategori Sangat Tinggi. Adapun data menyeluruh realisasi kinerja dan serapan anggaran sebagaimana tabulasi dibawah ini :

Tabel 3.33  
Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan  
Triwulan IV (September-Desember) Tahun 2023  
RPJMD 2021-2026

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	398.393.943.396	95,87	60,85	98,27	327.473.758.405	95,87	60,85	98,27	82,20
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	307.846.820.740,00	99,24	105,14	102,19	263.915.010.163	99,24	105,14	102,19	85,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	572.082.979.723	96,95	94,54	96,40	484.722.012.213	96,95	94,54	96,40	84,73
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	31.011.079.398	157,13	131,33	100,00	28.976.571.846	157,13	131,33	100,00	93,44
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	17.530.914.109	99,53	100,00	100,33	16.564.936.177	99,53	100,00	100,33	94,49



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan '(2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	33.138.442.066	99,98	100,00	100,00	32.113.042.961	99,98	100,00	100,00	96,91
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	44.152.753.567	97,71	92,22	81,96	41.169.187.284	97,71	92,22	81,96	93,24
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	34.777.134.530	105,53	98,67	99,60	32.070.637.124	107,72	98,67	99,60	92,22
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	6.962.697.488	91,39	95,65	97,65	6.712.431.719	91,39	95,65	97,65	96,41
10	Dinas Perhubungan	100	37.747.266.461	93,22	90,54	72,56	36.122.030.617	93,22	90,54	72,56	95,69
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	25.932.795.061	100,58	100,66	98,93	23.698.362.187	100,58	100,66	98,93	91,38
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	19.570.526.816	100,75	97,21	91,76	17.938.103.598	100,75	97,21	91,76	91,66
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100	38.424.373.297	94,11	97,29	216,69	37.125.487.907	94,11	97,29	216,69	96,62
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100	34.903.988.070	96,19	98,69	87,28	31.719.175.855	96,19	98,69	87,28	90,88
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	13.259.629.256	107,28	88,36	87,37	11.381.497.773	107,28	88,36	87,37	85,84
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	201.061.782.780,00	109,47	100,00	102,60	182.228.355.448,00	109,47	100,00	102,60	90,63
17	Sekretariat Daerah	100	203.756.090.549	98,11	101,36	80,00	188.014.767.019	98,11	101,36	80,00	92,27
18	Inspektorat Kabupaten	100	25.002.883.060	124,44	96,59	81,50	21.665.401.766	124,44	96,59	81,50	86,65
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100	21.056.536.066	98,87	102,00	104,67	19.971.580.789	98,87	102,00	104,67	94,85
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	359.520.937.817	94,90	100,00	96,91	341.389.410.640	94,90	100,00	96,91	94,96
21	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	19.076.062.212	99,22	114,49	35,60	17.797.565.535	99,22	114,49	35,60	93,30
22	Sekretariat DPRD	100	62.644.362.476	84,93	88,89	92,42	55.638.722.423	84,93	88,89	92,42	88,82
23	Kecamatan Lampihong	100	5.399.575.291	91,67	91,67	100,00	5.115.111.377	91,67	91,67	100,00	94,73
24	Kecamatan Batumandi	100	5.714.687.973	99,95	95,61	101,68	5.472.611.561	99,95	95,61	101,68	95,76
25	Kecamatan Awayan	100	4.948.760.470	97,60	92,37	85,71	4.779.033.458	97,60	92,37	85,71	96,57
26	Kecamatan Halong	100	4.921.582.520	99,53	100,00	100,48	4.549.462.508	99,53	100,00	100,48	92,44
27	Kecamatan Juai	100	4.812.649.341	100,14	92,86	86,93	4.432.197.076	100,14	92,86	86,93	92,09
28	Kecamatan Paringin	100	10.897.613.266	80,95	93,33	100,11	9.634.023.697	80,95	93,33	100,11	88,40
29	Kecamatan Tebing Tinggi	100	3.673.367.000	139,17	87,77	87,50	3.649.009.752	139,17	87,77	87,50	99,34
30	Kecamatan Parsel	100	8.536.824.894	98,52	90,38	83,68	7.548.598.242	98,52	90,38	83,68	88,42
<b>Rata-Rata Capaian SKPD Kabupaten Balangan</b>		<b>100</b>	<b>2.556.759.059.693</b>				<b>2.263.588.097.120</b>	<b>101,84</b>	<b>96,62</b>	<b>95,69</b>	<b>88,53</b>
<b>Predikat Kinerja</b>								<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>



## F. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahapan dan proses perencanaan sampai dengan penganggaran mulai dari APBD Murni sampai dengan Perubahan APBD termasuk di dalamnya proses pergeseran Pergeseran APBD menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD menggunakan Aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) atau disebut juga dengan Simda Next Generation (Simda-NG) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA yang dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahapan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran yang digunakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 Adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
2. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan terkait tahapan perencanaan dan penjelasan mengenai tahapan dari penganggaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Tahapan Perencanaan
  1. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2022.
  2. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2023.
- b. Tahapan Penganggaran
  1. APBD Murni Tahun 2023
    - a) Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2022 dengan nomor kesepakatan 130.13/010/PEM/2022 dan 188.4/09/DPRD-BLG/Tahun 2022.
    - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2022 dengan nomor kesepakatan 130.13/010.1/PEM/2022 dan 188.4/010/DPRD-BLG/Tahun 2022.
    - c) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui Bersama pada tanggal 17 November 2022 dengan nomor kesepakatan 130.5/019/PEM/2022 dan 188.342/15/DPRD-BLG/Tahun 2022.
    - d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0855/KUM/2022 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada 12 Desember 2022.



- e) Keputusan DPRD Nomor 188.342/33/DPRD-BLG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.
  - g) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 28 Desember 2022.
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
- a) Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/009/PEM/2023 dan 188.342/4/DPRD-BLG/2023.
  - b) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disepakati dengan persetujuan bersama antara tanggal 08 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/010/PEM/2023 dan 188.342/5/DPRD-BLG/2023.
  - c) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui Bersama pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan nomor kesepakatan 130.5/013/PEM/2023 dan 188.342/8/DPRD-BLG/2023.
  - d) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0810/KUM/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada 19 September 2023.
  - e) Persetujuan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nomor kesepakatan 188.342/24/DPRD-BLG/2023.
  - f) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.
  - g) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan tanggal 02 Oktober 2023.

**Komposisi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.947.568.265.686,00</b>	<b>2.384.594.925.767,05</b>	<b>437.026.660.081,05</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>75.226.258.220,00</b>	<b>104.521.373.930,49</b>	<b>29.295.115.710,49</b>
Pendapatan Pajak Daerah	12.194.000.000,00	12.444.000.000,00	250.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	1.801.329.000,00	2.161.698.666,00	360.369.666,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.237.460.000,00	14.874.367.772,00	(363.092.228,00)
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.993.469.220,00	75.041.307.492,49	29.047.838.272,49
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.866.165.297.093,00</b>	<b>2.273.896.841.463,56</b>	<b>407.731.544.370,56</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.777.838.301.015,00	2.178.018.839.712,00	400.180.538.697,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	88.326.996.078,00	95.878.001.751,56	7.551.005.673,56



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Uraian	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	-
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	6.176.710.373,00	-
<b>Belanja</b>	<b>2.067.568.265.686,00</b>	<b>2.557.167.298.075,00</b>	<b>489.599.032.389,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.317.146.042.475,00</b>	<b>1.578.337.781.963,00</b>	<b>261.191.739.488,00</b>
Belanja Pegawai	536.426.431.110,00	502.425.067.881,00	(34.001.363.229,00)
Belanja Barang Dan Jasa	666.140.508.118,00	889.889.966.575,00	223.749.458.457,00
Belanja Hibah	110.235.077.510,00	180.582.121.770,00	70.347.044.260,00
Belanja Bantuan Sosial	4.344.025.737,00	5.440.625.737,00	1.096.600.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>448.851.411.561,00</b>	<b>666.352.162.737,00</b>	<b>217.500.751.176,00</b>
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	1.035.250.000,00	35.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	54.643.235.911,00	173.356.943.387,00	118.713.707.476,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	97.322.974.300,00	116.951.551.100,00	19.628.576.800,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	290.500.672.250,00	368.065.180.950,00	77.564.508.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.577.408.400,00	5.874.358.400,00	1.296.950.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	807.120.700,00	1.068.878.900,00	261.758.200,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>26.386.663.150,00</b>	<b>5.603.265.908,00</b>	<b>(20.783.397.242,00)</b>
Belanja Tidak Terduga	26.386.663.150,00	5.603.265.908,00	(20.783.397.242,00)
<b>Belanja Transfer</b>	<b>275.184.148.500,00</b>	<b>306.874.087.467,00</b>	<b>31.689.938.967,00</b>
Belanja Bagi Hasil	1.766.884.500,00	1.827.921.467,00	61.036.967,00
Belanja Bantuan Keuangan	273.417.264.000,00	305.046.166.000,00	31.628.902.000,00
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(120.000.000.000,00)</b>	<b>(172.572.372.307,95)</b>	<b>(52.572.372.307,95)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>170.000.000.000,00</b>	<b>222.572.372.307,95</b>	<b>52.572.372.307,95</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	170.000.000.000,00	222.572.372.307,95	52.572.372.307,95
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>120.000.000.000,00</b>	<b>172.572.372.307,95</b>	<b>52.572.372.307,95</b>



Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023 dari sisi pendapatan sebesar 115,77% sedangkan dari sisi belanja sebesar 89,64% dengan rincian pada tabel berikut:

**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.384.594.925.767,05</b>	<b>2.760.544.200.504,01</b>	<b>115,77</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>104.521.373.930,49</b>	<b>137.007.880.082,01</b>	<b>131,08</b>
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.799.569,00	111,76
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	75.041.307.492,49	105.859.573.410,01	141,07
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.273.896.841.463,56</b>	<b>2.622.936.320.422,00</b>	<b>115,35</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.178.018.839.712,00</b>	<b>2.509.925.057.280,00</b>	<b>115,54</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>95.878.001.751,56</b>	<b>113.011.263.142,00</b>	<b>117,87</b>
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>9,71</b>
Pendapatan Hibah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.557.167.298.075,00</b>	<b>2.292.344.773.265,65</b>	<b>89,64</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.578.337.781.963,00</b>	<b>1.403.981.232.061,62</b>	<b>88,95</b>
Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16
Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.309.965,62	89,36
Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72
Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06



Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>666.352.162.737,00</b>	<b>580.674.088.157,03</b>	<b>87,14</b>
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.603.265.908,00</b>	<b>1.602.500.000,00</b>	<b>28,60</b>
Belanja Tidak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>306.874.087.467,00</b>	<b>306.874.087.467,00</b>	<b>99,74</b>
Belanja Bantuan Keuangan	306.874.087.467,00	306.874.087.467,00	99,74
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>172.572.372.613,97</b>	<b>172.572.372.613,97</b>	<b>100,00</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>222.572.372.307,95</b>	<b>222.572.372.613,97</b>	<b>100,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.572.372.307,95	222.572.372.307,95	100,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00

### Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Balangan dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	104.521.373.930,49	137.007.880.082,01	131,08	92.767.033.520,54
Pendapatan Transfer	2.273.896.841.463,56	2.622.936.320.422,00	115,35	1.686.057.079.199,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.176.710.373,00	600.000.000,00	9,71	6.539.410.279,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.384.594.925.767,05</b>	<b>2.760.544.200.504,01</b>	<b>115,77</b>	<b>1.785.363.522.998,54</b>



Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.384.594.925.767,00 dan terealisasi sebesar Rp2.760.544.200.504,01 atau 115,77%, sehingga melebihi dari target anggaran Pendapatan sebesar Rp375.949.274.737,01 atau 15,77%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp975.180.677.505,47 atau naik sebesar 54,62%.

**Rincian Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>104.521.373.930,49</b>	<b>137.007.880.082,01</b>	<b>131,08</b>	<b>92.767.033.520,54</b>
Pendapatan Pajak Daerah	12.444.000.000,00	13.907.799.569,00	111,76	12.308.860.393,50
Pendapatan Retribusi Daerah	2.161.698.666,00	2.366.139.331,00	109,46	1.908.662.405,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.874.367.772,00	14.874.367.772,00	100,00	13.573.275.479,00
Lain - lain PAD yang sah	75.041.307.492,49	105.859.573.410,01	141,07	64.976.235.243,04
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.273.896.841.463,56</b>	<b>2.622.936.320.422,00</b>	<b>115,35</b>	<b>1.686.057.079.199,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.178.018.839.712,00</b>	<b>2.509.925.057.280,00</b>	<b>115,54</b>	<b>1.583.753.808.032,00</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.555.562.368.000,00	1.899.001.975.914,00	122,08	994.362.274.685,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361.852.722.000,00	361.821.744.450,00	99,99	345.185.535.241,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.528.228.000,00	46.040.531.309,00	94,87	52.704.154.259,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.323.365.712,00	73.995.919.307,00	83,78	70.332.537.607,00
Dana Insentif Daerah	10.447.499.000,00	16.166.958.000,00	154,74	13.333.129.000,00
Dana Desa	113.304.657.000,00	112.897.928.300,00	99,64	107.836.177.240,00
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>95.878.001.751,56</b>	<b>113.011.263.142,00</b>	<b>117,87</b>	<b>102.303.271.167,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	95.878.001.751,56	113.011.263.142,00	117,87	102.303.271.167,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>9,71</b>	<b>6.539.410.279,00</b>
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>6.176.710.373,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>9,71</b>	<b>6.537.075.079,00</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	2.335.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.384.594.925.767,05</b>	<b>2.760.544.200.504,01</b>	<b>115,77</b>	<b>1.785.363.522.998,54</b>

**Belanja**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagaimana tersaji pada tabel berikut:



**Pengelompokkan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	1.578.337.781.963,00	1.403.981.232.061,62	88,95	1.009.312.423.852,08
Belanja Modal	666.352.162.737,00	580.674.088.157,03	87,14	391.771.955.326,03
Belanja Tidak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
Belanja Transfer	306.874.087.467,00	306.086.953.047,00	99,74	242.402.786.355,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.557.167.298.075,00</b>	<b>2.292.344.773.265,65</b>	<b>89,64</b>	<b>1.644.691.137.033,11</b>

Berdasarkan tabel di atas Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.557.167.298.075,00 terealisasi sebesar Rp2.292.344.773.265,65 atau 89,64%, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp264.822.524.809,35 atau 10,36%, lebih rinci anggaran dan realisasi belanja diuraikan sebagai berikut:

**Rincian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.578.337.781.963,00</b>	<b>1.403.981.232.061,62</b>	<b>88,95</b>	<b>1.009.312.423.852,08</b>
Belanja Pegawai	502.425.067.881,00	437.938.657.742,00	87,16	386.952.974.398,00
Belanja Barang dan Jasa	889.889.966.575,00	795.194.309.965,62	89,36	570.184.530.893,23
Belanja Hibah	180.582.121.770,00	165.622.074.354,00	91,72	47.703.693.560,85
Belanja Bantuan Sosial	5.440.625.737,00	5.226.190.000,00	96,06	4.471.225.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>666.352.162.737,00</b>	<b>580.674.088.157,03</b>	<b>87,14</b>	<b>391.771.955.326,03</b>
Belanja Modal Tanah	1.035.250.000,00	-	-	5.115.127.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.356.943.387,00	161.050.737.928,00	92,90	94.619.742.724,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.951.551.100,00	99.741.722.125,39	85,28	47.238.414.493,82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	368.065.180.950,00	313.533.424.903,64	85,18	244.145.726.258,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.874.358.400,00	5.354.696.000,00	91,15	652.944.850,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.068.878.900,00	993.507.200,00	92,95	-
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.603.265.908,00</b>	<b>1.602.500.000,00</b>	<b>28,60</b>	<b>1.203.971.500,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.603.265.908,00	1.602.500.000,00	28,60	1.203.971.500,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>306.874.087.467,00</b>	<b>306.874.087.467,00</b>	<b>99,74</b>	<b>242.402.786.355,00</b>



## LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Uraian	Tahun 2023		Persentase	Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	1.366.693.655,00
Belanja Bantuan Keuangan	306.874.087.467,00	306.874.087.467,00	99,74	241.036.092.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.557.167.298.075,00</b>	<b>2.292.344.773.265,65</b>	<b>89,64</b>	<b>1.644.691.137.033,11</b>

Tabulasi perbandingan jumlah anggaran pada program dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Anggaran
2022 Murni	78	669.512.854.464
2022 Perubahan	78	1.117.743.812.802
2023 Murni	78	1.209.911.606.591
2023 Perubahan	78	868.733.819.486

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagaimana tabulasi data berikut :

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> Tahun Anggaran 2023 periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.384.584.925.787,05	0,00	2.780.544.200.504,01	2.780.544.200.504,01	375.960.274.738,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.521.373.930,48	0,00	137.007.880.082,01	137.007.880.082,01	32.486.506.151,52
4.1.01	Pajak Daerah	12.444.000.000,00	0,00	13.907.799.569,00	13.907.799.569,00	1.463.799.569,00
4.1.01.08	Pajak Hotel	13.500.000,00	0,00	10.955.453,00	10.955.453,00	(2.544.547,00)
4.1.01.08.01	Pajak Hotel	13.500.000,00	0,00	10.955.453,00	10.955.453,00	(2.544.547,00)
4.1.01.08.01.0001	Pajak Hotel	13.500.000,00	0,00	10.955.453,00	10.955.453,00	(2.544.547,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.700.000.000,00	0,00	5.225.408.836,00	5.225.408.836,00	525.408.836,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000,00	0,00	298.875.249,00	298.875.249,00	98.875.249,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000.000,00	0,00	298.875.249,00	298.875.249,00	98.875.249,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00	0,00	4.928.433.687,00	4.928.433.687,00	428.433.687,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00	0,00	4.928.433.687,00	4.928.433.687,00	428.433.687,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	4.000.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00	(3.215.000,00)
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00	(2.215.000,00)
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00	(2.215.000,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	75.000.000,00	0,00	93.738.503,00	93.738.503,00	18.738.503,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard (Videotron/Megatron)	75.000.000,00	0,00	93.738.503,00	93.738.503,00	18.738.503,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard (Videotron/Megatron)	75.000.000,00	0,00	93.738.503,00	93.738.503,00	18.738.503,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.750.000.000,00	0,00	4.738.882.179,00	4.738.882.179,00	988.882.179,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.750.000.000,00	0,00	4.738.882.179,00	4.738.882.179,00	988.882.179,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.750.000.000,00	0,00	4.738.882.179,00	4.738.882.179,00	988.882.179,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.500.000,00	0,00	12.801.000,00	12.801.000,00	(7.699.000,00)
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.500.000,00	0,00	12.801.000,00	12.801.000,00	(7.699.000,00)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.500.000,00	0,00	12.801.000,00	12.801.000,00	(7.699.000,00)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	0,00	2.818.600,00	2.818.600,00	(3.181.400,00)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	0,00	2.818.600,00	2.818.600,00	(3.181.400,00)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000,00	0,00	2.818.600,00	2.818.600,00	(3.181.400,00)
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	(22.911.600,00)
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	(22.911.600,00)
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	0,00	2.088.400,00	2.088.400,00	(22.911.600,00)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.700.000.000,00	0,00	1.715.888.027,00	1.715.888.027,00	15.888.027,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000,00	0,00	1.715.888.027,00	1.715.888.027,00	15.888.027,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000,00	0,00	1.715.888.027,00	1.715.888.027,00	15.888.027,00



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			sd/ PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.803.285.908,00	0,00	1.802.500.000,00	1.802.500.000,00	(4.000.785.908,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.803.285.908,00	0,00	1.802.500.000,00	1.802.500.000,00	(4.000.785.908,00)
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.803.285.908,00	0,00	1.802.500.000,00	1.802.500.000,00	(4.000.785.908,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	308.974.987.467,00	0,00	308.086.953.047,00	308.086.953.047,00	(787.134.420,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.827.921.467,00	0,00	1.826.280.947,00	1.826.280.947,00	(2.880.520,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.805.370.000,00	0,00	1.803.105.200,00	1.803.105.200,00	(2.284.800,00)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.805.370.000,00	0,00	1.803.105.200,00	1.803.105.200,00	(2.284.800,00)
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.805.370.000,00	0,00	1.803.105.200,00	1.803.105.200,00	(2.284.800,00)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	222.551.467,00	0,00	222.155.747,00	222.155.747,00	(395.720,00)
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	222.551.467,00	0,00	222.155.747,00	222.155.747,00	(395.720,00)
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	222.551.467,00	0,00	222.155.747,00	222.155.747,00	(395.720,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	305.048.188.000,00	0,00	304.261.892.100,00	304.261.892.100,00	(784.473.900,00)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	305.048.188.000,00	0,00	304.261.892.100,00	304.261.892.100,00	(784.473.900,00)
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.741.509.000,00	0,00	191.363.763.800,00	191.363.763.800,00	(377.745.200,00)
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.741.509.000,00	0,00	191.363.763.800,00	191.363.763.800,00	(377.745.200,00)
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.304.657.000,00	0,00	112.897.928.300,00	112.897.928.300,00	(406.728.700,00)
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.304.657.000,00	0,00	112.897.928.300,00	112.897.928.300,00	(406.728.700,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(172.572.372.307,95)	0,00	488.186.427.238,38	488.186.427.238,38	840.771.799.546,31
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	222.572.372.307,95	0,00	222.572.372.613,67	222.572.372.613,67	306,02
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	222.572.372.307,95	0,00	222.572.372.613,67	222.572.372.613,67	306,02
6.1.01.05	Penghematan Belanja	194.551.805.315,95	0,00	194.551.805.621,97	194.551.805.621,97	306,02
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	194.551.805.315,95	0,00	194.551.805.621,97	194.551.805.621,97	306,02
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	194.551.805.315,95	0,00	194.551.805.621,97	194.551.805.621,97	306,02
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	28.020.788.992,00	0,00	28.020.788.992,00	28.020.788.992,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	28.020.788.992,00	0,00	28.020.788.992,00	28.020.788.992,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	28.020.788.992,00	0,00	28.020.788.992,00	28.020.788.992,00	0,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyerahan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	172.572.372.307,95	0,00	172.572.372.613,67	172.572.372.613,67	306,02
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENDARAAN</b>	(0,00)	0,00	648.771.799.632,33	648.771.799.632,33	640.771.799.852,33

## G. Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2021 dan 2022 secara berurutan sebesar 25 inovasi dan 14 inovasi. Untuk tahun 2023 Dari hasil penjurangan inovasi yang dilakukan oleh Bappedalitbang pada SKPD, BLUD dan UPT Puskesmas se- Kabupaten Balangan, terjaring 355 Inovasi, baik yang masih berupa Gagasan atau Ide maupun inovasi yang sudah jalan. Sebanyak 277 inovasi yang di uploud atau dilaporkan oleh admin inovasi pada Sistem Inovasi Daerah (Sinovda) dan hanya 24 inovasi yang memenuhi kriteria untuk ikut dalam ajang Bailang tahun 2023. Dari hasil verifikasi dan validasi menghasilkan sebanyak 10 karya inovasi yang masuk kedalam tahapan presentasi dan penilaian inovasi, yang sudah melakukan Presentasi karyanya pada tanggal 04 September 2023. Dari hasil penilaian Tim Juri pada saat presentasi tersebut di hasilkan 6 karya inovasi dari SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas dengan predikat Terbaik I,II dan III, Juara harapan I, II dan harapan III.

Praktik-praktik/pelaksanaan inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah Kabupaten Balangan untuk terus berinovasi. Bagi SKPD, UPT/BLUD yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi kemajuan Balangan akan diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

### Peserta Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	SKPD	Bentuk Inovasi
1	GALUH SANGGAM (Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai Dalam Genggaman)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik
2	LAYAR SI BALANG (Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelayanan Publik
3	Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tata Kelola Pemerintahan



No.	Nama Inovasi	SKPD	Bentuk Inovasi
4	Pengumpulan Data Wisatawan (PANDAWA)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pelayanan Publik
5	Aplikasi E-Kino (Elektronik Kinerja Organisasi) Reformasi Birokrasi)	Sekretariat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
6	"KULARAKAT" (Kolaborasi Usulan, Laporan Dan Aduan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	Pelayanan Publik
7	LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa)	Kecamatan Tebing Tinggi	Pelayanan Publik
8	Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (SEPEDA BARU) V.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pelayanan Publik
9	SMART KIDS (Kerjasama Penerbitan KIA Dengan Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Publik
10	PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)	BLUD RSUD Datu Kandang Haji	Bentuk lainnya
11	BERAS NYAMAN (Berkas Atas SP2D Nyaman)	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah	Tata Kelola Pemerintahan
12	GERTAK SAPATU (Gerakan tata Kelola Keuangan Desa Tepat Waktu)	Kecamatan Awayan	Pelayanan Publik
13	MUTAR (Temukan Tangani Anemia pada Remaja Putri)	UPT. Puskesmas Pirsus	Pelayanan Publik
14	LADANG PORANG PAMAN LINBAT (Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online Tanpa Batas Waktu)	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pelayanan Publik
15	Lake Acil Lamah (Layanan Kesehatan Akses Terpencil Bagi Lansia ke Rumah)	UPT. Puskesmas Tebing	Pelayanan Publik
16	Sistem Disposisi Digital (SIDIGIT)	Kecamatan Juai	Tata Kelola Pemerintahan
17	Pembela (Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelayanan Publik
18	BALANTING (Balangan Lawan Stunting)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pelayanan Publik
19	GERBANG PESONA (Gerakan Bangkit Peduli Pasien Corona)	UPT. Puskesmas Paringin	Pelayanan Publik
20	BU RT (Buku Rumah Tangga)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Publik
21	Coaching Clinic SKP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah	Tata Kelola Pemerintahan
22	Bapamu Kuat (Balangan Pasar Murah Kita Untuk Rakyat)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Pelayanan Publik
23	Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam (GeTaRiWiSa)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bentuk Lainnya
24	Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK)	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Publik



TOP 10 Besar Bailang Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Pengusul
1	LAYAR SI BALANG (Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pengumpulan Data Wisatawan (PANDAWA)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	Aplikasi E-Kino (Elektronik Kinerja Organisasi) Reformasi Birokrasi)	Sekretariat Daerah
5	“KULARAKAT” (Kolaborasi Usulan, Laporan Dan Aduan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
6	LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa)	Kecamatan Tebing Tinggi
7	Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (SEPEDA BARU) V.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8	PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)	RSUD Datu Kandang Haji
9	GALUH SANGGAM (Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai Dalam Genggaman)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	SMART KIDS (Kerjasama Penerbitan Kia Dengan Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

H. Piagam Penghargaan

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Balangan banyak menerima penghargaan, penghargaan adalah suatu bentuk dari pengakuan tertulis dari orang lain baik secara kelembagaan instansi pemerintah maupun swasta. Penghargaan yang diberikan merupakan sebuah motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan demi Balangan yang lebih baik dan lebih maju serta lebih sejahtera.

Adapun Penghargaan yang diterima pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
1.	14 Februari 2023	Aula Kantor Ombudsman RI Kalimantan Selatan Banjarmasin	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman RI	Mokhammad Najih, S.H., M.Hum, Ph.D	
2.	21 Februari 2023	Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta	Kabupaten Bebas	Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin	
3.	14 Maret 2023	Balai Sudirman Jakarta	Penghargaan Atas Dukungan dan Kontribusi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pencapaian Universal Health Coverage dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P	



No	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
4.	9 Maret 2023	Gedung Idham Khalid Banjarbaru	Penghargaan atas Prestasi dalam Penerapan Reformasi Birokrasi Terbaik 5 di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dengan Predikat B Nilai 60,03	Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor	
5.	30 Maret 2023	Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan	Penghargaan kepada Pemerintahan Kabupaten Balangan Atas Pembayaran Tagihan Listrik Tepat Waktu	Manajer Unit Pelayanan Pelanggan PLN Cabang Paringin	
6.	5 April 2023	Dia Ballroom Hotel Reffles Jakarta	Penghargaan TOP Pembina BUMD Award 2023 pada Penganugerahan Penghargaan TOP BUMD Award 2023		
7.	13 April 2023	Gedung Idham Khalid Banjarbaru	Penghargaan Terbaik Kategori Penurunan Stunting Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting	Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor	
8.	9 Mei 2023	Aula BPK Kal Sel	WTP ke Sepuluh	Kepala Perwakilan BPK Kal Sel	
9.	30 Mei 2023	Di Kota Bandung	Penghargaan Berhasil Meraih Award 2023 dengan Kategori 1 terbaik 3 Pengembangan Kompetensi 2, Terbaik 5 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja 3, Terbaik 5 Penerapan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	Secara Virtual	
10.	8 Juni 2023	Gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan RI	Penghargaan Pastika Away Pariwara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Wakil Kesehatan RI	
11.	15 Agustus 2023	Titik 0 KM Banjarmasin	Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 2,86 dan Status Kinerja Sedang Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022	Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor	



No	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Oleh	Foto Kegiatan
12.	21 Agustus 2023	Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kal Sel Banjarmasin	Atas Kontribusi Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi di Balangan dan Pengusulan Kanim Kelas III Balangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal Ali	
13.	12 September 2023	Hotel Novotel Balikpapan	Peringkat I Apresiasi Percepatan Layanan Pengangkatan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara RI, Drs. Aris Windiyanto, M.Si	
14.	17 September 2023	Hotel Best Western Banjarmasin	Atas Komitmen Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Pekerja Rentan	BPJS Ketenagakerjaan Erfan Kurniawan	





## PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### BAB IV PENUTUP KESIMPULAN



- A. CAPAIAN KINERJA PADA IKU 2021-2026  
MENGACU RPJMD PERIODE 2021-2026
- B. UPAYA PERBAIKAN DAN RENCANA AKSI

## BAB IV PENUTUP

### KESIMPULAN

#### A. Capaian Kinerja pada IKU 2021-2026 Mengacu RPJMD Periode 2021-2026

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran PK Perubahan Berbasis Pohon Kinerja Baru tahun 2023 mengacu RPJMD Periode 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1.3 Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan						
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Angka	5,57	4,01	72,03	Sedang
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Angka	6,53	15,54	237,97	Sangat Tinggi
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Angka	1,35	8,74	648	Sangat Tinggi
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Angka	6,45	9,85	152,73	Sangat Tinggi
1.4 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi						
5.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Persentase	48,88%	16,76	34,28	Sangat Rendah
2.4 Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
6.	Usia Harapan Hidup	Usia	68,32	73,69	107,86	Sangat Tinggi
2.5 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
7.	Harapan Lama Sekolah	Angka	12,85	12,82	99,77	Sangat Tinggi
8.	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	8,36	8,03	96,05	Sangat Tinggi
2.6 Sasaran : Meningkatnya Pengeluaran Perkapita						
9.	Pengeluaran Perkapita	Angka	1308553	990.667	75,71	Sedang
3.3 Sasaran : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan						
10.	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,285	0,258	109,47	Sangat Tinggi
3.4 Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
11.	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	2,40	2,70	87,50	Tinggi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
4.1 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi						
12.	Nilai SAKIP	Angka	72,40(BB)	70,17 (BB)	96,92	Sangat Tinggi
13.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
14.	Nilai EKPPD	Angka	3,5900	2,8600	79,67	Tinggi
15.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51 (B)	4,01 (A Minus)	114	Sangat Tinggi
16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	85,07	100,08	Sangat Tinggi
4.2 Sasaran : Meningkatnya Kualitas SDGS Desa						
17.	Indeks Desa membangun	Indeks	0,7293	0,7527	103,21	Sangat Tinggi

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran PK tahun 2023 Berbasis Pohon Kinerja Lama mengacu RPJMD Periode 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
1.3 Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik						
1.	Indeks Infrastruktur Publik	Indeks	41,58	43,69	105,07	Sangat Tinggi
1.4 Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman						
2.	Indeks Infrastruktur Permukiman	Indeks	31,42	29,87	95,07	Sangat Tinggi
2.2 Sasaran : Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan						
3.	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,30	50	99,40	Sangat Tinggi
4.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,16	93,97	102,71	Sangat Tinggi
5.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	55,67	51,94	93,30	Sangat Tinggi
3.2 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi						
6.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	13,14	37,68	58,45	Sangat Rendah
7.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	%	6,40	4,16	65	Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
8.	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,44	0,24	55	Sangat Tinggi
9.	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	Milyar	600 M	471,227	78,54	Tinggi
4.2 Sasaran : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka						
10.	Angka Pengangguran Terbuka	Angka	2,40	2,70	87,50	Tinggi
5.3 Sasaran : Meningkatkan Indeks Pendidikan						
11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	8,36	8,03	96,05	Sangat Tinggi
12.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,85	12,82	99,77	Sangat Tinggi
5.4 Sasaran : Meningkatkan Indeks Kesehatan						
13.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,32	73,69	107,86	Sangat Tinggi
14.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	Angka	132	207	43,18	Sangat Rendah
15.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran)	Angka	8,8	15,54	23,41	Sangat Rendah
16.	Prevalensi Stunting	Angka	14	14,61	95,64	Sangat Tinggi
17.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Angka	18	20,80	84,44	Tinggi
6.2 Sasaran : Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi						
18.	Nilai SAKIP	Angka	72,40 (BB)	70,17 (BB)	96,92	Sangat Tinggi
19.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
20.	Nilai EKPPD	Angka	3,5900	2,8600	79,67	Tinggi
21.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.51 (B)	4,01 (A Minus)	114	Sangat Tinggi
22.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85,07	100,08	Sangat Tinggi
7.5 Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan						
23.	Angka Kemiskinan	Angka	5,2 – 5,0	5,22	99,62	Sangat Tinggi



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Kategori
24.	Angka PPKS yang tertangani	Angka	70,95	59,40	83,70	Tinggi
7.6 Sasaran : Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif						
25.	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka	0	0	100	Sangat Tinggi
7.7 Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum						
26.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	100	100	100	Sangat Tinggi
27.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	126,16	115,21	108,68	Sangat Tinggi
7.8 Sasaran : Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan						
28.	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	%	68	70,97	104,37	Sangat Tinggi
8.2 Sasaran : Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan						
29.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7293	0,7527	103,21	Sangat Tinggi

Adapun Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan IV (September-Desember) Tahun 2023 yang mengacu pada Perda RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	398.393.943.396	95,87	60,85	98,27	327.473.758.405	95,87	60,85	98,27	82,20
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	307.846.820.740,00	99,24	105,14	102,19	263.915.010.163	99,24	105,14	102,19	85,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	572.082.979.723	96,95	94,54	96,40	484.722.012.213	96,95	94,54	96,40	84,73
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	31.011.079.398	157,13	131,33	100,00	28.976.571.846	157,13	131,33	100,00	93,44
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	17.530.914.109	99,53	100,00	100,33	16.564.936.177	99,53	100,00	100,33	94,49
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	33.138.442.066	99,98	100,00	100,00	32.113.042.961	99,98	100,00	100,00	96,91
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	44.152.753.567	97,71	92,22	81,96	41.169.187.284	97,71	92,22	81,96	93,24
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	34.777.134.530	105,53	98,67	99,60	32.070.637.124	107,72	98,67	99,60	92,22
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	6.962.697.488	91,39	95,65	97,65	6.712.431.719	91,39	95,65	97,65	96,41
10	Dinas Perhubungan	100	37.747.266.461	93,22	90,54	72,56	36.122.030.617	93,22	90,54	72,56	95,69



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang di Evaluasi Pada Triwulan IV Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
		K	APBD (Rp)	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	Rp	K (Sub Keg)	K (Kegiatan)	K (Program)	APBD (Rp)
1	2	3		4				5			
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	25.932.795.061	100,58	100,66	98,93	23.698.362.187	100,58	100,66	98,93	91,38
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	19.570.526.816	100,75	97,21	91,76	17.938.103.598	100,75	97,21	91,76	91,66
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100	38.424.373.297	94,11	97,29	216,69	37.125.487.907	94,11	97,29	216,69	96,62
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100	34.903.988.070	96,19	98,69	87,28	31.719.175.855	96,19	98,69	87,28	90,88
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	13.259.629.256	107,28	88,36	87,37	11.381.497.773	107,28	88,36	87,37	85,84
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	201.061.782.780,00	109,47	100,00	102,60	182.228.355.448,00	109,47	100,00	102,60	90,63
17	Sekretariat Daerah	100	203.756.090.549	98,11	101,36	80,00	188.014.767.019	98,11	101,36	80,00	92,27
18	Inspektorat Kabupaten	100	25.002.883.060	124,44	96,59	81,50	21.665.401.766	124,44	96,59	81,50	86,65
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100	21.056.536.066	98,87	102,00	104,67	19.971.580.789	98,87	102,00	104,67	94,85
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	359.520.937.817	94,90	100,00	96,91	341.389.410.640	94,90	100,00	96,91	94,96
21	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	19.076.062.212	99,22	114,49	35,60	17.797.565.535	99,22	114,49	35,60	93,30
22	Sekretariat DPRD	100	62.644.362.476	84,93	88,89	92,42	55.638.722.423	84,93	88,89	92,42	88,82
23	Kecamatan Lumphong	100	5.399.575.291	91,67	91,67	100,00	5.115.111.377	91,67	91,67	100,00	94,73
24	Kecamatan Batumandi	100	5.714.687.973	99,95	95,61	101,68	5.472.611.561	99,95	95,61	101,68	95,76
25	Kecamatan Awayan	100	4.948.760.470	97,60	92,37	85,71	4.779.033.458	97,60	92,37	85,71	96,57
26	Kecamatan Halong	100	4.921.582.520	99,53	100,00	100,48	4.549.462.508	99,53	100,00	100,48	92,44
27	Kecamatan Juai	100	4.812.649.341	100,14	92,86	86,93	4.432.197.076	100,14	92,86	86,93	92,09
28	Kecamatan Paringin	100	10.897.613.266	80,95	93,33	100,11	9.634.023.697	80,95	93,33	100,11	88,40
29	Kecamatan Tebing Tinggi	100	3.673.367.000	139,17	87,77	87,50	3.649.009.752	139,17	87,77	87,50	99,34
30	Kecamatan Parsel	100	8.536.824.894	98,52	90,38	83,68	7.548.598.242	98,52	90,38	83,68	88,42
<b>Rata-Rata Capaian SKPD Kabupaten Balangan</b>		<b>100</b>	<b>2.556.759.059.693</b>				<b>2.263.588.097.120</b>	<b>101,84</b>	<b>96,62</b>	<b>95,69</b>	<b>88,53</b>
<b>Predikat Kinerja</b>								<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>

## B. Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi

Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Implementasi SAKIP berdasarkan LHE Kemenpan RB Nomor B/1154/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 67,04 atau predikat B. Adapun beberapa rencana aksi atas perbaikan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### A. Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan pada Tahun 2023

1. Melakukan evaluasi dan rewiu cascading kinerja melalui asistensi bersama dengan TIM SAKIP Pemda Balangan dan fasilitasi dengan Kemenpan RB.



2. Menyusun sasaran strategis pada level pemerintah daerah agar lebih berorientasi outcome yang berdampak secara langsung ke masyarakat dan indikator kinerja yang dimiliki harus relevan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Hasil cascading Pemerintah Daerah akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan awal RPJPD pada tahun 2023 (Perubahan) dan Teknokratik RPJMD pada tahun 2024.
4. Asistensi Reviu indikator Kinerja SKPD dengan Tim SAKIP Pemda Balangan, Reviu IKU SKPD mengacu pada cascading kinerja berbasis logical framework.
5. Mereviu kembali perencanaan kinerja PD agar dapat merumuskan sasaran strategis yang berorientasi outcome yang mampu menjawab tugas, fungsi dan ekspektasi masyarakat terkait dengan hadirnya PD tersebut. Selain itu, memastikan indikator kinerja yang dimiliki agar dapat relevan mengukur keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan tindaklanjut terkait adanya catatan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah diberikan dengan melakukan rapat dengan melibatkan bidang-bidang terkait agar diperoleh kesepakatan terkait sasaran strategis yang berorientasi outcome dan indikator yang bisa mengukur keberhasilan pencapaian kinerja.
7. Wujud kegiatan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan terhadap Cashcading dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdahulu dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimana dalam penyusunan perbaikan Cashcading melalui konsep kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) pada penjabaran kinerja antar level.
8. Penyusunan tersebut dilakukan terhadap ketiga urusan yang diampu oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahap 1 yang dilakukan yaitu menentukan outcome, Tahap 2 Mengidentifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja, Tahap 3 Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional, Tahap 4 Merumuskan Indikator Kinerja, Tahap 5, Penyusunan Pohon Kinerja dan Penyusunan Cashcading.
9. Setelah melakukan penyusunan melalui Tahapan-Tahapan Tersebut maka ditetapkan bahwa untuk Urusan Sosial dengan tujuan “Meningkatnya Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat” dengan Indikator tujuan” Persentase PPKS yang Mandiri”, dengan Sasaran SKPD “ Meningkatkan PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya” dengan Indikator Sasaran “Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dan Sasaran “Meningkatnya Sumber Daya Manusia PSKS yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” dengan Indikator Sasaran “ Persentase SDM PSKS yang berkualitas dan berkompeten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Dukungan Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa” dengan Indikator Tujuan “ Indeks Desa Membangun”, dengan Sasaran SKPD “ Meningkatkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik” Indikator Sasaran “ Persentase Pembinaan Pemerintahan Desa”, Sasaran SKPD “Meningkat dan berkembangnya status pembangunan desa” Indikator Sasaran “ Persentase Peningkatan Status Desa Maju”.
10. Telah dilaksanakan penyusunan Cashcading dengan berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, namun belum dapat dituangkan kedalam dokumen kerja seperti Renstra, dan Renja, dikarenakan adanya tahapan-tahapan dari sisi perencanaan yang belum dapat mengakomodir.
11. Melakukan evaluasi dan reviu cascading kinerja melalui asistensi indikator dengan TIM SAKIP Pemda Balangan dan fasilitasi dengan Kemenpan RB.



12. Menyempurnakan kembali penjabaran kinerja yang dimiliki agar disusun berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) pada penjabaraan kinerja antar level sehingga pencapaian kinerja antar level saling mempengaruhi.
13. Melakukan evaluasi dan reviu cascading kinerja dan crosscutting melalui asistensi indikator dengan TIM SAKIP Pemda Balangan dan fasilitasi dengan Kemenpan RB.
14. Pengidentifikasi crosscutting pada level pemerintah daerah yang mengarah ke pengidentifikasian kondisi hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas PD yang mempengaruhi pencapaian kinerja strategis/final outcome di level pemerintah daerah.
15. Melakukan asistensi dengan SKPD dan melakukan pengukuran kinerja secara online melalui aplikasi E-KINO dan memfasilitasi SKPD dalam penginputan secara triwulan serta penajaman data dukung kinerja triwulan melalui google drive yang disediakan Bagian Organisasi, melakukan revisi PK dan IKU SKPD.
16. Melakukan evaluasi dan reviu terhadap rumusan perhitungan indeks infrastruktur urusan PUPR ( formula yang kami gunakan selama ini berfokus pada bidang yang hanya melakukan pembangunan infrastruktur publik saja ) untuk selanjutnya kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Menpan.
17. Melakukan asistensi dengan SKPD dan melakukan pengukuran kinerja secara online melalui aplikasi E-KINO dan memfasilitasi SKPD dalam penginputan secara triwulan serta penajaman data dukung kinerja triwulan melalui google drive yang disediakan Bagian Organisasi, memberikan penandatanganan PK secara ceremonial bersamaan dengan internalisasi core values ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas selaku ASN.
18. Melakukan rapat koordinasi TIM SAKIP dalam rangka pembahasan hasil entri data E-KINO dan E-Monev.
19. Menjadikan kinerja sebagai salah satu tolak ukur dalam pemberian TPP ASN dalam kemasan indikator prestasi kerja.
20. Melakukan rapat penyusunan LKIP, melakukan asistensi dengan SKPD terkait capaian data kinerja, melakukan asistensi penyusunan LKIP SKPD, melakukan entri data hasil LHE SAKIP SKPD tahun sebelumnya dan memantau progres rencana aksi, mereviu kembali dokumen perencanaan baik renstra renja maupun PK.
21. Melakukan asistensi pengukuran kinerja dan melakukan pengecekan data dukung kinerja sebagai bersama TIM SAKIP Kabupaten dan SKPD.
22. Telah melakukan analisa terkait efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja pada sasaran/indikator IKU sampai Triwulan II Tahun 2023.
23. Telah melakukan penambahan pada Dokumen Laporan analisa terkait efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja pada sasaran/indikator IKU.
24. Telah melakukan analisa terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, Bappedalitbang menaikkan target tahunan indeks perencanaan mulai perubahan tahun 2023 dst, menjadi 100% (Mempertahankan capaian kondisi terakhir).
25. Melaksanakan perbaikan target kinerja pada perencanaan kinerja di perubahan.
26. Melakukan Rapat teknis TIM SAKIP Kabupaten, melakukan rapat lanjutan dengan SKPD tentang pemahaman atas implementasi Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.
27. Akan meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM APIP Inspektorat Kabupaten Balangan melalui seleksi terbuka dan Uji Kompetensi serta meningkatkan dan mengikutkansertakan dalam Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM khususnya Bimtek PermenPANRB no. 88 Tahun 2021.
28. Melakukan asistensi penyusunan LKIP SKPD bersama Tim SAKIP Kabupaten, memastikan penginputan dokumen SAKIP pada aplikasi E-SAKIP Reviu dan website Balangan.
29. APIP selaku evaluator SAKIP akan melakukan FGD/PKS untuk dapat mempertajam dan lebih spesifik dalam memberikan rekomendasi di LHE SAKIP SKPD.
30. Melakukan monitoring triwulan tindaklanjut hasil LHE tahun sebelumnya. (LHE Tahun 2021)



**B. Rencana Aksi yang Akan Dilakukan pada Tahun 2024**

1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah:
  - Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045.
  - Pemerintah Daerah akan menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 – 2029.
  - Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Balangan (RPJPD dan RPJMD) disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur.
  - Pohon kinerja hasil asistensi dengan Kemenpanrb dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
2. Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB.
3. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) SKPD telah dilakukan Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading bersama Kementerian PAN RB dan telah memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional, sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi.
4. Ada beberapa SKPD yang perlu dilakukan reviu kembali pohon kinerja dan cascadingnya dengan Kementerian PANRB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Sosial, PPPAPMD.
5. Dokumen Perencanaan SKPD :  
SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB.
6. Melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi atas rencana aksi SKPD sebagai implementasi pencapaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan LHE SAKIP melalui aplikasi e-kino dan manual.
7. Melakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya.
8. Melakukan Asistensi dan monitoring evaluasi capaian Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan dengan data yang relevan.
9. Melaksanakan coaching klinik penyusunan SKP berbasis pada Perjanjian Kinerja Individu dan asistensi kesesuaian antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
10. Telah dilaksanakan Asistensi dengan Kementerian PANRB Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga Laporan Kinerja SKPD memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja
11. Memanfaatkan Informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja terutamapencapaian realisasi kinerja rendah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas ke depan.
12. LKIP dijadikan dasar penyusunan renja SKPD dan adanya kegiatan khusus tentang AKB menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam LKIP Kabupaten dan SKPD.
13. Telah Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan III tahun 2023.
14. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP triwulan IV 2023.
15. Membuat Perbup Evaluasi AKIP.
16. Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
17. Membuat SOP Evaluasi AKIP.
18. Telah dilaksanakan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan pada program strategi pengurangan beban pengeluaran sesuai fokus utama dalam pengentasan kemiskinan.
19. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD yang berfokus pada upaya kolaborasi pensasaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang berdasarkan pada data P3KE dan dapat menghasilkan data sektoral SKPD



khususnya Dinas Sosial, adanya inovasi SIAP PD sebagai alat yang mempermudah dalam intervensi dan berkoordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.

20. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) terkait akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan monitoring evaluasi hasil intervensi per triwulan yang mengacu pada RAT Penanggulangan kemiskinan (Rencana Aksi Tahunan)
21. Optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaporan kemiskinan ekstrem dengan memberi kolom belanja spesifik sehingga terlihat jumlah belanja spesifik sebagai bahan analisa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ditahun berikutnya.

**C. Tabulasi Hasil Evaluasi SAKIP Pemda, Rekomendasi Menpan RB dan Rencana Aksi Pemda**

Berdasarkan LHE SAKIP Pemda Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengacu surat Nomor B/494/AA.05/2023 tanggal 27 Nopember 2023, tabulasi hasil evaluasi, rekomendasi implementasi SAKIP dari Kemenpan RB dan Rencana Aksi Pemda terlihat dalam tabulasi dibawah ini :

NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
<b>A</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>		
1.	Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan Instansi Pemerintah memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis;	1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur;	1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah: - Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 - Pemerintah Daerah akan menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 - 2029 - Penyusunan dokumen Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Balangan (RPJPD dan RPJMD) disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur. - Pohon kinerja hasil asistensi dengan Kemenpanrb dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah 2. Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB



NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
2.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyusun penjenjangan kinerja dengan berpedoman pada Permen PANRB 89 Tahun 2021. Namun penjenjangan yang dilakukan masih perlu dilakukan penyempurnaan, utamanya pada kinerja pada level taktikal yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta memiliki rumusan kinerja yang sama/redundant dengan kinerja di atasnya;	2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi;	1. Sebanyak 30 (Tiga Puluh) SKPD telah dilakukan Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading bersama Kementerian PAN RB dan telah memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional, sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi 2. Ada beberapa SKPD yang perlu dilakukan reviu kembali pohon kinerja dan cascadingnya dengan Kementerian PANRB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Sosial, PPPAPMD
3.	Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik;	3. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;	1. Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian restra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB
4.	Aktivitas dalam Rencana Aksi yang disusun oleh beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah daerah.	4. Meningkatkan kualitas rencana aksi pada setiap Perangkat daerah agar memuat aktivitas yang irrelevant dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pada pemerintah daerah;	1. Melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi atas rencana aksi SKPD sebagai implementasi pencapaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan LHE SAKIP melalui aplikasi e-kino dan manual.
<b>B. Pengukuran Kinerja</b>			
1.	Sistem pengukuran kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai;	5. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;	1. Melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya.
2.	Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;	6. Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran	1. Melakukan Asistensi dan monitoring evaluasi capaian Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan dengan data yang relevan.



NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
		capaian kinerja dapat diandalkan;	
3.	Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP), namun SKP yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi;	7. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;	1. Melaksanakan coaching klinik penyusunan SKP berbasis pada Perjanjian Kinerja Individu dan asistensi kesesuaian antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
<b>C Pelaporan Kinerja</b>			
1.	Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;	8. Mengimplementasikan standar pelaporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 secara merata pada setiap unit kerja dengan memastikan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja;	1. Telah dilaksanakan Asistensi dengan Kementerian PANRB Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga Laporan Kinerja SKPD memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja.
2.	Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan unit kerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan.	9. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja perangkat daerah maupun unit kerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;	1. Memanfaatkan Informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja terutamapencapaian realisasi kinerja rendah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas ke depan. 2. LKIP dijadikan dasar penyusunan renja SKPD dan adanya kegiatan khusus tentang AKB menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam LKIP Kabupaten dan SKPD.
<b>D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
1.	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi internal kepada Perangkat Daerah, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kerjanya belum tercapai;	10. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;	1. Telah Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan III tahun 2023 2. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP triwulan IV 2023.
2.	Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk	11. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang	1. Membuat Perbup Evaluasi AKIP.



NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.	diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;	2. Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. 3. Membuat SOP Evaluasi AKIP.
<b>E</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan</b>		
1.	Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebesar Rp. 287.376.020.624 atau 13,90% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 101 Sub Kegiatan;	12. Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Balangan agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Balangan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;	1. Telah dilaksanakan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan pada program strategi pengurangan beban pengeluaran sesuai fokus utama dalam pengentasan kemiskinan.
2.	Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian" yaitu sebesar 27,26% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT" yaitu sebesar 0,33928%;	13. Mendorong keterlibatan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Balangan, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;	1. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD yang berfokus pada upaya kolaborasi pensasaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang berdasarkan pada data P3KE dan dapat menghasilkan data sektoral SKPD khususnya Dinas Sosial, adanya inovasi SIAP PD sebagai alat yang mempermudah dalam intervensi dan berkoordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
3.	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,22% atau turun 0,61% dibandingkan dengan tahun 2022;	14. Pimpinan Daerah beserta Bappeda agar melakukan revidi atas seluruh program, kegiatan serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.	1. Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) terkait akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan monitoring evaluasi hasil intervensi per triwulan yang mengacu pada RAT Penanggulangan kemiskinan (Rencana Aksi Tahunan).
4.	Hasil analisis tim evaluator masih menemukan banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan		1. Optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaporan kemiskinan ekstrem dengan memberi kolom belanja spesifik sehingga terlihat jumlah belanja spesifik sebagai bahan



NO	HASIL EVALUASI MENPAN	REKOMENDASI MENPAN	RENCANA AKSI PEMDA BALANGAN
	dinas dan lainnya) yang masih cukup besar.		analisa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ditahun berikutnya.



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SK IKU KABUPATEN BALANGAN PERIODE RPJMD 2021-2026
LAMPIRAN 2	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN 3	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 BERBASIS POHON KINERJA LAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN 5	POHON KINERJA DAN CASCADING TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN 6	CROSCUTING PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
LAMPIRAN 7	RENCANA AKSI PEMDA ATAS LHE KEMENPAN RB TAHUN 2023
LAMPIRAN 8	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAMPIRAN 9	DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2023
LAMPIRAN 10	SK IKU PERUBAHAN MENGACU PADA RPJMD PENYESUAIAN
LAMPIRAN 11	POHON KINERJA TATA KELOLA
LAMPIRAN 12	CASCADING KINERJA TATA KELOLA
LAMPIRAN 13	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LAMPIRAN 14	PENGUKURAN KINERJA PK PERUBAHAN
LAMPIRAN 15	RANCANGAN KETERKAITAN RPJMD PENYESUAIAN DAN PK KABUPATEN



# LAMPIRAN I

SK IKU KABUPATEN BALANGAN  
PERIODE RPJMD 2021-2026



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ **754** /Kum TAHUN 2021  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

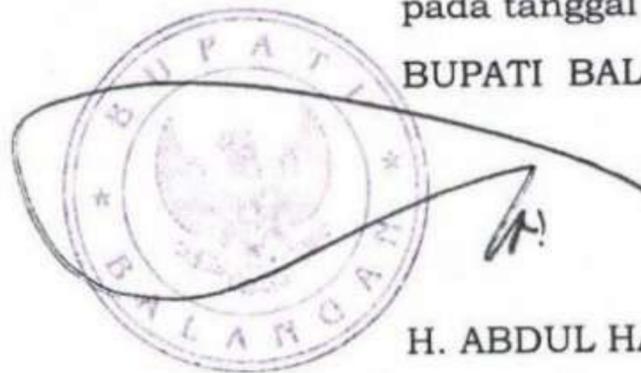
3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007/ tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;
  - b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unit Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
  - c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 188.45/754 /KUM TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA												
<b>MISI I : MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>																		
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1 Indeks Infrastruktur Publik	<p>Makna : Indeks Infrastruktur Publik merupakan Indikator Komposit untuk menggambarkan kondisi pelayanan publik di bidang infrastruktur.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Indeks Infrastruktur Publik diperlukan sebagai bahan evaluasi, analisis dan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait pemenuhan infrastruktur publik guna menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>INDEKS INFRASTRUKTUR PUBLIK</p> <table border="1"> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>(70%*(PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP+PERSENTASE JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP)) + (30%*((40%*PRESENTASE PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN) + (40%*PERSENTASE SARANA PRASARANA TERMINAL YANG MEMADAI) + (20%*PERSENTASE SARANA PRASARANA PERPARKIRAN YANG MEMADAI))</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30%</td> <td>50%*(PERSENTASE PANJANG INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN DAERAH YANG DIBANGUN + PERSENTASE LUAS JARINGAN DAERAH IRRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KONDISI BAIK)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10%</td> <td>PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG/PUBLIK DALAM KONDISI BAIK</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10%</td> <td>(30%*CAKUPAN INTERNET) + (70%*PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI AKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH)</td> </tr> </table>	50%	50%	(70%*(PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP+PERSENTASE JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP)) + (30%*((40%*PRESENTASE PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN) + (40%*PERSENTASE SARANA PRASARANA TERMINAL YANG MEMADAI) + (20%*PERSENTASE SARANA PRASARANA PERPARKIRAN YANG MEMADAI))		30%	50%*(PERSENTASE PANJANG INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN DAERAH YANG DIBANGUN + PERSENTASE LUAS JARINGAN DAERAH IRRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KONDISI BAIK)		10%	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG/PUBLIK DALAM KONDISI BAIK		10%	(30%*CAKUPAN INTERNET) + (70%*PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI AKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Perhubungan	Perhitungan Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Perhubungan
50%	50%	(70%*(PERSENTASE JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI MANTAP+PERSENTASE JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP)) + (30%*((40%*PRESENTASE PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN) + (40%*PERSENTASE SARANA PRASARANA TERMINAL YANG MEMADAI) + (20%*PERSENTASE SARANA PRASARANA PERPARKIRAN YANG MEMADAI))																
	30%	50%*(PERSENTASE PANJANG INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN DAERAH YANG DIBANGUN + PERSENTASE LUAS JARINGAN DAERAH IRRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM KONDISI BAIK)																
	10%	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG/PUBLIK DALAM KONDISI BAIK																
	10%	(30%*CAKUPAN INTERNET) + (70%*PERSENTASE OPD YANG MEMILIKI AKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH)																

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA						
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2 Indeks Infrastruktur Permukiman	<p>Makna : Indeks Infrastruktur Permukiman merupakan Indikator komposit untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di bidang infrastruktur guna pemenuhan standar hidup layak.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Indeks Infrastruktur Permukiman diperlukan sebagai bahan evaluasi, analisis dan masukan dalam pengambilan kebijakan terkait pemenuhan infrastruktur dasar.</p> <p>Rumus Perhitungan : INDEKS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</p> <table border="1"> <tr> <td>20%</td> <td>(70%*PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH) + (30%*PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH)</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>(30%*PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU) + (20%*PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DIKAWASAN PERKOTAAN YANG TERTANGANI) + (30%*PERSENTASE TERSEDIAANYA LUASAN RTH) + (30%*CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI)</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>50%*(PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR BERSIH YANG LAYAK + PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK)</td> </tr> </table>	20%	(70%*PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH) + (30%*PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH)	20%	(30%*PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU) + (20%*PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DIKAWASAN PERKOTAAN YANG TERTANGANI) + (30%*PERSENTASE TERSEDIAANYA LUASAN RTH) + (30%*CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI)	10%	50%*(PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR BERSIH YANG LAYAK + PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Perhitungan Mandiri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
20%	(70%*PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH) + (30%*PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH)											
20%	(30%*PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU) + (20%*PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DIKAWASAN PERKOTAAN YANG TERTANGANI) + (30%*PERSENTASE TERSEDIAANYA LUASAN RTH) + (30%*CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI)											
10%	50%*(PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR BERSIH YANG LAYAK + PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR LIMBAH DOMESTIK)											
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3 Indeks Kualitas Air	<p>Makna : Indeks Kualitas Air merupakan indikator untuk menggambarkan capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kualitas air.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Indeks Kualitas Air memberikan gambaran instrumen keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dari segi kualitas air.</p> <p>Rumus Perhitungan : Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>PI<sub>j</sub> adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan ① yang merupakan fungsi dari C<sub>i</sub>/L<sub>ij</sub>, di mana C<sub>i</sub> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L<sub>ij</sub> menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.</p>	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Perhitungan Mandiri, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup						

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	4 Indeks Kualitas Udara	<p>Makna : Indeks Kualitas Udara merupakan indikator untuk menggambarkan capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kualitas udara.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Indeks Kualitas Udara memberikan gambaran instrumen keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dari segi kualitas udara.</p> <p>Rumus Perhitungan :  <math display="block">IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)</math> Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen.</p>	Dinas dan Hidup Pertanahan Lingkungan	Perhitungan Mandiri, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
			5 Indeks Kualitas Lahan	<p>Makna : Indeks Kualitas Lahan merupakan indikator untuk menggambarkan capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kualitas lahan.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Indeks Kualitas Lahan memberikan gambaran instrumen keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dari segi kualitas lahan.</p> <p>Rumus Perhitungan :  <math display="block">IKTL = 100 \left( 84,3 - (TL \times 100) \times \frac{50}{54,3} \right)</math> </p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA SERTA EKONOMI KREATIF</b>						
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	<p>Makna :</p> <p>Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor pertanian dan perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Nilai Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan (<i>leading sector</i>) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB sektor Pertanian, Perikanan, dan Perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Data BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			7 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	<p>Makna :</p> <p>Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Nilai Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (<i>leading sector</i>) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	8 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	<p>Makna : Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (<i>leading sector</i>) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math></p>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Data BPS, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			9 Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	<p>Makna : Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah) merupakan angka/nilai yang menggambarkan sejauh mana investasi dan permodalan perusahaan dapat dikembangkan di daerah.</p> <p>Alasan Pemilihan : Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah) diperlukan sebagai gambaran kegiatan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan : Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.</p>	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Perhitungan Mandiri, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dipindai dengan CamScanner

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	5 Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10 Angka Pengangguran Terbuka	<p>Makna :            Angka Pengangguran Terbuka merupakan gambaran kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.</p> <p>Alasan Pemilihan :            Nilai Angka Pengangguran Terbuka diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan ketenagakerjaan dan acuan bagi Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru.</p> <p>Rumus Perhitungan :  <math display="block">TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</p>	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Data BPS, Perhitungan Mandiri, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN</b>						
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	6 Meningkatkan Indeks Pendidikan	11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	<p>Makna :</p> <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/<i>Mean Years School (MYS)</i> didefinisikan sebagai jumlah tahu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- / yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			12 Angka Harapan Lama Sekolah	<p>Makna :</p> <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	7 Meningkatnya Indeks Kesehatan	13 Usia Harapan Hidup	<p>Makna :</p> <p>Usia Harapan Hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu.</p>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data BPS, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			14 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	<p>Makna :</p> <p>Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI menggambarkan status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	7 Meningkatnya Indeks Kesehatan	15 Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	<p>Makna :</p> <p>Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memonitor kematian bayi yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $AKB = \frac{D_{0-51th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana:</p> <p><math>D_{0-51th}</math> = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p> <p><math>\sum \text{Lahir Hidup}</math> = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.</p>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perhitungan Mandiri; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			16 Prevalensi Stunting	<p>Makna :</p> <p>Kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya (Apabila tinggi badan dan panjang tubuhnya minus 2 dari standar Multicentre Growth Reference Study atau standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO atau dengan nilai z-skor nya kurang dari -2 SD menurut Kemenkes RI).</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Memperoleh gambaran terhadap status gizi masyarakat untuk kemudian dilakukan perbaikan baik intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik terhadap perbaiki status gizi masyarakat.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ <p><small>Keterangan:  PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)  JAB(5)SPstunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu  JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</small></p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	7 Meningkatkan Indeks Kesehatan	17 Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	<p>Makna : ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Indikator ini mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dimasa yang akan datang, pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).</p> <p>Alasan Pemilihan : ASFR 15 - 19 tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 1000$	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perhitungan Mandiri; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>MISI IV : MENINGKATKAN KUALITAS DAN LAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA</b>						
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18 NILAI SAKIP	<p>Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p> <p>Rumus Perhitungan : LHE SAKIP Kemenpan RB RI</p>	Sekretariat Daerah; Inspektorat; Bappedalitbang; dan Seluruh SKPD	LHE SAKIP Kemenpan RB RI, Sekretariat Daerah; Inspektorat; Bappedalitbang; dan Seluruh SKPD
			19 Opini BPK	<p>Makna : Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>Rumus Perhitungan : Perolehan Opini WTP dalam LHP BPK atas LKPD (UU Nomor 15 Tahun 2004)</p>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	20 Nilai EKPPD	<p>Makna :</p> <p>EKPPD Kabupaten/Kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian divalidasi oleh Tim Nasional pada saat EKPPD dilaksanakan (pembobotan nilai adalah 100% di dapat dari indeks capaian kinerja sebesar 95% dan indeks kesesuaian materi sebesar 5% pada capaian urusan pemerintahannya).</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri</p>	Sekretariat Daerah dan Seluruh SKPD	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri; Sekretariat Daerah
			21 Indeks Pelayanan Publik	<p>Makna :</p> <p>Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p><b>Rumus Perhitungan;</b> Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Menentukan nilai untuk setiap indikator</b> • Nilai per indikator: <math>\frac{(\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03)}{3} \times \text{bobot perindikator}</math></li> <li><b>Menentukan nilai setiap aspek</b> • Nilai per aspek: <math>\sum \text{nilai perindikator}</math></li> <li><b>Menentukan indeks</b> • Nilai indeks: <math>\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></li> </ol> <p>Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi</p>		

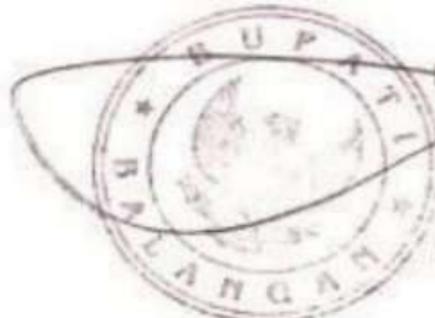
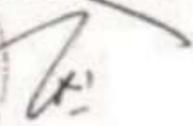
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	22 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan publik.</p> <p>Rumus Perhitungan : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p>	Sekretariat Daerah dan UPP	Perhitungan Mandiri; Sekretariat Daerah dan UPP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<b>MISI V : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF</b>						
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	9 Menurunnya Angka Kemiskinan	23 Angka Kemiskinan	<p>Makna : Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indeks yang menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan.</p> <p>Rumus Perhitungan : Badan Pusat Statistik</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Data BPS, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			24 Angka PPKS yang tertangani	<p>Makna : Mengindikasikan besaran jumlah PPKS yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Alasan Pemilihan : Semakin besar prosentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan menurunkan jumlah PPKS se-Kabupaten Balangan.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Target Populasi PPKS yang Dibiayai APBD}}{\text{Target PPKS Kab/Kota}} \times 100</math> </div>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	10 Terjaganya kehidupan sosial yang kondusif	25 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	<p>Makna :</p> <p>Makna Indikator tersebut kita mengharapkan dengan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial di Kabupaten Balangan baik itu dari segi pembinaan secara materil dan moril dapat mewujudkan Daerah yang memiliki kualitas yang baik di bidang sosial sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi dan dapat berpengaruh baik dalam menciptakan Iklim yang Kondusif.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Semakin sedikit Kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban membandingkan dengan sebelumnya.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani}}{\text{Total Kasus}} \times 100\%</math> </div>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perhitungan Mandiri; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>Makna :</p> <p>Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Persentase pelanggaran trantibum di masyarakat.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Sebagai informasi terkait tingkat kondusifitas daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <math display="block">\frac{\text{Kasus Tahun N} - \text{Kasus N1}}{\text{Kasus Tahun N-1}}</math> </div>		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	11 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27 Indeks Resiko Bencana	<p>Makna : Indeks Resiko Bencana merupakan tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana.</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Informasi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\text{Resiko (R)} = \text{BAHAYA (H)} \times \frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$	BPBD	Perhitungan Mandiri; BPBD
		12 Meningkatkan Budaya Balangan yang Terlestarikan	28 Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	<p>Makna : Persentase Seni dan Budaya yang mendapatkan binaan serta pemeliharaan untuk mencapai SPM minimal dalam 5 tahun.</p> <p>Alasan Pemilihan : Setiap bidang seni dan budaya berhak mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah agar mencapai SPM untuk mempertahankan eksistensi seni dan budaya daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dikembangkan}}{\text{Jumlah seni dan budaya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perhitungan Mandiri; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8	Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	13 Meningkatkan Status Desa Kabupaten Balangan	29 Indeks Desa Membangun	<p>Makna : Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\text{Indeks Variabel} = (\sum \text{Indikator}X) / (\text{Nilai Maksimum } (X))$ <p>Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Perhitungan Mandiri; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


 BUPATI BALANGAN,  
  
 H. ABDUL HADI

# LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, 10 Januari 2023



**BUPATI BALANGAN,**

**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik	41,58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	31,42	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3.	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,3	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	91,16	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan	55,67	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	13,14%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,40%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
		Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44%	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
		Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	600 M	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka	2,40%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6.	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	Meningkatnya Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup	68,32	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	132	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	8,8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Prevalensi Stunting	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)	18	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	72,40 (BB)	Setda, Inspektorat dan Bappedalitbang dan seluruh SKPD
		Opini BPK	WTP	BKPAD, Inspektorat
		Nilai EKPPD	3,5900	Setda dan seluruh SKPD
		Indeks Pelayanan Publik	3.51 (B)	Setda, dan UPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Setda, dan UPP
9.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,2 - 5,0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Angka PPKS yang tertangani	70,95%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
10.	Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Indeks Resiko Bencana	126,16	BPBD
12.	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Indeks Desa Membangun	0,7293	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. ga Berencana. BPBD

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Jalan	186.964.276.950
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.073.883.550
3.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	26.102.635.100
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.744.745.900
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	36.384.126.200
6.	Penataan Bangunan Gedung	95.665.486.600
7.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.021.794.152
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.044.640.000
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.925.982.200
10.	Kawasan Permukiman	4.577.050.400
11.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78.698.886.700
12.	Pengelolaan Persampahan	12.121.265.400
13.	Perencanaan Lingkungan Hidup	211.860.000
14.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	979.009.200
15.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.227.823.700
16.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	67.145.700
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.479.700
18.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.957.361.000

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
19.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	287.346.200
20.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	283.697.700
21.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.787.174.774
22.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	45.834.260.410
23.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	869.044.600
24.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.468.808.650
25.	Penyuluhan Pertanian	5.247.434.900
26.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	648.655.600
27.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.111.863.100
28.	Penanganan Kerawanan Pangan	188.132.700
29.	Pengawasan Keamanan Pangan	32.636.800
30.	Pengembangan UMKM	993.259.000
31.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	39.046.400
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	433.370.400
33.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	446.141.800
34.	Pengendalian Izin Usaha Industri	99.758.300
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.065.995.800
36.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.105.855.500
37.	Pengembangan Ekspor	2.205.017.000
38.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	133.810.000
39.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	421.864.000
40.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	57.010.000
41.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.306.682.700
42.	Pemasaran Pariwisata	1.004.998.500
43.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	349.152.500
44.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	82.437.400
45.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	87.980.800
46.	Pelayanan Penanaman Modal	426.926.800
47.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	106.140.000
48.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.414.732.500
49.	Penempatan Tenaga Kerja	1.191.123.700
50.	Pengelolaan Pendidikan	76.283.011.136
51.	Pengembangan Kurikulum	115.951.000
52.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	731.300.000
53.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	73.020.000
54.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	53.202.917.039
55.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.101.476.600

No	Program	Anggaran (Rp.)
56.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	82.828.200
57.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	383.297.600
58.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.382.948.500
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.184.481.293
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	4.913.270.000
61.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.643.029.200
62.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.629.293.900
63.	Pengelolaan Keuangan Daerah	309.853.037.350
64.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.203.370.400
65.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.024.252.400
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	63.278.489.200
67.	Pemberdayaan Sosial	302.605.200
68.	Rehabilitasi Sosial	368.028.200
69.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.474.881.837
70.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.262.478.000
71.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	255.675.100
72.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.405.330.000
73.	Penanggulangan Bencana	4.893.704.050
74.	Pengembangan Kesenian Tradisional	1.858.957.000
75.	Pembinaan Sejarah	3.803.682.000
76.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	659.441.000
77.	Administrasi Pemerintahan Desa	4.442.834.500
78.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.352.644.900
	<b>Jumlah</b>	<b>1.209.911.606.591</b>

Paringin, 10 Januari 2023



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

# LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

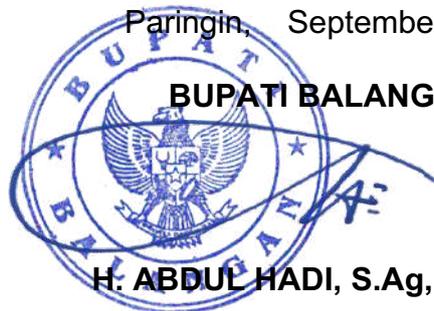
Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Paringin, September 2023

**BUPATI BALANGAN,**



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	5,57	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,53	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	1,35	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	48,88 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, BPKPAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	68,32	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
	Masyarakat			dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian, Pengembang SDM
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita	1.308.553	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kecamatan/Kelurahan/ Desa, Sekretariat Daerah
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini Rasio	0,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Kecamatan.
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	72,40 (BB)	Setda, Inspektorat dan Bappedalitbang dan seluruh SKPD
		Opini BPK	WTP	BPKPAD, Inspektorat
		Nilai EKPPD	3,5900	Setda dan seluruh SKPD
		Indeks Pelayanan Publik	3.51 (B)	Setda, dan UPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Setda, dan UPP
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	Indeks Desa Membangun	0,7293	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. ga Berencana. BPBD

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Jalan	77.913.633.500
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.016.624.950
3.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	14.756.534.300
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.744.745.900
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	32.262.673.000
6.	Penataan Bangunan Gedung	9.379.936.400
7.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.021.794.152
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.428.870.000
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.206.469.200
10.	Kawasan Permukiman	688.469.700
11.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48.359.069.950
12.	Pengelolaan Persampahan	6.185.535.400
13.	Perencanaan Lingkungan Hidup	211.860.000
14.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	894.009.200
15.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.928.553.700
16.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	67.145.700
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.479.700
18.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.814.037.500
19.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	137.346.200
20.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	262.704.700
21.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.534.359.300
22.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.365.510.300
23.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	736.008.000
24.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	757.118.350
25.	Penyuluhan Pertanian	3.462.884.900
26.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	451.953.800
27.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	632.877.600
28.	Penanganan Kerawanan Pangan	178.132.700
29.	Pengawasan Keamanan Pangan	32.636.800
30.	Pengembangan UMKM	403.446.800
31.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	39.046.400
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	285.370.400
33.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	196.141.800
34.	Pengendalian Izin Usaha Industri	79.758.300
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	936.995.800
36.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	949.088.500
37.	Pengembangan Ekspor	467.513.800
38.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	46.210.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
39.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	114.664.100
40.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	57.010.000
41.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	839.242.700
42.	Pemasaran Pariwisata	710.528.500
43.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	242.154.600
44.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	82.437.400
45.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	87.980.800
46.	Pelayanan Penanaman Modal	426.926.800
47.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	106,140,000
48.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.922.640.000
49.	Penempatan Tenaga Kerja	966.106.500
50.	Pengelolaan Pendidikan	60.586.819.213
51.	Pengembangan Kurikulum	115.951.000
52.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	731,300,000
53.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	73.020.000
54.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.255.784.993
55.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.907.426.600
56.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	82.828.200
57.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	333.799.600
58.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	278.948.500
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	227.927.945.007
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	3.265.760.000
61.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.443.030.500
62.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.229.293.700
63.	Pengelolaan Keuangan Daerah	225.942.195.034
64.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.243.230.400
65.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	794.032.400
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.602.573.000
67.	Pemberdayaan Sosial	289.405.200
68.	Rehabilitasi Sosial	328.979.000
69.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.454.881.837
70.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	684.451.000
71.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	358.507.100
72.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.128.907.700
73.	Penanggulangan Bencana	3,765,528,900
74.	Pengembangan Kesenian Tradisional	1.040.777.000
75.	Pembinaan Sejarah	361.482.000
76.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	619.441.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
77.	Administrasi Pemerintahan Desa	4.010.937.600
78.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.401.204.900
	<b>Jumlah</b>	

Paringin, September 2023



**BUPATI BALANGAN,**

**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

# LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA TAHUN  
2023 BERBASIS POHON KINERJA  
LAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
BALANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

Provinsi / Kabupaten/ Kota : Kalimantan Selatan / Balangan  
Tahun Anggaran : 2023

**MISI I :**

**MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Capaian 2022 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1 Indeks Infrastruktur Publik	109,73	41,58	43,69	105,07	82,89	52,71	SANGAT TINGGI	TURUN	-4,66
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2 Indeks Infrastruktur Permukiman	98,73	31,42	29,87	95,07	90,21	33,11	SANGAT TINGGI	TURUN	-3,66
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3 Indeks Kualitas Air	102,25	50,30	50	99,40	98,81	50,60	SANGAT TINGGI	TURUN	-2,85
		4 Indeks Kualitas Udara	100,97	91,16	93,97	103,08	102,71	91,49	SANGAT TINGGI	NAIK	2,11
		5 Indeks Kualitas Lahan	95,57	55,67	51,94	93,30	85,51	60,74	SANGAT TINGGI	TURUN	-2,27

MISI II :

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Capaian 2022 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian					
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	6 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	125,68	13,14	7,68	58,45	55,29	13,89	RENDAH	TURUN	-67,23
		7 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa (%)	108,73	6,40	4,16	65,00	62,09	6,70	RENDAH	TURUN	-43,73
		8 Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	362	0,44	0,24	55	48	0,50	RENDAH	TURUN	-307,45
		9 Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	127,35	600	471,23	78,54	30,48	1.546	TINGGI	TURUN	-48,81
5	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10 Angka Pengangguran Terbuka	36,21	2,40	2,70	87,50	82,61	2,30	TINGGI	NAIK	51,29

MISI III :

MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian					
6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11 Angka Rata-rata Lama Sekolah	97,03	8,36	8,03	96,05	87,57	9,17	SANGAT TINGGI	TURUN	-0,98
		12 Angka Harapan Lama Sekolah	99,14	12,85	12,82	99,77	96,83	13,24	SANGAT TINGGI	NAIK	0,63
7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13 Usia Harapan Hidup	100,01	68,32	73,69	107,86	106,92	68,92	SANGAT TINGGI	NAIK	7,85
		14 Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 Kelahiran Hidup	116,95	132	207	43,18	-40,77	130	SANGAT RENDAH	TURUN	-73,77
		15 Angka Kematian Bayi (AKB) / 1000 Kelahiran Hidup	137	8,8	15,54	23,41	44,60	10,00	SANGAT RENDAH	TURUN	-113,59
		16 Prevalensi Stunting	118,97	14	14,61	95,64	95,64	14,00	SANGAT TINGGI	TURUN	-23,33
		17 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR)	114,29	18	20,80	84,44	40,00	13,00	TINGGI	TURUN	-29,85

MISI IV :

MENINGKATKAN KUALITAS DAN LAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Capaian 2022 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian					
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18 Nilai SAKIP	95,23	72,40 (BB)	70,17 (BB)	96,92	89,73	78,20 (BB)	SANGAT TINGGI	TURUN	1,69
		19 Nilai Opini BPK	100	WTP	WTP	100	100	WTP	SANGAT TINGGI	TURUN	0,00
		20 Nilai EKPPD	99,36	3,5900	2,8600	79,67	79,44	3,6000	TINGGI	TURUN	-19,69
		21 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	104	3,51 (B)	4,01 (A-)	114	72,51	4,91 (A)	SANGAT TINGGI	TURUN	10,25
		22 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,18	85,00	85,07	100,08	100,08	85	SANGAT TINGGI	TURUN	-1,10

## MISI V :

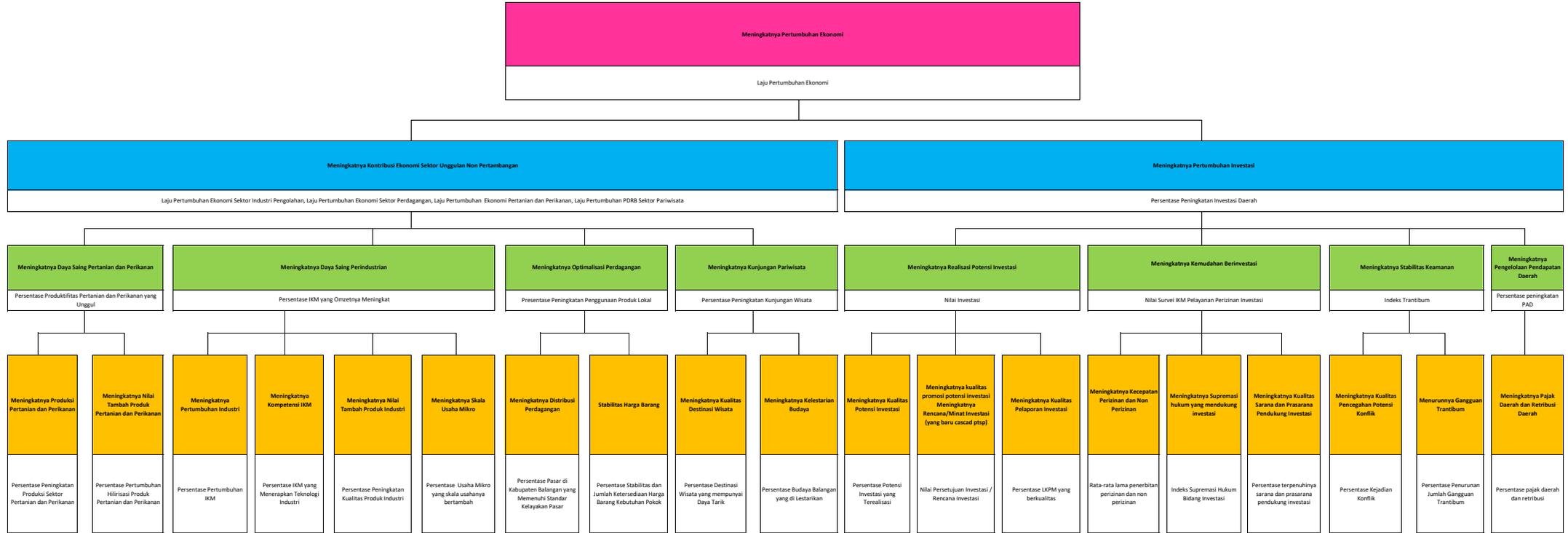
## MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Capaian 2022 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian					
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23 Angka Kemiskinan	90	5,2 - 5,0	5,22	99,62	76,12	4,9-4,7	SANGAT TINGGI	NAIK	9,62
		24 Angka PPKS Yang Tertangani	130	70,95	59,4	83,72	77,19	76,95	TINGGI	NAIK	-46,28
10	Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	100	0	0	100	100	0	SANGAT TINGGI	KONSTAN	0,00
11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	SANGAT TINGGI	KONSTAN	0,00
		27 Indeks Resiko Bencana	109,81	126,16	115,21	108,68	117,64	139,89	SANGAT TINGGI	TURUN	-1,13
12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28 Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	100,1	68	70,97	104,37	70,97	100	SANGAT TINGGI	NAIK	4,27
13	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29 Indeks Desa Membangun	110,58	0,7293	0,7527	103,21	107,61	0,6995	SANGAT TINGGI	TURUN	-7,37

# LAMPIRAN V

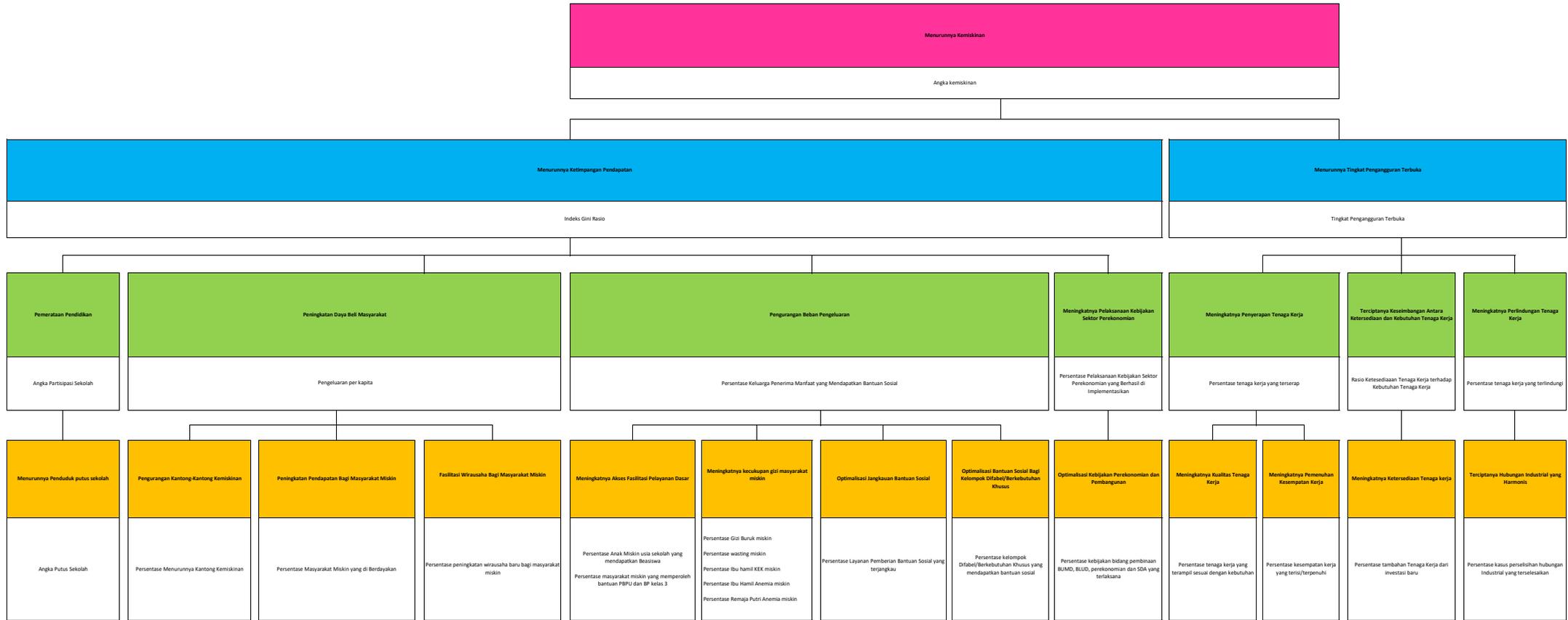
POHON KINERJA DAN CASCADING  
TAHUN 2023 PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN

# POHON KINERJA EKONOMI





# CASCADING KEMISKINAN









Management  
and Leadership

RAM  
MANAGEMENT  
SYSTEMS

Management  
and Leadership  
and Leadership

RAM  
MANAGEMENT  
SYSTEMS

RAM  
MANAGEMENT  
SYSTEMS

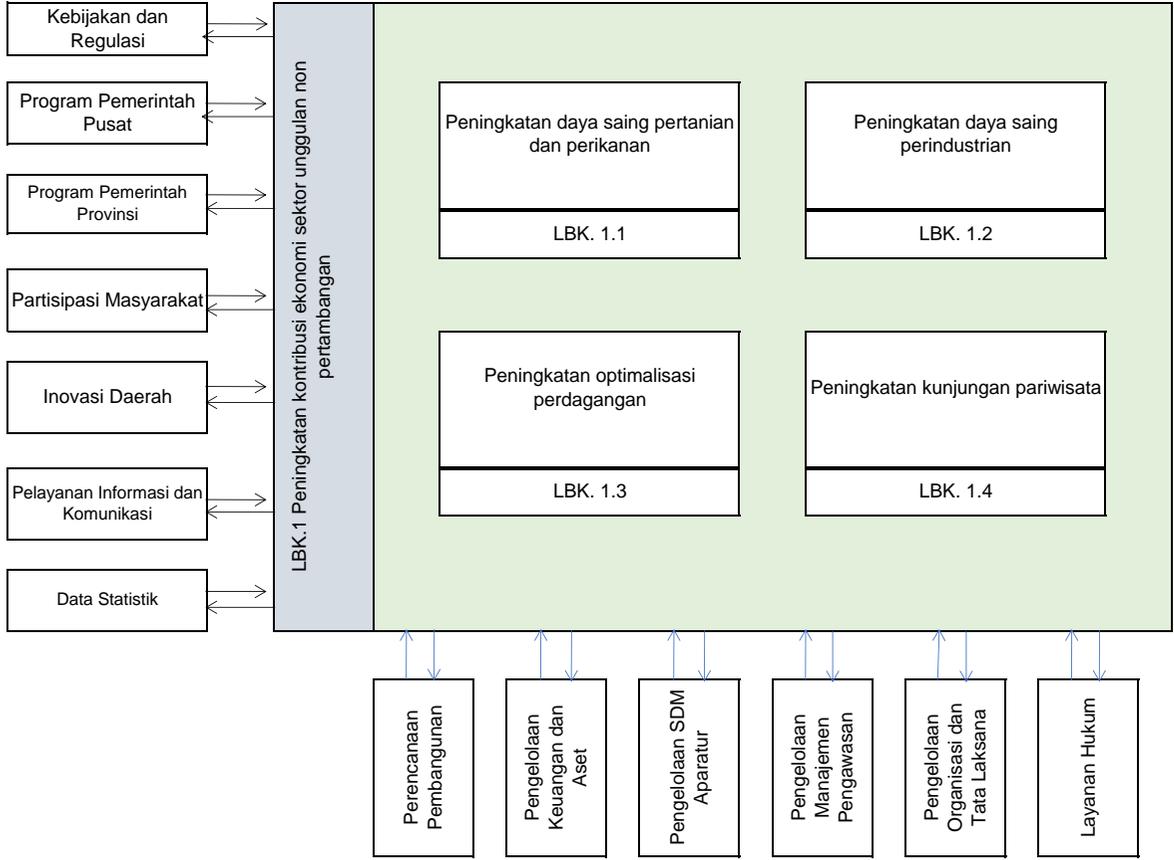


# LAMPIRAN VI

CROSCUTTING                      PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN

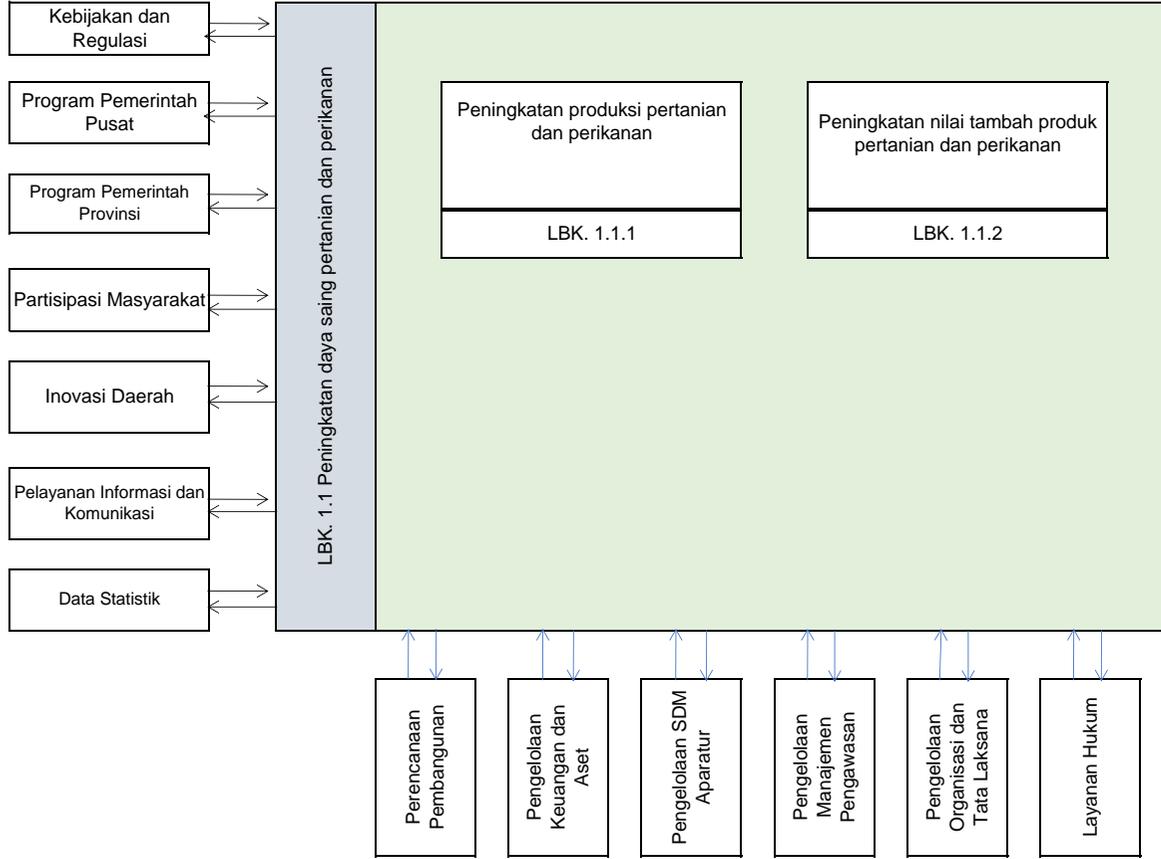
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
**SUB PROSES**



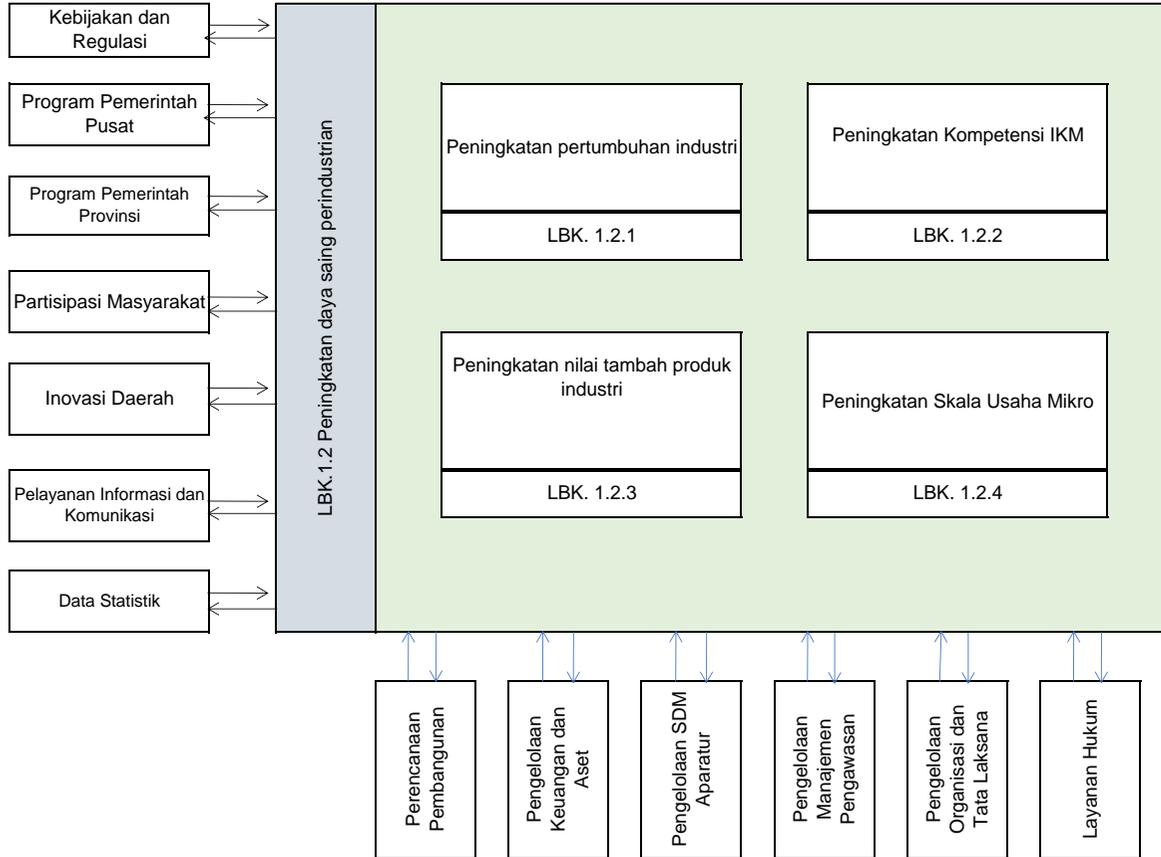
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

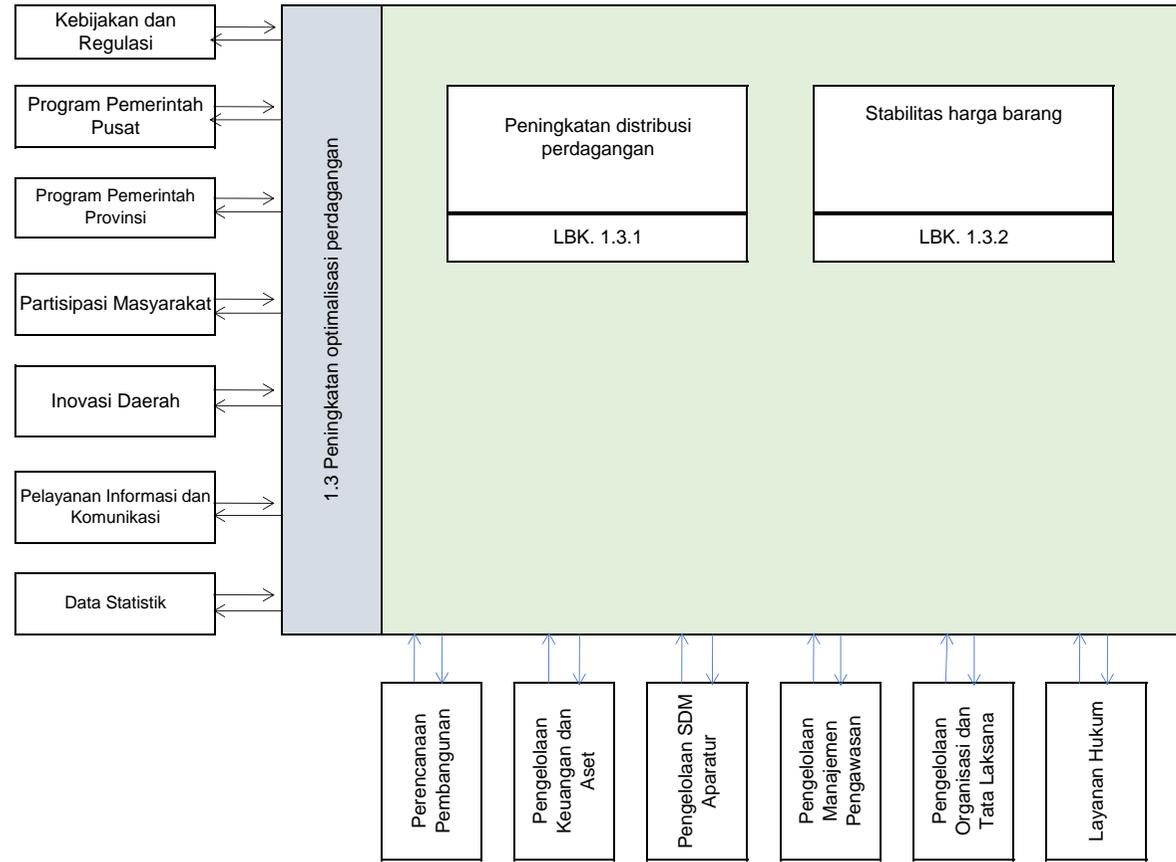
LEVEL 1  
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1

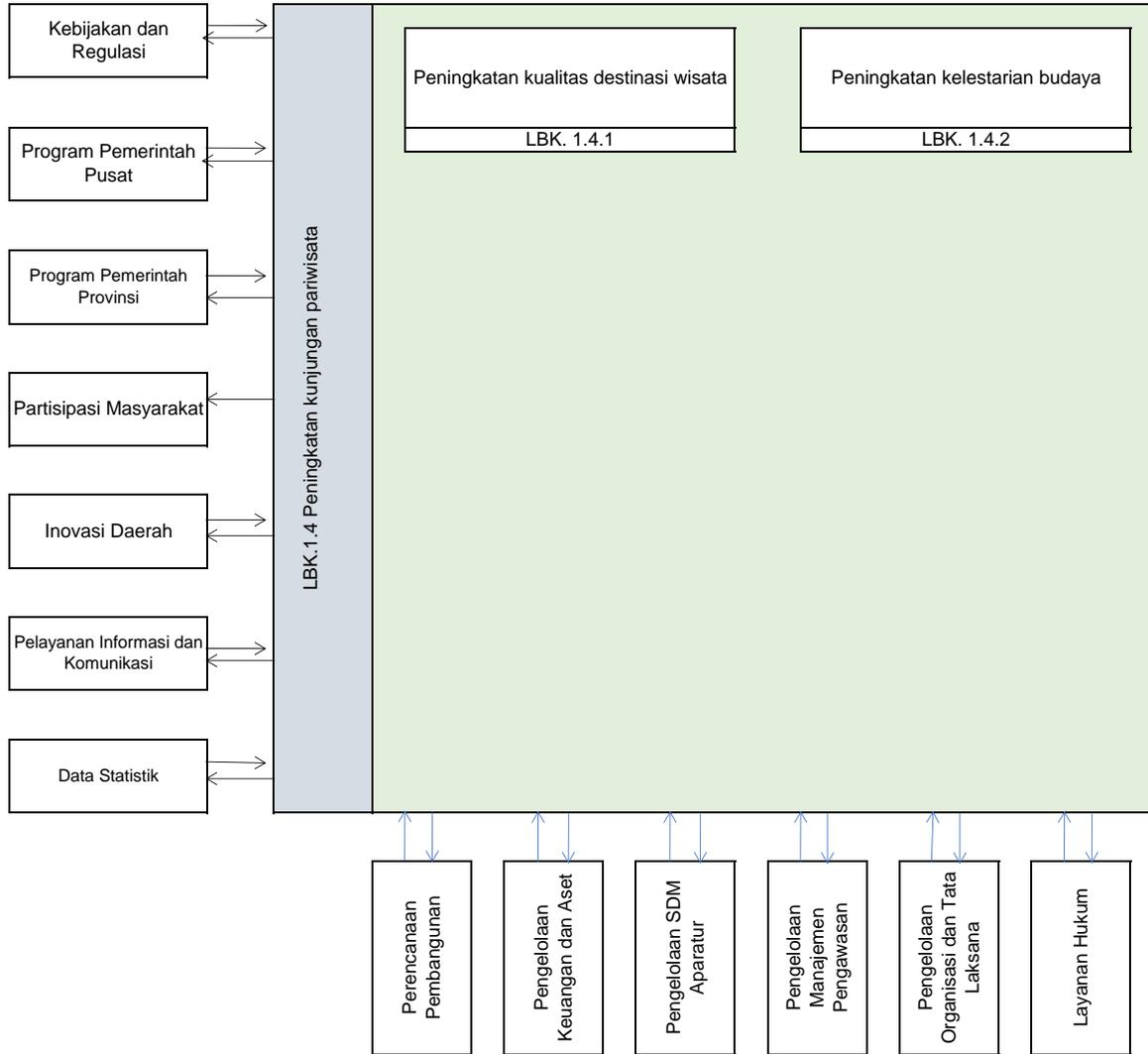
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1

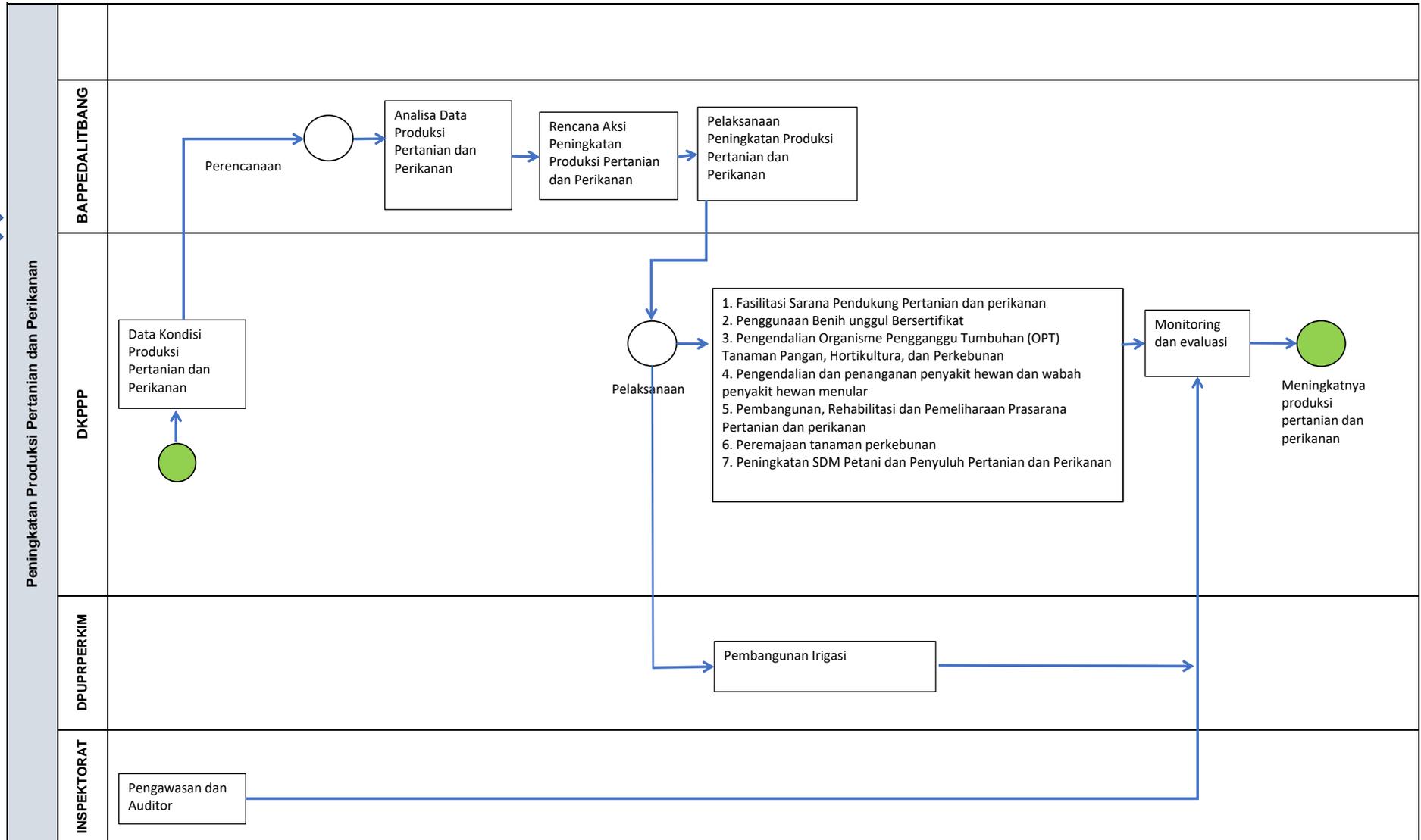
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PERSENTASE PENINGKATAN DAYA SAING PERTANIAN DAN PERIKANAN**

LEVEL II

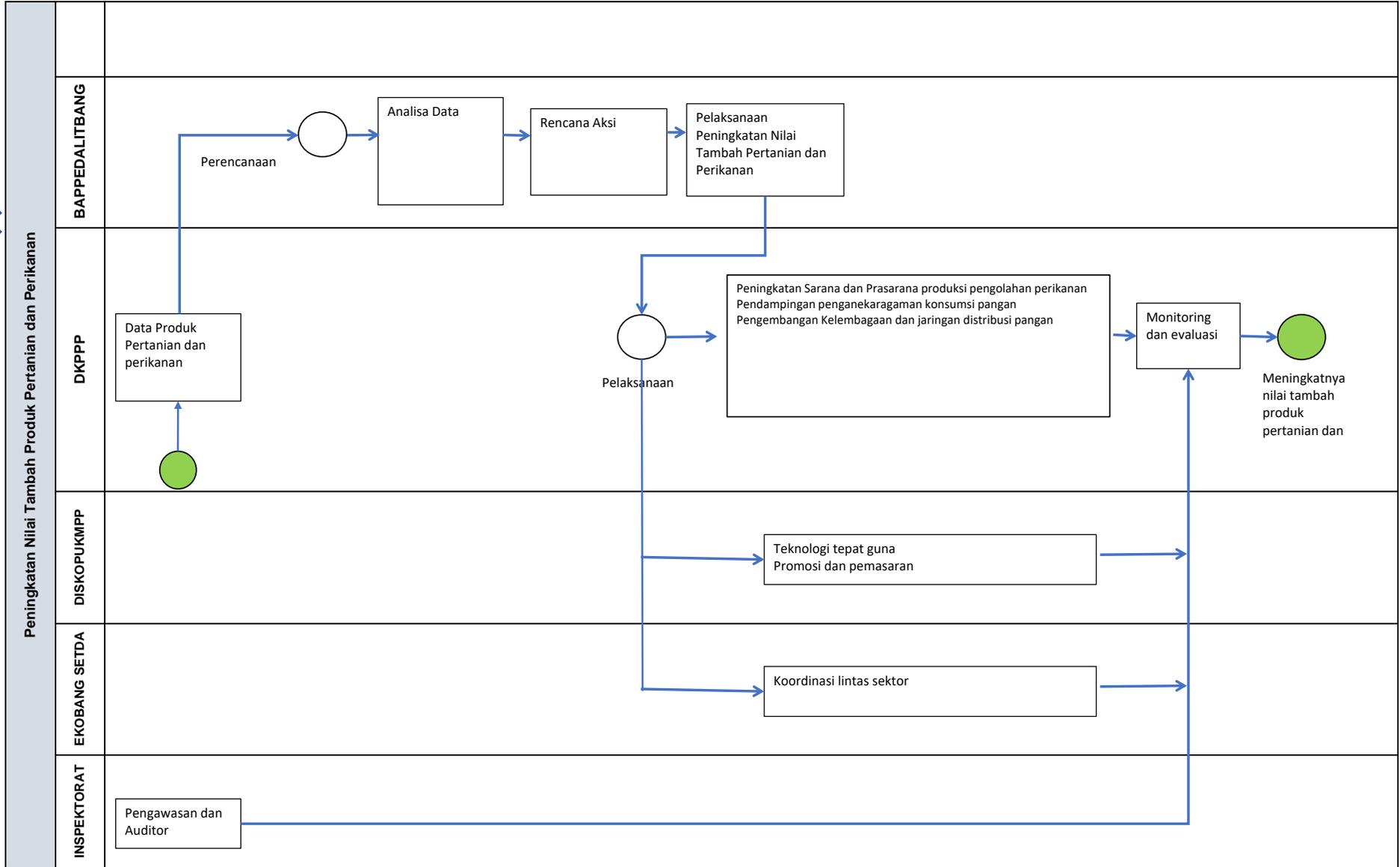
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PERSENTASE PENINGKATAN DAYA SAING PERTANIAN DAN PERIKANAN**

LEVEL II

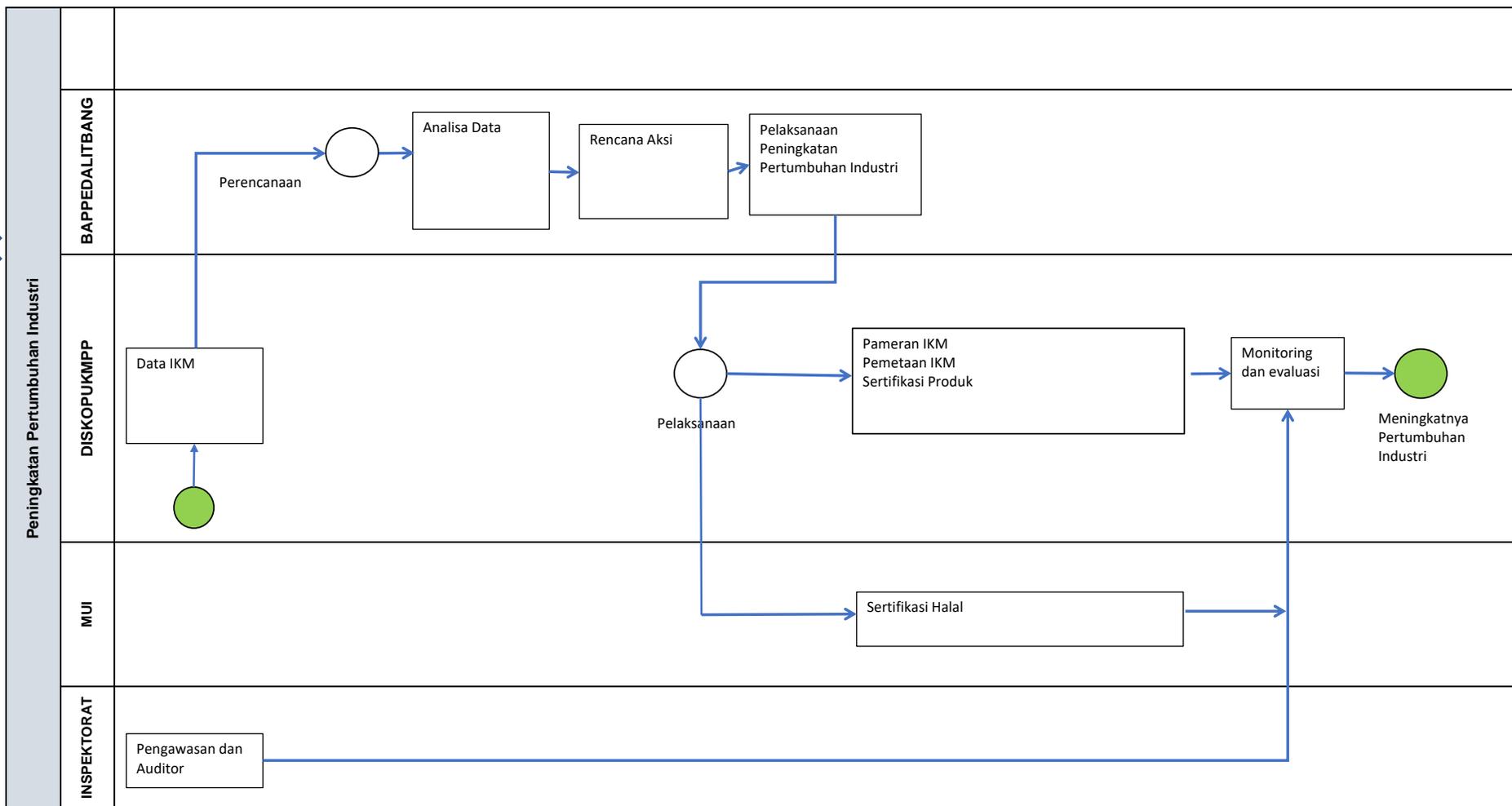
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

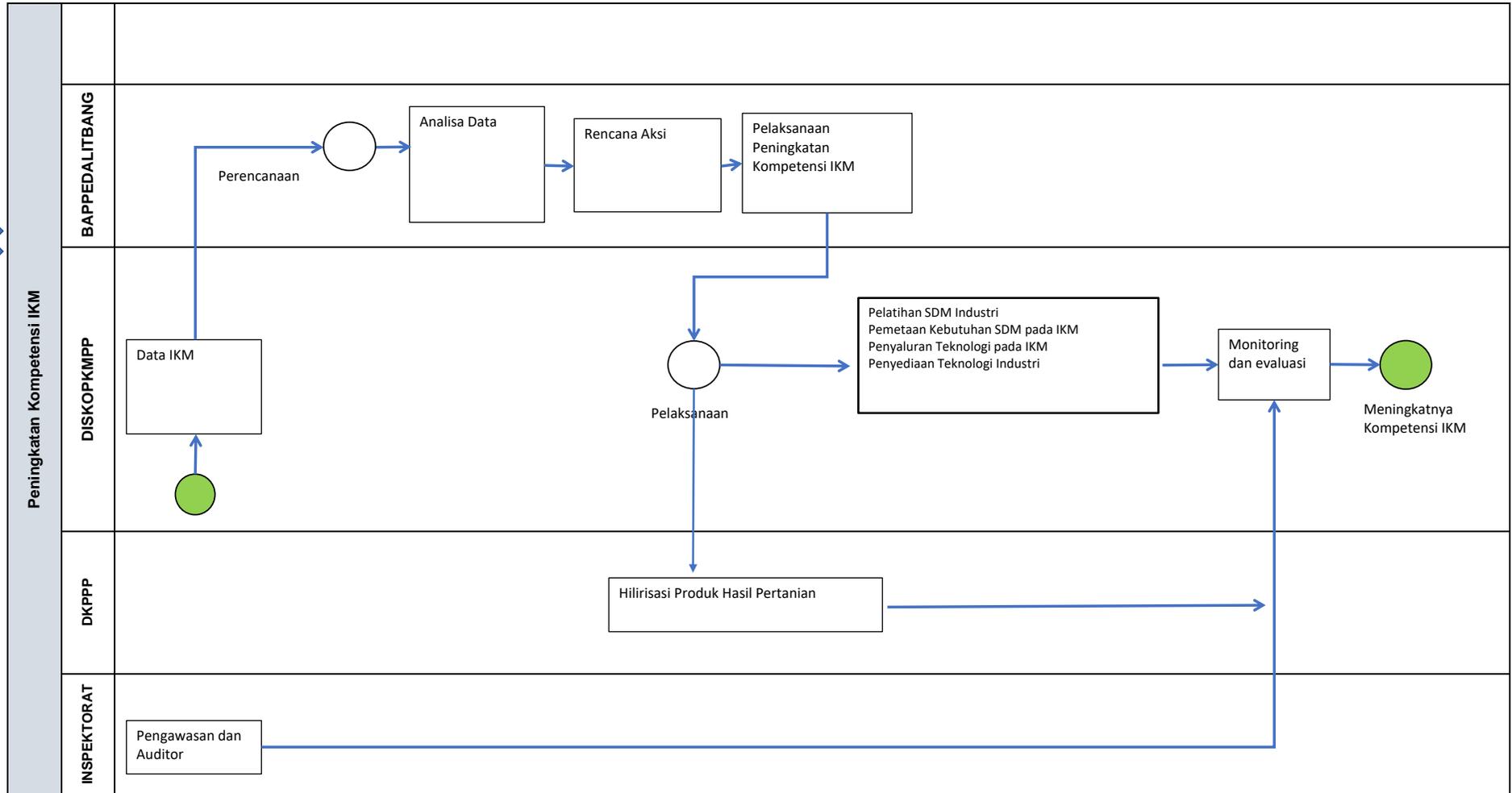
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

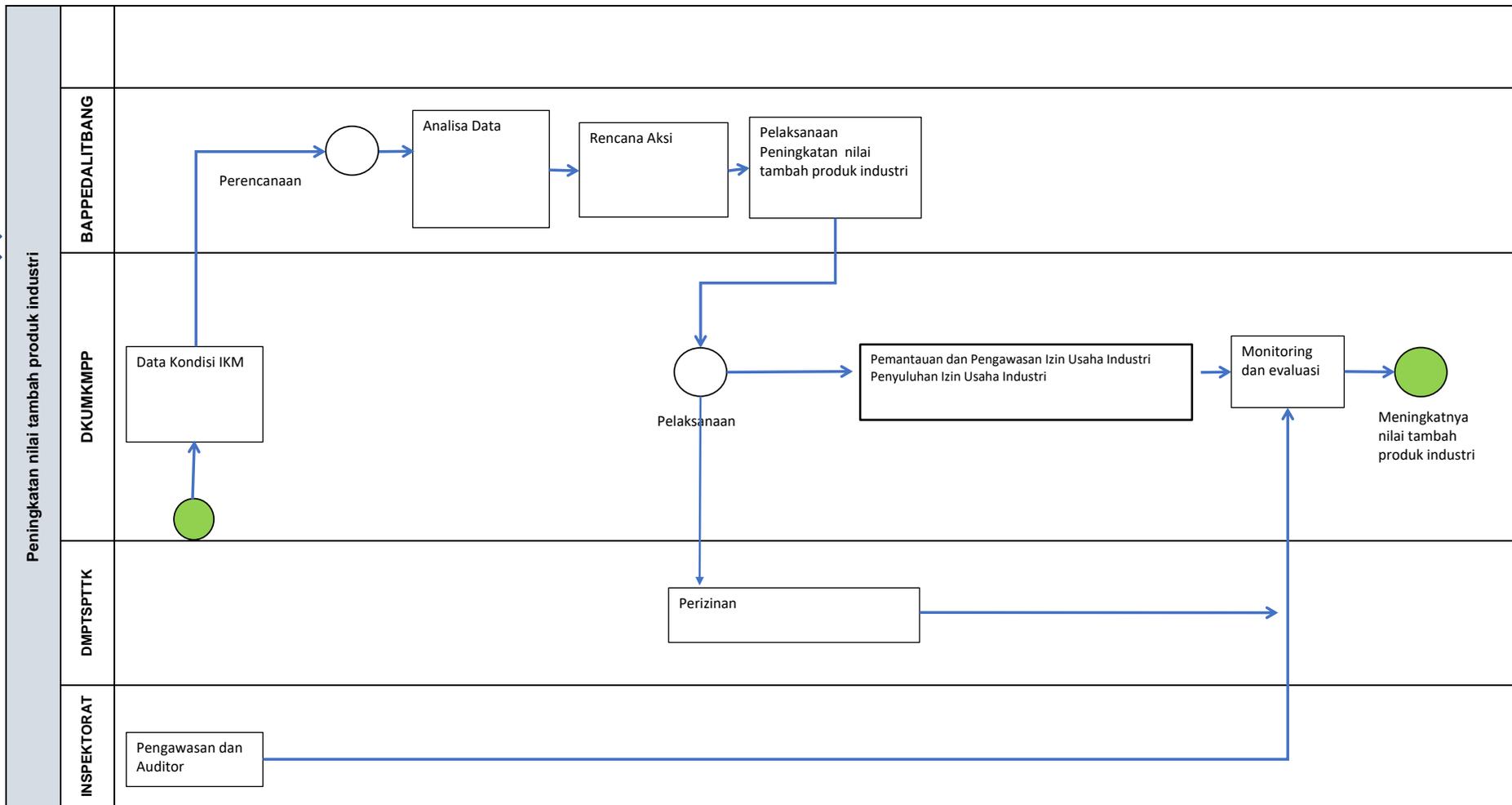
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

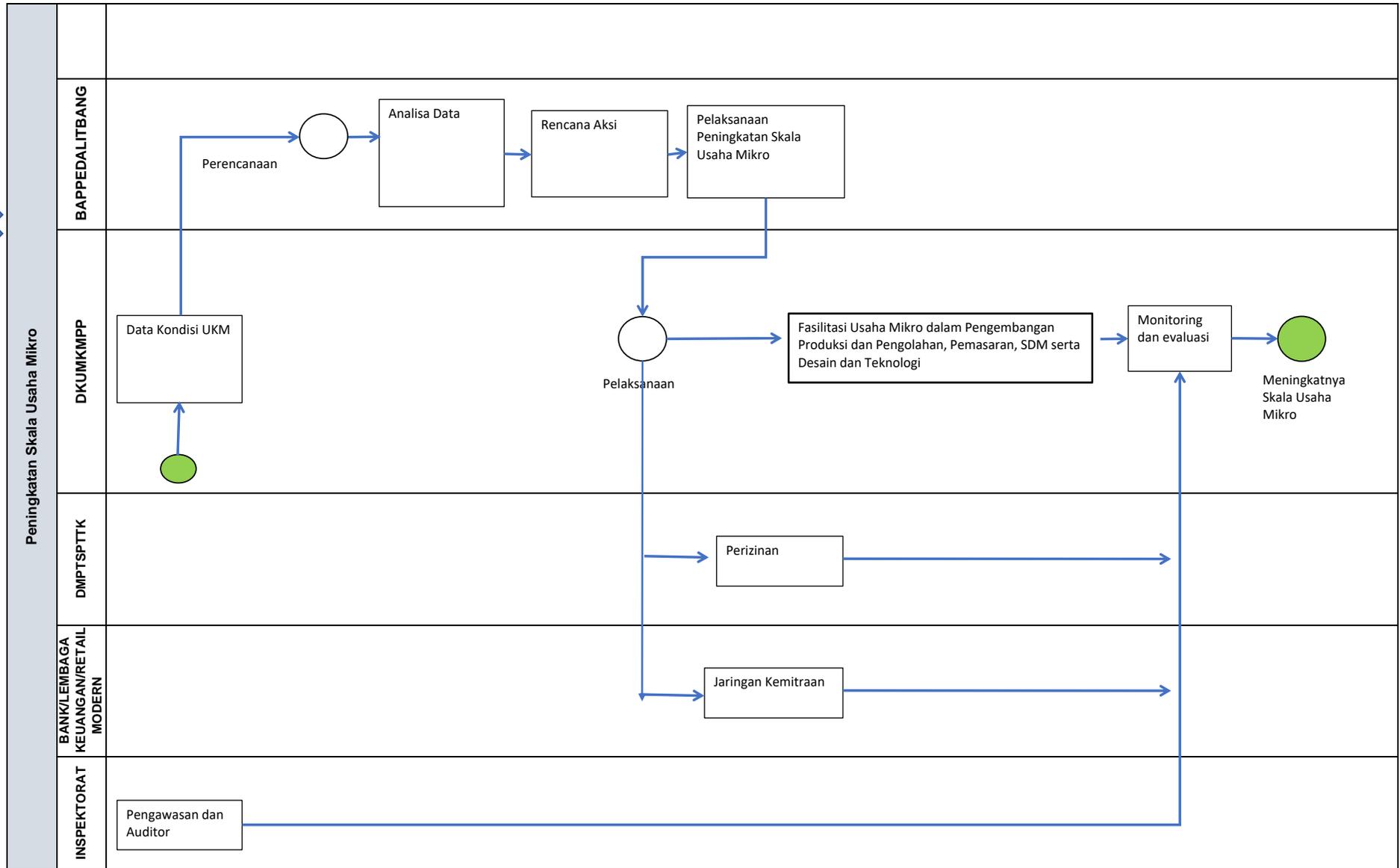
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

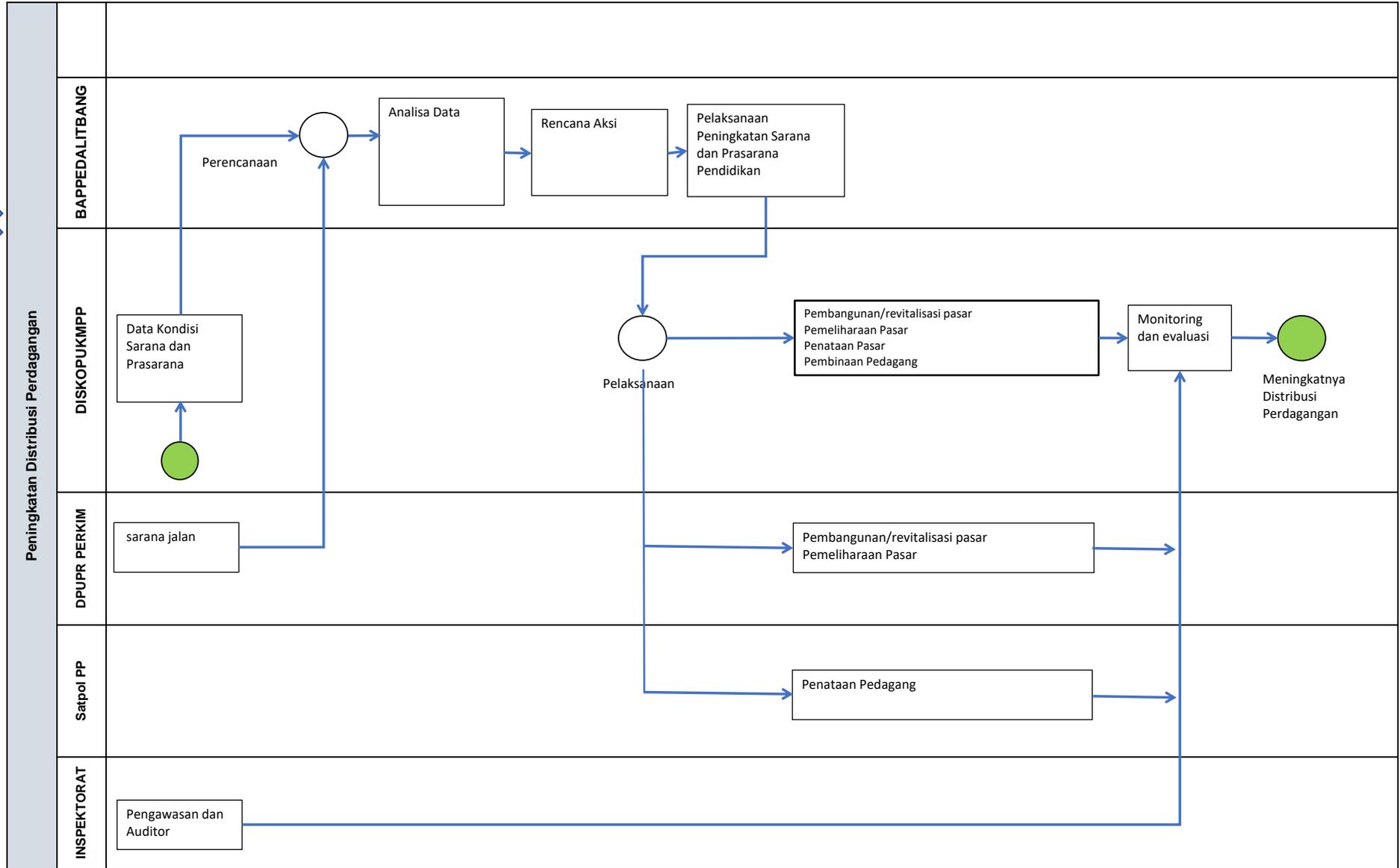
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING OPTIMALISASI PERDAGANGAN**

LEVEL II

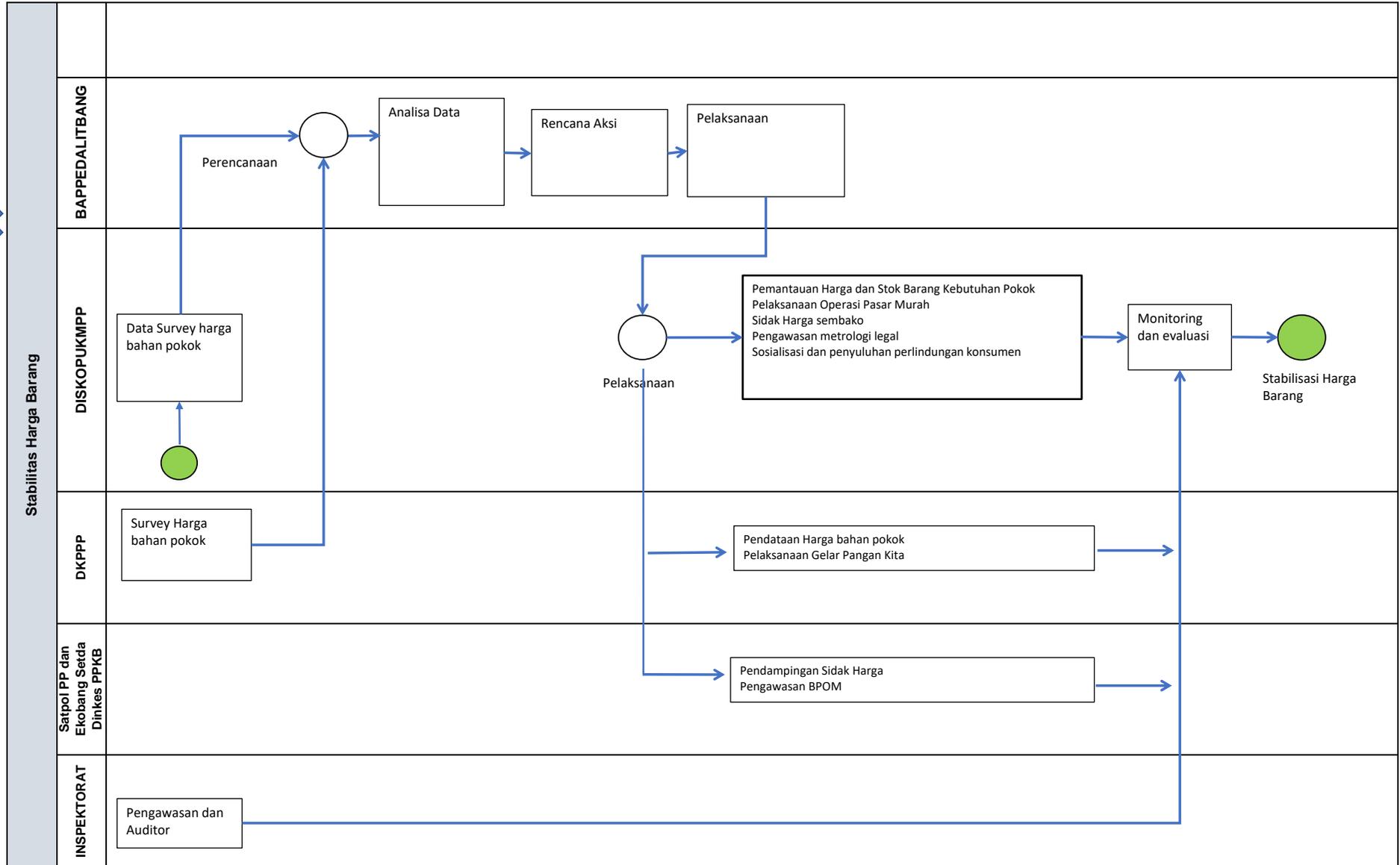
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING OPTIMALISASI PERDAGANGAN**

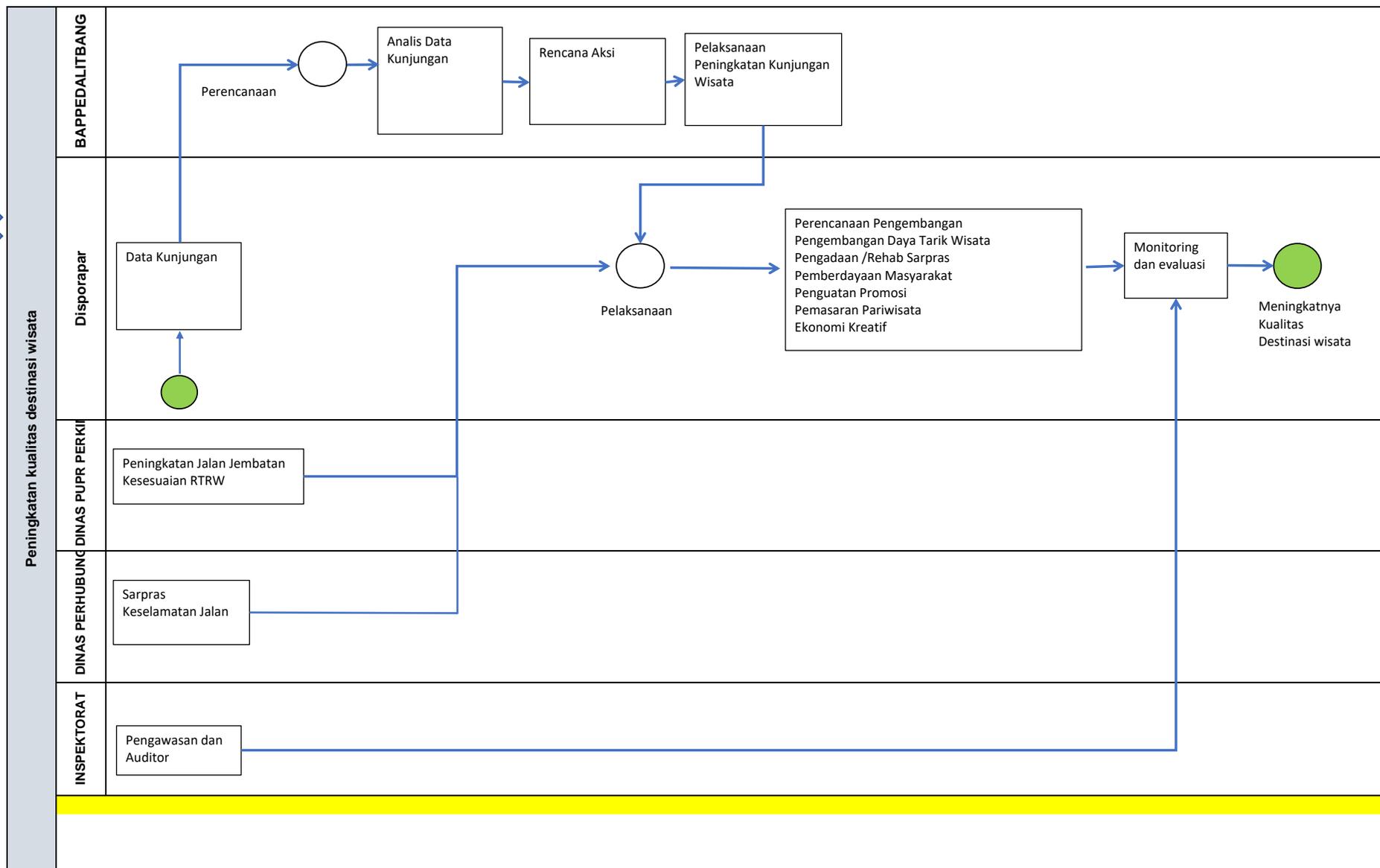
LEVEL II

**LINTAS FUNGSI**



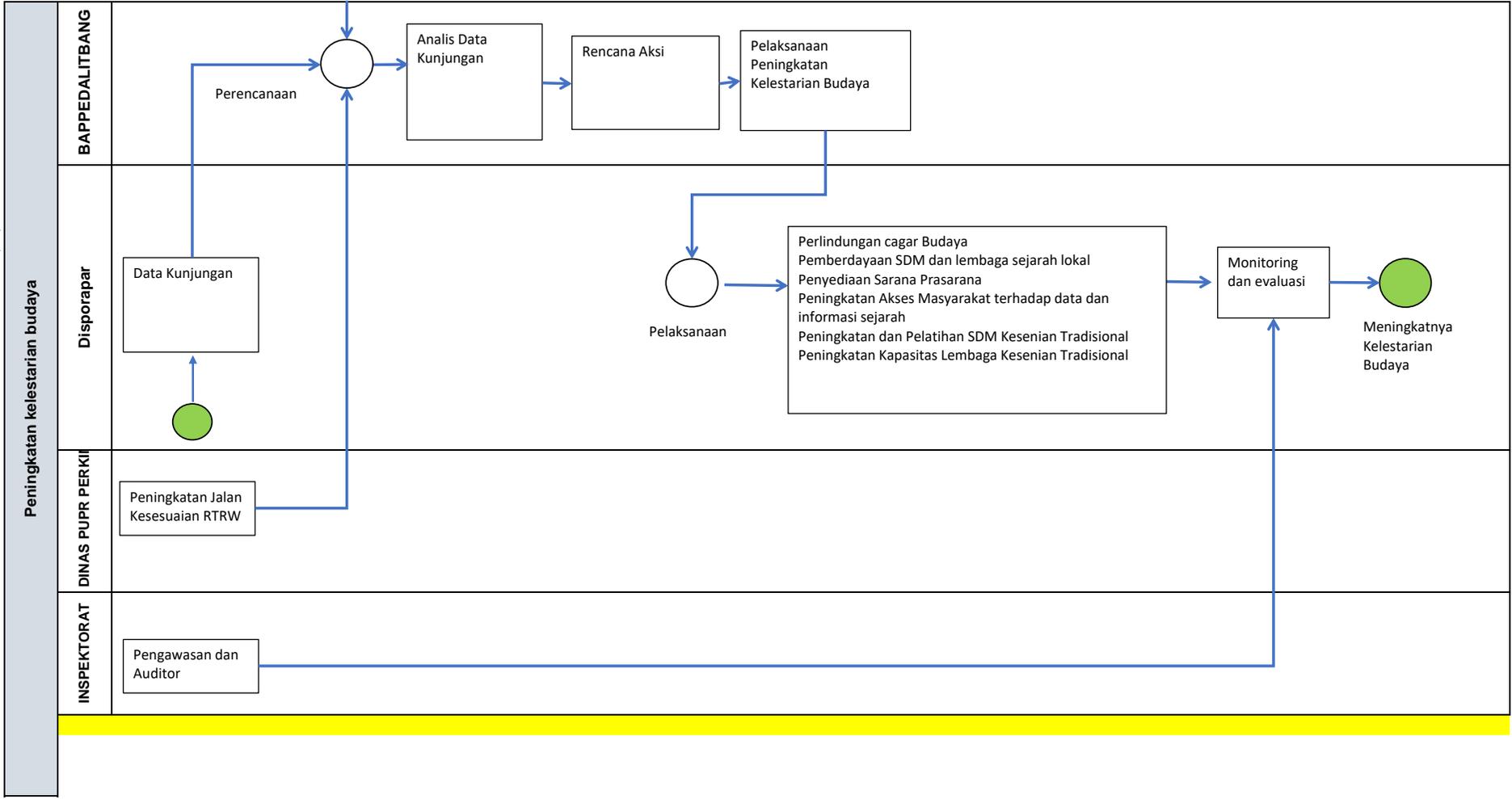
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KUNJUNGAN PARIWISATA**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KUNJUNGAN PARIWISATA**

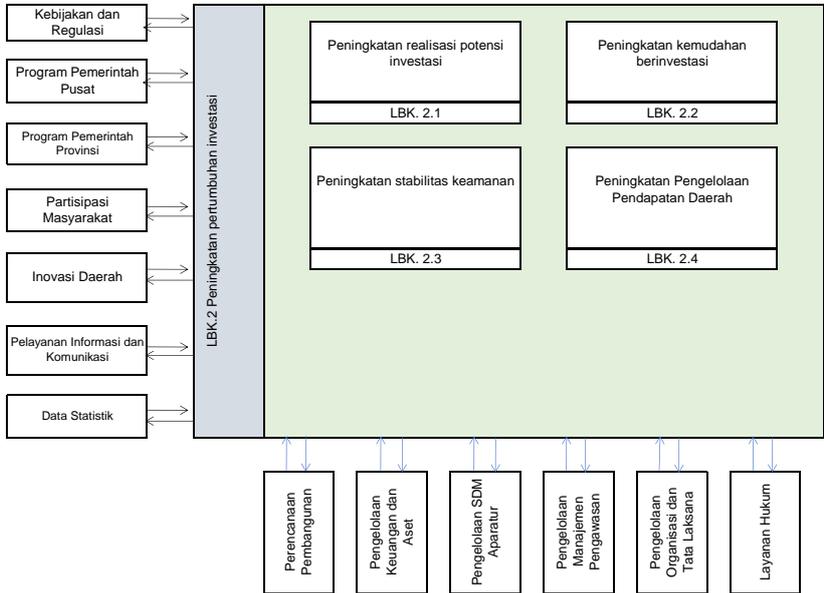
LEVEL II  
**LINTAS FUNGSI**



Pelaksanaan  
Peningkatan Kunjungan  
Wisata

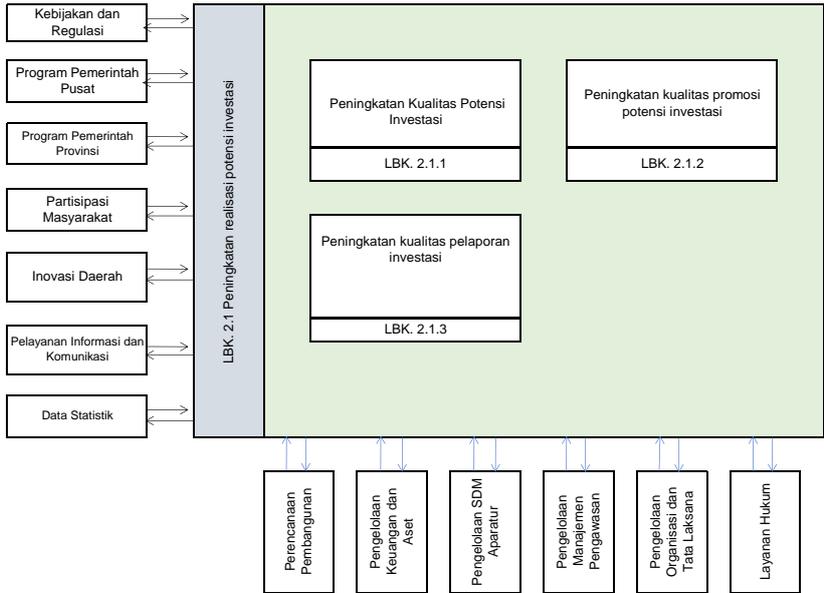
**PETA PROSES BISNIS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
SUB PROSES



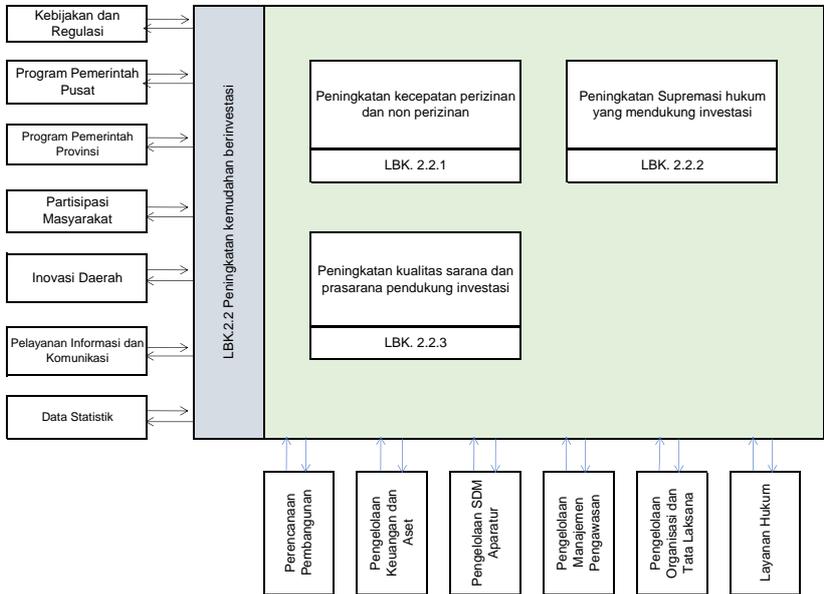
**PETA PROSES BISNIS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
SUB PROSES



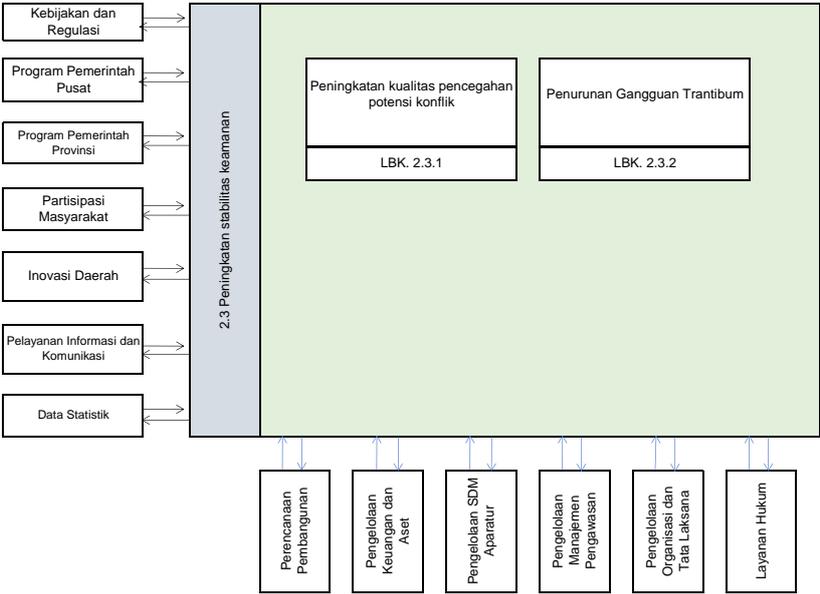
**PETA PROSES BISNIS**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
SUB PROSES



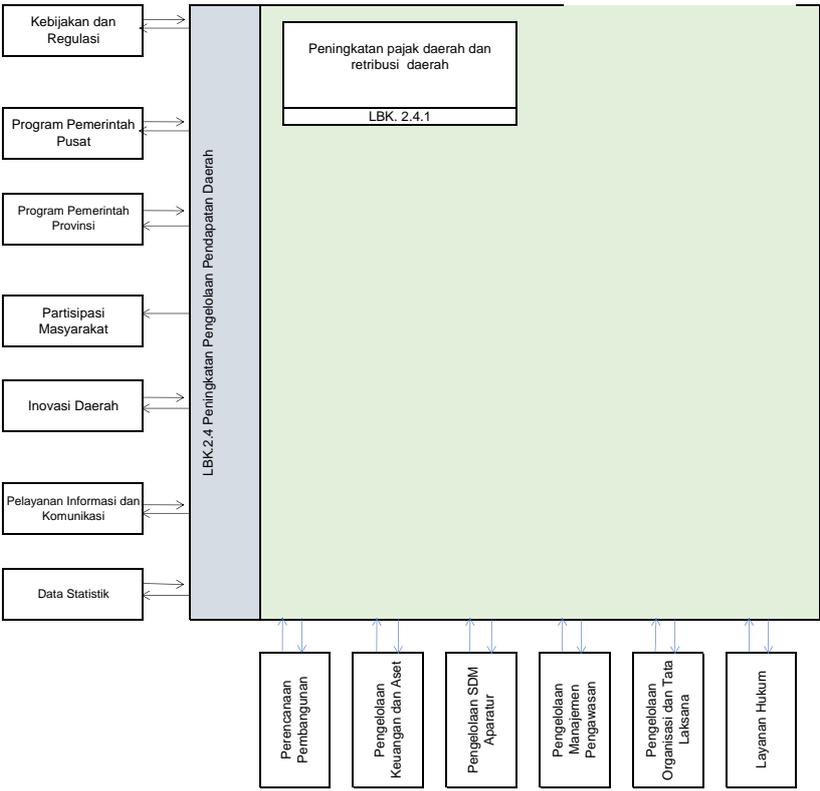
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
SUB PROSES



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

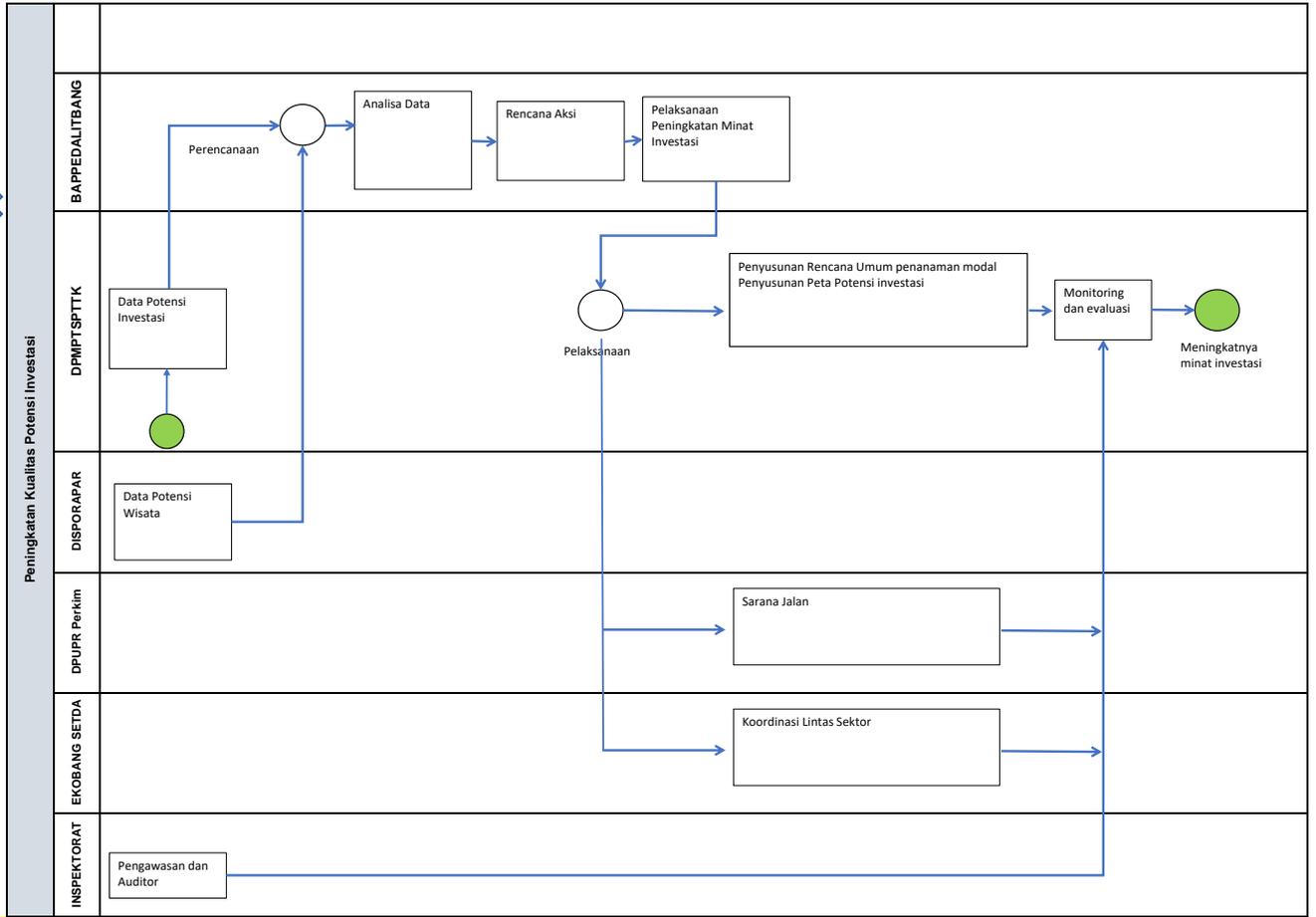
LEVEL 1  
SUB PROSES



Saran Kesepakatan proses bisnis  
level Pemda  
L0 = Bupati  
L1= Sasaran  
Peta relasi  
coba untuk 1 OPD  
L0 = sasaran OPD  
L1= Program OPD tersebut & OPD yang terkait

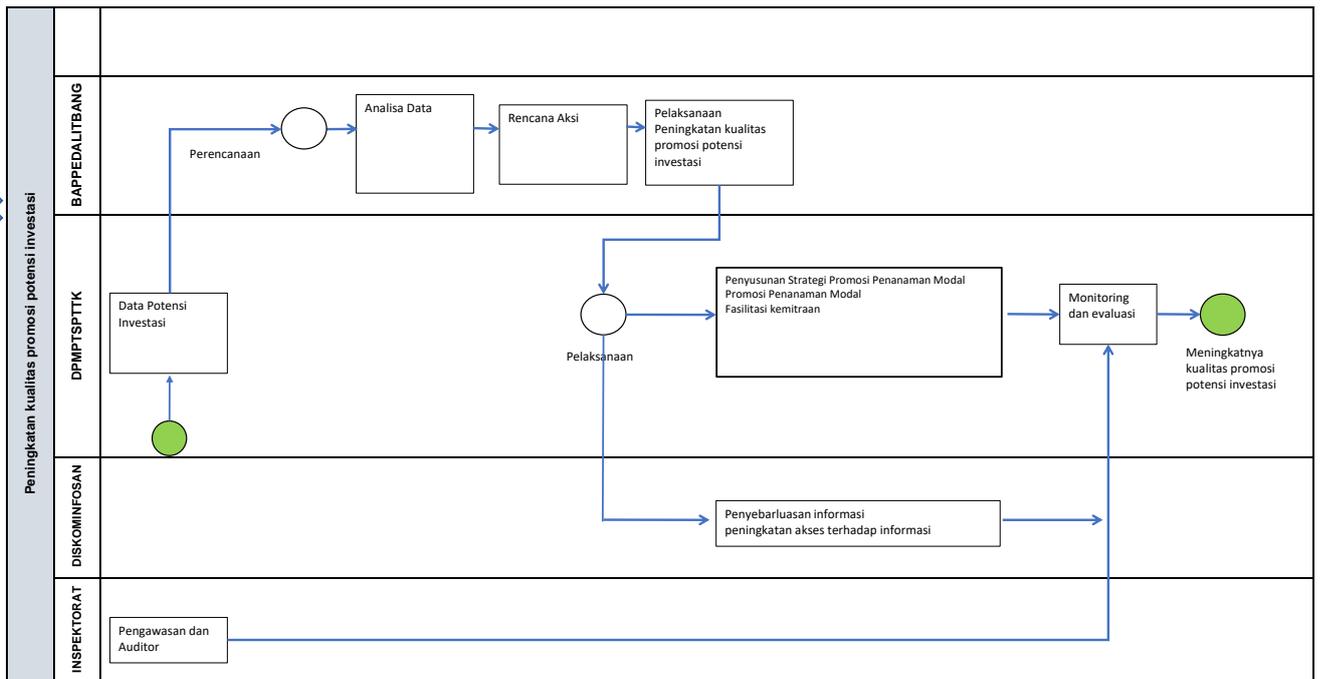
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



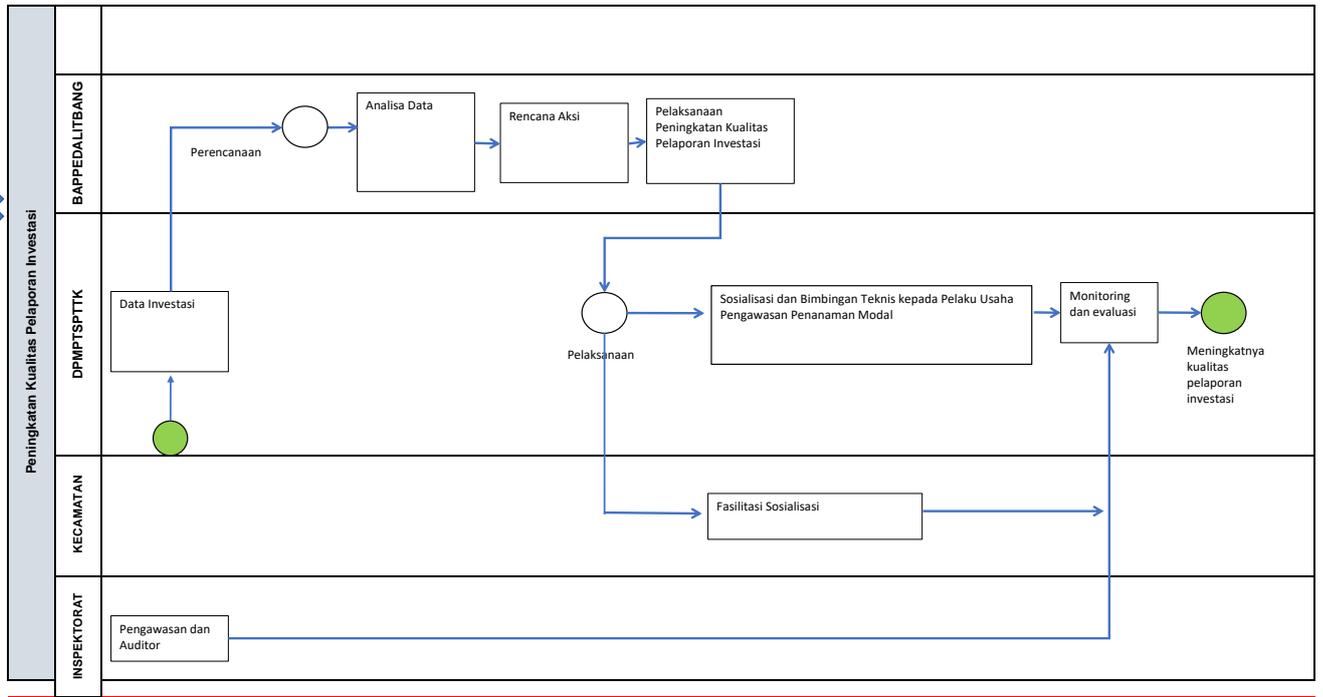
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



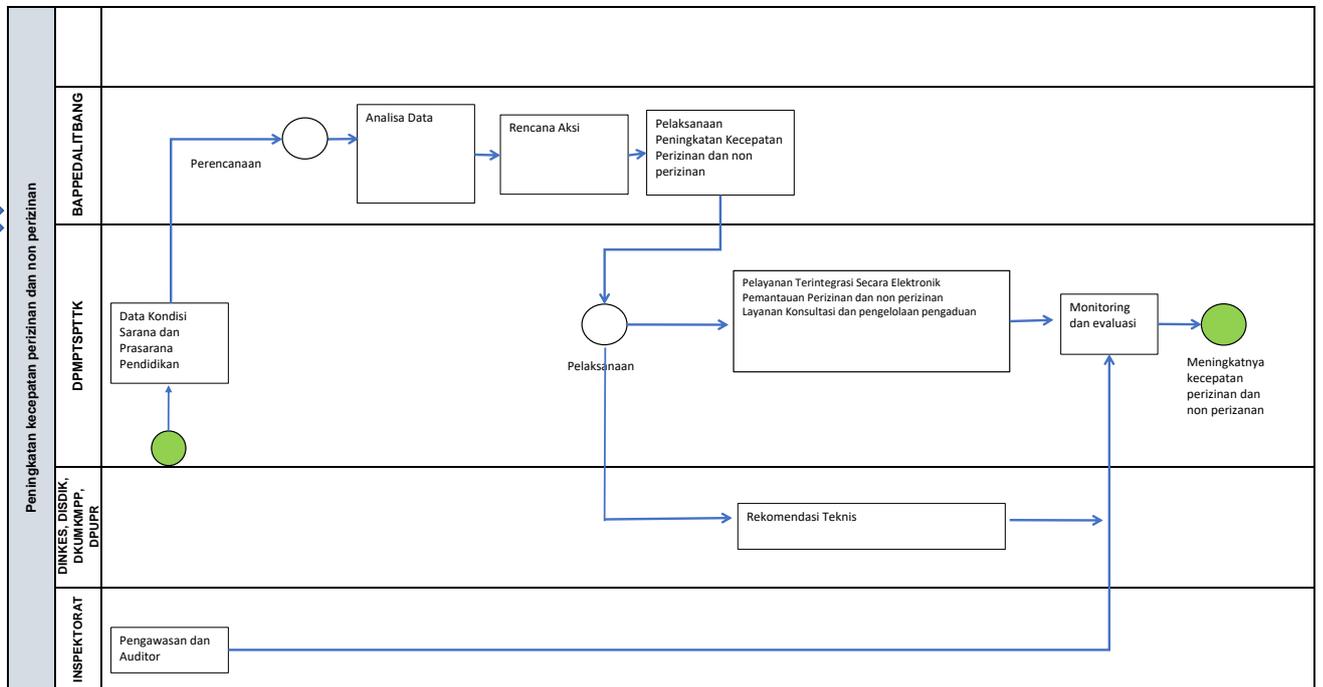
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



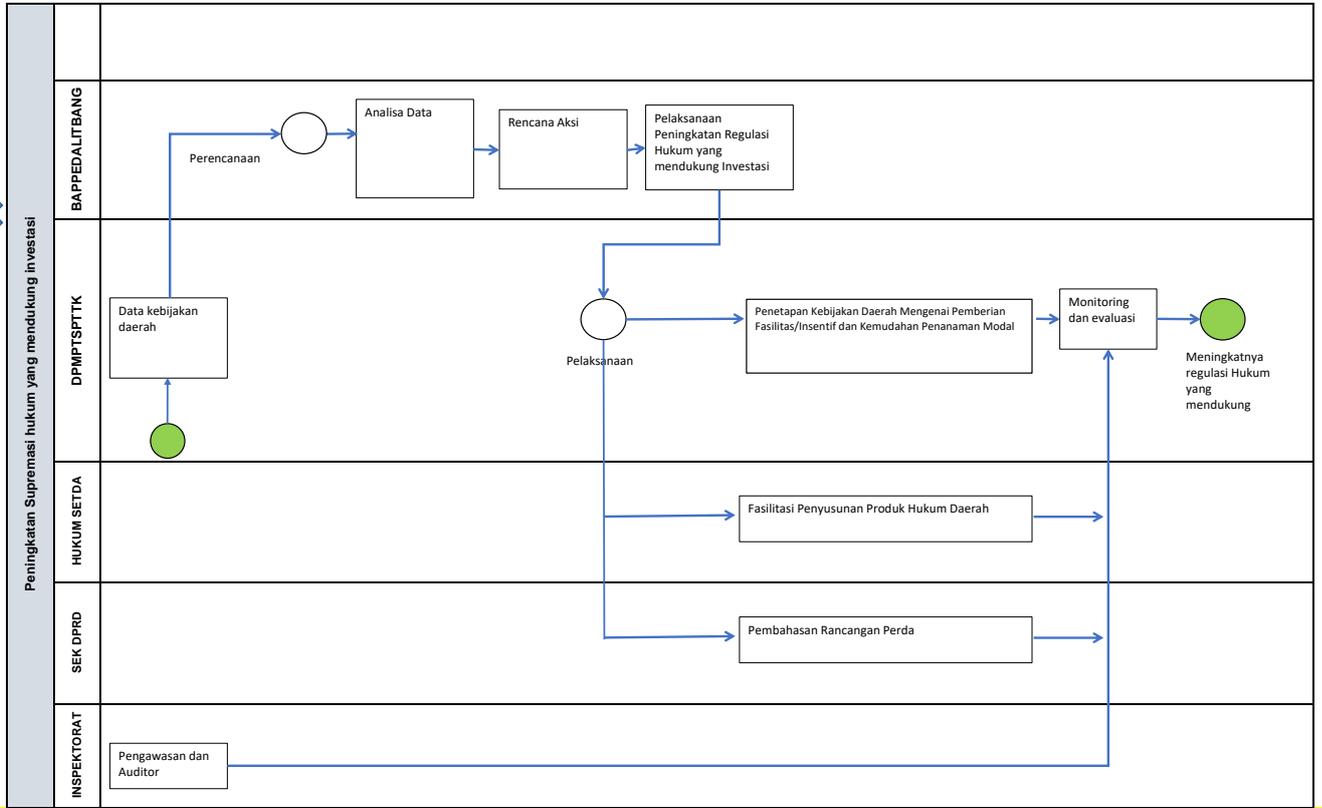
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KEMUDAHAN BERINVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



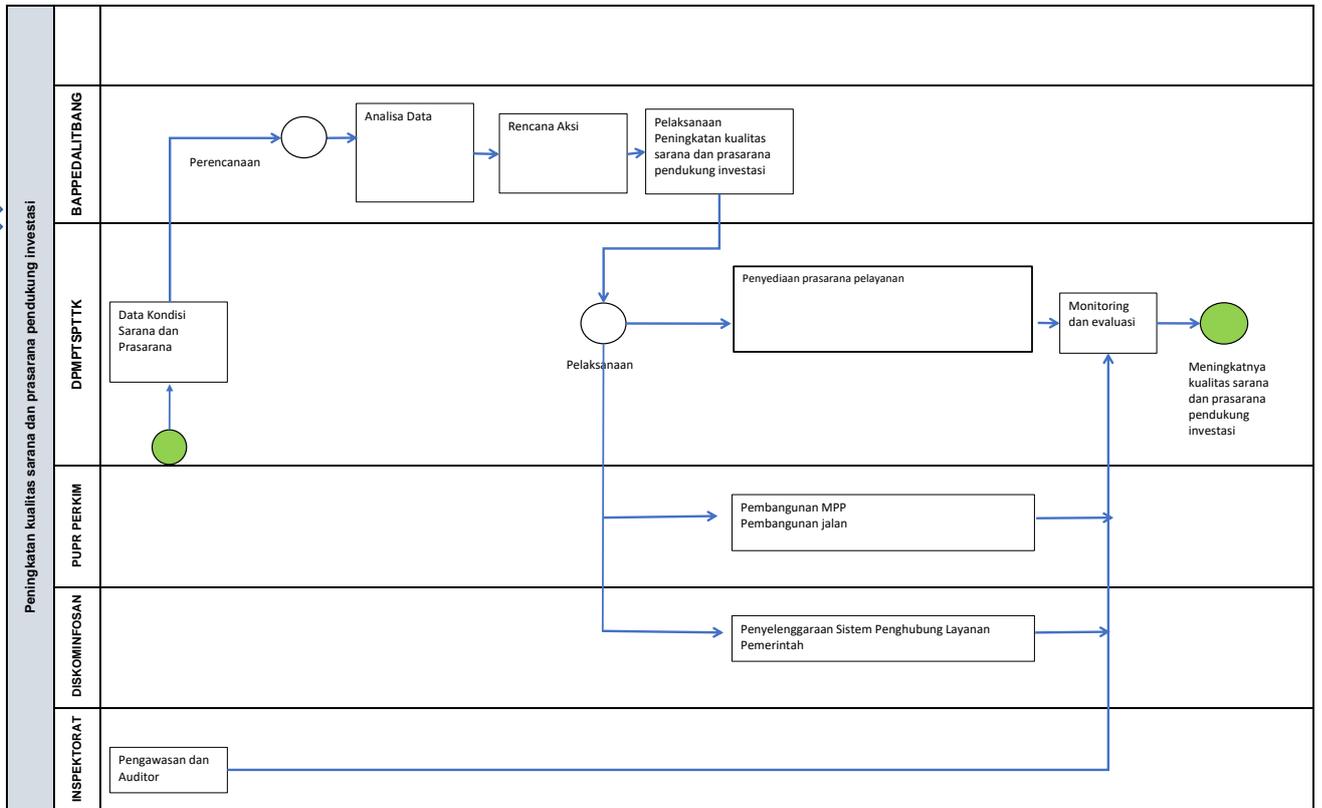
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KEMUDAHAN BERINVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



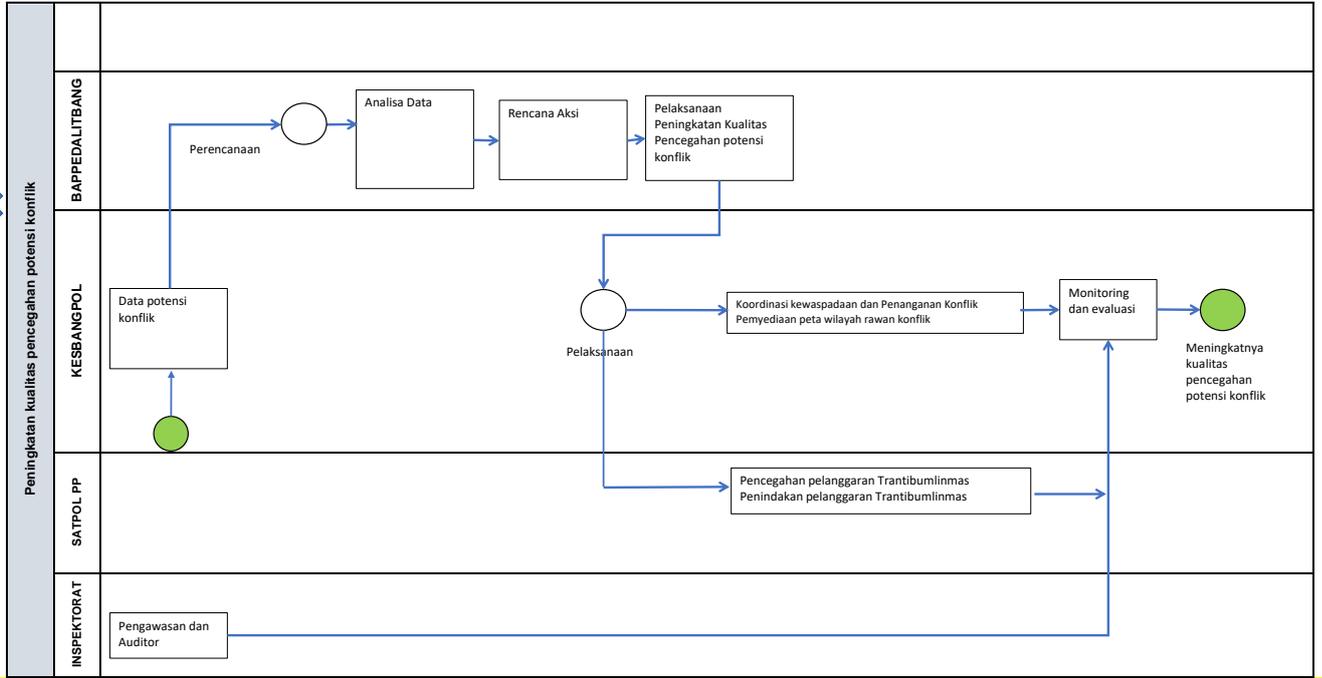
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KEMUDAHAN BERINVESTASI**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



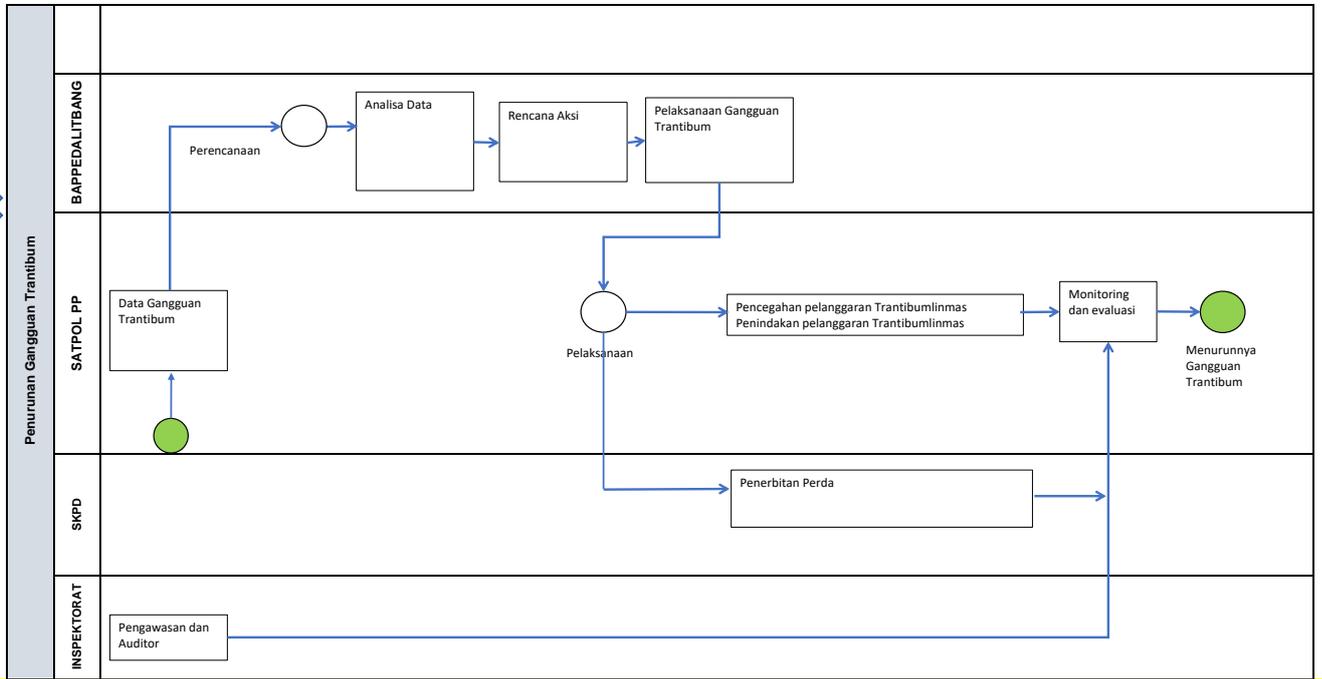
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN**

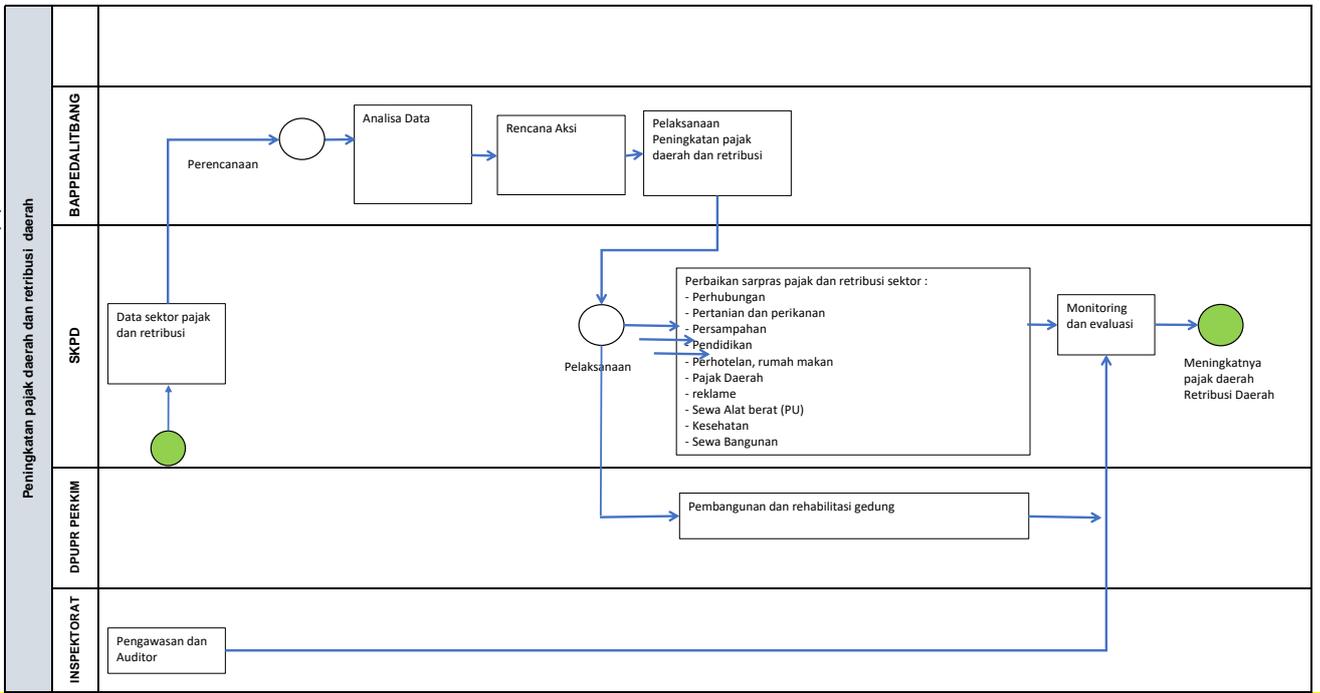
LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

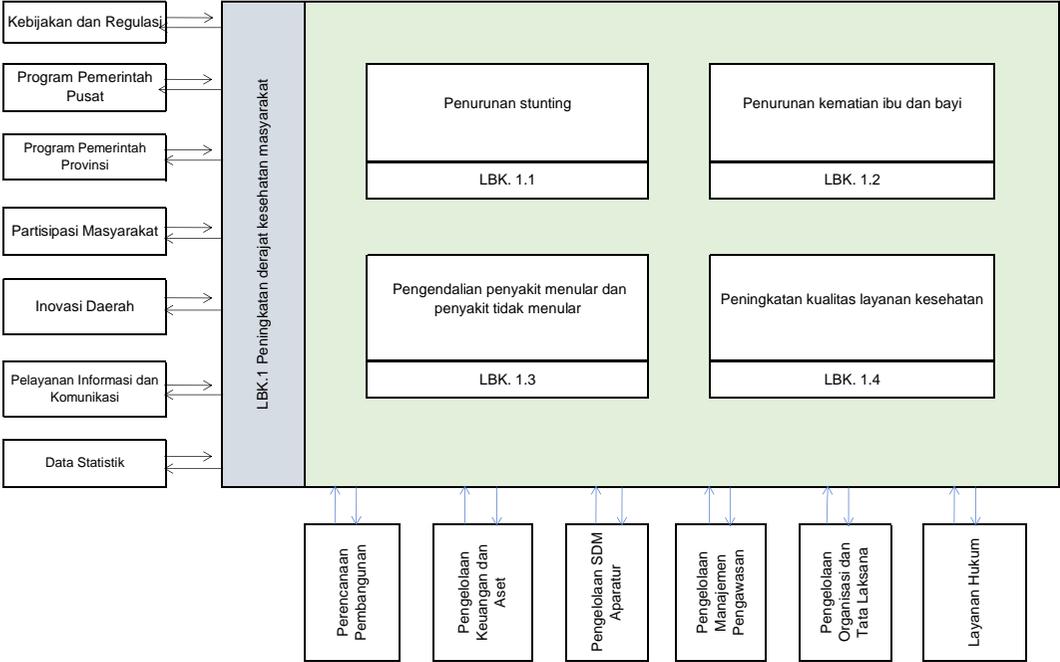
LEVEL II

LINTAS FUNGSI



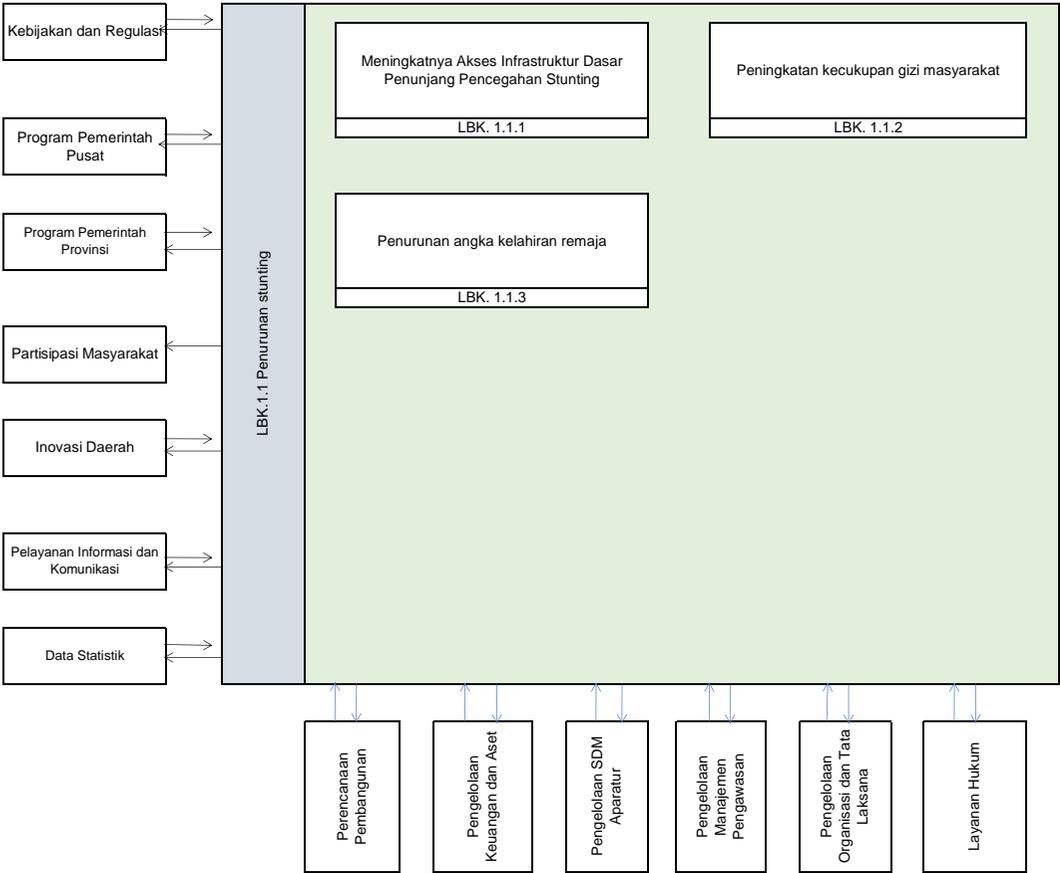
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
**SUB PROSES**



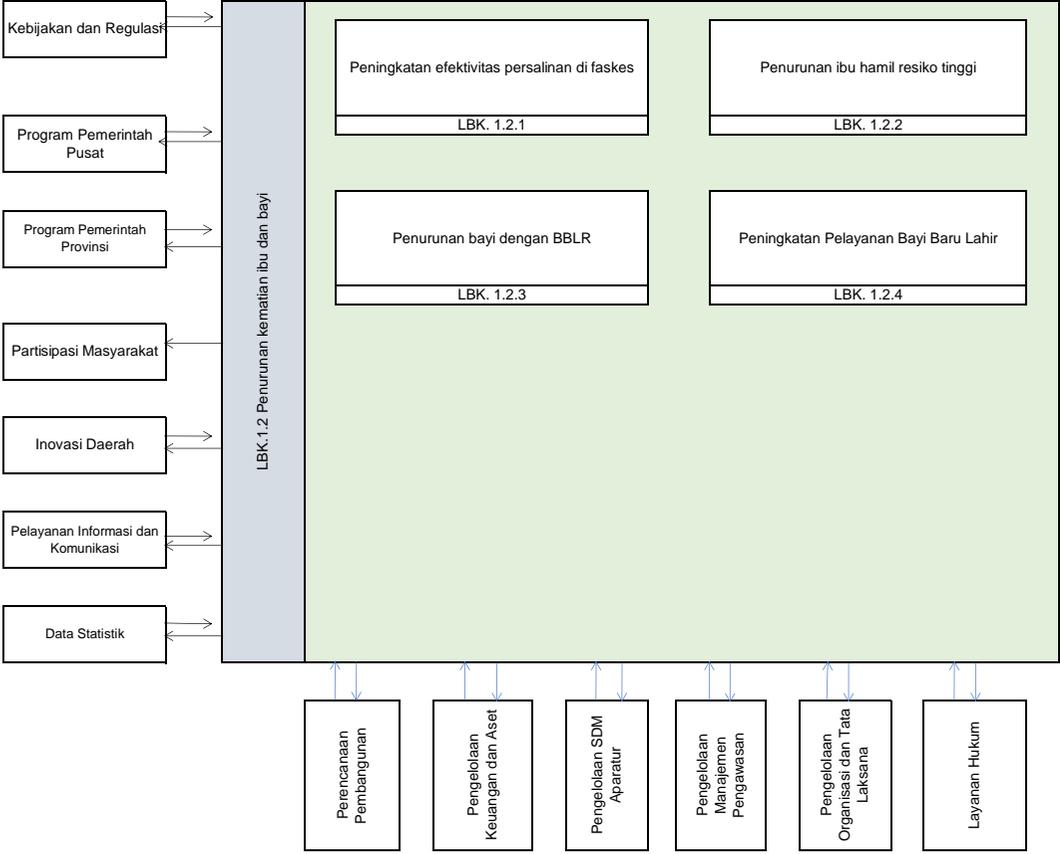
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
**SUB PROSES**



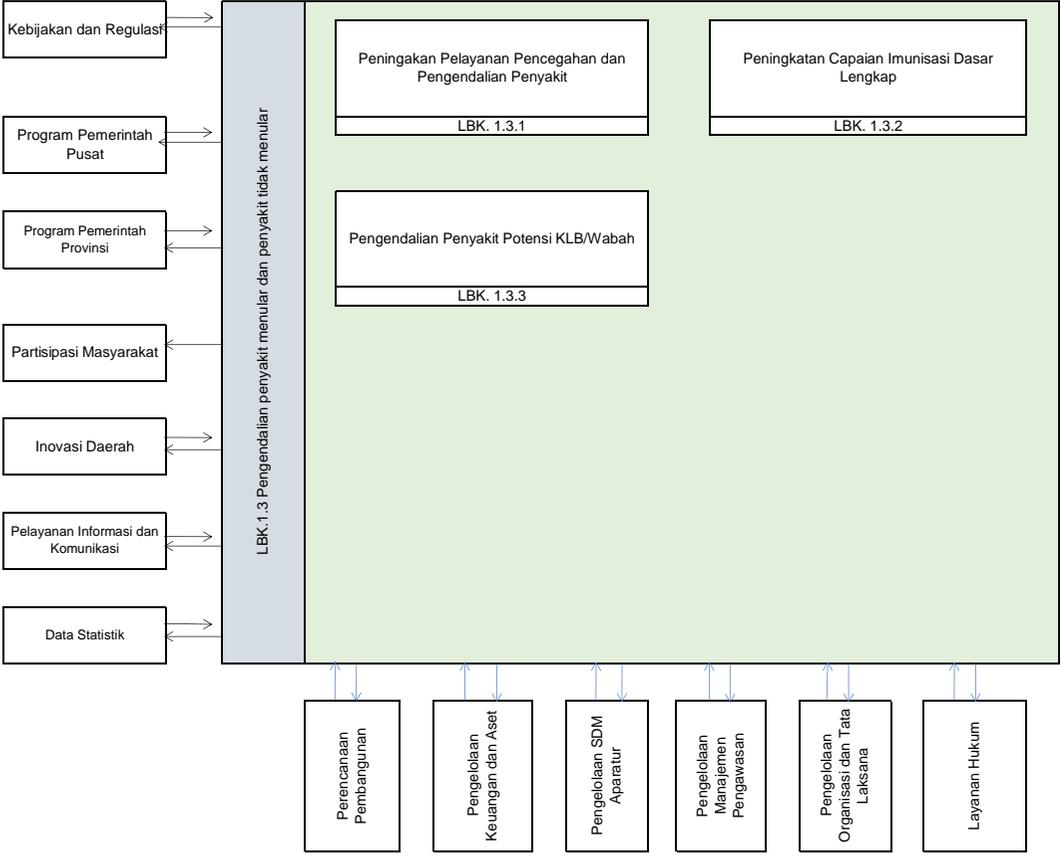
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
**SUB PROSES**



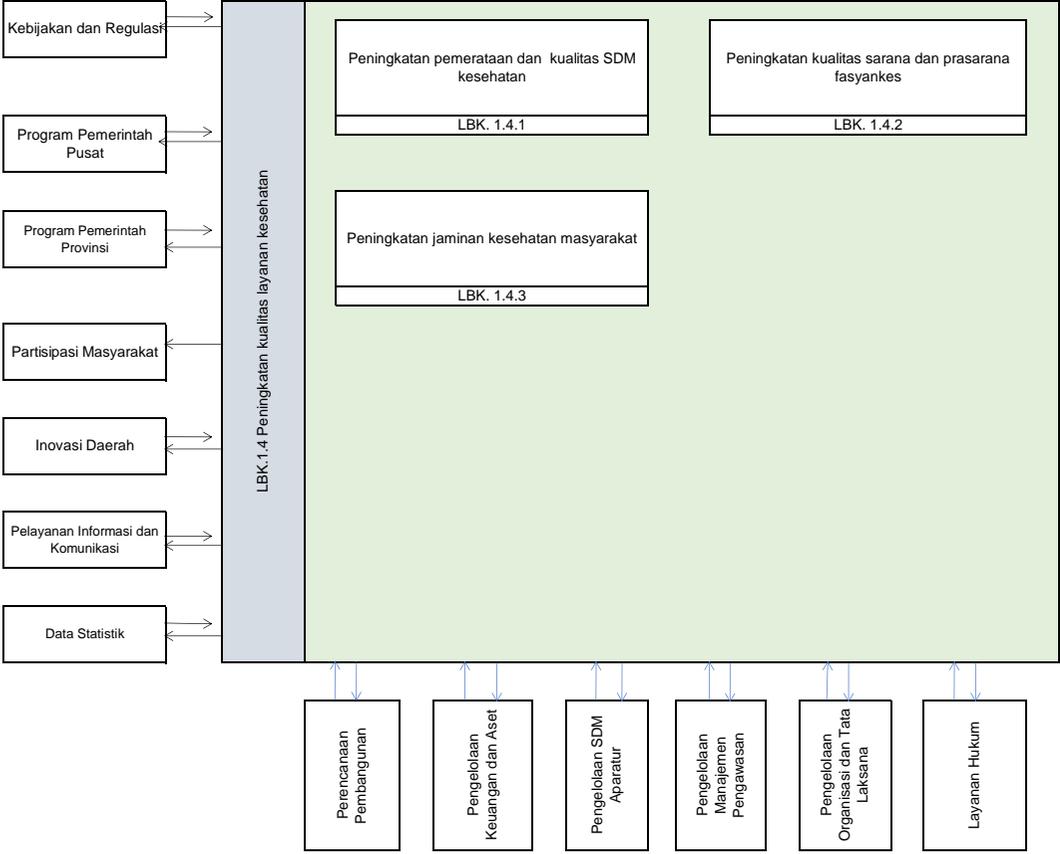
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**LEVEL 2  
SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

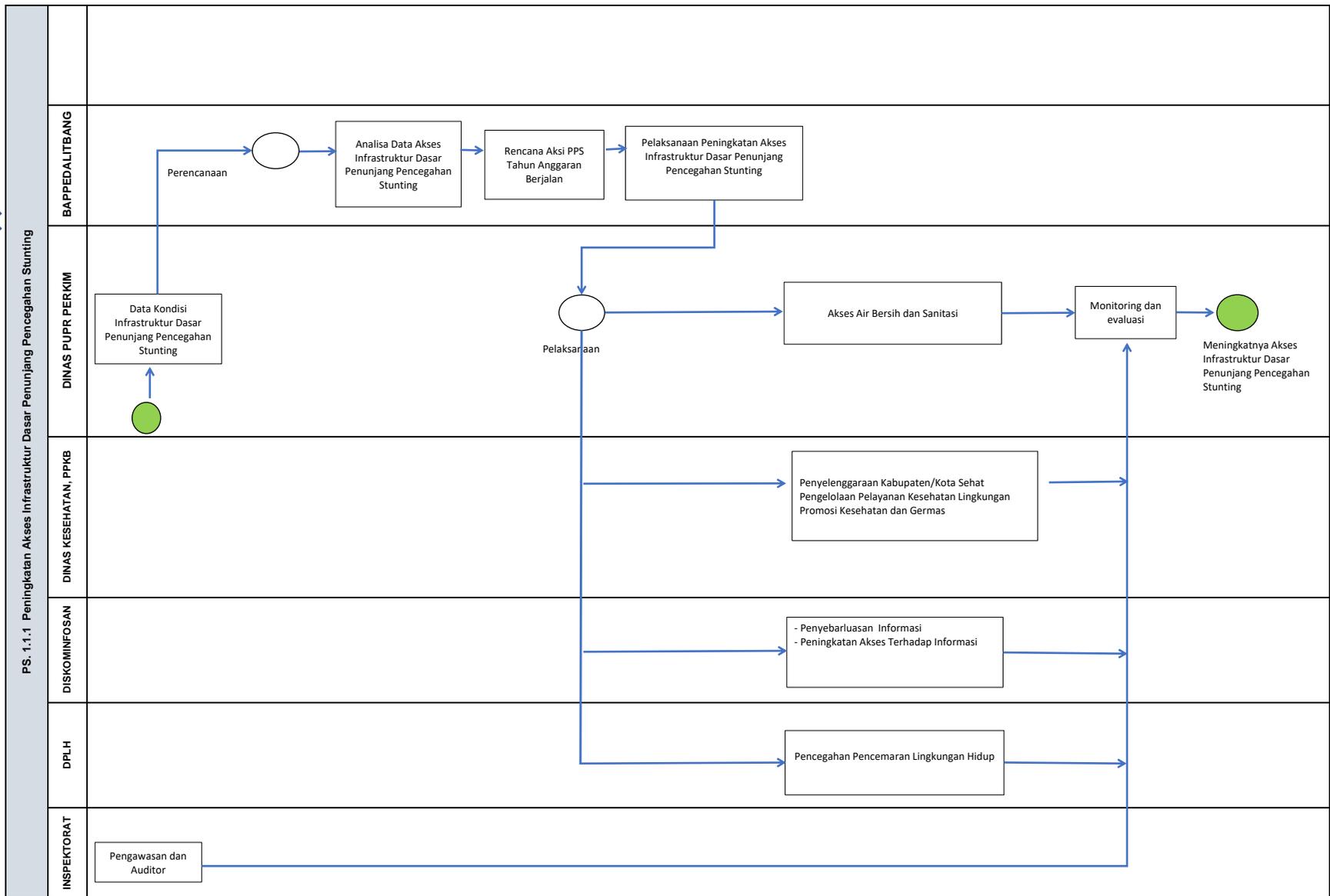
LEVEL 2  
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENURUNAN STUNTING**

LEVEL II

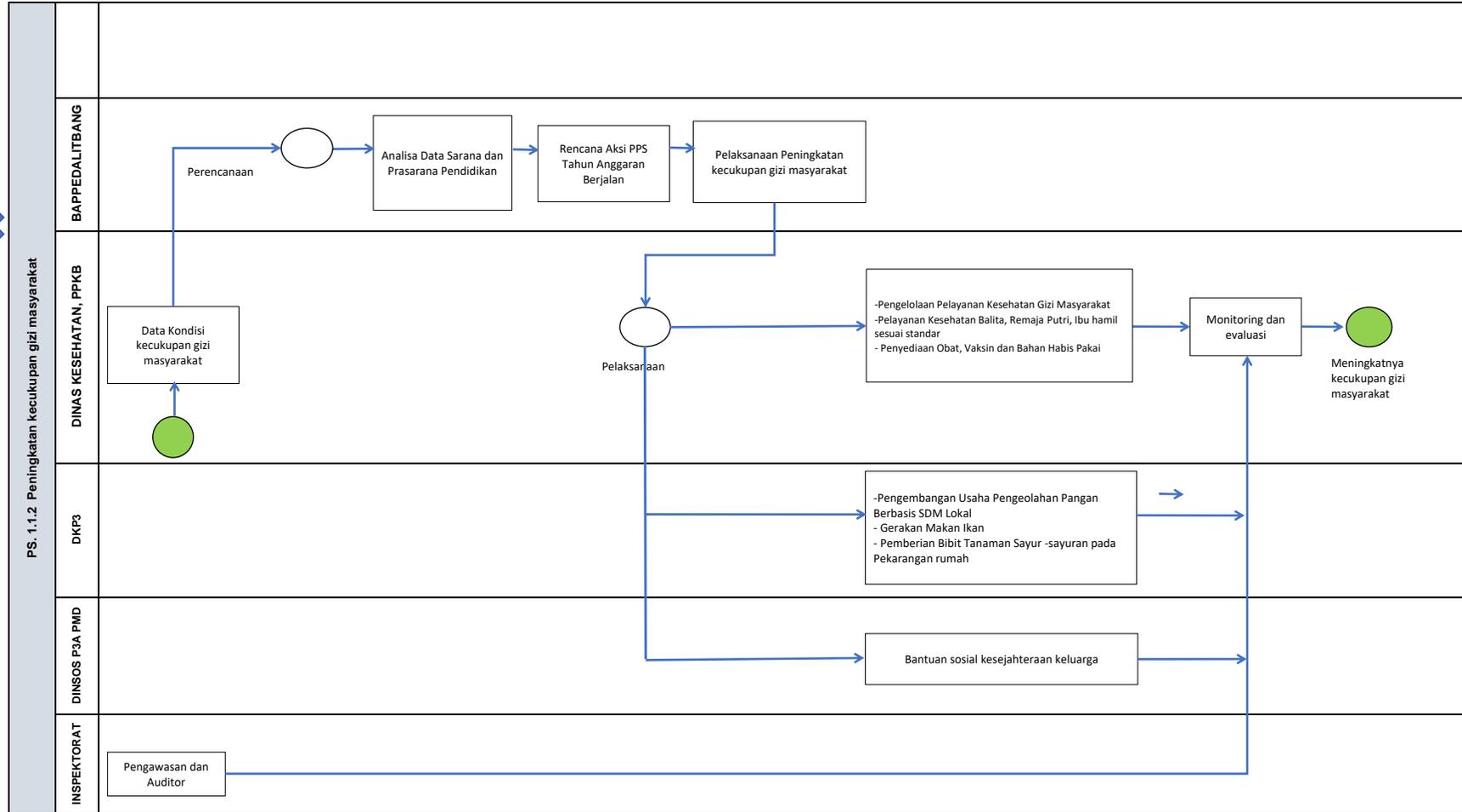
LINTAS FUNGSI



PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENURUNAN STUNTING

LEVEL II

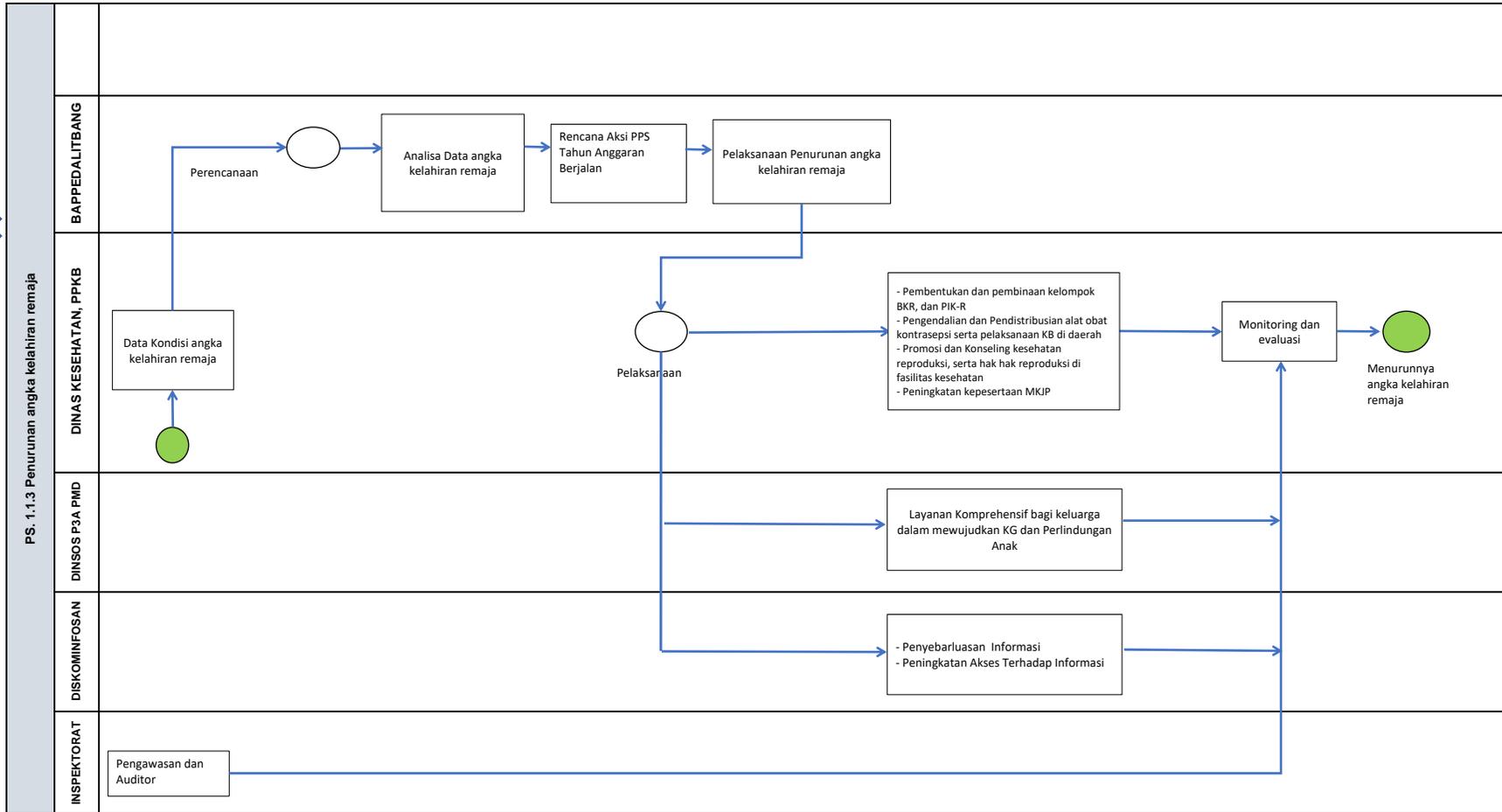
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENURUNAN STUNTING**

LEVEL II

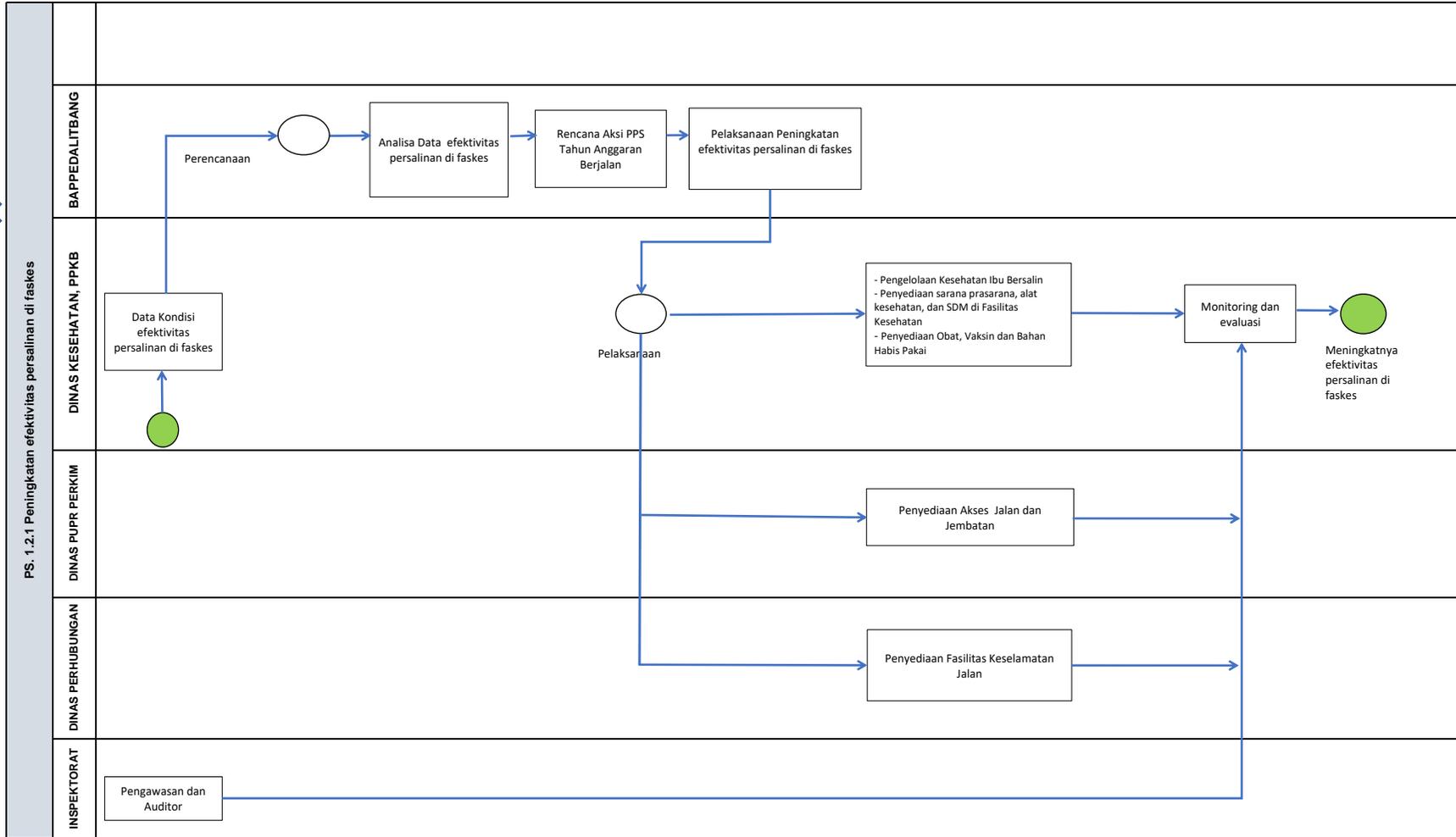
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI**

LEVEL II

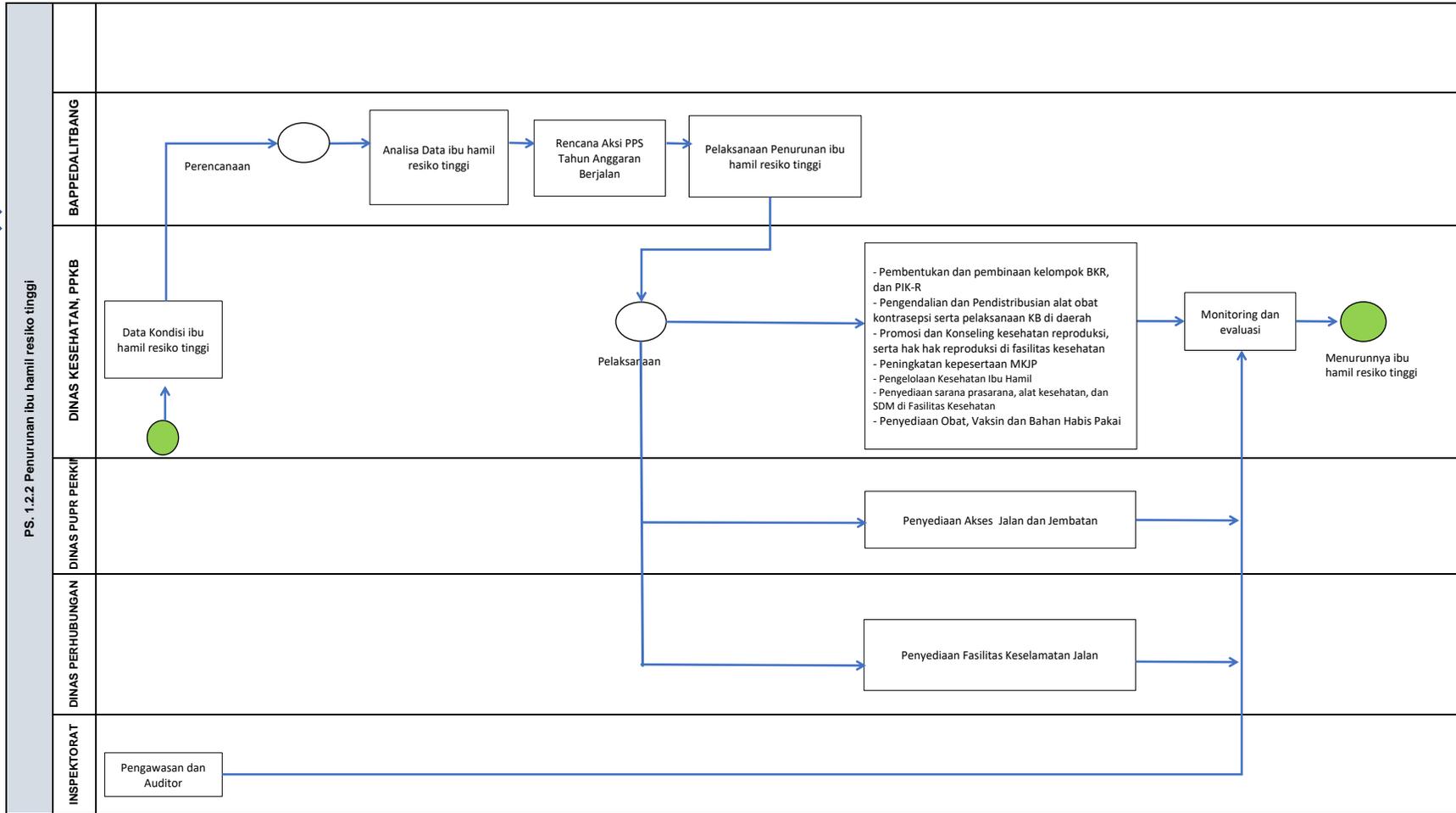
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI**

LEVEL II

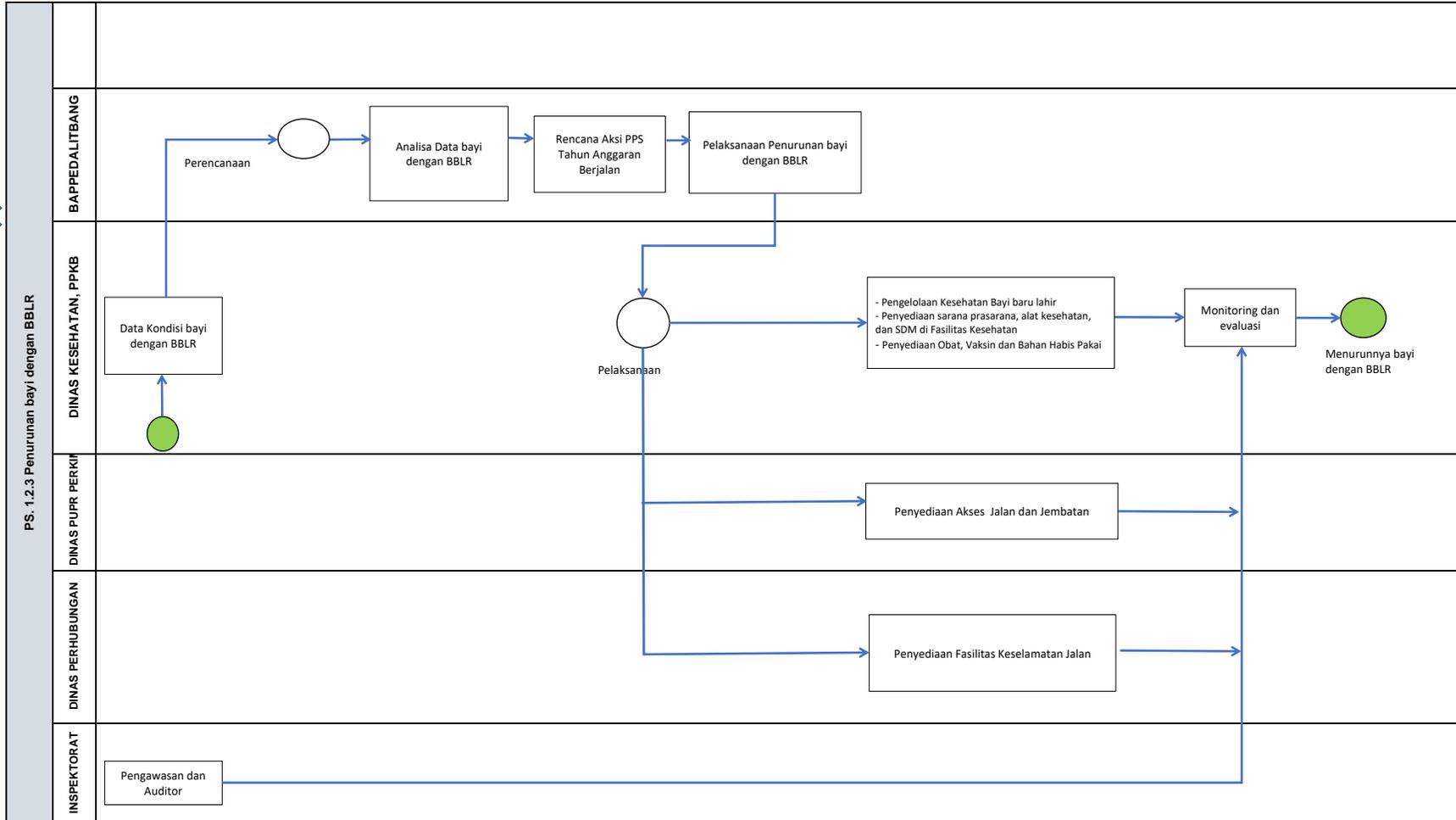
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI**

LEVEL II

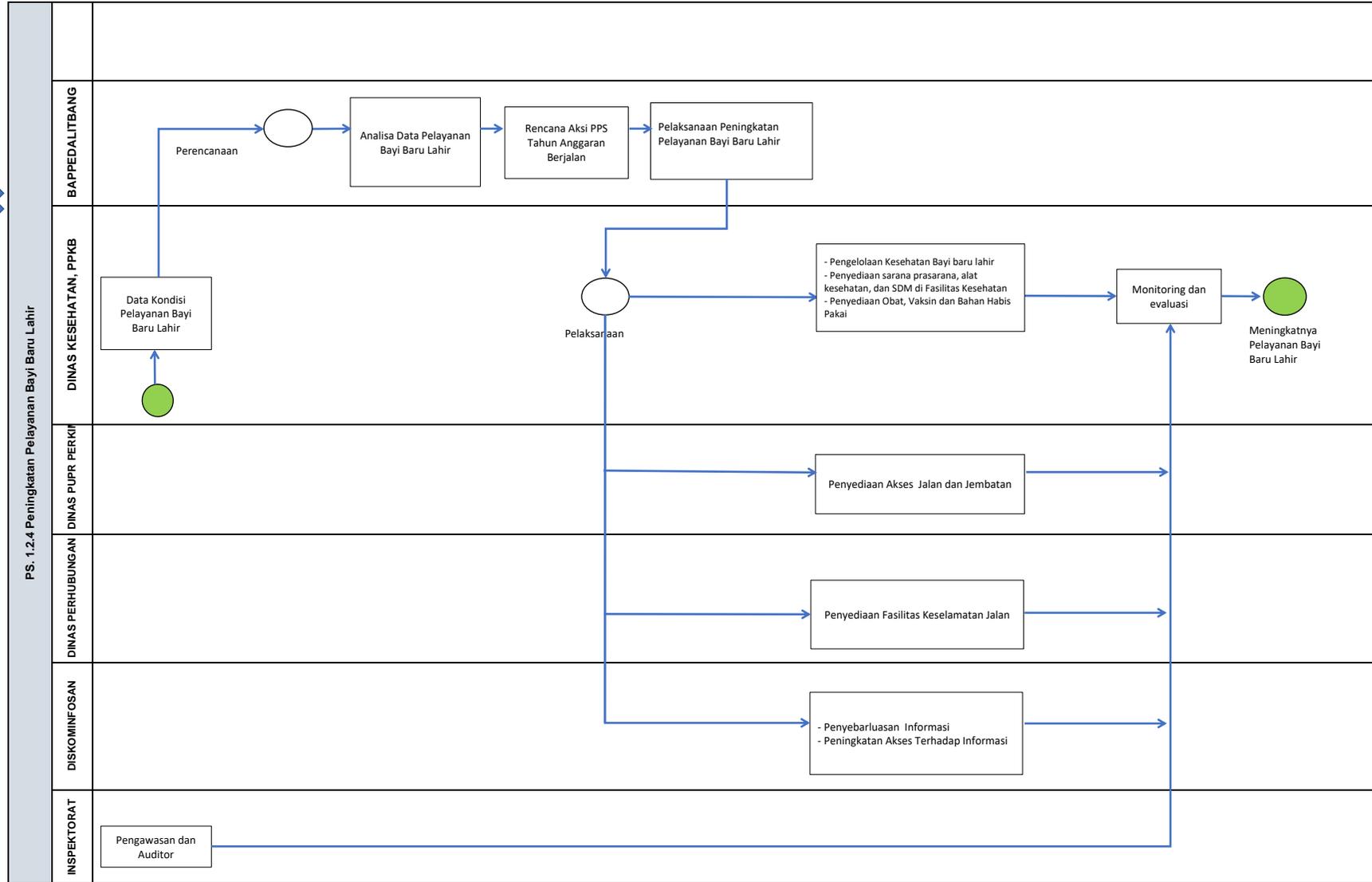
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI**

LEVEL II

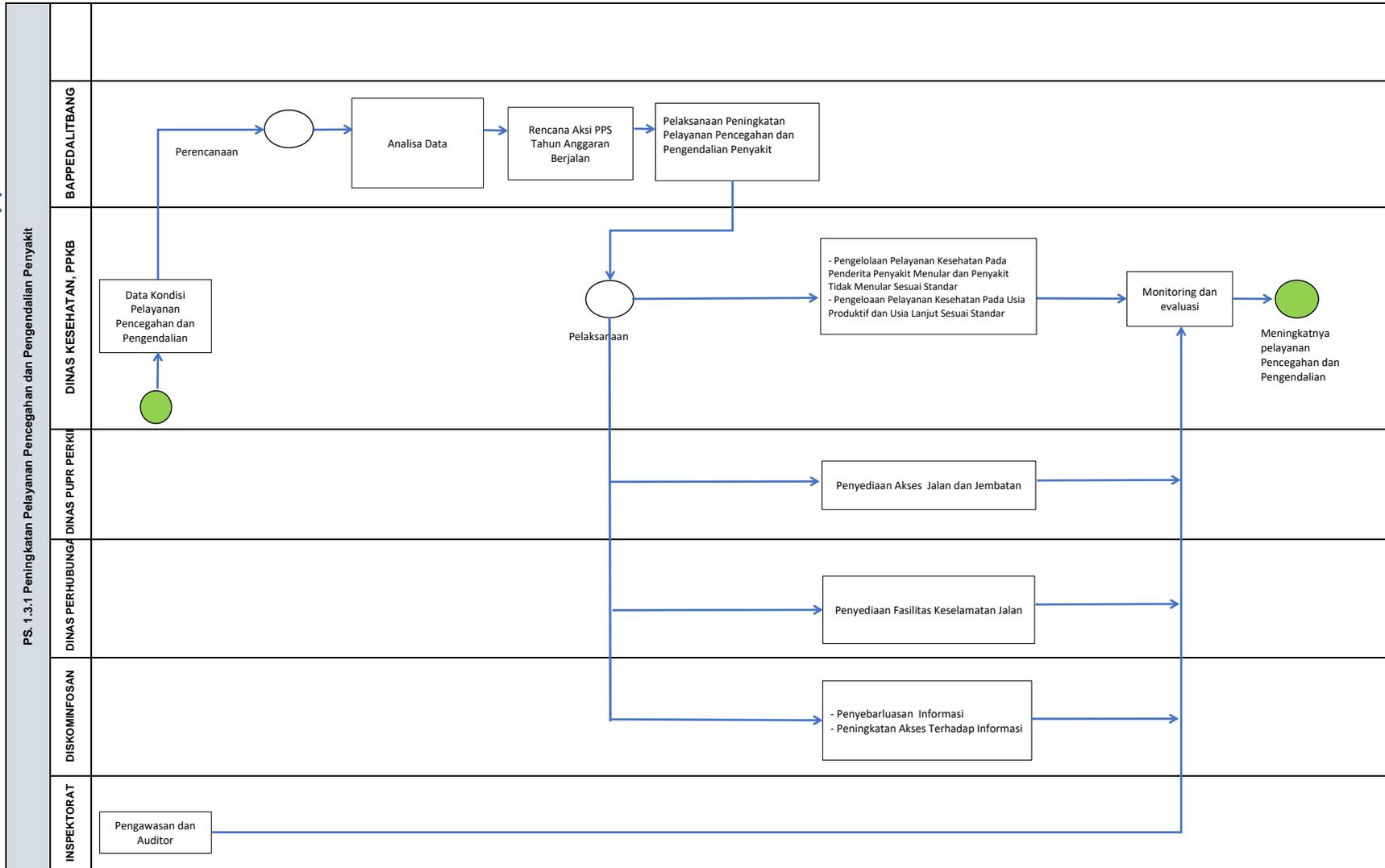
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

LEVEL II

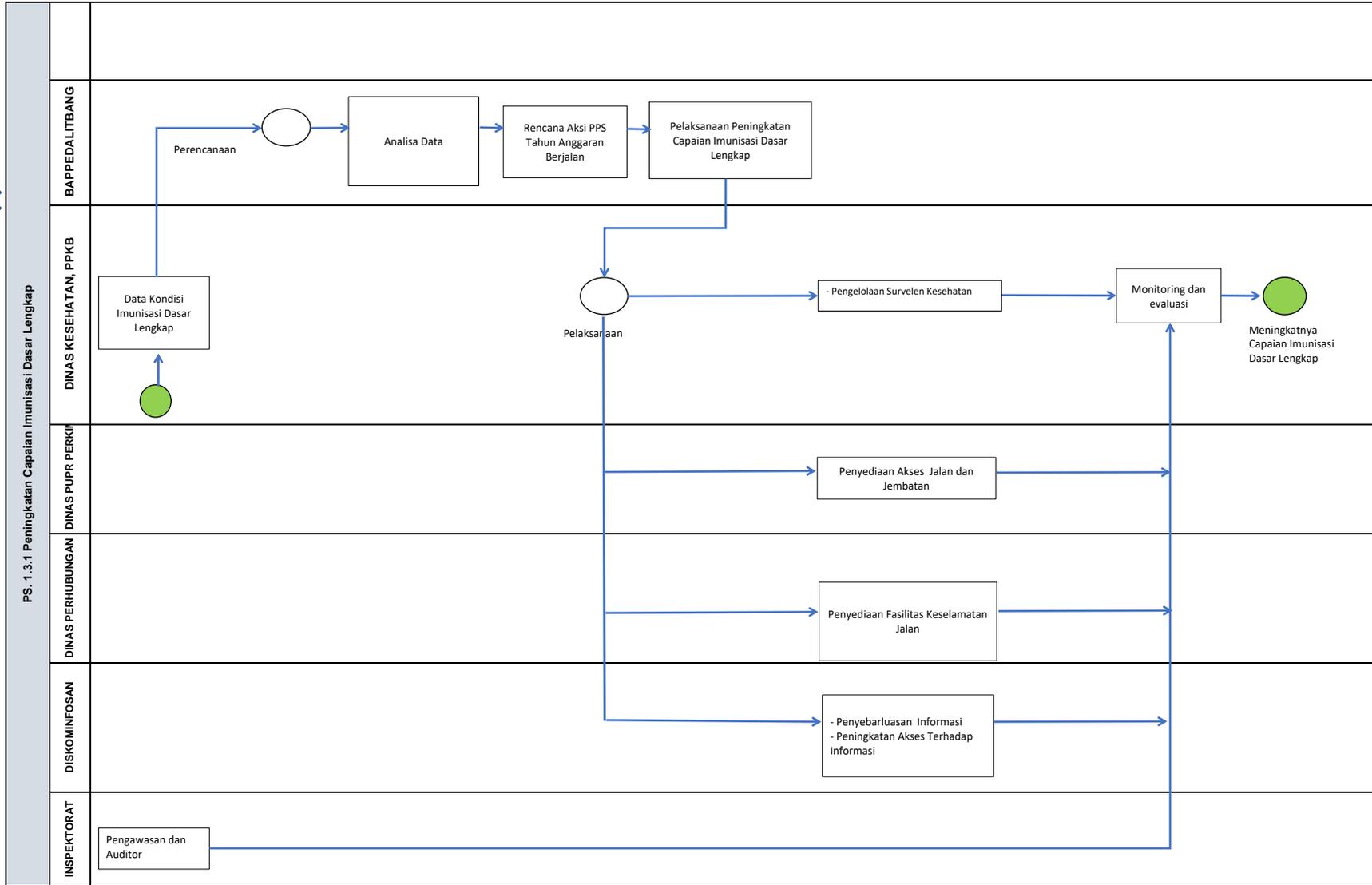
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING CROSS CUTTING PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

LEVEL II

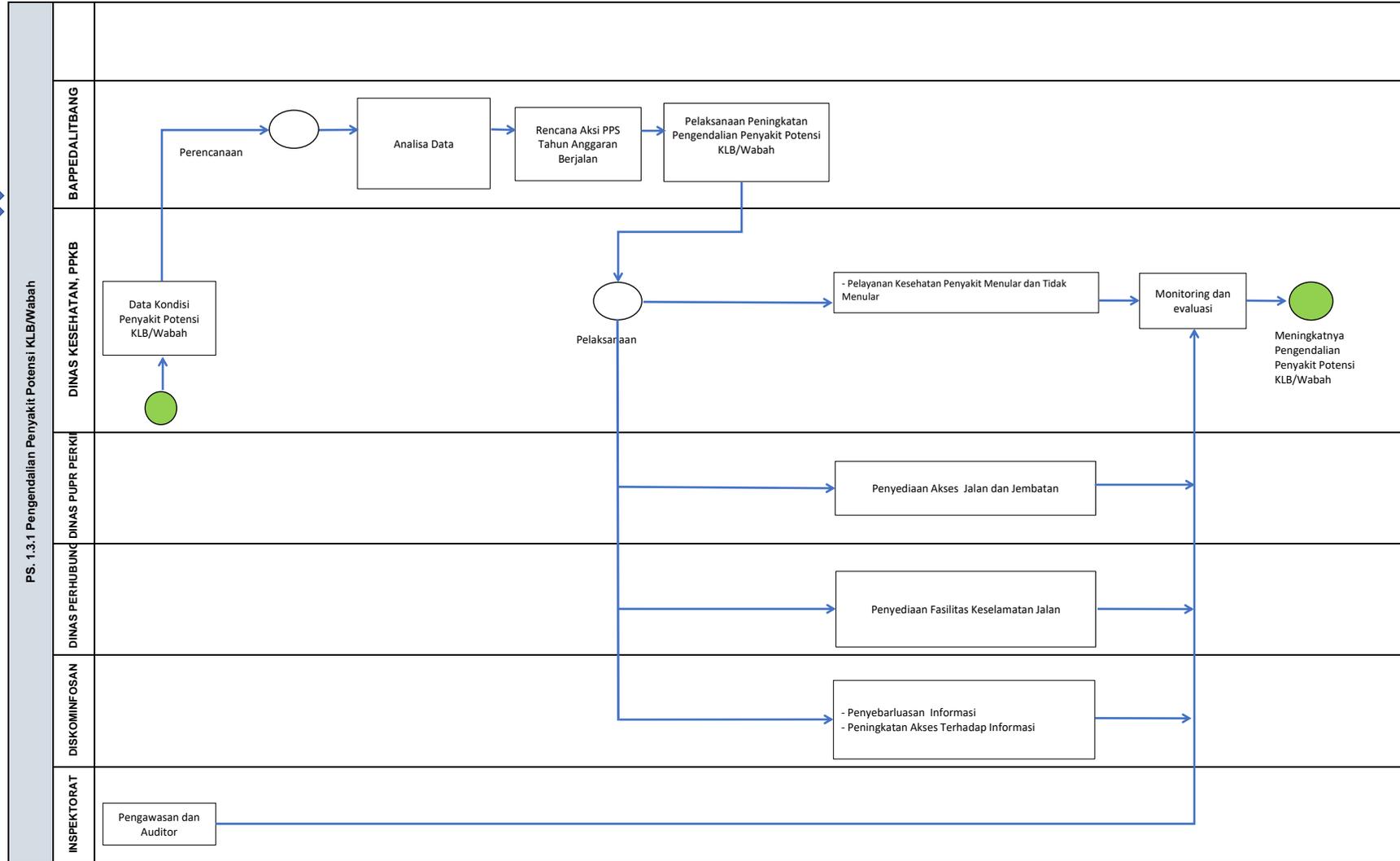
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING CROSS CUTTING PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR**

LEVEL II

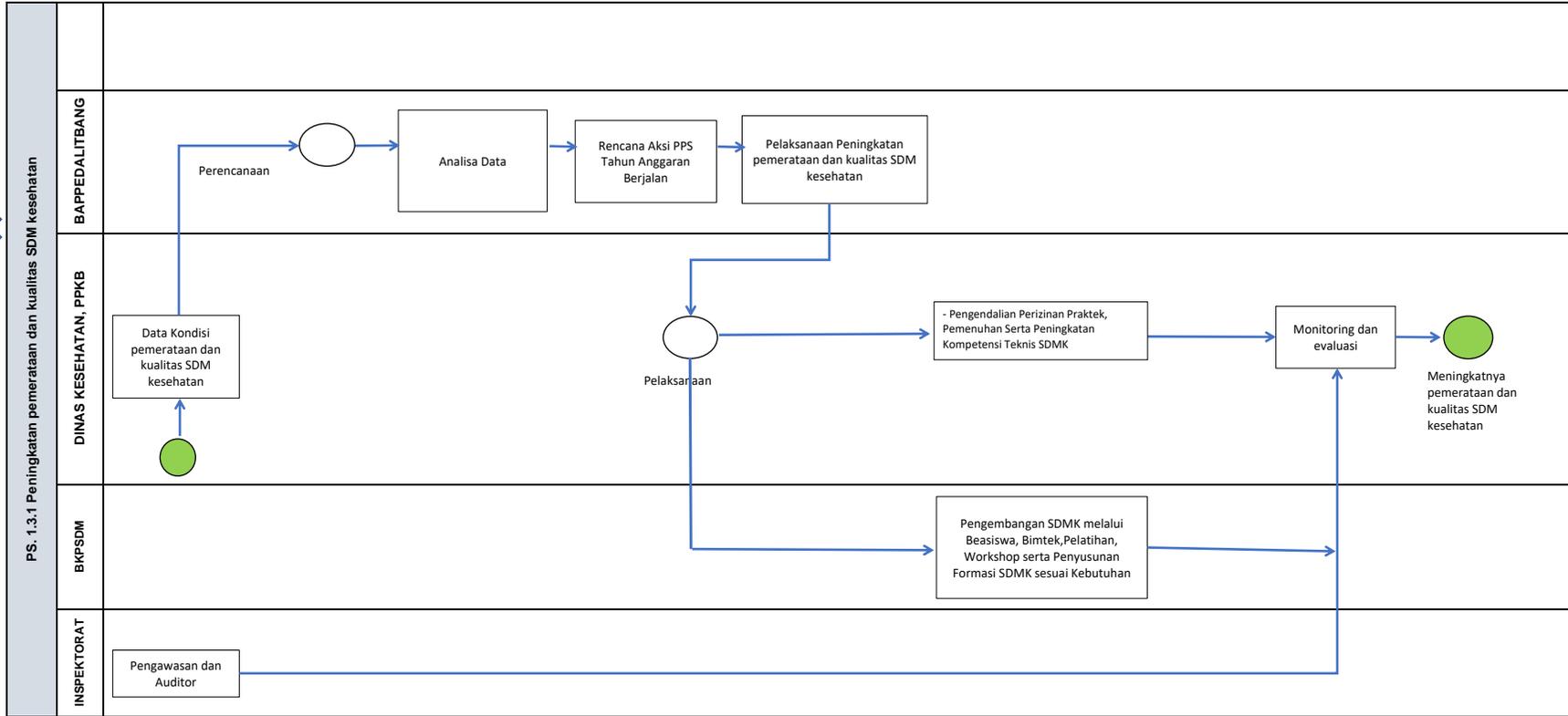
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**

LEVEL II

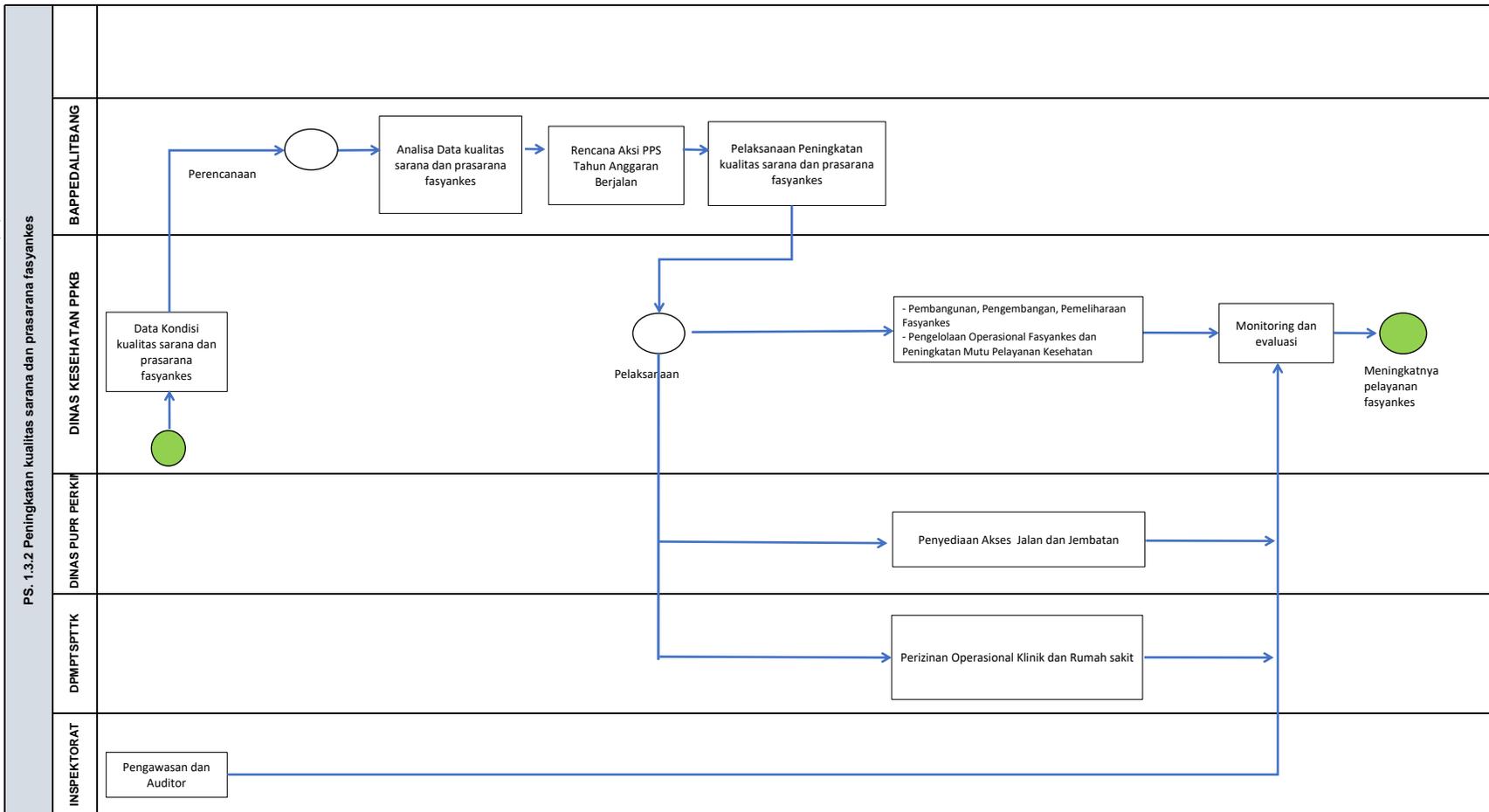
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**

LEVEL II

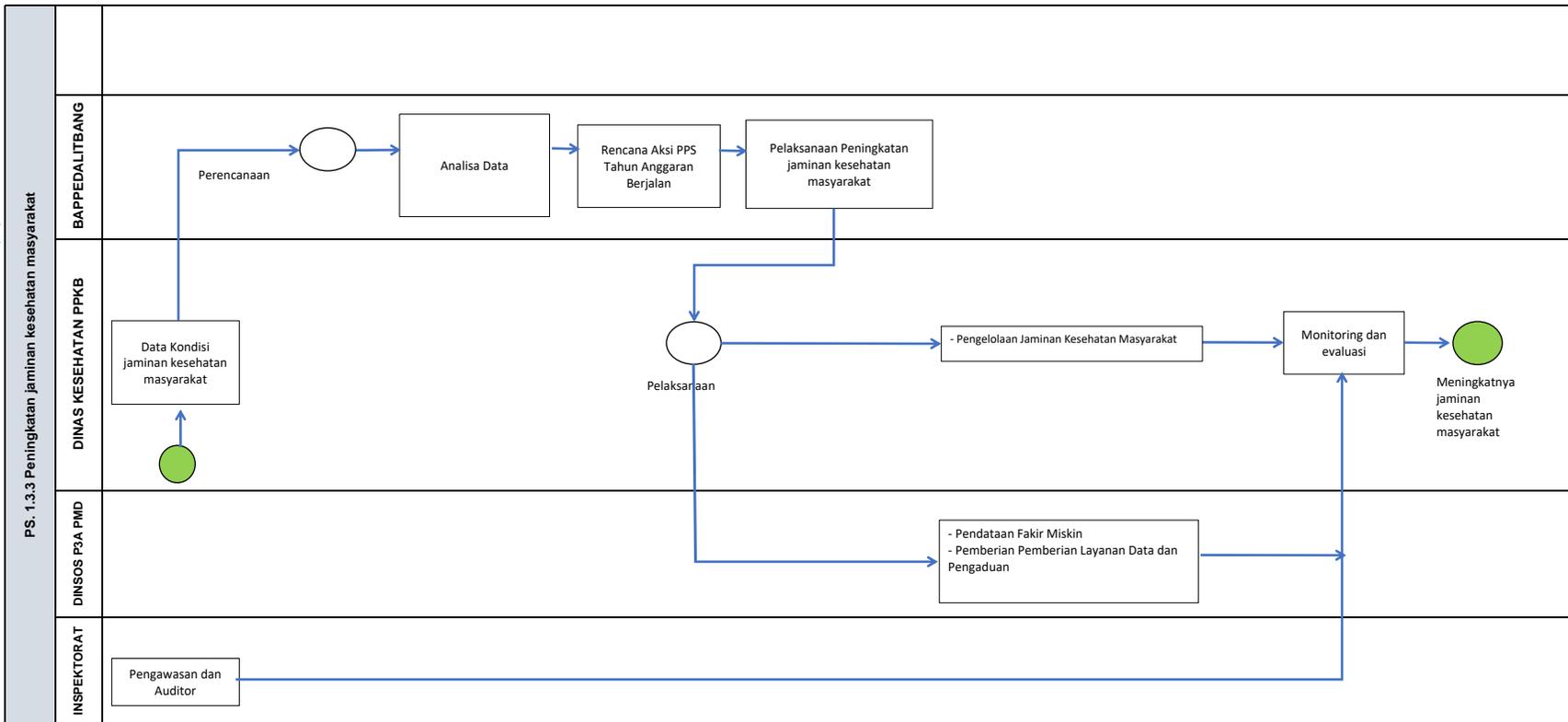
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**

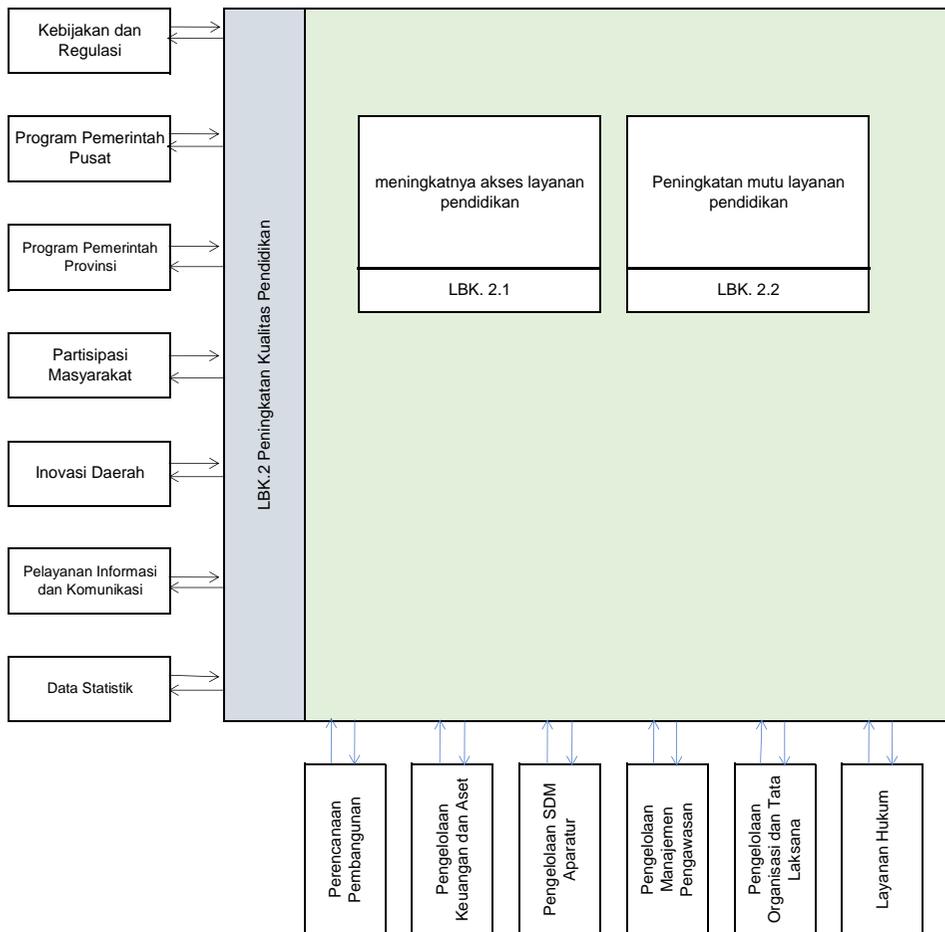
LEVEL II

**LINTAS FUNGSI**



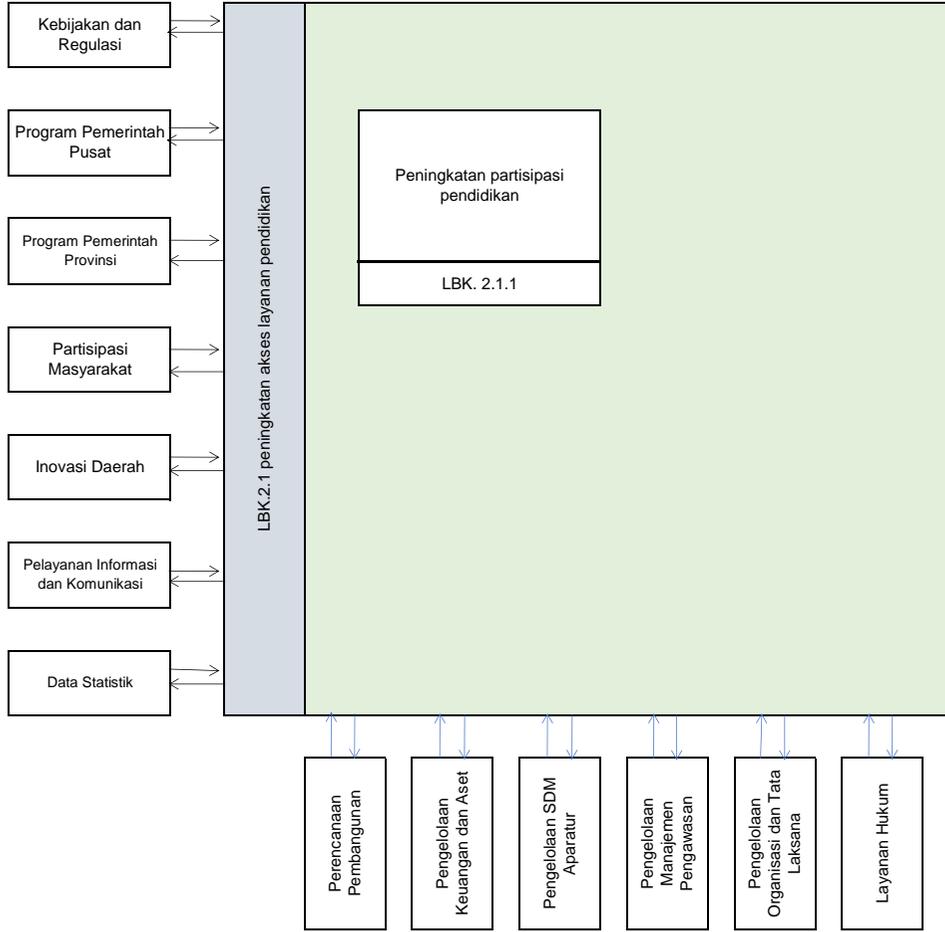
PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

LEVEL 2  
SUB PROSES



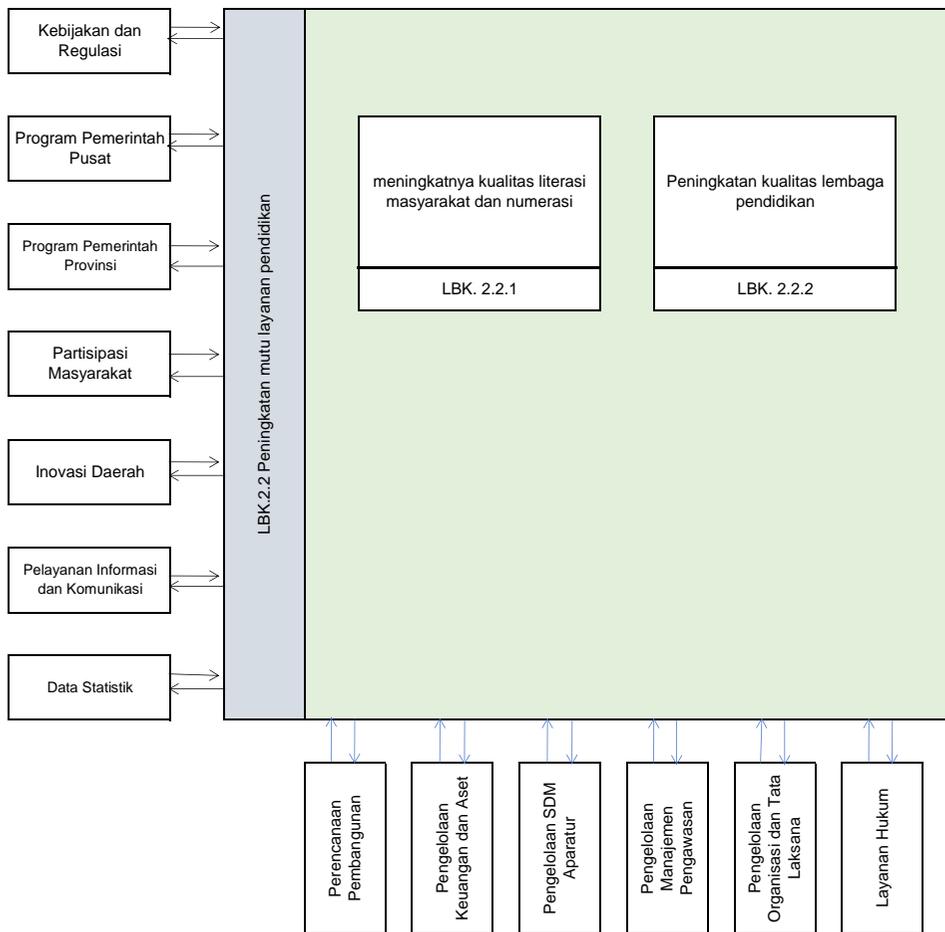
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
**SUB PROSES**



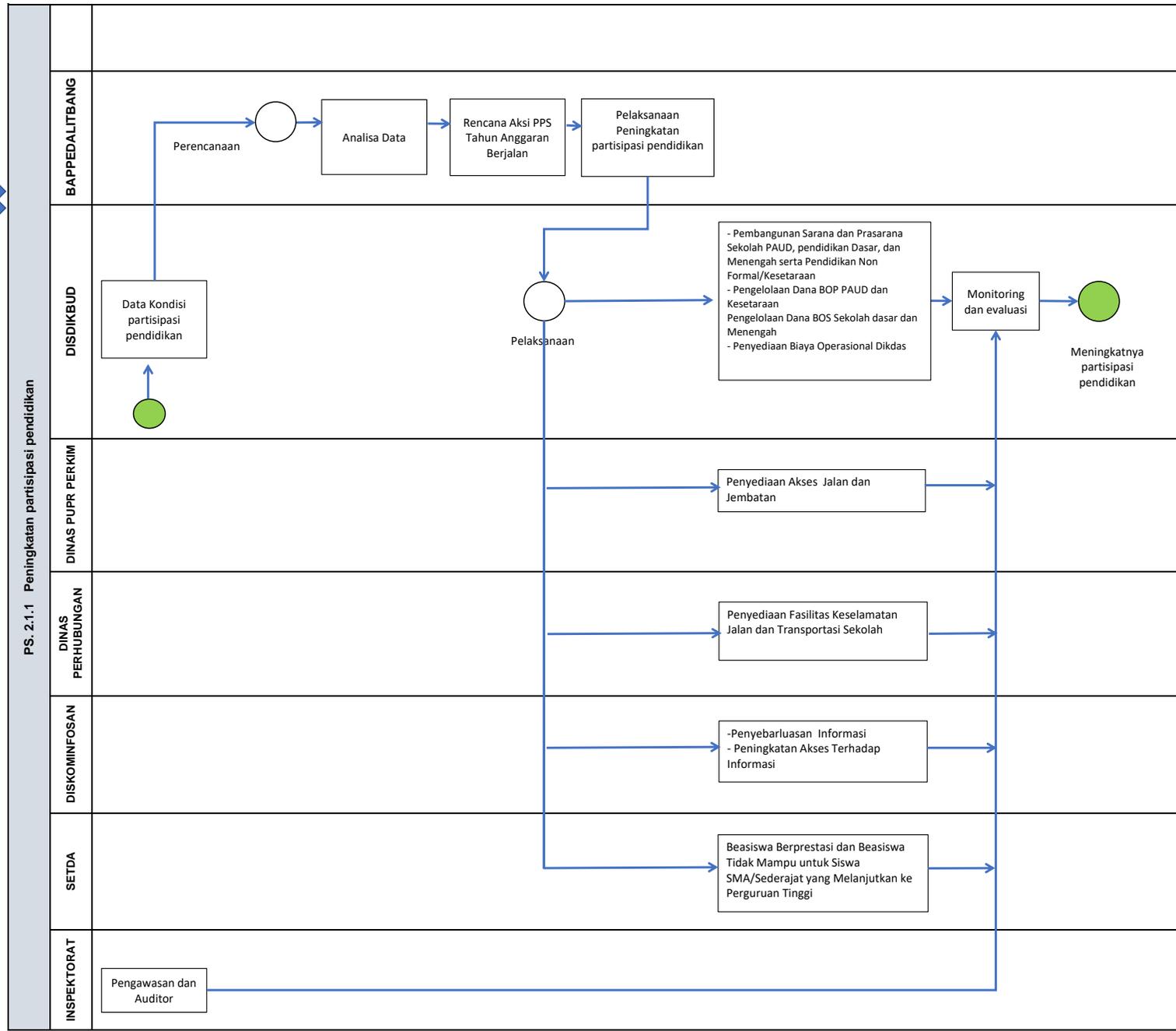
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
SUB PROSES



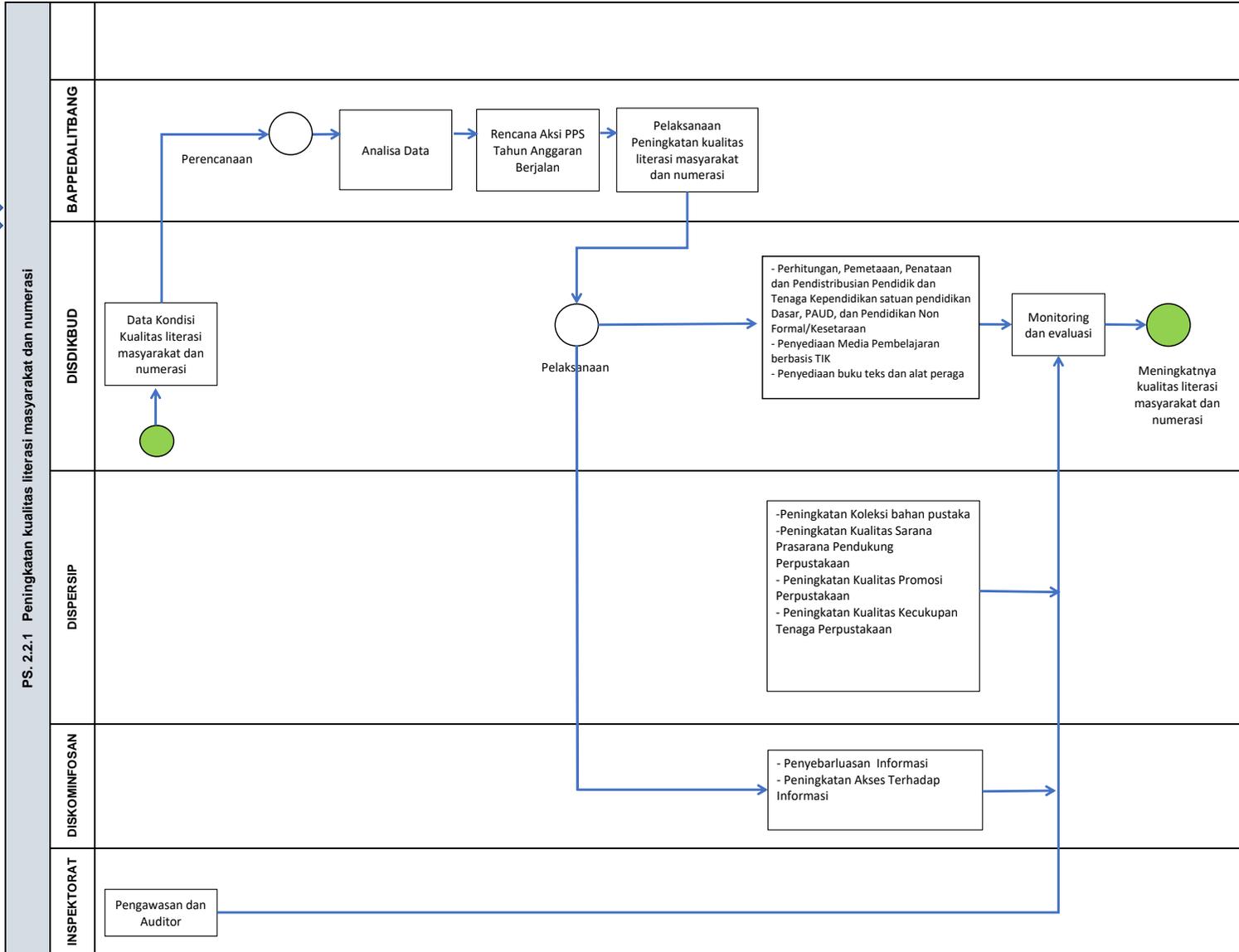
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN**

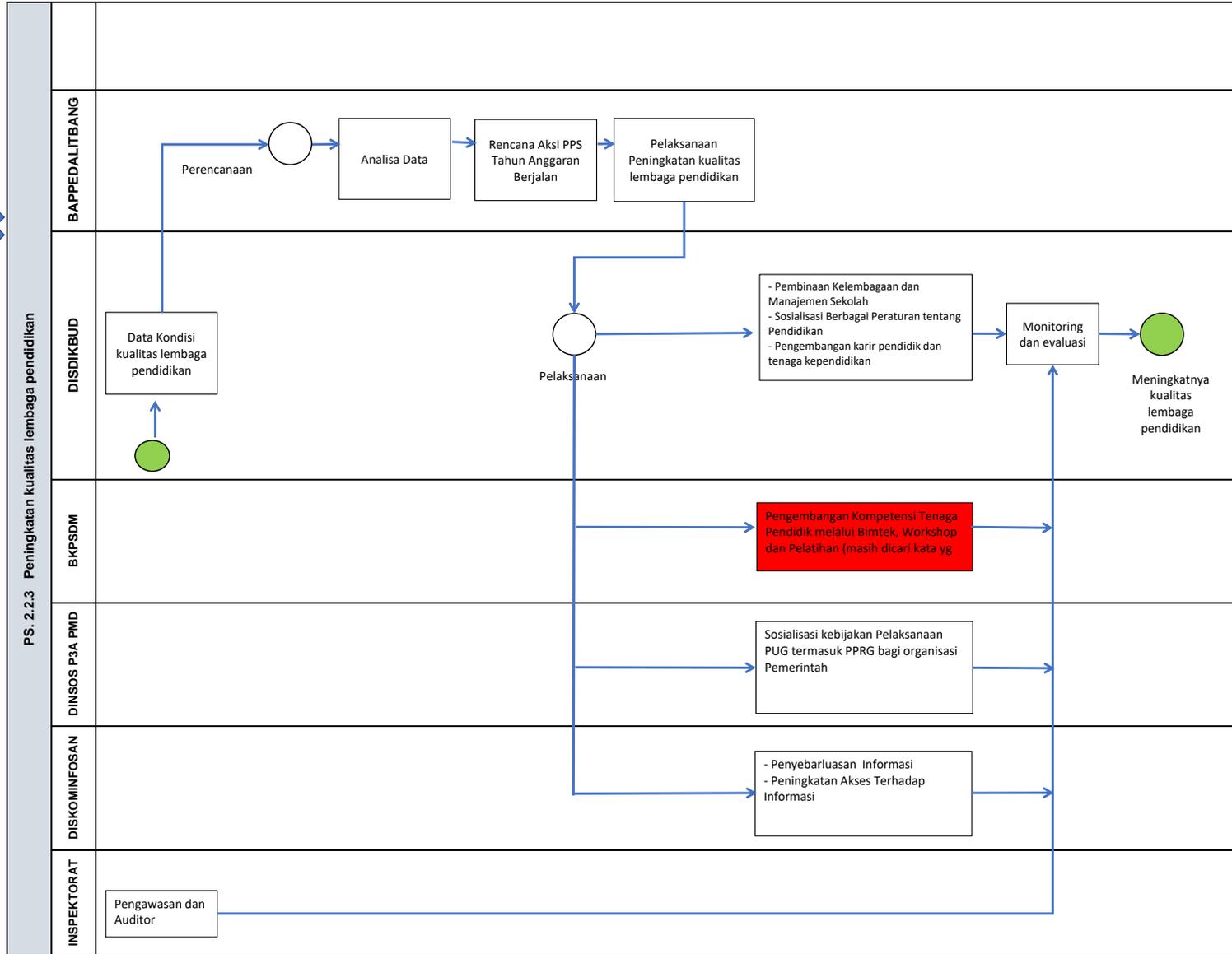
LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN**

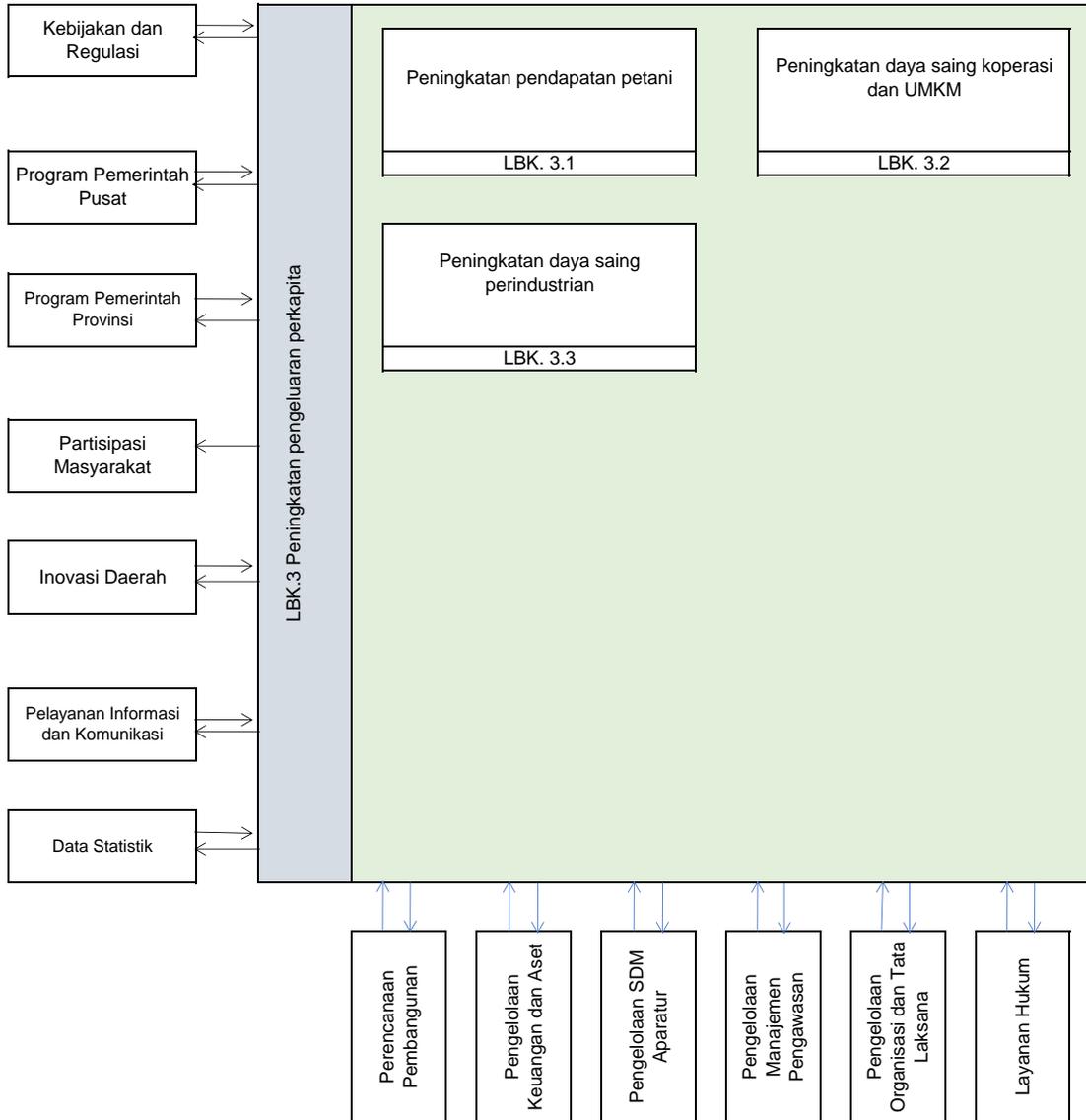
LEVEL II

LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 1  
**SUB PROSES**



Saran Kesepakatan  
proses bisnis

level Pemda

L0 = Bupati

L1= Sasaran

Peta relasi

coba untuk 1 OPD

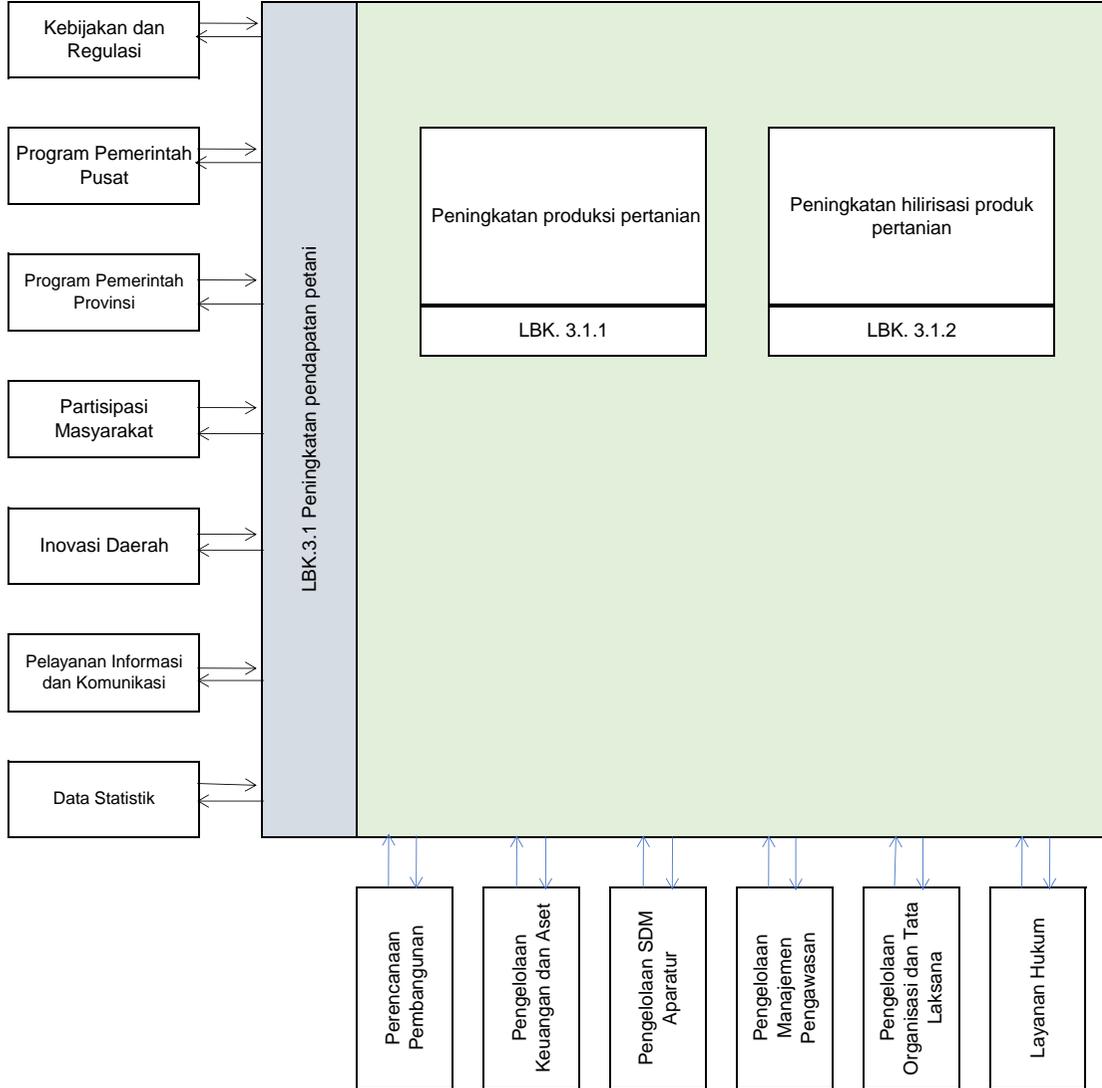
L0 = sasaran OPD

L1= Program OPD tersebut & OPD yang terkait

**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2

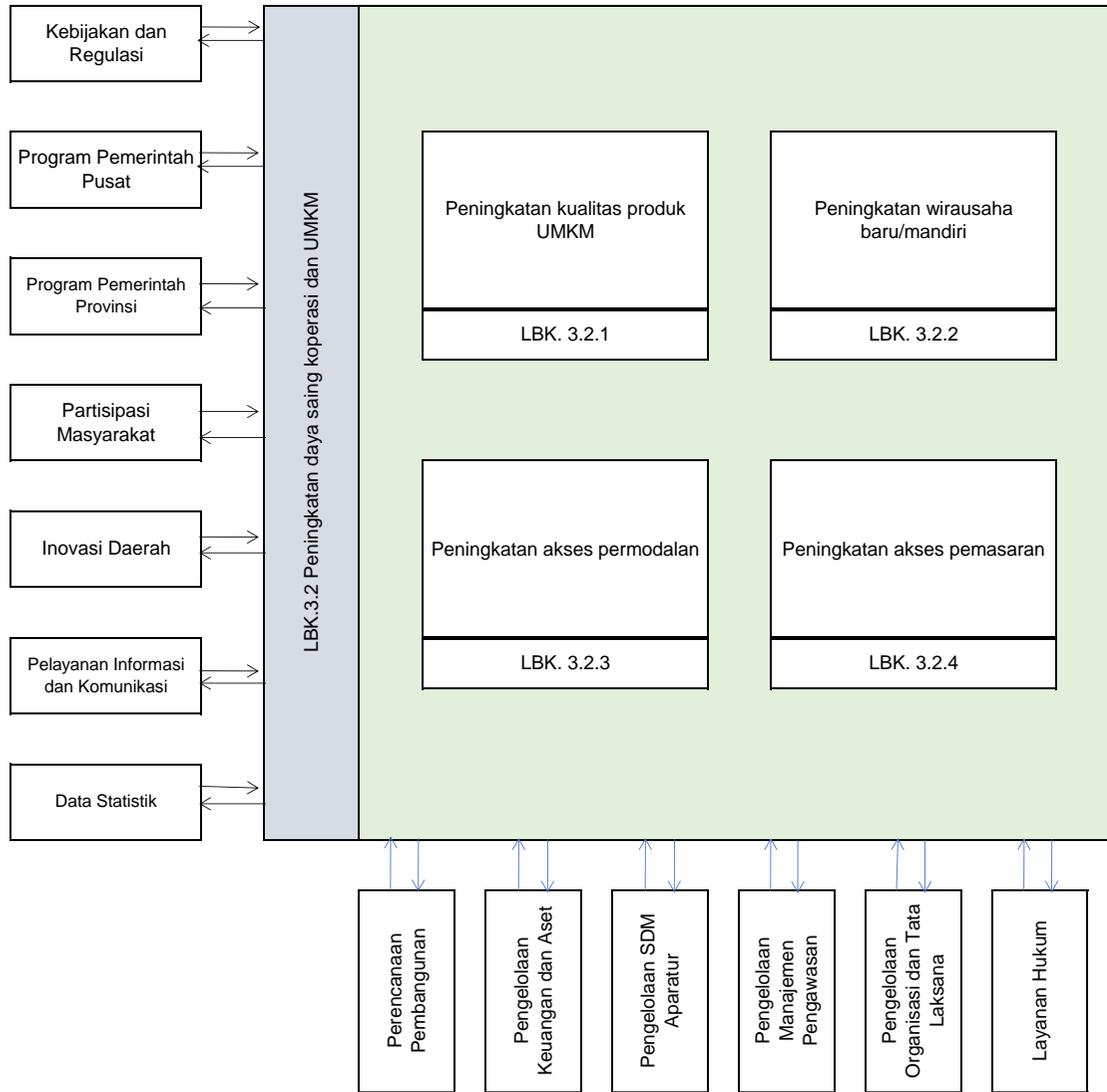
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2

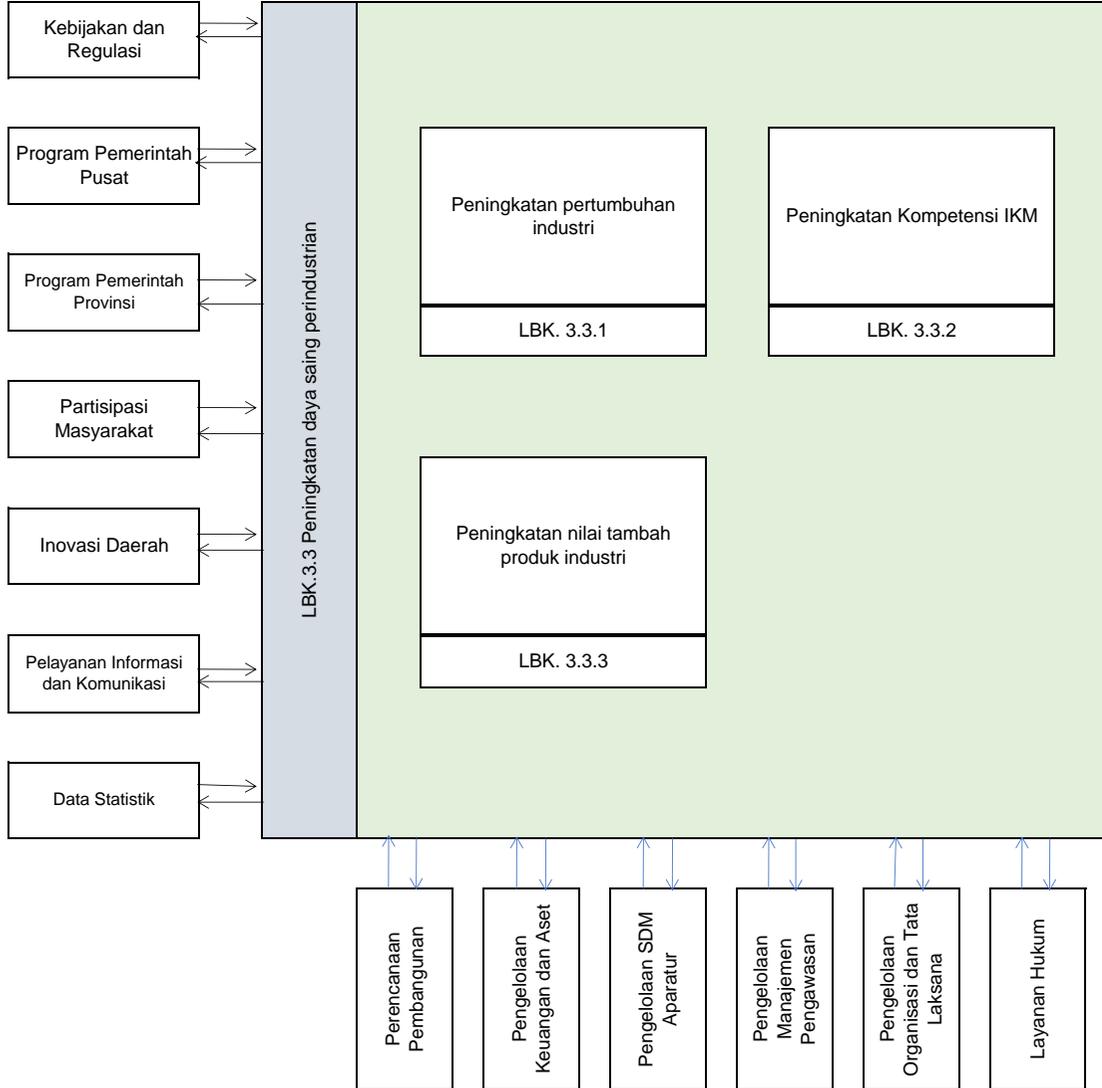
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2

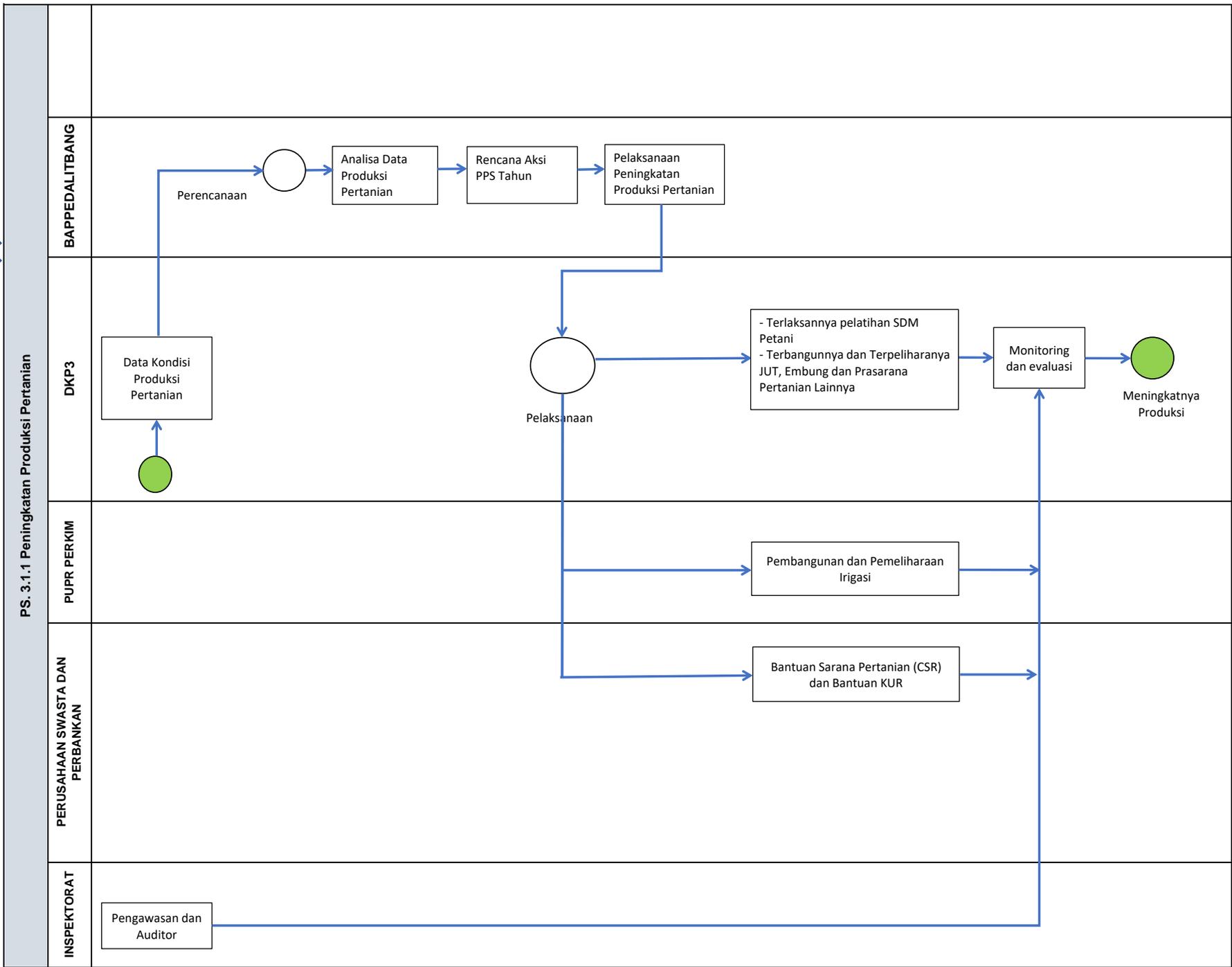
**SUB PROSES**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI**

LEVEL II

LINTAS FUNGSI



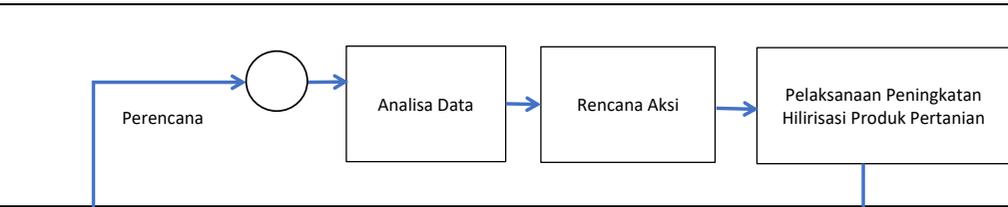
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI**

LEVEL II

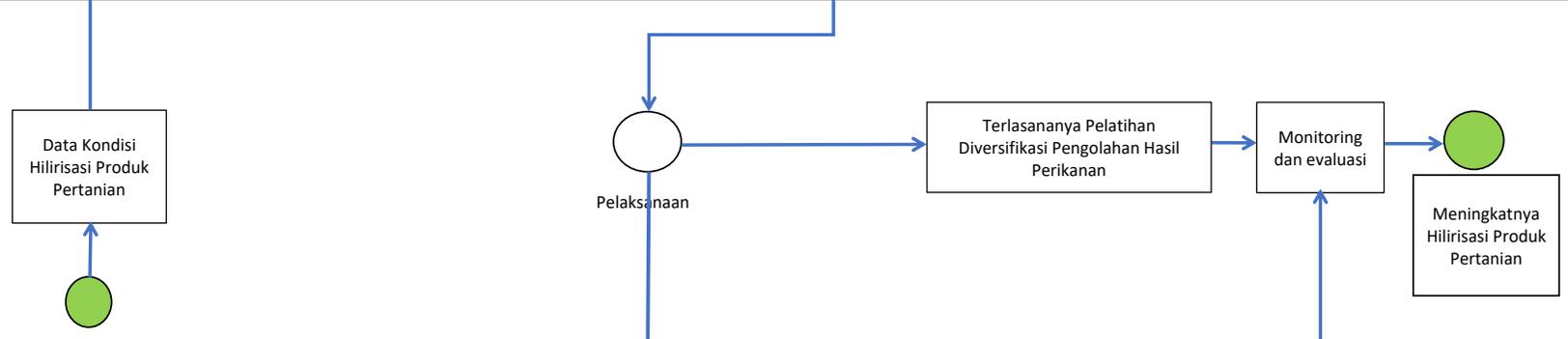
**LINTAS FUNGSI**

**PS. 3.1.2 Peningkatan Hilirisasi Produk Pertanian**

**BAPEDALITBANG**



**DKP3**



**DKUKMPP**



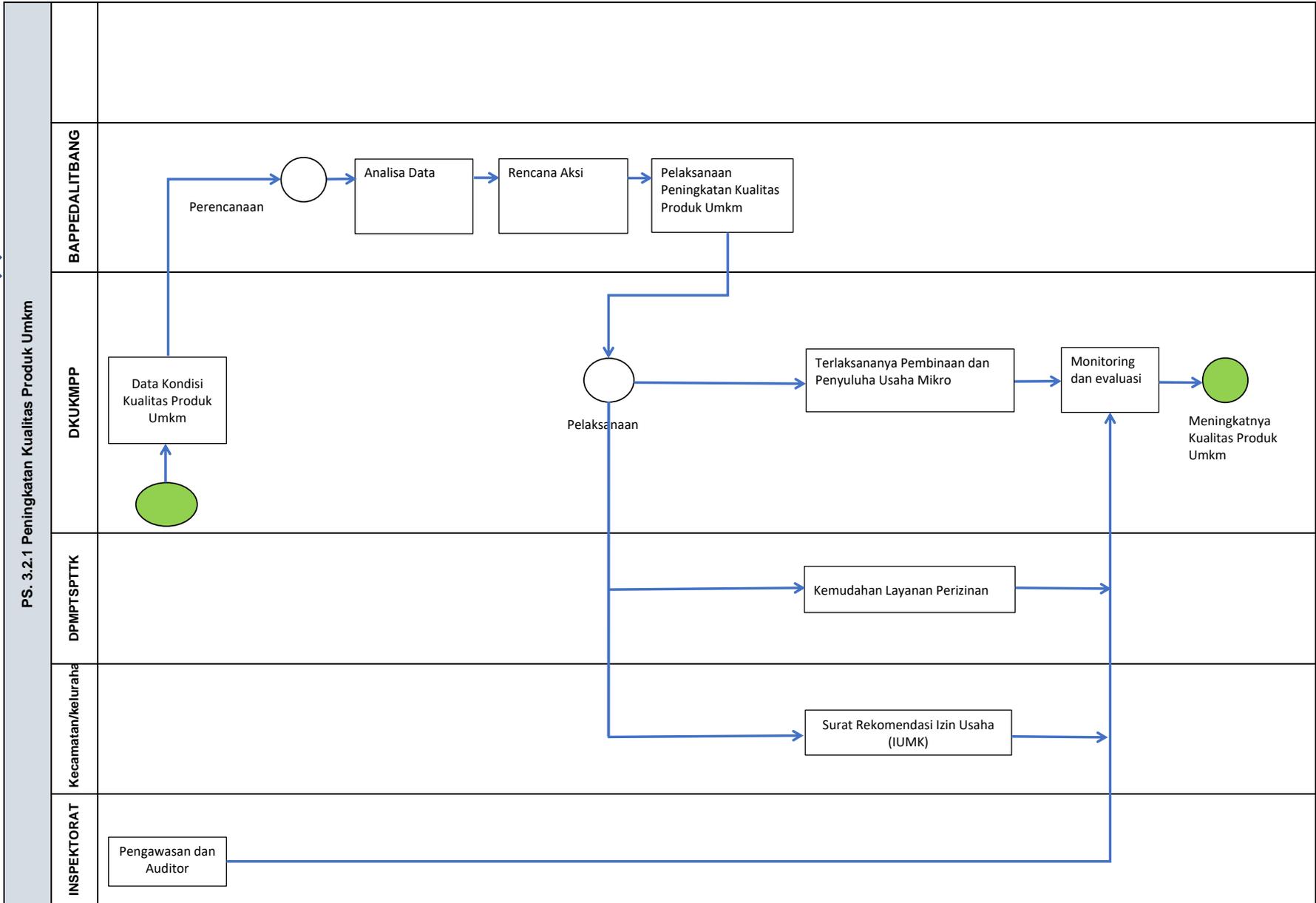
**INSPEKTORAT**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM**

LEVEL II

LINTAS FUNGSI

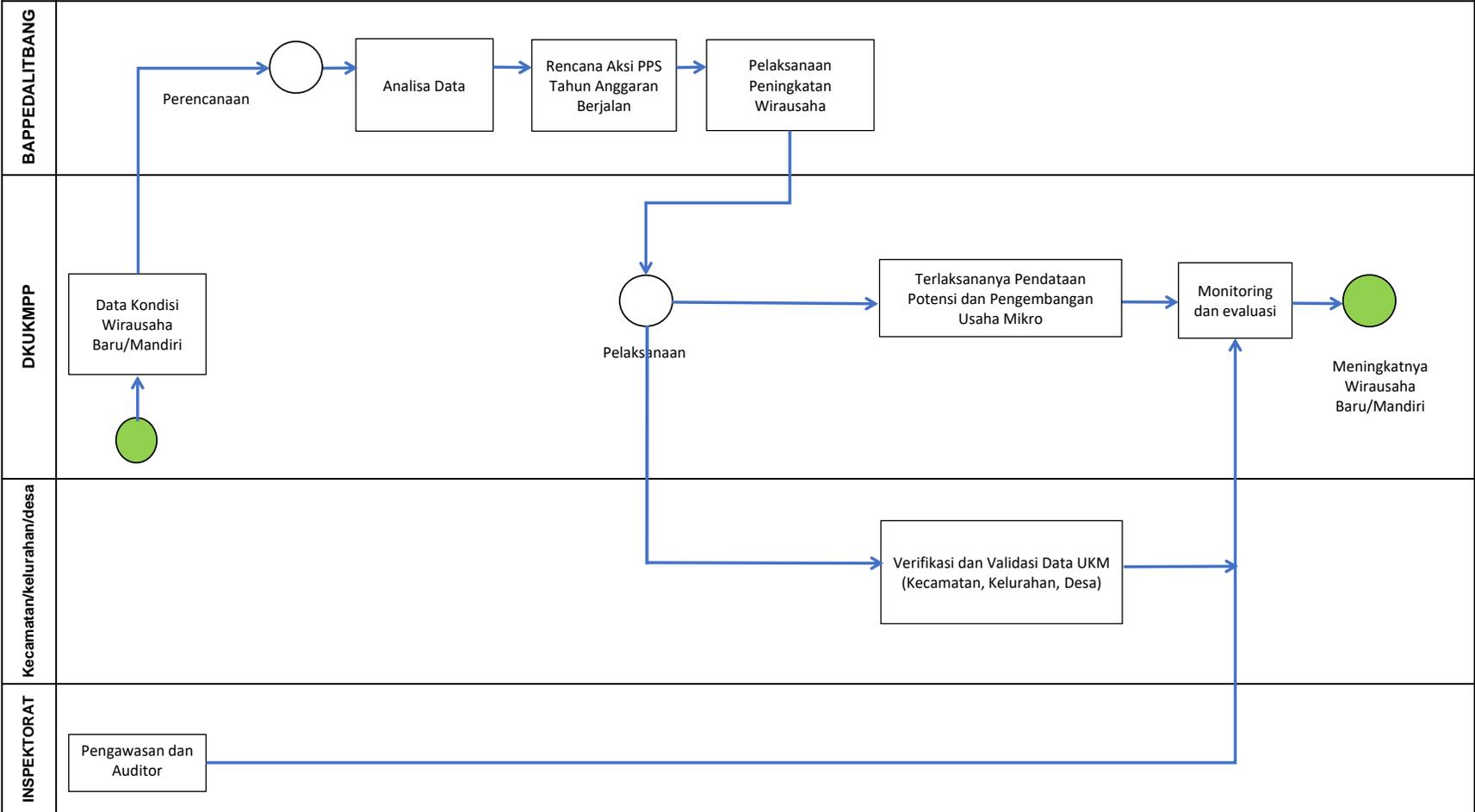


**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM**

LEVEL II

**LINTAS FUNGSI**

**PS. 3.3.2 Peningkatan Wirausaha Baru/Mandiri**



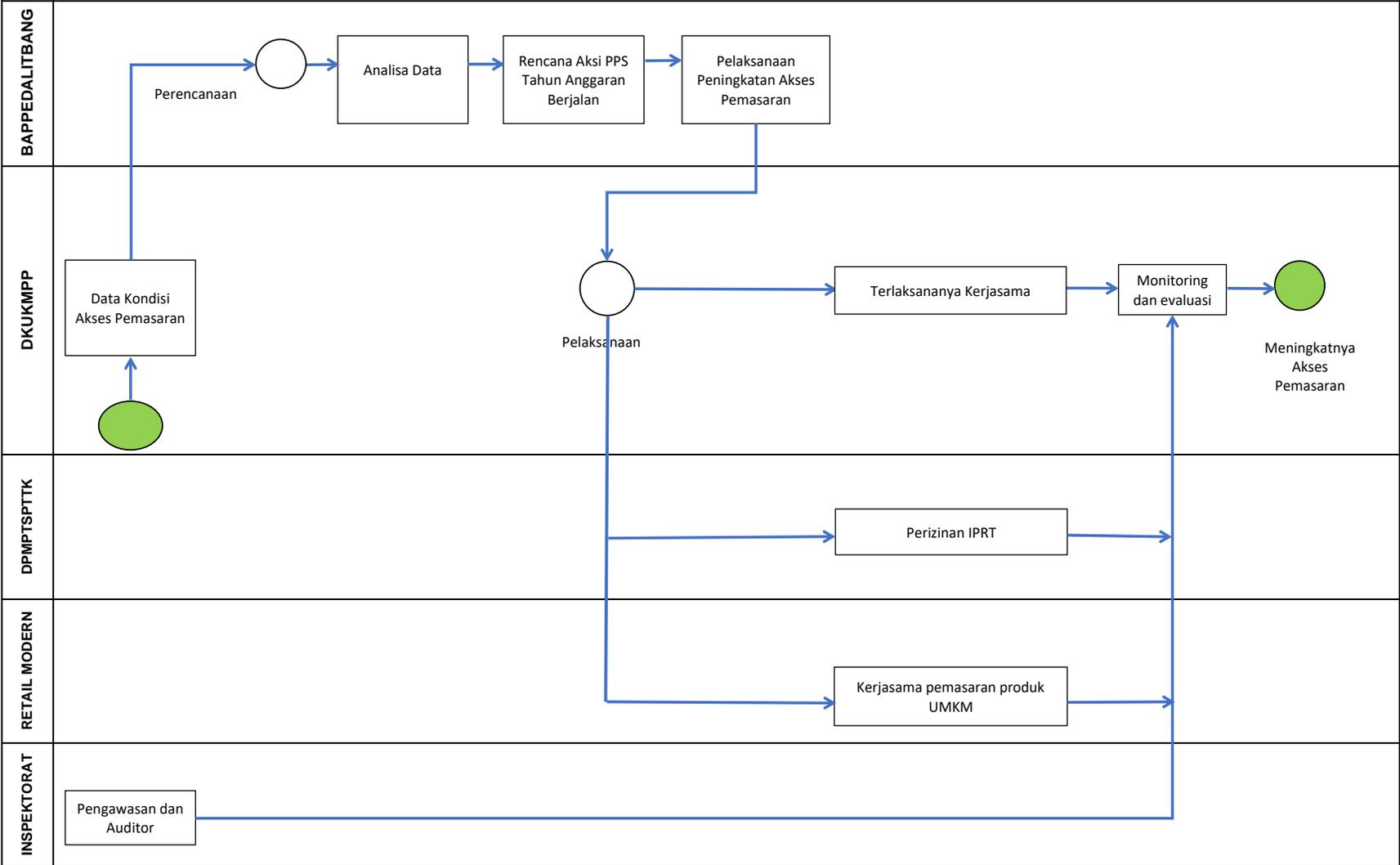


**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UMKM**

LEVEL II

**LINTAS FUNGSI**

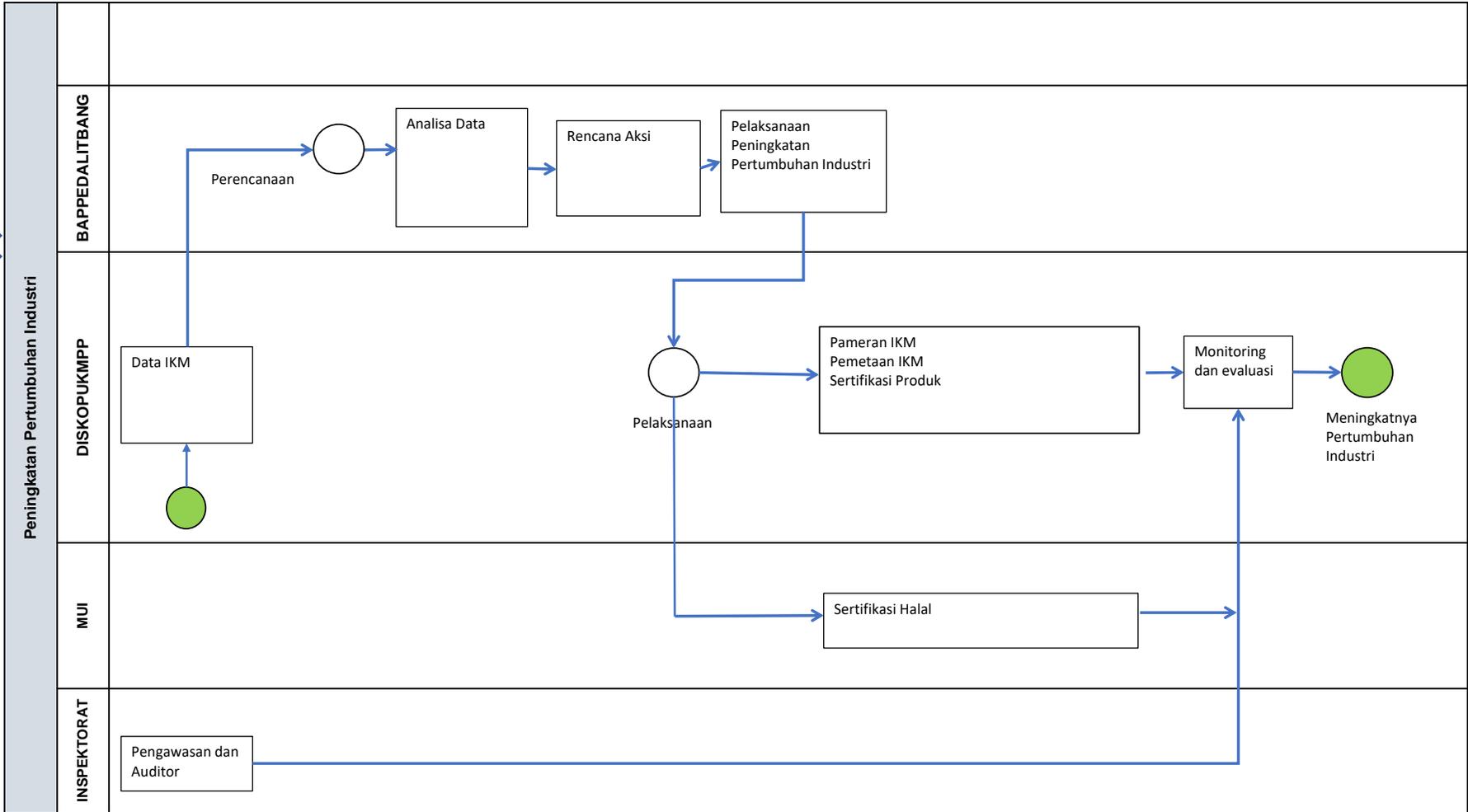
**PS. 3.2.4 Peningkatan Akses Pemasaran**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

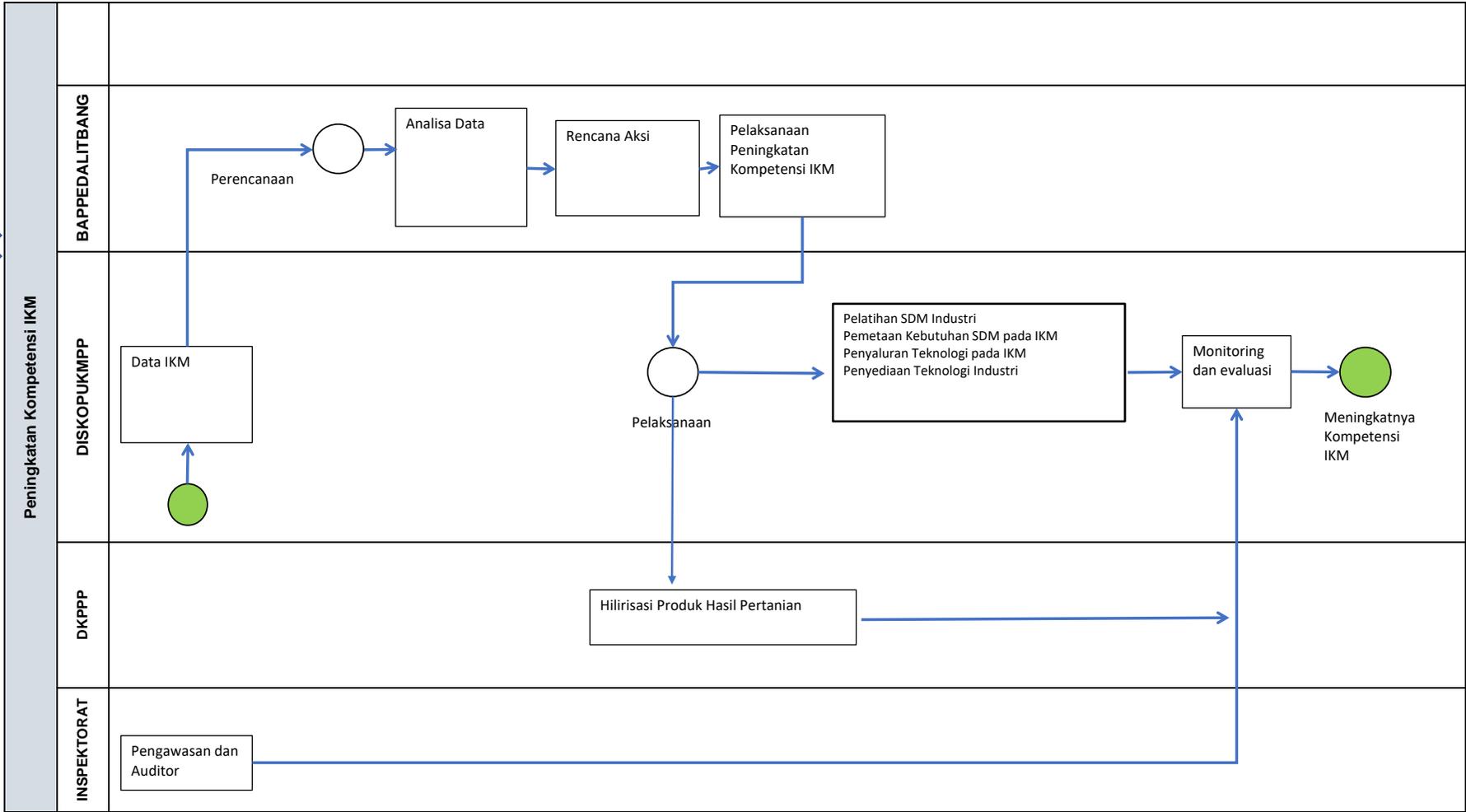
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

LEVEL II

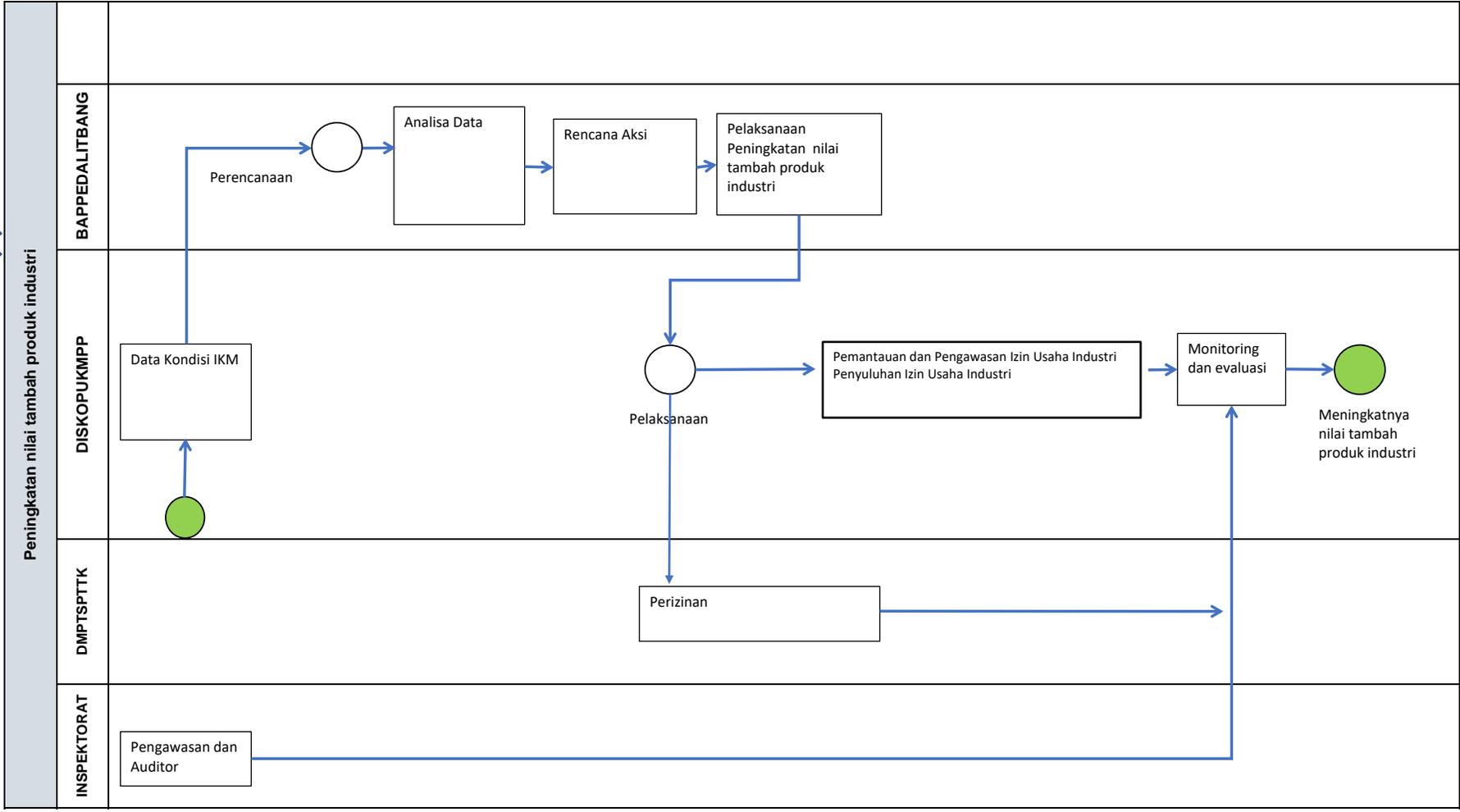
**LINTAS FUNGSI**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING PENINGKATAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN**

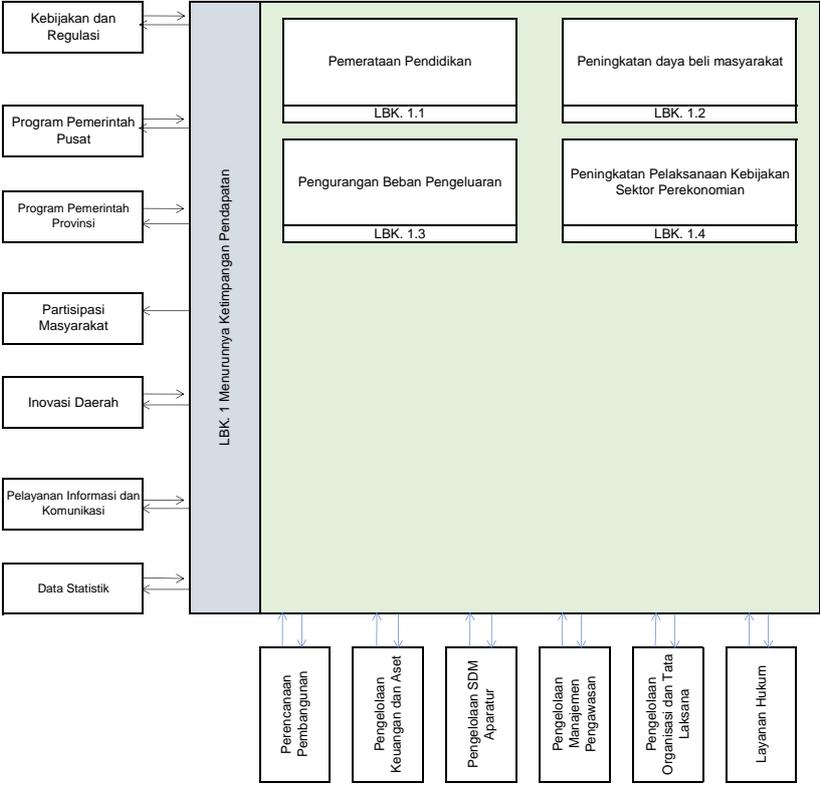
LEVEL II

**LINTAS FUNGSI**



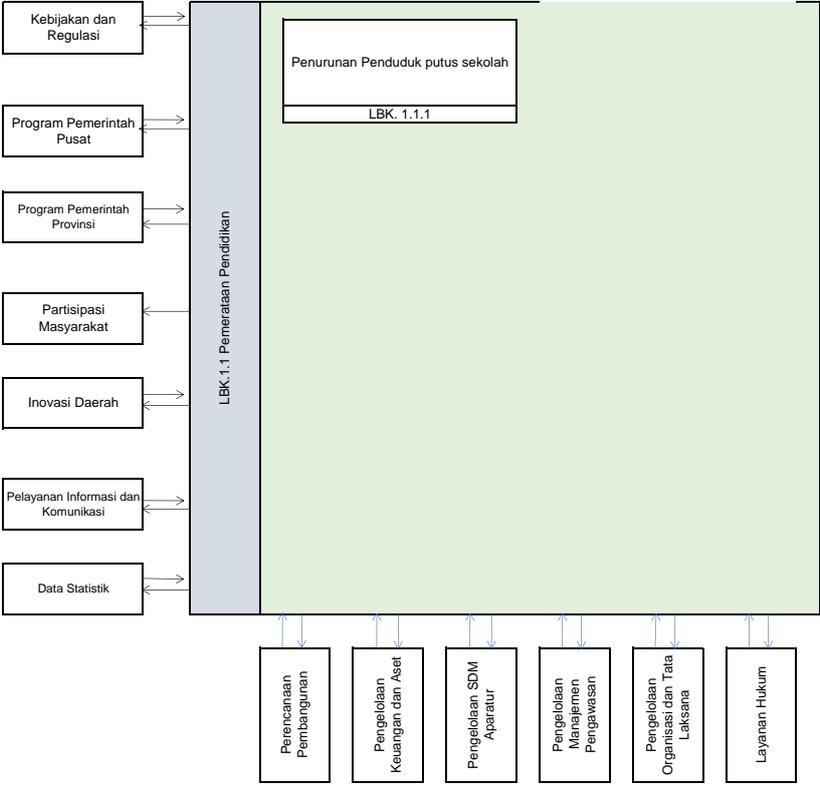
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
SUB PROSES



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

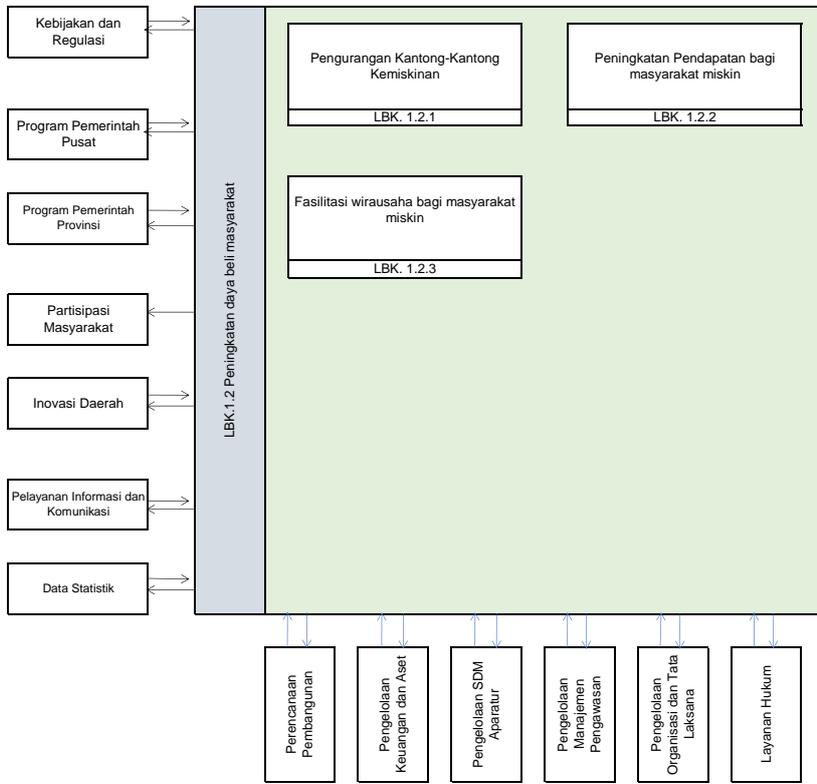
LEVEL 2  
SUB PROSES



PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

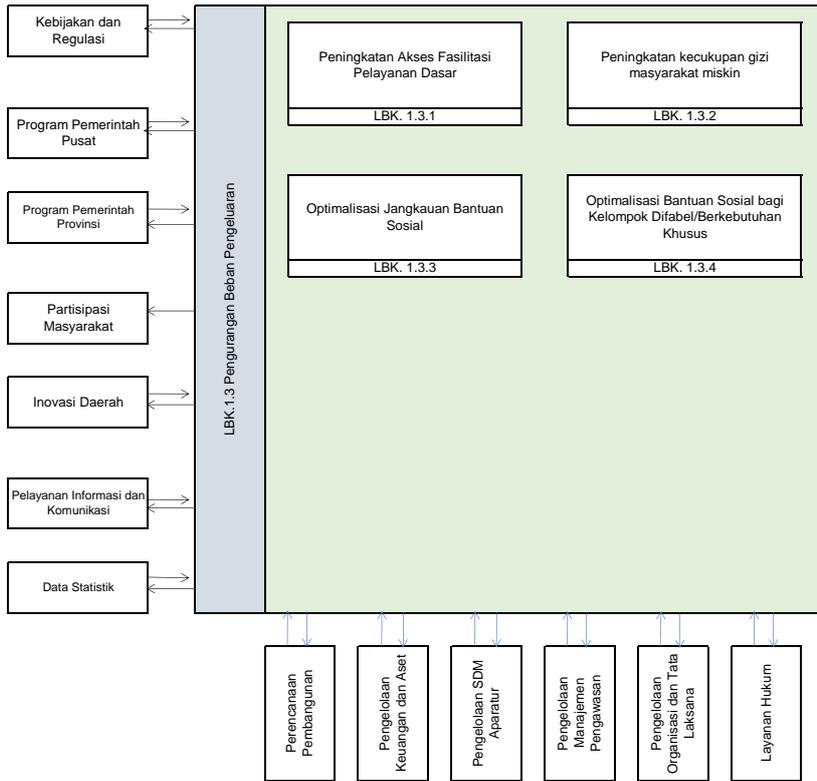
LEVEL 2  
SUB PROSES



PETA PROSES BISNIS

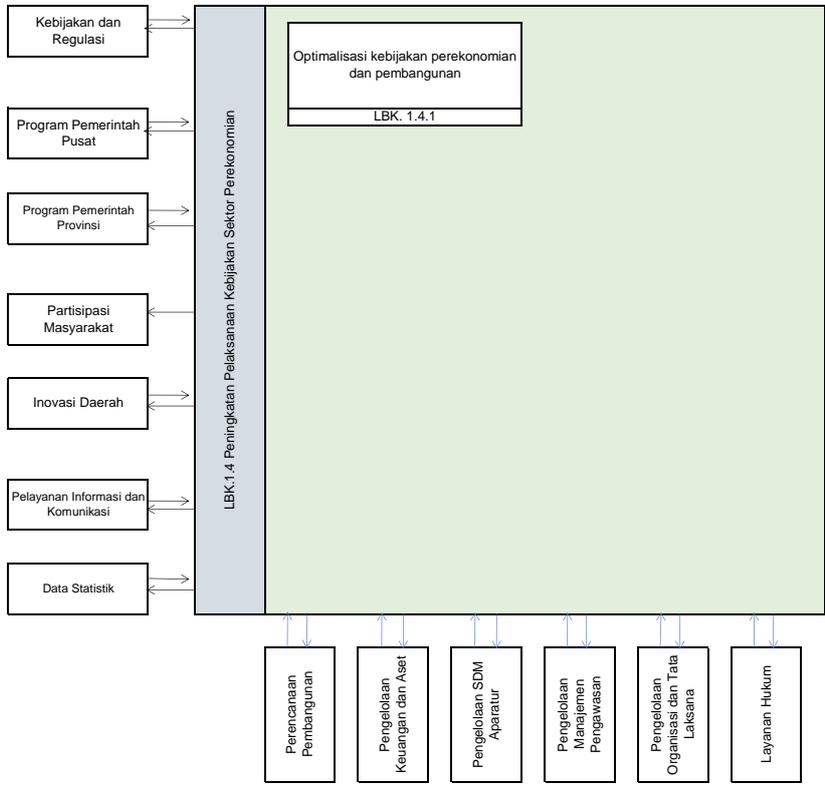
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

LEVEL 2  
SUB PROSES



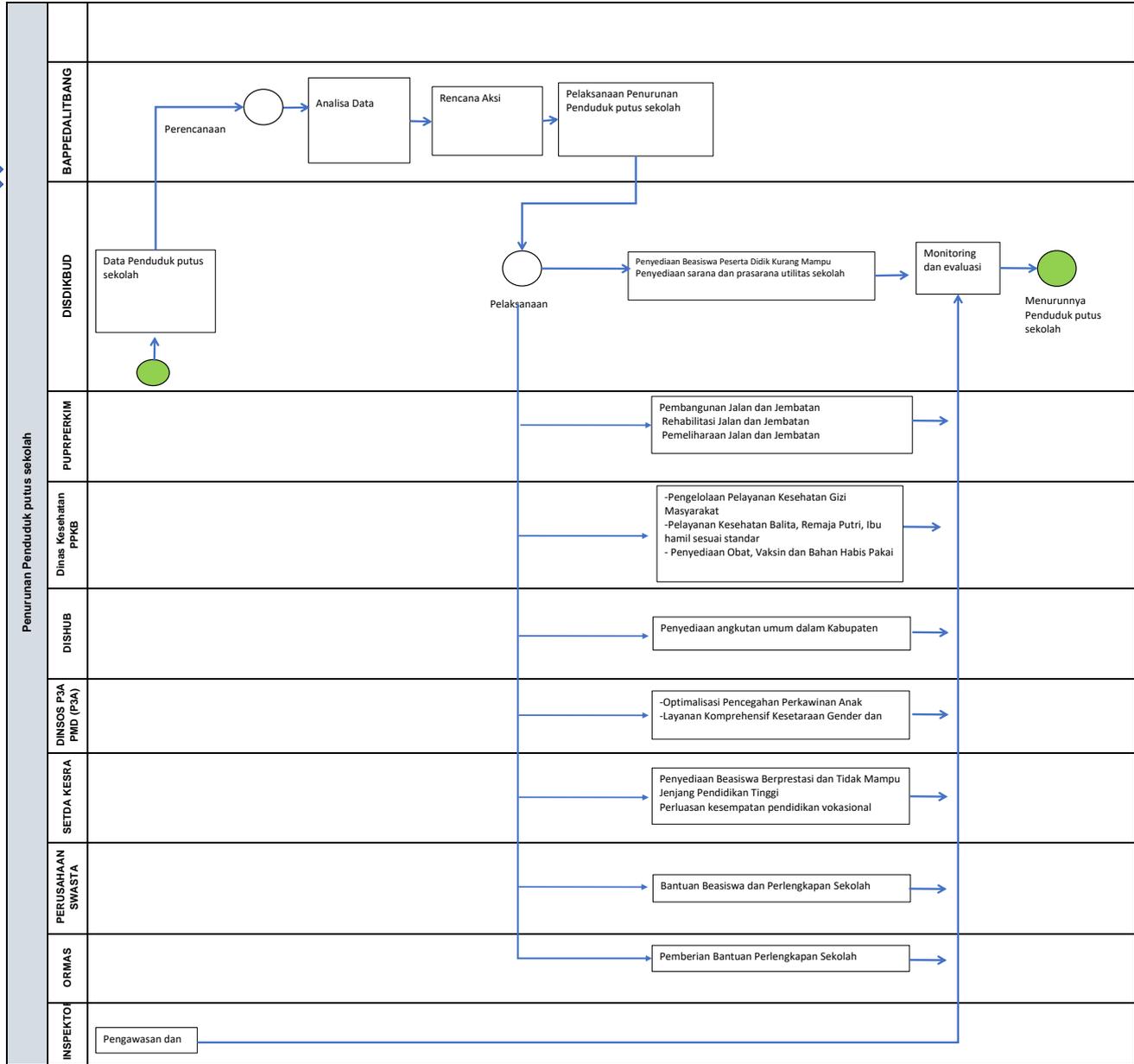
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
SUB PROSES

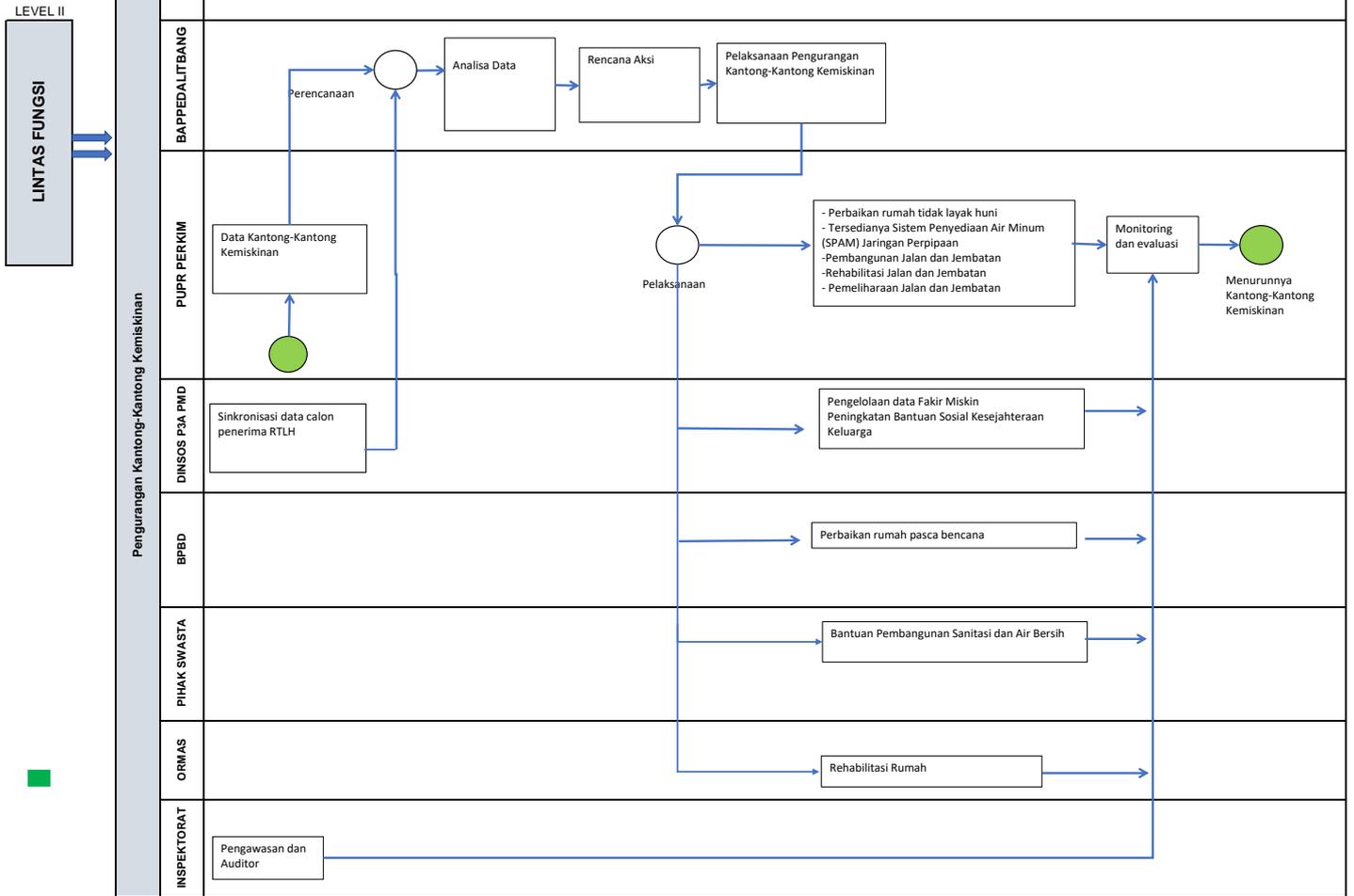


**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Pemerataan Pendidikan**

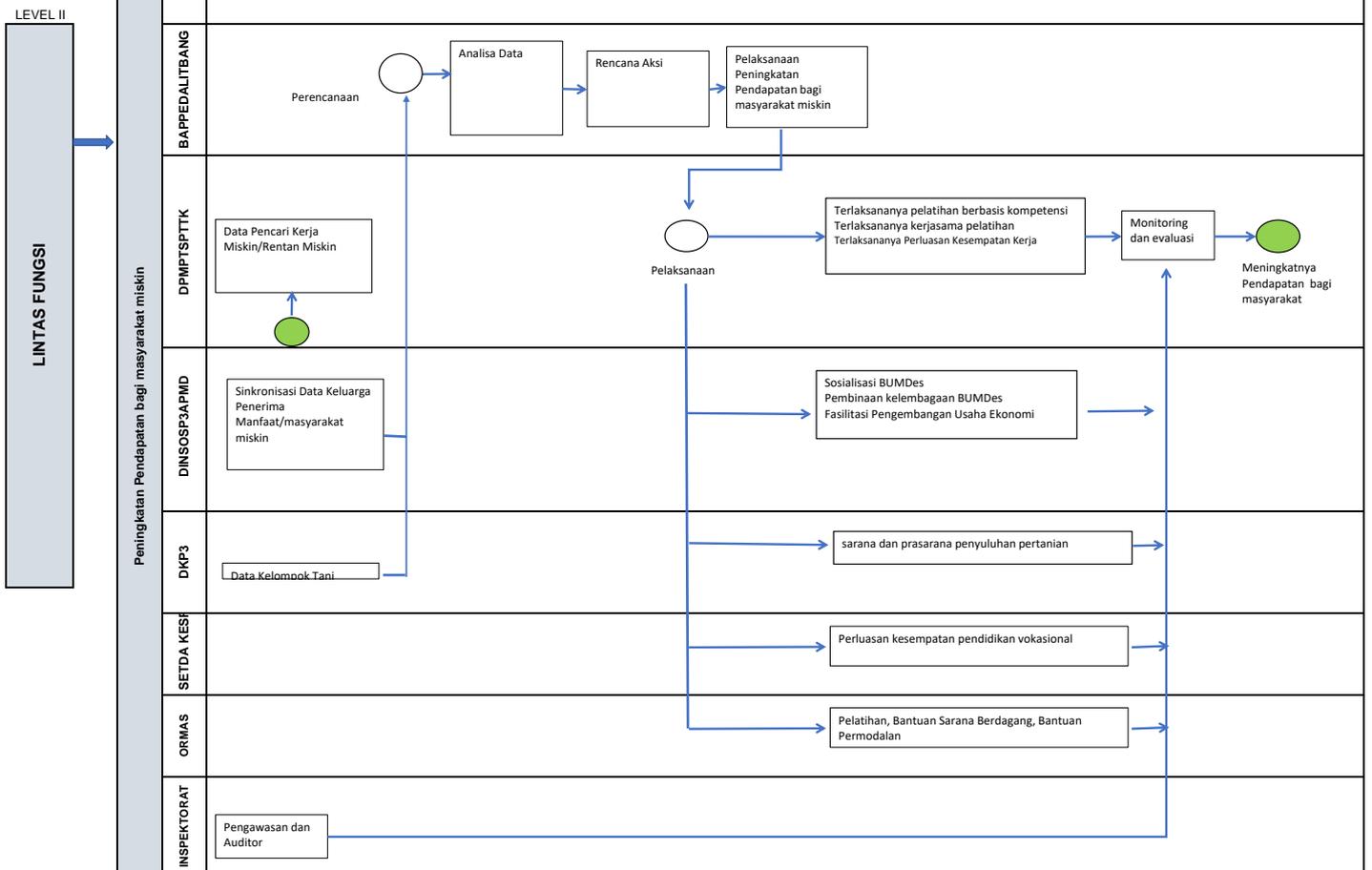
LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



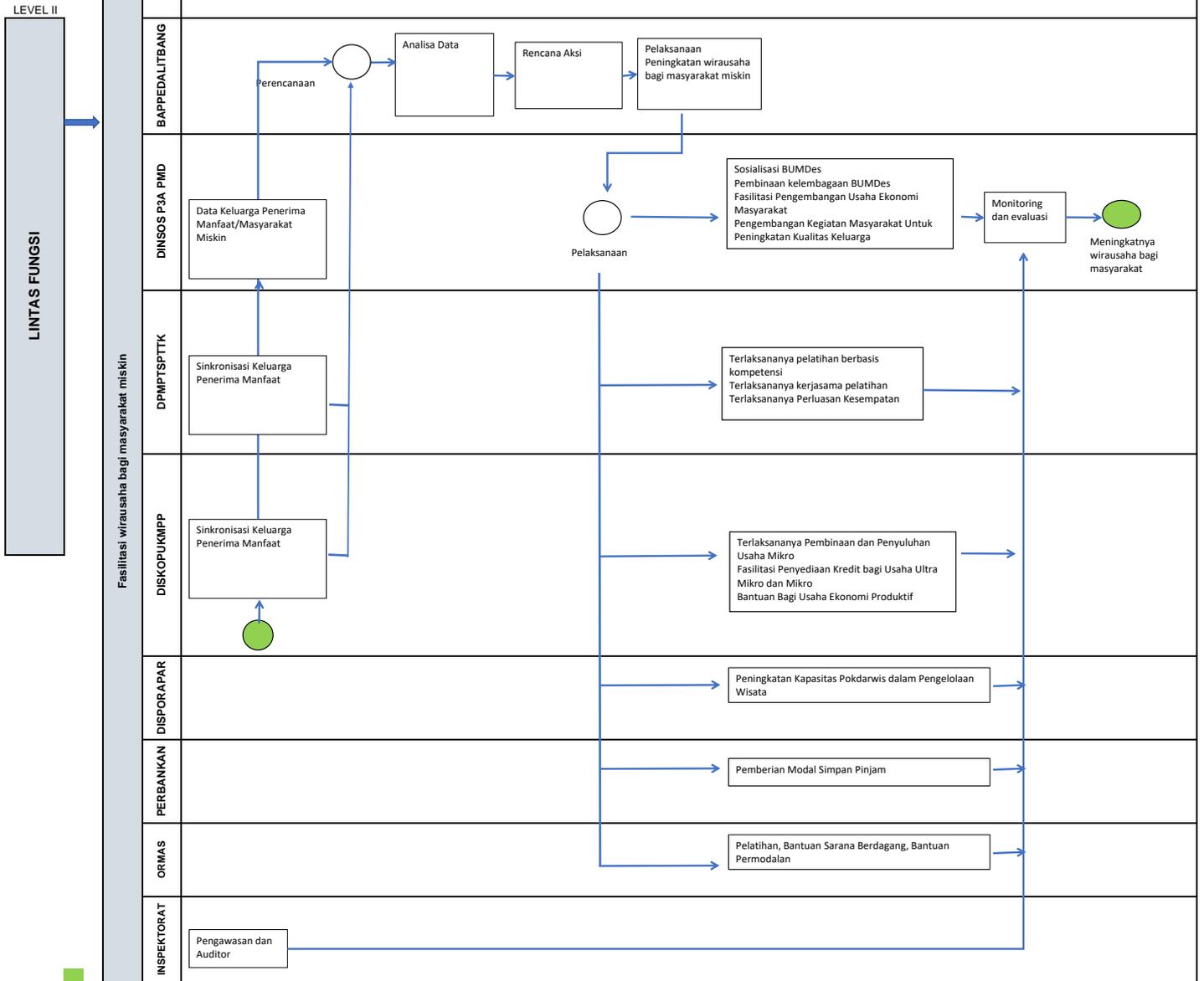
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Peningkatan daya beli masyarakat**



**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Peningkatan daya beli masyarakat**

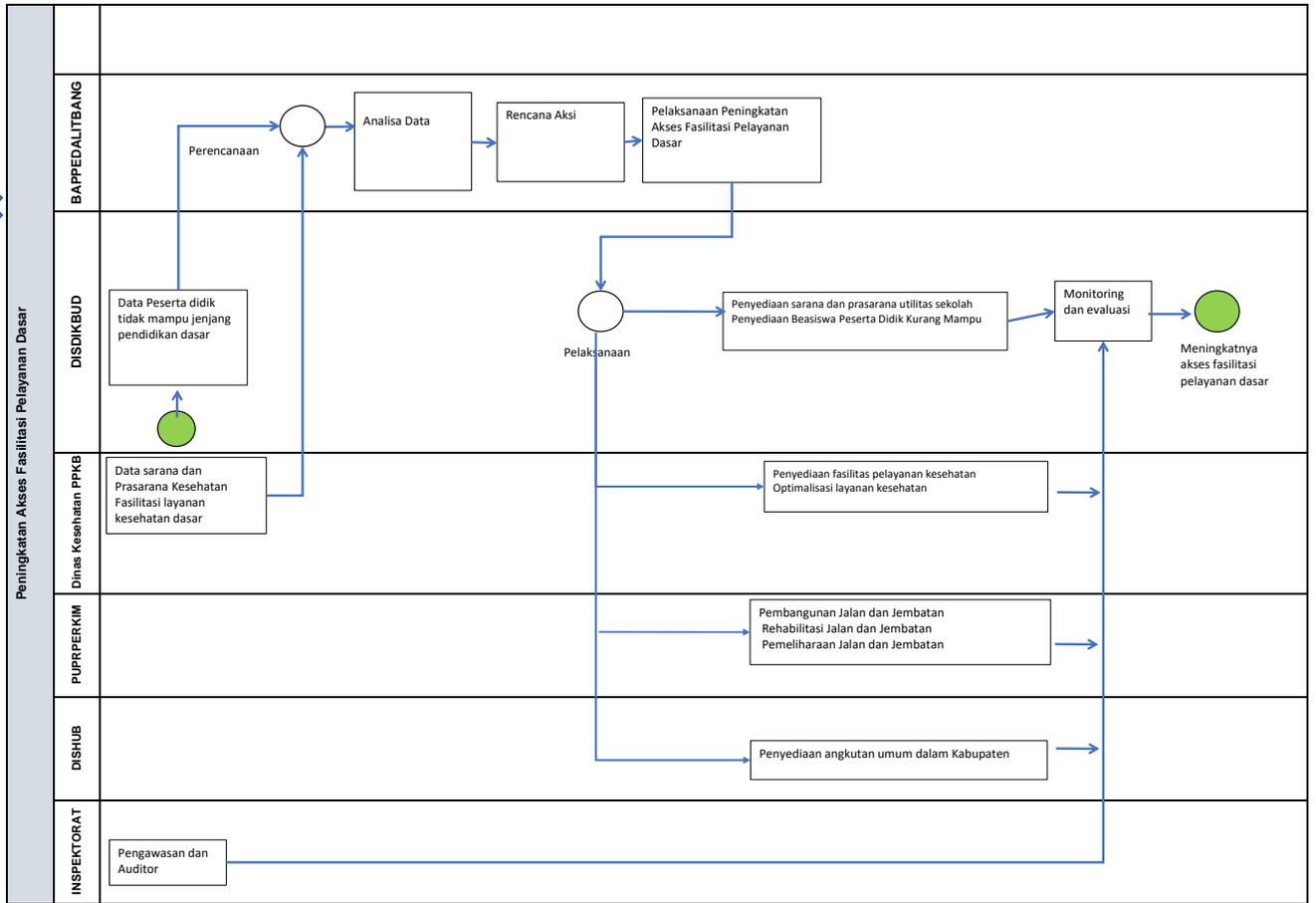


**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan daya beli masyarakat**



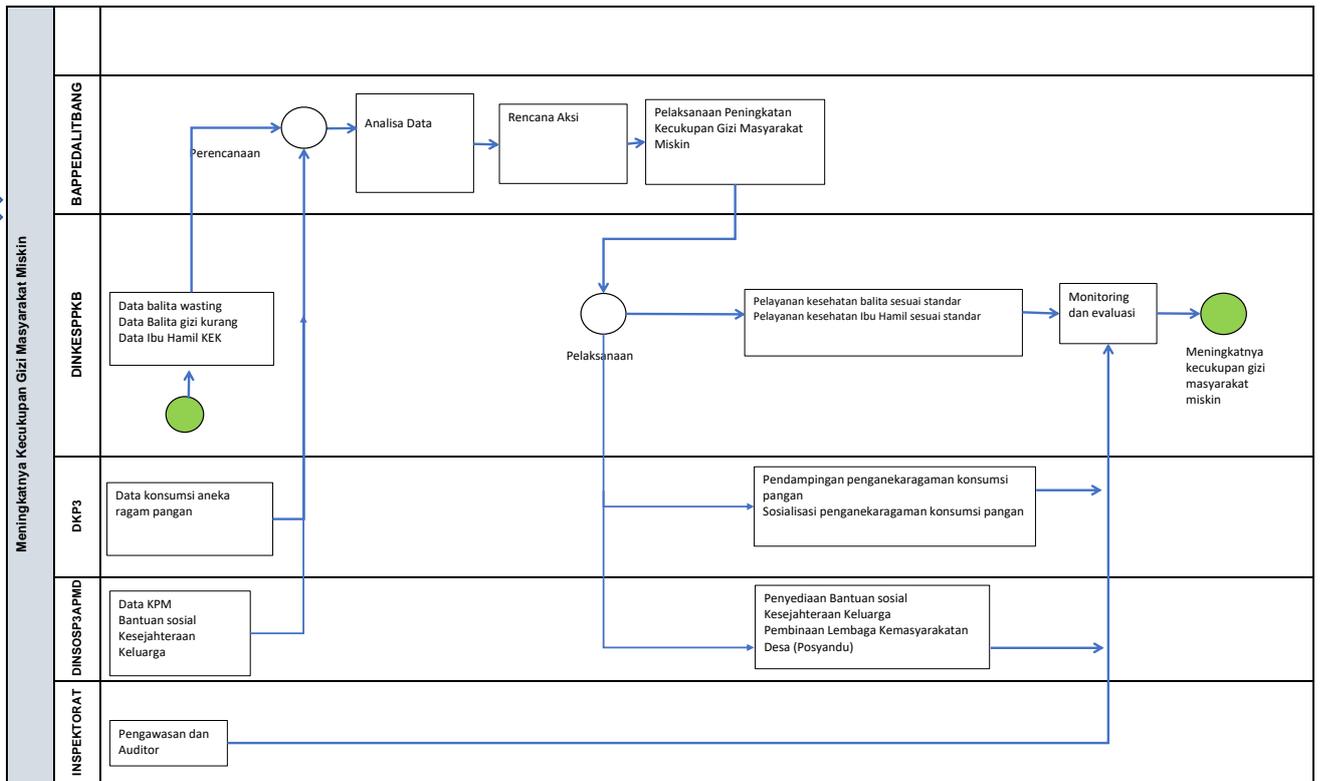
**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Pengurangan Beban Pengeluaran**

LEVEL II  
LINTAS FUNGSI

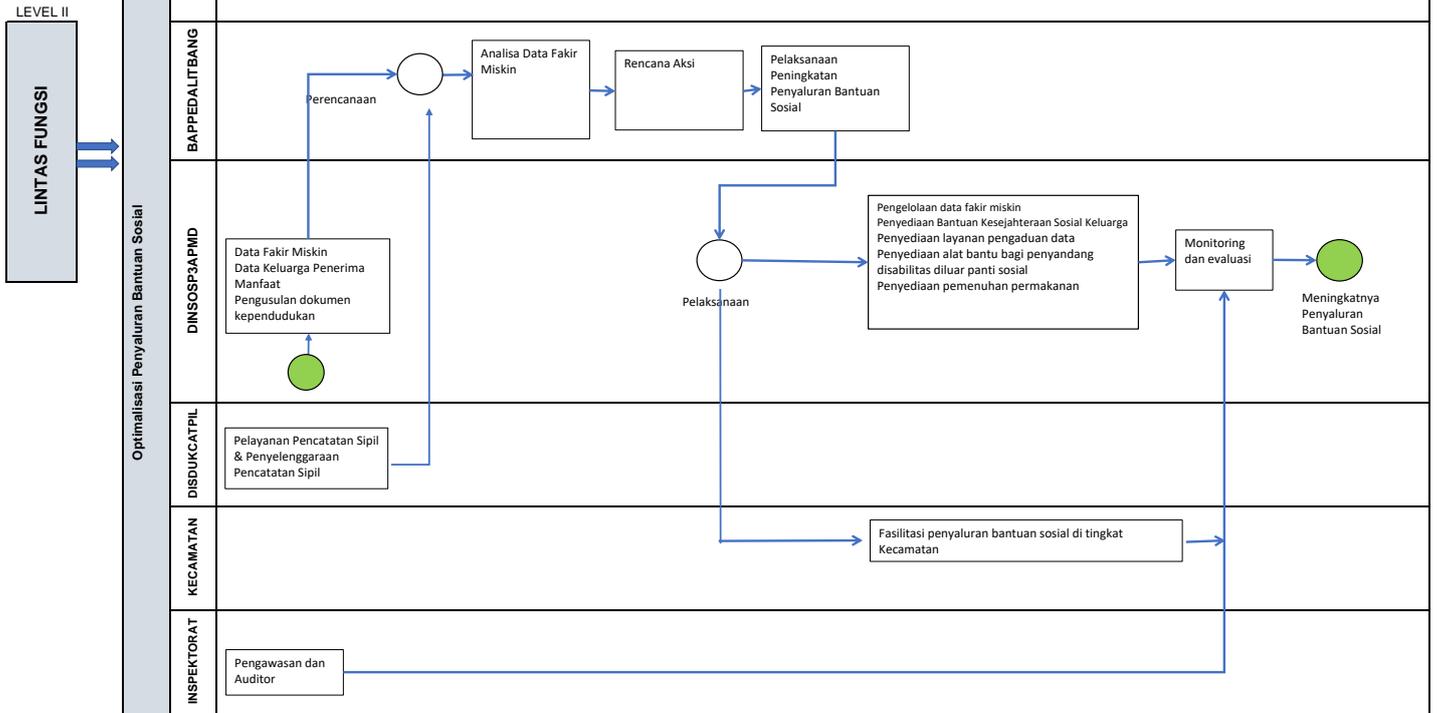


**PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Pengurangan Beban Pengeluaran**

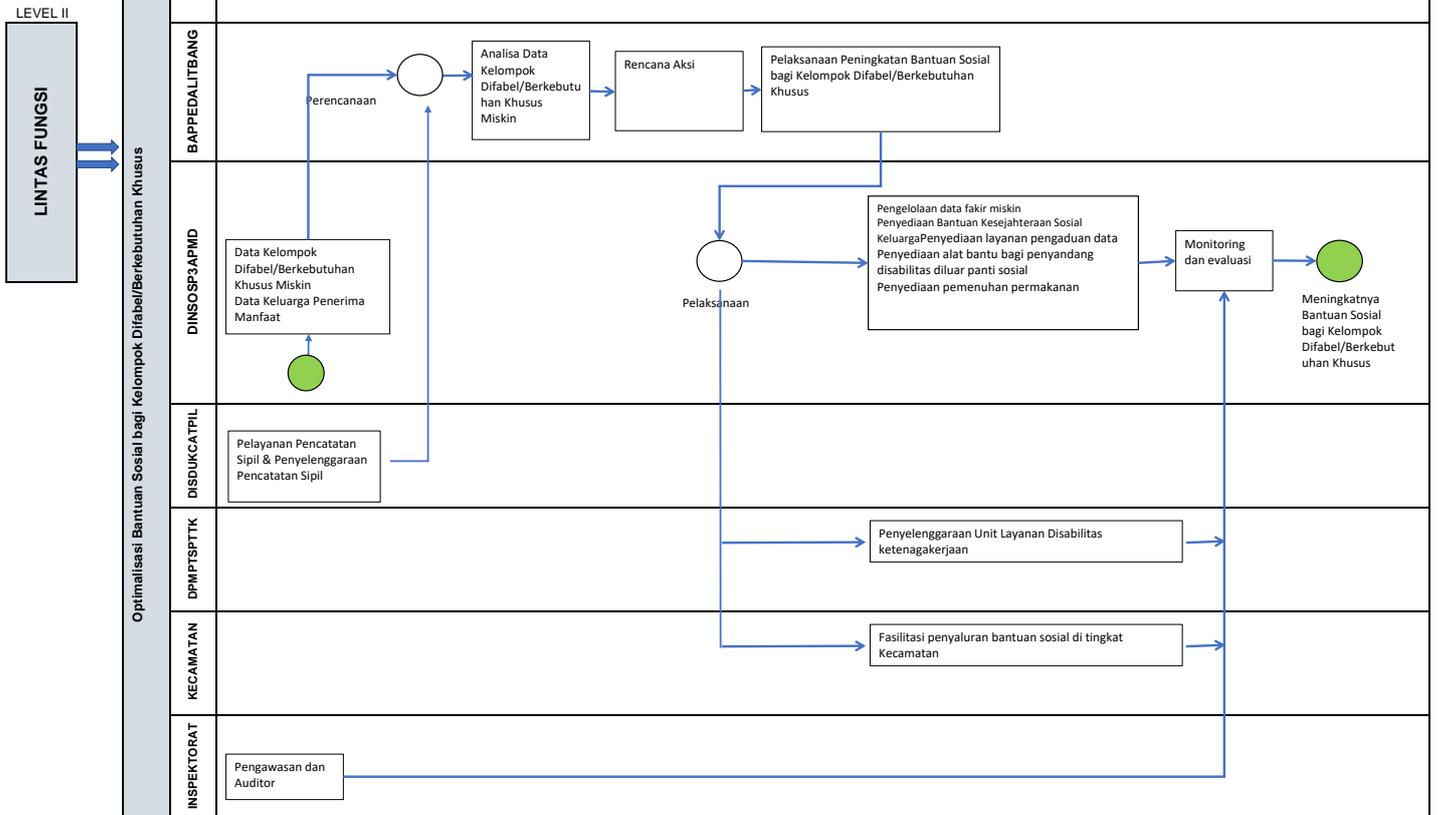
LEVEL II  
LINTAS FUNGSI



PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Pengurangan Beban Pengeluaran



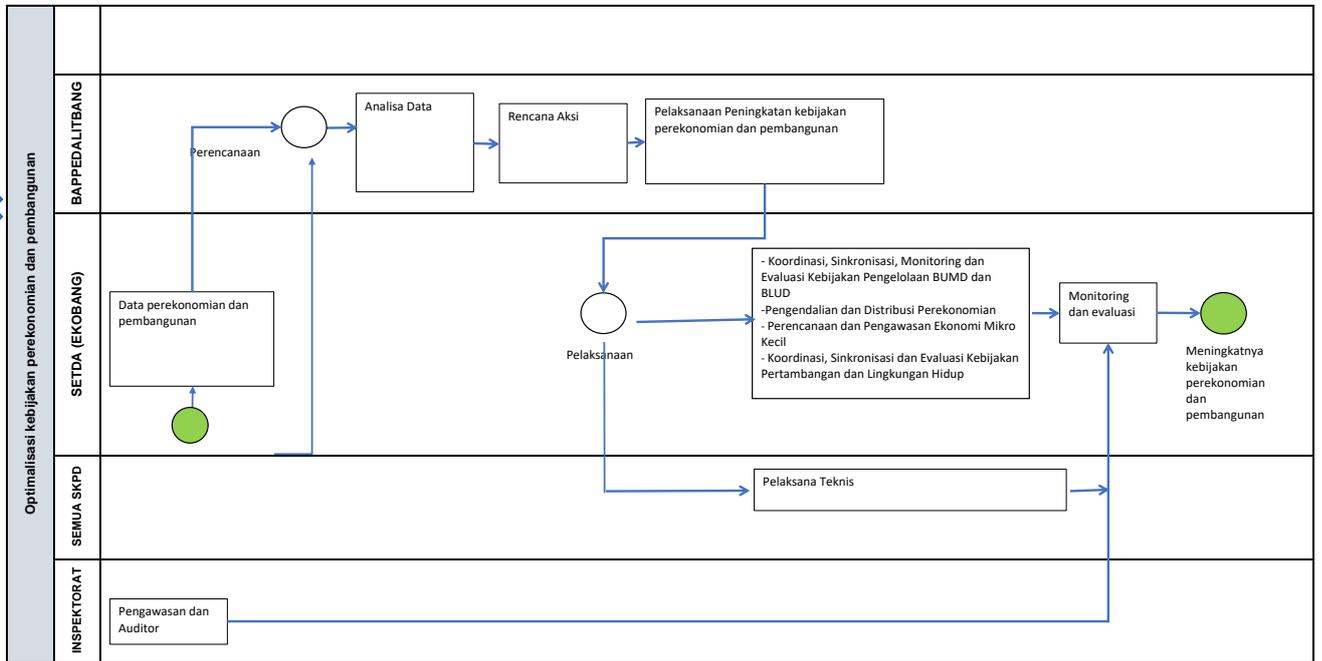
PETA PROSES BISNIS  
CROSS CUTTING Pengurangan Beban Pengeluaran



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Sektor Perekonomian**

LEVEL II

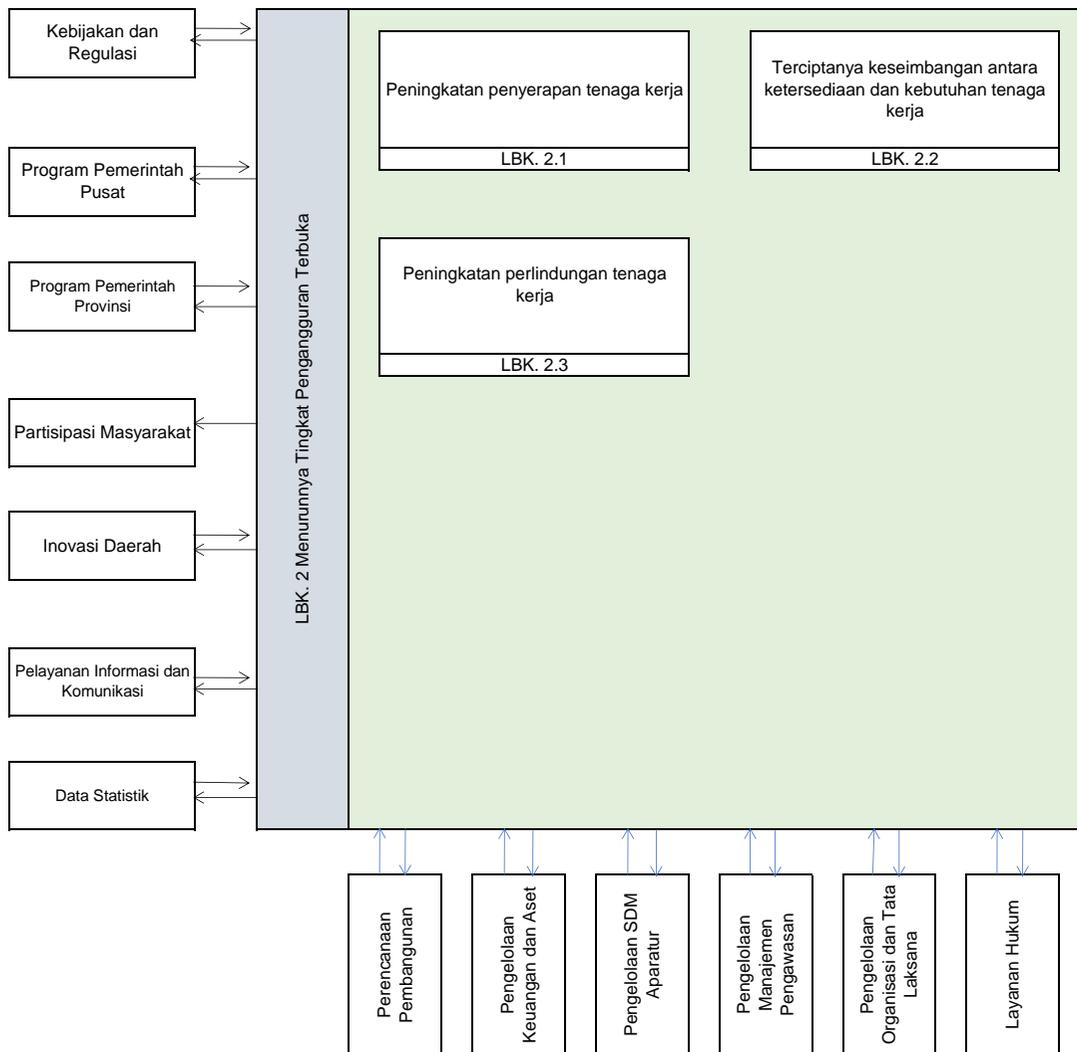
LINTAS FUNGSI



**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

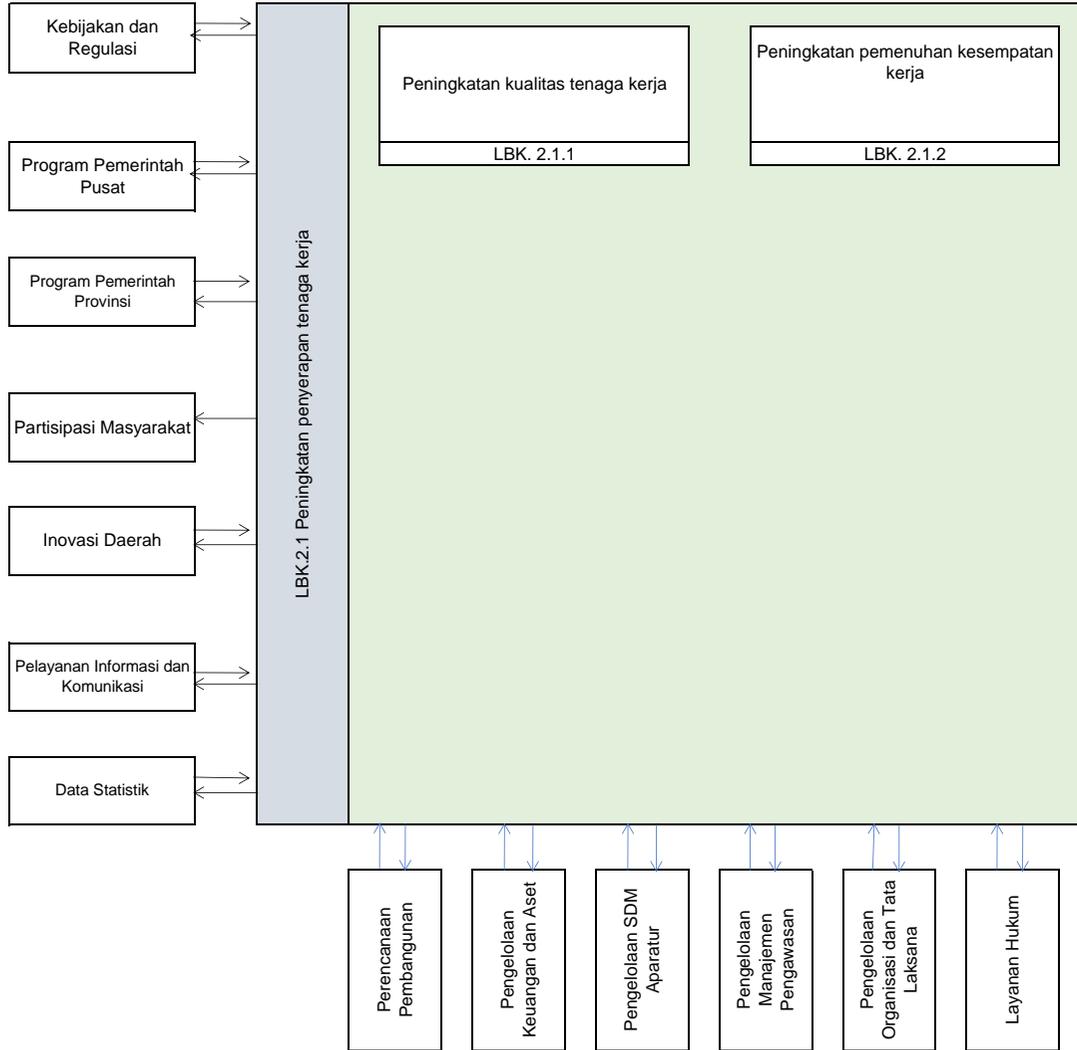
LEVEL 2

**SUB PROSES**



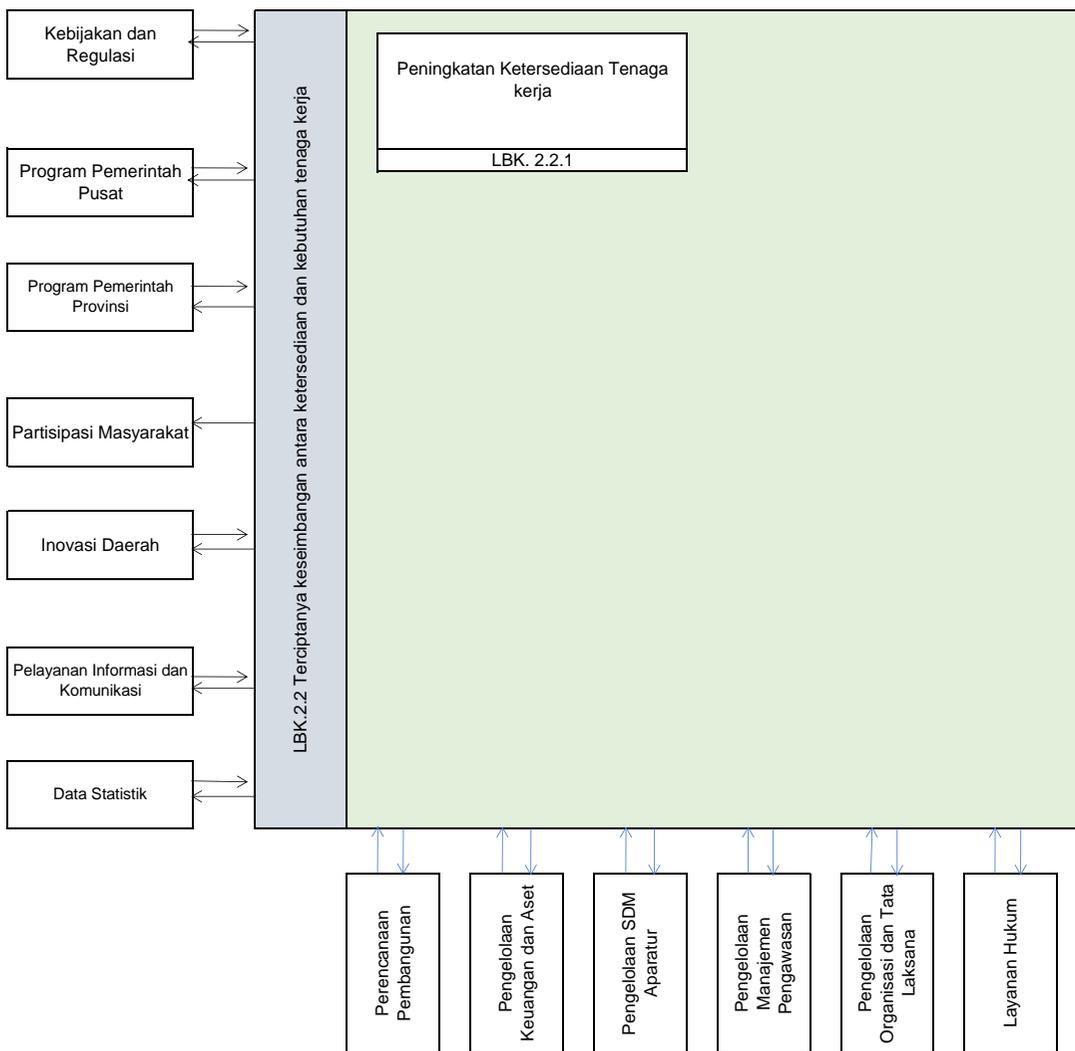
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
**SUB PROSES**



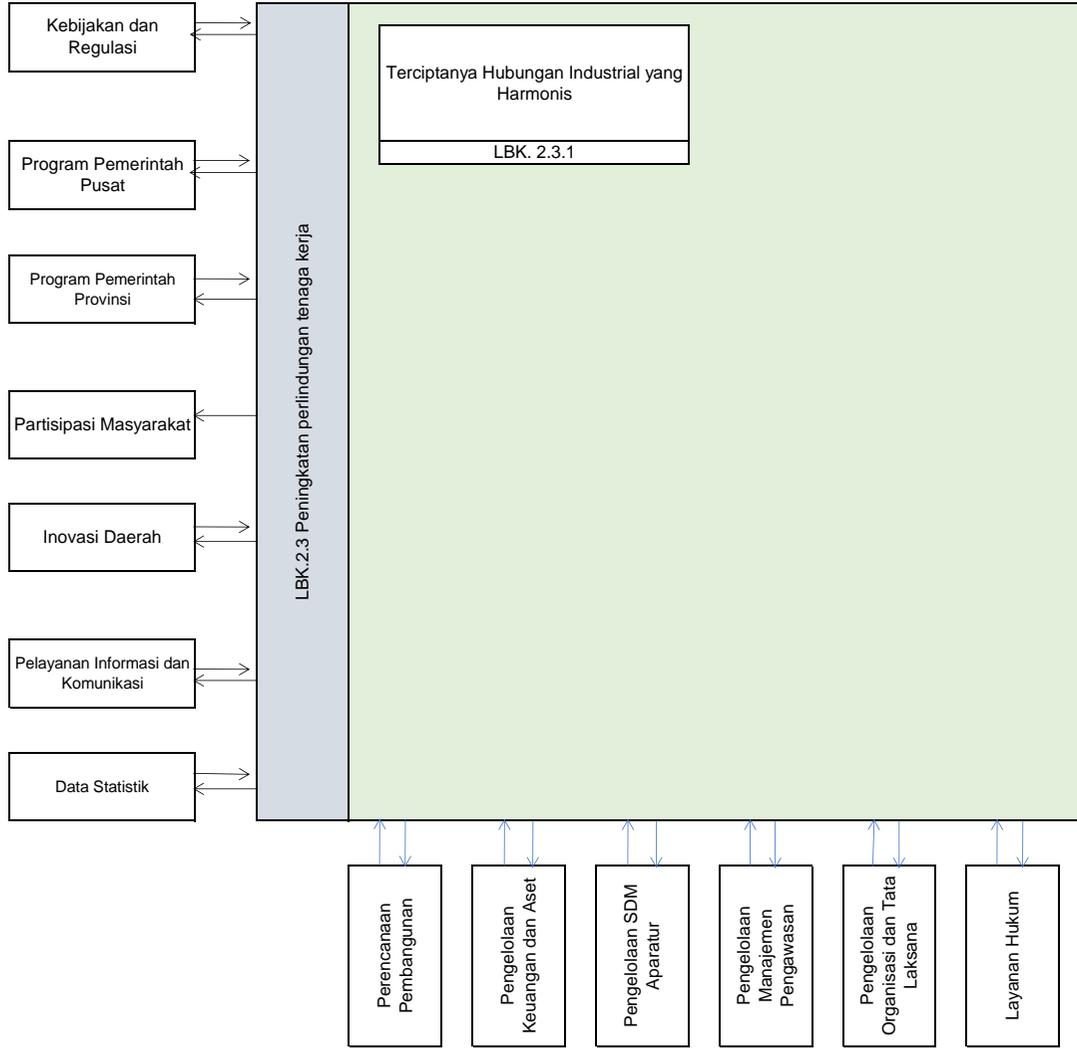
**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

LEVEL 2  
**SUB PROSES**

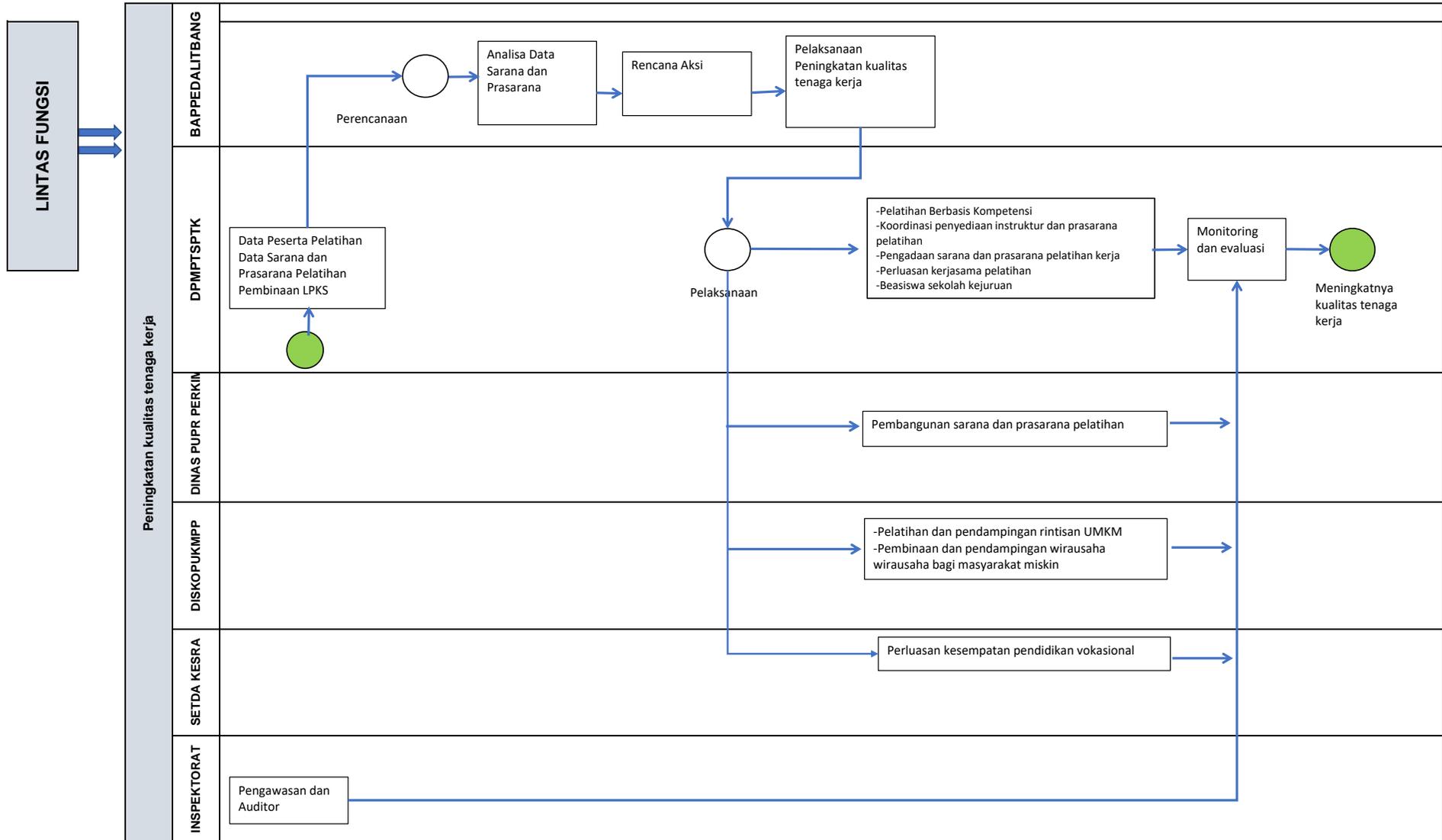


**PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

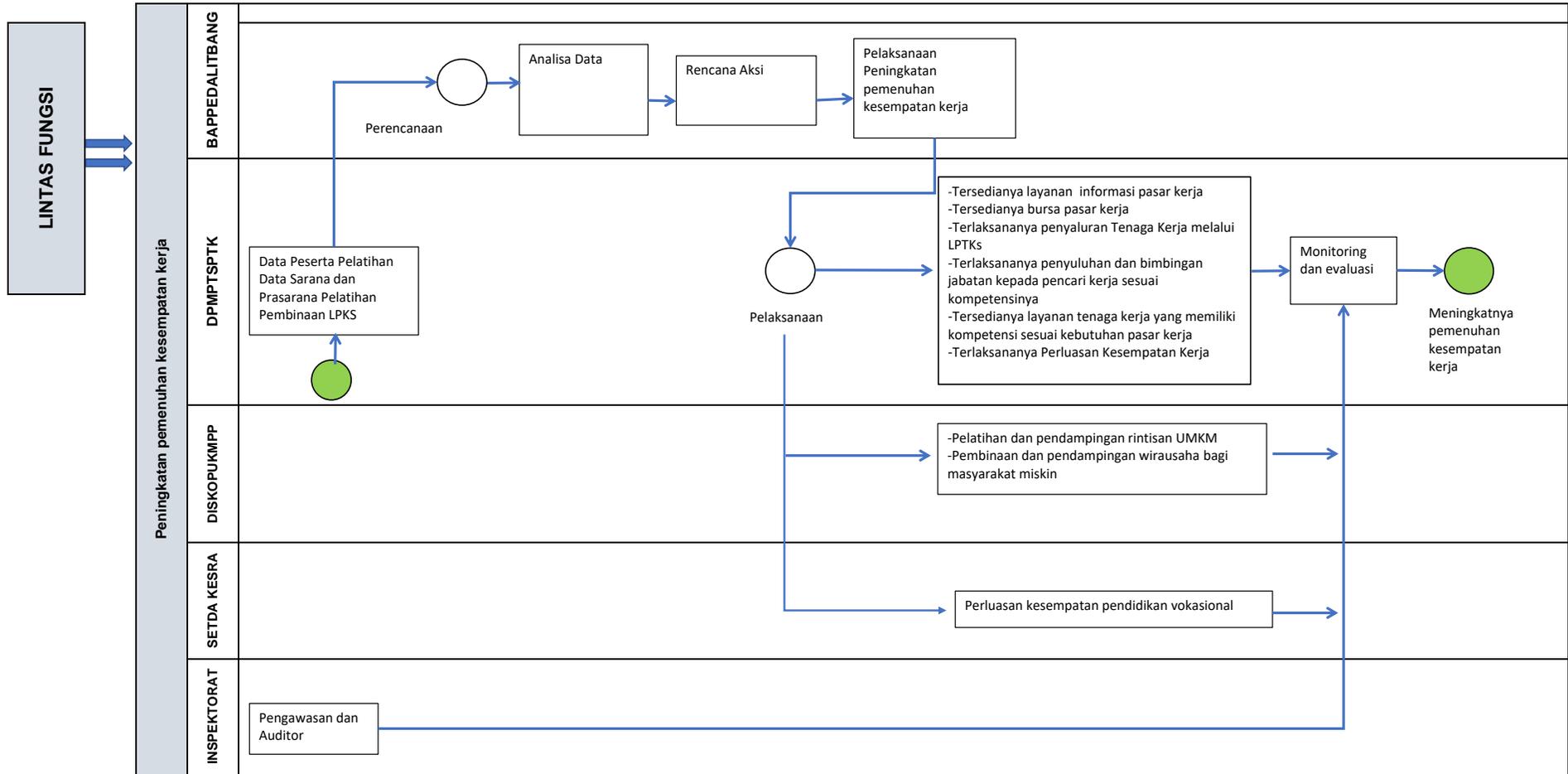
LEVEL 2  
**SUB PROSES**



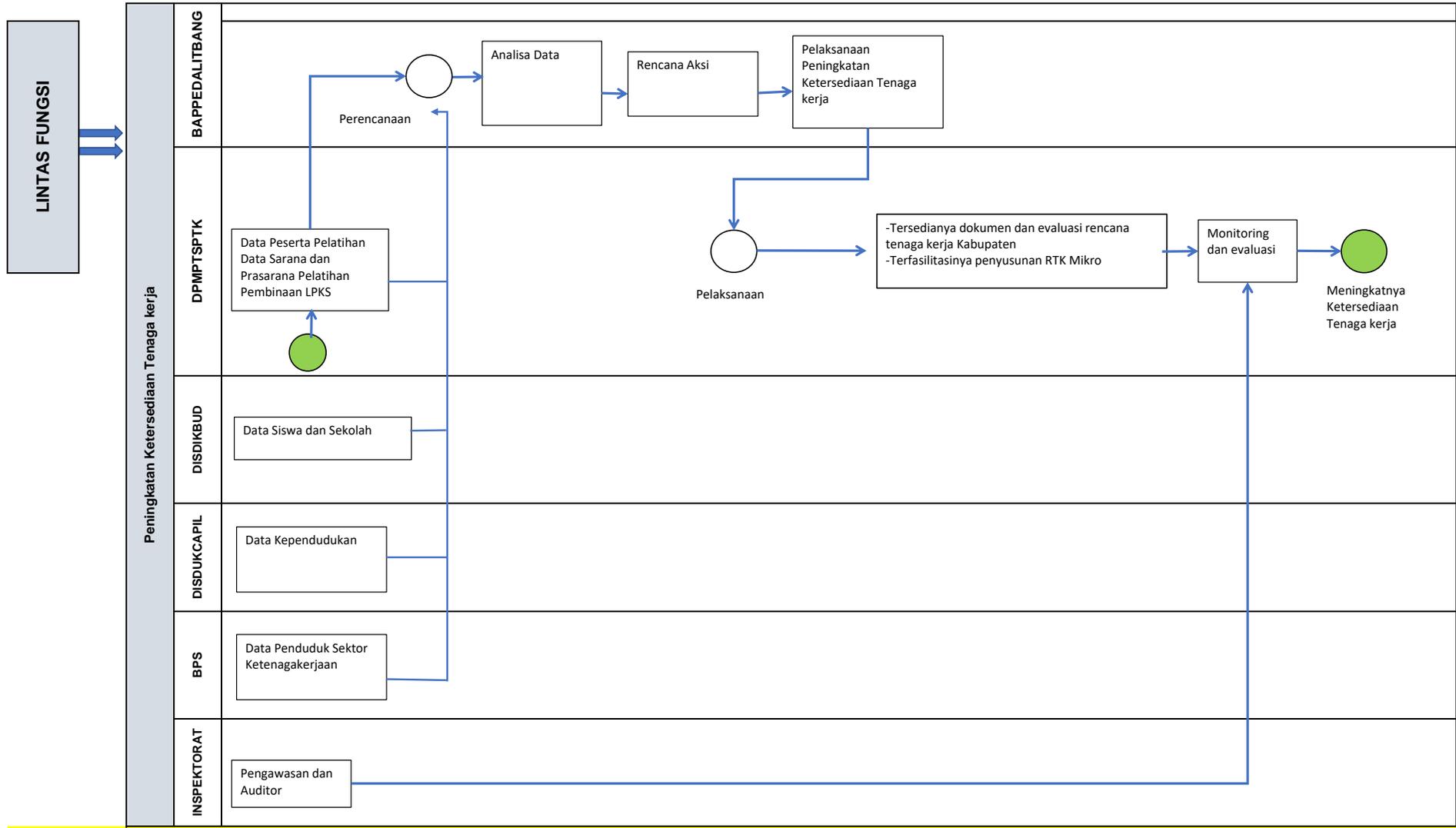
**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan penyerapan tenaga kerja**



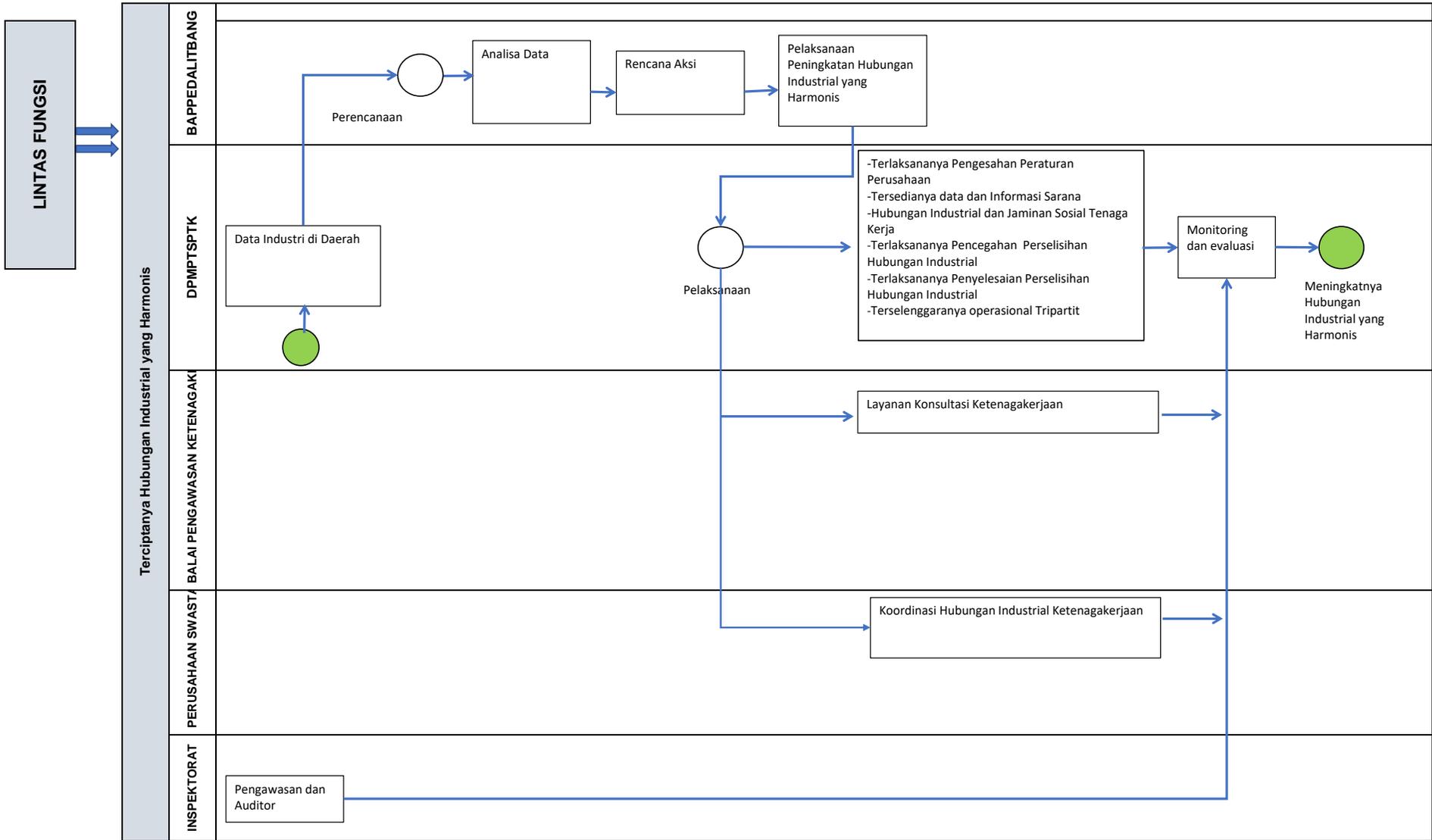
**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan penyerapan tenaga kerja**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Terciptanya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja**



**PETA PROSES BISNIS**  
**CROSS CUTTING Peningkatan perlindungan tenaga kerja**



# LAMPIRAN VII

RENCANA AKSI PEMDA ATAS LHE  
KEMENPAN RB TAHUN 2023

**RENCANA AKSI ATAS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

- 1 Link Data Dukung Tindak Lanjut SAKIP (link google drive / cloud yang berisi data dukung tambahan SAKIP (yang tidak terakomodir di esr) : Link google drive tertera dalam lampiran excel dibawah
- 2 Nama Penanggung Jawab Data SAKIP/Unit Kerja : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
- 3 Nomor HP Penanggungjawab Data SAKIP : 082148743000

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
<b>A Perencanaan Kinerja</b>			
1	Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan Instansi Pemerintah memenuhi kriteria SMART ( <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound</i> ) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis;	1 Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil ( <i>result oriented</i> ), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART ( <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound</i> ) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur;	<p>1 Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Daerah telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045</li> <li>- Pemerintah Daerah akan menyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2025 - 2029</li> <li>- Penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Balangan (RPJPD dan RPJMD) disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (<i>result oriented</i>), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound</i>) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur.</li> <li>- Pohon kinerja hasil asistensi dengan Kemenpanrb dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah daerah</li> </ul> <p>2 Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB</p>
2	Pemerintah Kabupaten Balangan telah menyusun penjenjangan kinerja dengan berpedoman pada Permen PANRB 89 Tahun 2021. Namun penjenjangan yang dilakukan masih perlu dilakukan penyempurnaan, utamanya pada kinerja pada level taktikal yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta memiliki rumusan kinerja yang sama/redundant dengan kinerja di atasnya;	2 Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi;	<p>1 Sebanyak 30 (Tiga Puluh) SKPD telah dilakukan Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading bersama Kementerian PAN RB dan telah memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional, sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi</p> <p>2 Ada beberapa SKPD yang perlu dilakukan revaluasi kembali pohon kinerja dan cascadingnya dengan Kementerian PANRB seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Dinas Sosial, PPPAPMD</p>
3	Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan, secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik;	3 Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;	1 Dokumen Perencanaan SKPD : SKPD telah melakukan penyesuaian renstra berdasarkan cascading hasil asistensi dengan Kemen PANRB
4	Aktivitas dalam Rencana Aksi yang disusun oleh beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah daerah.	4 Meningkatkan kualitas rencana aksi pada setiap Perangkat Daerah agar memuat aktivitas yang irrelevant dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pada pemerintah daerah;	1 Melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi atas rencana aksi SKPD sebagai implementasi pencapaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan LHE SAKIP melalui aplikasi e-kino dan manual.
<b>B Pengukuran Kinerja</b>			
1	Sistem pengukuran kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian antara kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai;	5 Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;	1 Melakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi (Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
<b>B Pengukuran Kinerja</b>			
2	Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;	6 Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;	1 Melakukan Asistensi dan monitoring evaluasi capaian Pengukuran Kinerja yang telah dilaksanakan dengan data yang relevan
3	Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP), namun SKP yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi;	7 Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;	1 Melaksanakan coaching klinik penyusunan SKP berbasis pada Perjanjian Kinerja Individu dan asistensi kesesuaian antara kinerja organisasi dengan kinerja individu.
<b>C Pelaporan Kinerja</b>			
1	Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;	8 Mengimplementasikan standar pelaporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 secara merata pada setiap unit kerja dengan memastikan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja;	1 Telah dilaksanakan Asistensi dengan Kementerian PANRB Atas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga Laporan Kinerja SKPD memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja
2	Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan unit kerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja ke depan.	9 Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja perangkat daerah maupun unit kerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;	1 Memanfaatkan Informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja terutamapencapaian realisasi kinerja rendah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas ke depan 2 LKIP dijadikan dasar penyusunan renja SKPD dan adanya kegiatan khusus tentang AKB menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam LKIP Kabupaten dan SKPD
<b>D Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
1	Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi internal kepada Perangkat Daerah, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;	10 Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;	1 Telah Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Triwulan III tahun 2023 2 Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP triwulan IV 2023
2	Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menysar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.	11 Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;	1 Membuat Perbup Evaluasi AKIP 2 Melakukan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 3 Membuat SOP Evaluasi AKIP

NO	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
<b>E Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan</b>			
1	Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan <i>tagging</i> penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebesar Rp. 287.376.020.624 atau 13,90% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 101 Sub Kegiatan;	12 Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Balangan agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Balangan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;	1 Telah dilaksanakan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan pada program strategi pengurangan beban pengeluaran sesuai fokus utama dalam pengentasan kemiskinan.
2	Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian" yaitu sebesar 27,26% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT" yaitu sebesar 0,33928%;	13 Mendorong keterlibatan seluruh <i>stakeholder</i> di wilayah Kabupaten Balangan, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi <i>crosscutting</i> dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;	1 Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD yang berfokus pada upaya kolaborasi pensasaran masyarakat miskin ekstrem dan miskin yang berdasarkan pada data P3KE dan dapat menghasilkan data sektoral SKPD khususnya Dinas Sosial, adanya inovasi SIAP PD sebagai alat yang mempermudah dalam intervensi dan berkoordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem.
3	Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,22% atau turun 0,61% dibandingkan dengan tahun 2022;	14 Pimpinan Daerah beserta Bappeda agar melakukan revidi atas seluruh program, kegiatan serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.	1 Melaksanakan rapat koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) terkait akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan monitoring evaluasi hasil intervensi per triwulan yang mengacu pada RAT Penanggulangan kemiskinan (Rencana Aksi Tahunan)
4	Hasil analisis tim evaluator masih menemukan banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya) yang masih cukup besar.		1 Optimalisasi monitoring dan evaluasi setiap triwulan pelaporan kemiskinan ekstrem dengan memberi kolom belanja spesifik sehingga terlihat jumlah belanja spesifik sebagai bahan analisa percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ditahun berikutnya

  
 BUPATI BALANGAN  
 SEKRETARIS DAERAH,  
**H. SUTIKNO, AP, M.AP**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19760417 199412 1 001

# LAMPIRAN VIII

STANDAR	OPERASIONAL
PROSEDUR	PENGUMPULAN
DATA KINERJA	



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin. Telp. (0526) 28060 Fax. (0526) 28408

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan peningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pelayanan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Balangan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Keputusan Ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mencakup SOP masing-masing layanan pada bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;

KETIGA : Setiap bagian dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib mengikuti ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan;

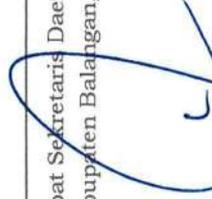
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada tanggal : 1 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

Drs. H. YULIANSYAH, M.AP

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b></p>	<p>Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021                  Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi : -                  Tanggal Efektif :                  Disahkan oleh ;                  Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan,                    Drs. H. NILLANSYAH, M.AP                  NIP. 19620412 199203 1 013</p> <p>Nama SOP : Pengumpulan Data Kinerja Sekretariat Daerah</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p>
<p>1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.                  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.                  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.                  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan                  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.                  Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas.                  2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.                  3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>
<p>Keterkaitan dengan SOP lain</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>Peringatan</p>	<p>1. Komputer/Laptop                  2. Printer                  3. Kertas/Pulpen                  4. Buku Kerja                  5. Filling Kabinet/Odner untuk menyimpan arsip</p>
<p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan pelayanan. Apabila di masa yang akan datang SOP ini sudah tidak sesuai dengan prosedur, maka SOP ini akan direvisi ulang.</p>	<p>Pencatatan dan pendataan/dokumentasi</p> <p>1. Dokumentasi kinerja SKPD                  2. Data kinerja SKPD</p>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Sekretariat Daerah

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Sekretaris Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kepala Bagian Adm. Pembangunan	Kasubbag. Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan seluruh Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah untuk menyampaikan data kinerja bagian kepada Bagian Administrasi Pembangunan					Surat permintaan data	15 menit	Tanda terima surat permintaan data Lkj dari bagian		
2	Menerima data capaian kinerja masing-masing bagian dan menugaskan Kasubbag. Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan untuk menghimpun dan mengevaluasi.					Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bagian	8 jam	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Bagian		
3	Menghimpun dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul, dan menyerahkan hasil evaluasi data informasi kinerja bagian berdasarkan dokumen capaian kinerja masing-masing bagian kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan					Dokumen Laporan Kinerja Bagian	8 jam	Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan dokumen Lkj Bagian		
4	Menyampaikan hasil analisis terhadap data evaluasi capaian kinerja bagian kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah.					Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan dokumen Lkj Bagian, Renja, Renstra dan PK	30 menit	Surat rekomendasi untuk melaksanakan rapat kerja penyusunan dokumen Lkj Sekretariat Daerah		
5	Melaksanakan rapat bersama seluruh bagian lingkup Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala SKPD. Hasil rapat akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja.					Dokumen Laporan Kinerja Bagian, Renja, PK, Renstra.	5 jam	Dokumen Laporan Kinerja Bagian dan Berita Acara Hasil Rapat		
6	Melaksanakan proses penyusunan Lkj Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Lkj yang disampaikan masing-masing bagian dan hasil rapat bersama bagian.					Dokumen Laporan Kinerja Bagian, Renja, PK, Renstra dan Berita Acara Hasil Rapat	3 hari	Draft 1 Laporan Kinerja Kab. Balangan		
7	Mengoreksi (editing data kinerja) jika sudah sesuai maka akan diteruskan untuk direviu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, akan dilanjutkan reviu pada organisasi apabila Lkj sudah sesuai, namun bila belum sesuai akan dikembalikan pada proses penyusunan.					Draft 1 Laporan Kinerja Kab. Balangan	8 jam	Draft 2 Laporan Kinerja Kab. Balangan		
8	Mengirimkan draf awal Lkj Sekretariat Daerah yang telah disusun untuk dilakukan reviu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Apabila hasil reviu sudah sesuai maka akan dilanjutkan ke paraf dan tandatangan, apabila tidak akan dikembalikan ke penyusunan Lkj.					Draft 2 Laporan Kinerja Kab. Balangan	5 menit	Draft 3 Lapoan Kinerja Kab. Balangan		
9	Paraf dan penandatanganan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah.					Final draft Laporan Kinerja Kab. Balangan	8 jam	Final draft Laporan Kinerja Kab. Balangan		
10	Melakukan penjiilidan Lkj Sekretariat Daerah untuk kemudian dikirimkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.					Final draft Laporan Kinerja Kab. Balangan	30 menit	Dokumen Laporan Kinerja Kab. Balangan		

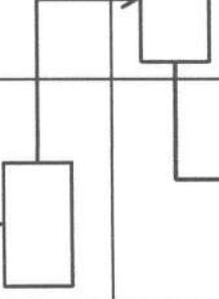
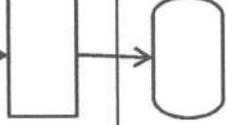
Penjabat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Balangan.

Drs. H. YULIANSYAH, M.AP  
NIP. 19620412 199203 1 013

LAMPIRAN XVIII  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KINERJA KABUPATEN DAN SKPD

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>BAGIAN ORGANISASI</b></p>	<p>Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021</p> <p>Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi : -                  Tanggal Efektif :</p> <p>Disahkan oleh :                  Penjabat Sekretaris Daerah                  Kabupaten Balangan,                  Drs. H. YULIAN SYAH, M.AP                  NIP 19620412 199203 1 013</p> <p>Nama SOP :                  Pengelolaan Kinerja Kabupaten dan SKPD</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Pedoman penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>Memahami Penyusunan Perencanaan Strategis</li> <li>Memahami terhadap penyusunan Renstra SKPD</li> </ol>
<p>Keterkaitan dengan SOP lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Balangan</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ol>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang-undangan</li> <li>Dokumen Perjanjian Kinerja</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja SKPD</li> <li>Dokumen Renja SKPD</li> <li>Dokumen Realisasi Keuangan</li> </ol>
<p>Peringatan</p> <p>Keterlambatan pengumpulan data dan informasi kinerja akan memperlambat penyusunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja</li> </ol>	<p>Pencatatan dan pendataan/dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan Sebagai Data Elektronik Dan Manual</li> </ol>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kinerja Kabupaten dan SKPD

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubbag Kinerja dan RB	Sekretaris Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan pengumpulan Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)				Surat Edaran MENPAN-RB	1 hari	Perintah Pelaksana		
2	Mempersiapkan konsep surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)				Perintah Pelaksana	20 menit	Konsep surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD		
3	Menandatangani surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)				Konsep pengumpulan Laporan Kinerja SKPD	15 menit	Konsep surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD yang telah ditandatangani		
4	Menyampaikan surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)				Konsep pengumpulan Laporan Kinerja SKPD yang telah ditandatangani	1 hari	Surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD		
5	Menghimpun dan menginventarisir Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)				Surat pengumpulan Laporan Kinerja SKPD	2 minggu	Laporan Kinerja SKPD (LKIP, PK dan IKU)		

Penjabat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Balangan,

Drs. H. YULIANSYAH, M.AP  
NIP. 19620412 199203 1 013

LAMPIRAN XIX  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN DAN SKPD

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>BAGIAN ORGANISASI</b></p>	<p>Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021</p> <p>Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi : -                  Tanggal Efektif :</p> <p>Disahkan oleh :                  Penjabat Sekretaris Daerah                  Kabupaten Balangan,</p> <p style="text-align: center;">Drs. H. YULIANSYAH, M.AP                  NIP 19620412 199203 1 013</p> <p>Nama SOP : Pengukuran Kinerja Kabupaten dan SKPD</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,</li> <li>Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.</li> <li>Memahami Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra).</li> <li>Memiliki Kemampuan Menyusun dan Menganalisis Data Kinerja SKPD.</li> </ol>
<p>Keterkaitan dengan SOP lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Balangan.</li> <li>SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ol>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>Dokumen Perjanjian Kinerja.</li> <li>Dokumen Laporan Kinerja SKPD.</li> <li>Dokumen Renja SKPD.</li> <li>Dokumen Realisasi Keuangan.</li> </ol>
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterlambatan pengumpulan data kinerja dan informasi kinerja mengakibatkan keterlambatan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten.</li> </ol>	<p>Pencatatan dan pendataan/dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</li> </ol>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja Kabupaten dan SKPD

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubbag. Kinerja dan RB	Asisten	Sekretaris Daerah	Tim Laporan Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan pengumpulan data dan informasi Kinerja triwulan dari SKPD untuk kelengkapan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten (LKIP)						Surat Edaran Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten (LKIP)	1 hari	Perintah Pelaksana	Pengumpulan data dan informasi kinerja triwulan SKPD dilaksanakan pada bulan Maret - Juni - September - Desember pada tahun berjalan	
2	Mempersiapkan konsep surat pengumpulan data dan informasi kinerja serta menyiapkan format pengisian data kinerja triwulan SKPD						Perintah Pelaksana	15 menit	Konsep surat dan format pengisian data kinerja SKPD		
3	Memaraf surat pengumpulan data dan informasi kinerja serta menyiapkan format pengisian data kinerja triwulan SKPD						Konsep surat dan format pengisian data kinerja SKPD	5 menit	Konsep surat dan format pengisian data kinerja yang telah diparaf secara berjenjang		
4	Penandatanganan surat pengumpulan data kinerja dan format pengisian data kinerja triwulan SKPD						Konsep surat dan format pengisian data kinerja yang telah diparaf secara berjenjang	5 menit	Konsep surat pengumpulan data dan informasi serta format pengisian yang telah ditandatangani		
5	Menyampaikan surat pengumpulan data dan informasi kinerja serta format pengisian data kinerja triwulan SKPD						Surat yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah	1 hari	Surat permohonan data dan informasi beserta kelengkapannya		
6	Menghimpun, menginventarisasi data dan informasi kinerja triwulan dari SKPD						Surat permohonan data dan kelengkapannya	2 minggu	Data dan informasi capaian kinerja SKPD		
7	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja triwulan yang telah disampaikan SKPD						Data dan informasi capaian kinerja SKPD	2 minggu	Data dan informasi capaian kinerja SKPD serta kelengkapannya		
8	Menyusun draf Laporan Kinerja Kabupaten berdasarkan data dan informasi kinerja triwulan SKPD						Data dan informasi capaian kinerja SKPD yang telah dianalisis dan dievaluasi	1 bulan	Draf Laporan Kinerja Kabupaten (LKIP)		

Penjabat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Batangas,

Drs. H. YULIANSYAH, M.AP  
NIP. 19620412 199203 1 013

LAMPIRAN XX  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
 BAGIAN ORGANISASI

<p>Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021                  Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi : -                  Tanggal Efektif :                  Disahkan oleh :                  Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan,                  Drs. H. YUJIANSYAH, M.AP                  NIP 19620412 199203 1 013                  Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan</p>	<p>Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021                  Tanggal Pembuatan :                  Tanggal Revisi : -                  Tanggal Efektif :                  Disahkan oleh :                  Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan,                  Drs. H. YUJIANSYAH, M.AP                  NIP 19620412 199203 1 013                  Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan</p>
<p>Dasar Hukum                  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.                  2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Nama SOP                  Kualifikasi Pelaksanaan                  1. Memahami pedoman penyusunan Laporan Kinerja.                  2. Memahami perencanaan strategis.                  3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.</p>
<p>Keterkaitan dengan SOP lain                  1. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja                  2. SOP Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan                  1. Peraturan Perundang-Undangan                  2. Dokumen Perjanjian Kinerja                  3. Dokumen Realisasi Keuangan                  4. Seperangkat Komputer                  5. Alat Tulis Kantor (ATK)</p>
<p>Peringatan                  1. Apabila tidak dilaporkan maka mempengaruhi tingkat capaian kinerja oleh Kementerian PAN.</p>	<p>Pencatatan dan pendataan/dokumentasi                  1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan

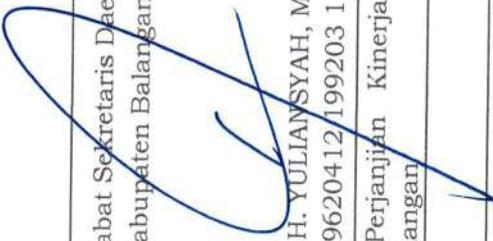
No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubbag Kinerja dan RB	Tim LKIP	Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan rapat persiapan kerja Tim LKIP							Surat Edaran Penyusunan LKIP	1 hari	Surat persiapan rapat	
2	Mempersiapkan rapat penyusunan LKIP							Surat persiapan rapat	15 menit	Materi LKIP, PK Tahun Sebelumnya, Hasil evaluasi PANRB, Ruang dan Kelengkapan	
3	Melaksanakan Rapat Penyusunan LKIP							Materi LKIP, PK Tahun Sebelumnya, Hasil evaluasi PANRB, Ruang dan Kelengkapan	2 minggu	Surat Edaran untuk seluruh SKPD	
4	Menerima data/dokumen LKIP							Surat Edaran untuk seluruh SKPD	2 minggu	Data/ dokumen LKIP	Dokumen LKIP SKPD
5	Melakukan pembahasan dan perbaikan (asistensi) data/dokumen LKIP							Data/dokumen LKIP	2 minggu	Data/dokumen LKIP yang diverifikasi	Data dikembalikan apabila tidak sesuai dengan data yang ada di BKD dan Bappeda
6	Menyusun Draf LKIP							Data/dokumen LKIP yang diverifikasi	1 bulan	Draf LKIP	
7	Melakukan Evaluasi dan Konsultasi LKIP							Draf LKIP	5 hari	Draf LKIP yang dikonsultasikan	Evaluasi dan konsultasi ke PANRB dan Biro Organisasi Provinsi
8	Melaksanakan rapat Evaluasi & Finalisasi Penyusunan LKIP Kab. Balangan							Draf LKIP yang dikonsultasikan	3 hari	Draf LKIP yang telah diverifikasi	
9	Melakukan perbaikan hasil rapat evaluasi dan finalisasi penyusunan LKIP							Draf LKIP yang telah diverifikasi	3 hari	Draf LKIP yang sudah disetujui	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubbag Kinerja dan RB	Tim LKIP	Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Reviu LKIP							Draf LKIP yang sudah disetujui	1 minggu	Draf LKIP hasil Reviu	
11	Melaksanakan perbaikan draf LKIP hasil Reviu							Draf LKIP hasil Reviu	3 hari	Draf LKIP final	
12	Menyetujui dan pengesahan LKIP							Draf LKIP final	5 hari	LKIP yang disahkan	SOP dokumen
13	Penjilidan dan Penggandaan untuk disampaikan ke PANRB dan Instansi/Lembaga terkait							LKIP yang disahkan	3 hari	LKIP yang telah dijilid dan digandakan dan di apload dalam e SAKIP REVU Menpan	Pengesahan

Penjabat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Balangan,

Drs. H. YULANSYAH, M.AP  
NIP. 19620412 199203 1 013

LAMPIRAN XXI  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 NOMOR 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN</b>  <b>BAGIAN ORGANISASI</b></p>	Nomor : 188.45/22/Setda/Kum TAHUN 2021 Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif :
	Disahkan oleh : Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan,  Drs. H. YULIANSYAH, M.AP NIP 19620412/199203 1 013
Nama SOP	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan
Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksanaan 1. Memahami pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Memahami perencanaan strategis (Renstra)
Keterkaitan dengan SOP lain 1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembentukan Tim	Peralatan/Perlengkapan 1. Peraturan Perundang-Undangan 2. Perjanjian Kinerja SKPD 3. Dokumen Perencanaan Strategis 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan 1. Apabila tidak disusun/dilaporkan maka mempengaruhi penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN.	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Bupati	Mutu Baku			Ket.
		Tim Penyusun PK	Kasubbag. Kinerja dan RB	Kepala Bagian Organisasi	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Melaksanakan rapat persiapan kerja tim Perjanjian Kinerja					Undangan rapat	1 hari	Teknis pekerjaan	pelaksanaan	
2	Melakukan Instruksi penyusunan dan pengumpulan data/dokumen Perjanjian Kinerja seluruh SKPD					Teknis pelaksanaan pekerjaan	2 minggu	Perjanjian kinerja		
3	Menerima data / dokumen Perjanjian Kinerja					Perjanjian kinerja	1 minggu	Data / dokumen Perjanjian Kinerja		
4	Melakukan Kompilasi / Penyusunan Data Perjanjian Kinerja					Data/dokumen Perjanjian Kinerja	1 bulan	Data / dokumen		
5	Melakukan Pengesahan / Penandatanganan					Data/dokumen	3 hari	Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten yang sudah ditandatangani / disahkan		
6	Melakukan penjiilidan dan penggandaan untuk disampaikan ke PANRB dan Instansi/Lembaga terkait					Dokumen Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani / disahkan	3 hari	Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten yang sudah ditandatangani/ disahkan		

Penjabat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Balangan,

Drs. H. YULIANSYAH, M.AP  
NIP. 19620412 199203 1 013



## REKAP PENGHARGAAN PENJABAT BUPATI BALANGAN TAHUN 2023

NO.	TANGGAL	TEMPAT	PENGHARGAAN	OLEH	FOTO KEGIATAN
1	14 Februari 2023	Aula Kantor Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Banjarmasin	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan publik) dari ombudsman RI	Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.	
2	21 Februari 2023	Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta	Kabupaten Bebas Frambusia	Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin	
3	14 Maret 2023	Balai Sudirman Jakarta	Penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam Progam Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pencapaian Universal Health Coverage dari Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. A. P	

4	09 Maret 2023	Gedung Idham Khalid Banjarbaru	Penghargaan atas prestasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi Terbaik 5 di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan Predikat B Nilai 60,03	Gubernur Kalimantan Selatan H.Sahbirin Noor	
5	30 Maret 2023	Ruang Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Penghargaan kepada Pemerintahan Kabupaten Balangan atas pembayaran tagihan Listrik tepat waktu	Manajer Unit Pelayanan Pelanggan PLN Cabang Paringin	
6	05 April 2023	Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta	Penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2023 pada penganugerahan Penghargaan TOP BUMD Awards 2023		

7	13 April 2023	Gedung Idham Khalid Banjarbaru	Penghargaan terbaik Kategori penurunan Stunting Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi penurunan Stunting	Gubernur Kalimantan Selatan H.Sahbirin Noor	
8	09 Mei 2023	Aula BPK KalSel	WTP	Kepala Perwakilan BPK KalSel	
9	30Mei 2023	Di Kota Bandung	Penghargaan Berhasil meraih BKN Award 2023 dengan kategori 1. terbaik 3 Pengembangan Kompetensi 2. Terbik 5 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja 3. Terbaik 5 Penerapan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	Secara Virtual	

10	08 Juni 2023	Gedung Prof. Sujudi Kementerian Kesehatan RI	Penghargaan Pastika Away Pariwara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Wakil Menteri Kesehatan RI	
11	15 Agustus 2023	Titik 0 KM Banjarmasin	Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan skor 2,86 dan Status Kinerja Sedang Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD) Tahun 2022	Gubernur Kalimantan Selatan H.Sahbirin Noor	
12	21 Agustus 2023	Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM KalSel Banjarmasin	Atas kontribusi dalam pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Di Balangan dan Pengusulan Kanim Kelas III Balangan Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal Ali	

13	12 September 2023	Hotel Novotel Balikpapan	Peringkat I Apresiasi Percepatan Layanan Pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pensiun wilayah Propinsi Kalimantan Selatan	Deputi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara RI, Drs. Aris Windiyanto, M. Si	
14	07 September 2023	Hotel Bets Westren Banjarmasin	Atas komitmen Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja Untuk Pekerjaan Rentan	BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan	

15	21 November 2023	Hotel Bidakara Jakarta	Inovasi Pulpendacil sebagai TOP 45	Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	
16	27 November 2023	Bali Nusa Dua convention center 1, Nusa Dua, Bali	Prestasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 dengan Predikat Nilai BB( Sangat Baik)	Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Abdullah Azwar Anas	

17	12 Desember 2023	Gedung c lantai 3 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta	Innovative Government Award	Menteri Dalam negeri, Muhammad Tito Karnavian	 A photograph of Muhammad Tito Karnavian, the Indonesian Minister of the Interior, in a brown military-style uniform. He is standing on a stage, holding a golden trophy in his right hand and a framed certificate in his left. The background features a large banner with the text "PENGANTARAN INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)" and the Indonesian coat of arms. Below the banner, it says "Sponsored by" and "TAMINA".
----	------------------	---	-----------------------------	--	---

# LAMPIRAN X

SK IKU PERUBAHAN

MENGACU PADA

RPJMD PENYESUAIAN



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 890 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1464);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan nInstansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut ::

- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;

- b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unut Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yg akan diwujudkan, dan;
- c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 890 /KUM TAHUN 2023

TENTANG : 29 Desember 2023

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	<p>Makna :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor industri pengolahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data Industri pengolahan, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	<p>Makna :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Perdagangan, Pengolahan dan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun } n - 1} \times 100\%$		
1	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	<p>Makna :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.</p>	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Data BPS, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun } n - 1} \times 100\%$		
			4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	<p>Makna :</p> <p>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $= \frac{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (Tahun } n - \text{Tahun } (n - 1))}{\text{Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Data BPS, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5 Persentase Peningkatan Investasi Daerah	<p>Makna :</p> <p>Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) merupakan angka/nilai yang menggambarkan sejauh mana investasi dan permodalan perusahaan dapat dikembangkan di daerah.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) diperlukan sebagai gambaran kegiatan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya</p>	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Perhitungan Mandiri, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
2	2 Meningkatnya Kualitas SDM	3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6 Usia Harapan Hidup	<p>Makna :</p> <p>Usia Harapan Hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu.</p>	Dinas Kesehatan,	Data BPS, Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	<p>Makna :</p> <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><math>x_i</math> = Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			8 Angka Harapan Lama Sekolah	<p>Makna :</p> <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana:</p> <p><math>HLS_a^t</math> = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>i = Usia (a, a + 1, ..., n)</p> <p>FK = Faktor koreksi pesantren</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5 Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9 Pengeluaran Perkapita	<p>Makna :</p> <p>Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.</p> <p>Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p>	Bagian Perekonomian Setda	Data BPS, Bagian Perekonomian Setda

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p>Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi</p> <p>Rumus Perhitungan : <math display="block">= \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Jumlah Penduduk}}</math></p>		
3	3 Menurunnya Kemiskinan	5 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10 Indeks Gini Rasio	<p>Makna : Indeks Gini Rasio merupakan gambaran untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p> <p>Alasan Pemilihan : Indeks Gini Rasio diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan dalam pendapatan.</p> <p>Rumus Perhitungan : <math display="block">GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1}) \text{ atau } GC = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)</math></p> <p>Ket:  <b>GC</b> = Angka Gini Coefficient.  <b>X<sub>i</sub></b> = Proporsi jumlah RT kumulatif dalam kelas i  <b>f<sub>i</sub></b> = Proporsi jumlah RT dalam kelas i  <b>Y<sub>i</sub></b> = Proporsi jumlah pendapatan RT kumulatif dalam kelas i</p>	Dinas Sosial	Data BPS, Dinas Sosial
		6 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11 Angka Pengangguran Terbuka	<p>Makna : Angka pengangguran terbuka merupakan gambaran kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai angka pengangguran terbuka diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan ketenagakerjaan dan acuan bagi Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru.</p> <p>Rumus Perhitungan : <math display="block">TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%</math></p> <p>Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</p>	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Data BPS, Perhitungan Mandiri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
4	4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12 Nilai SAKIP	<p>Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja.</p> <p>Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p> <p>Rumus Perhitungan : LHE SAKIP Kemenpan RB RI</p>	Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD	LHE SAKIP Kemenpan RB RI, Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			13 Opini BPK	<p>Makna :</p> <p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Perolehan Opini WTP dalam LHP BPK atas LKPD (UU Nomor 15 Tahun 2004)</p>	BPKPAD, Inspektorat	LHP BPK atas LKPD, BPKPAD, Inspektorat
			14 Nilai EKPPD	<p>Makna :</p> <p>EKPPD kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian divalidasi oleh Tim Nasional pada saat EKPPD dilaksanakan (pembobotan nilai adalah 100% di dapat dari indeks capaian kinerja sebesar 95% dan indeks kesesuaian materi sebesar 5% pada capaian urusan pemerintahannya).</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri</p>	Setda dan Seluruh SKPD	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri , Setda
4	4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	15 Nilai IPP	<p>Makna :</p> <p>Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan.</p> <p>Rumus Perhitungan : Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai per indikator: <math>\frac{\text{nilai } F01 + \text{nilai } F02 + \text{nilai } F03}{3} \times \text{bobot perindikator}</math></li> </ul> </li> <li><b>2. Menentukan nilai setiap aspek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai per aspek: <math>\sum \text{nilai perindikator}</math></li> </ul> </li> <li><b>3. Menentukan indeks</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai indeks: <math>\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></li> </ul> </li> </ol>	Setda dan UPP	Setda dan UPP

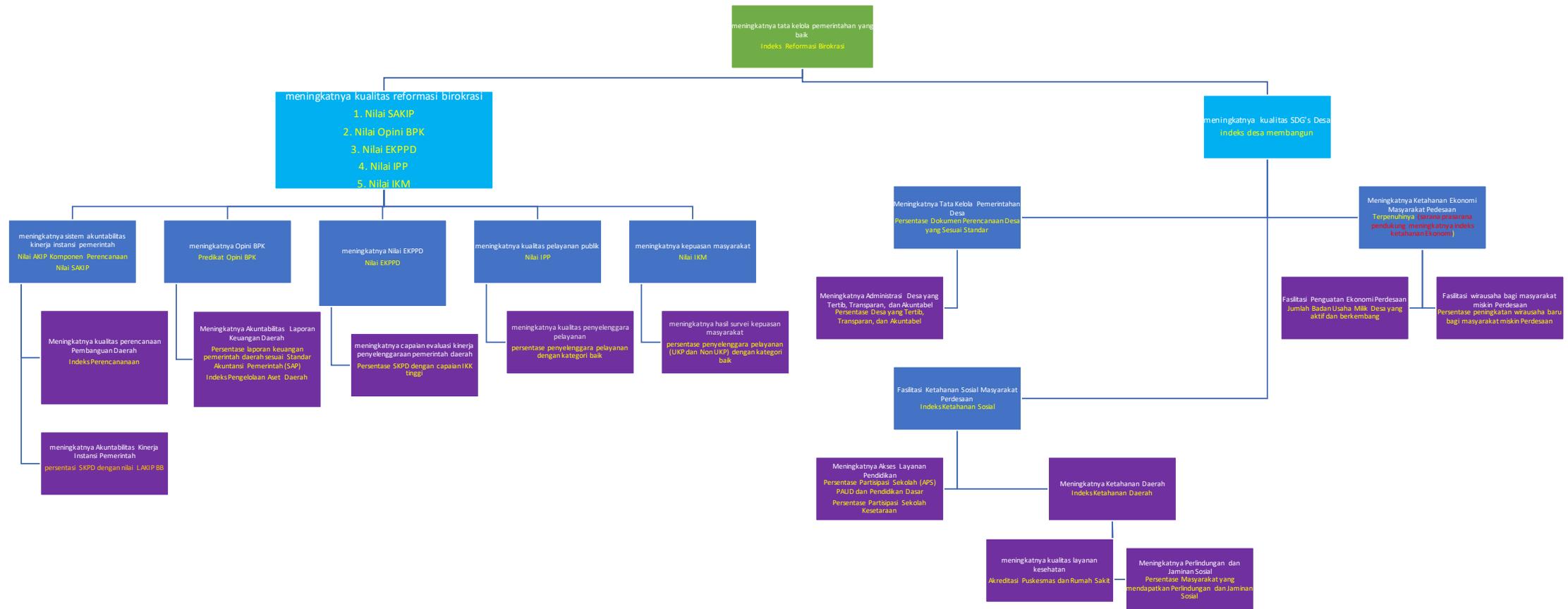
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			16 Nilai IKM)	<p>Makna :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan publik.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p>Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p>	Setda dan UPP	Setda dan UPP
		9 Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17 Indeks Desa Membangun	<p>Makna :</p> <p>Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <p style="text-align: center;"><math>Indeks\ Variabel = (\sum IndikatorX) / (Nilai\ Maksimum\ (X))</math></p> <p style="text-align: center;">Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

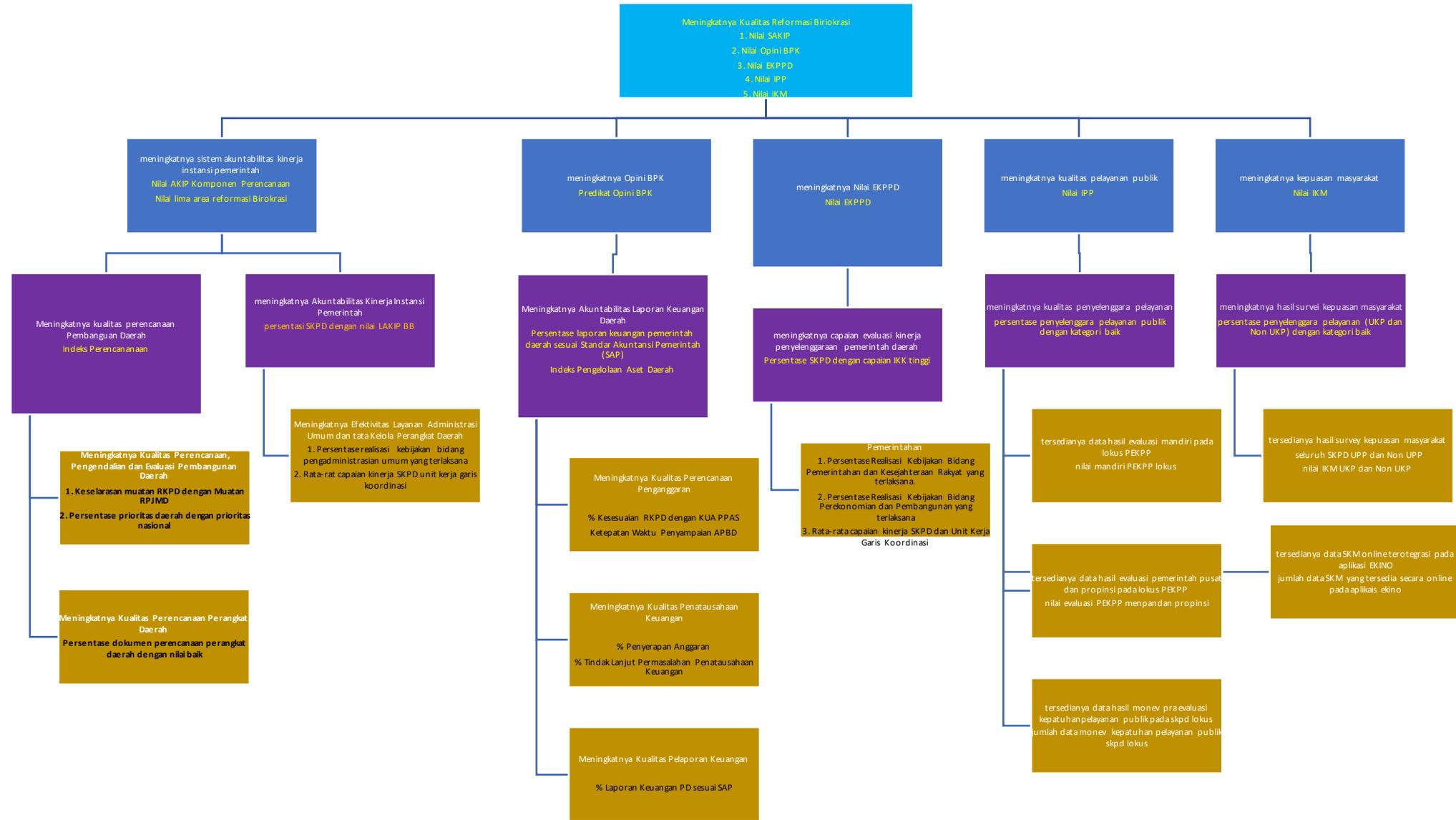


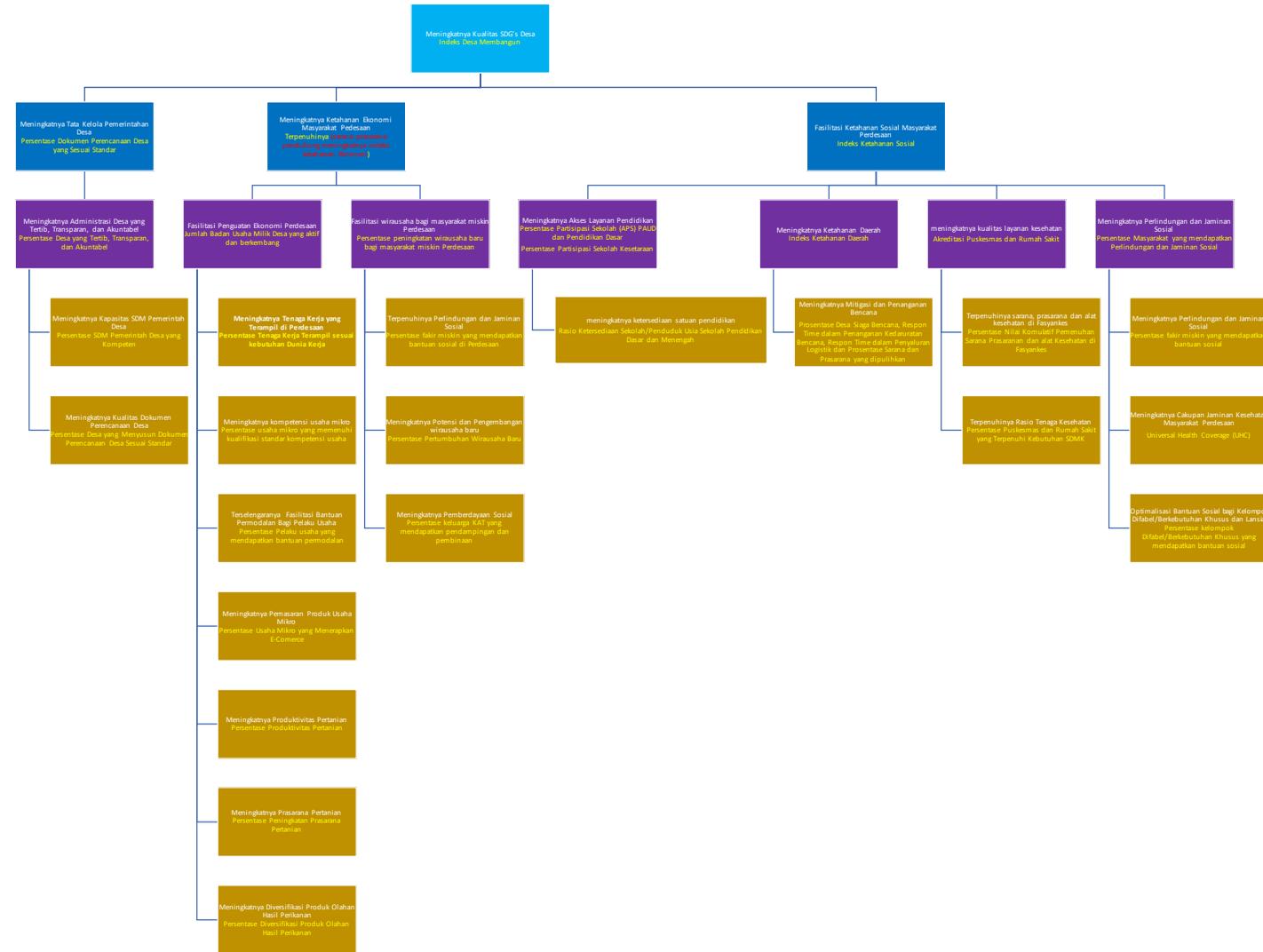
# LAMPIRAN XI

POHON KINERJA

TATA KELOLA



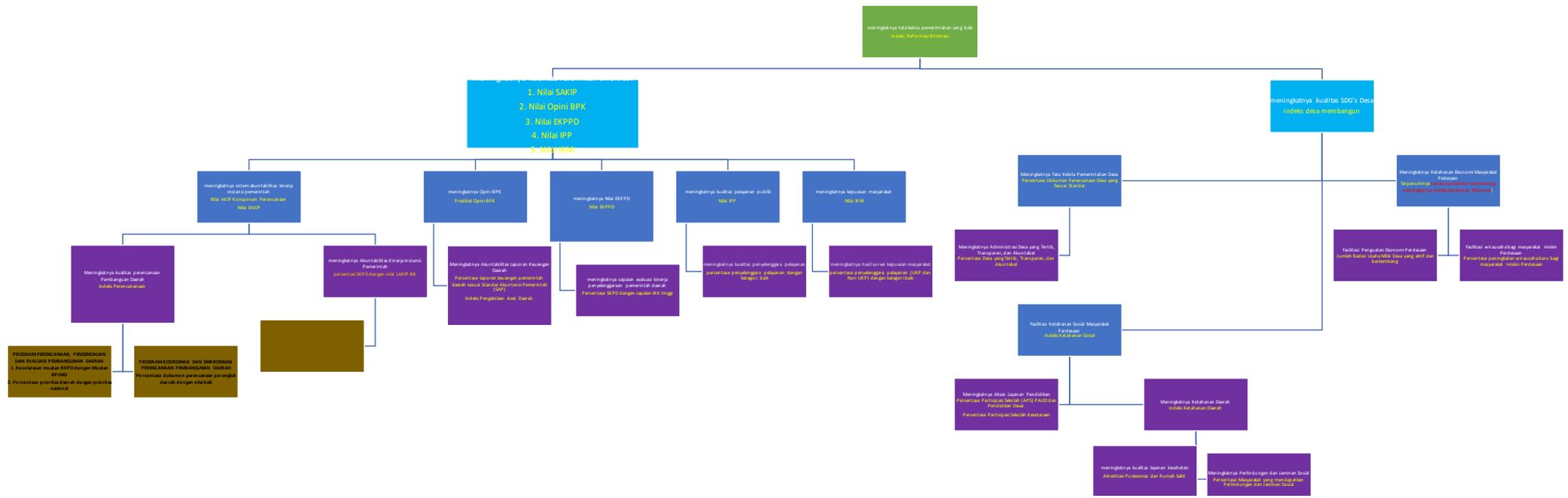




**LAMPIRAN XII**

**CASCADING KINERJA**

**TATA KELOLA**



# LAMPIRAN XIII

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**  
Jabatan : **BUPATI BALANGAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parangin, 16 Januari 2024



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

**LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	6,57	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	7,53	
		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	2,35	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	7,45	
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	53,61 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPKPAD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,89	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian, Pengembang SDM
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	
5.	Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran Perkapita	1.341.267	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan/Kelurahan/ Desa, Sekretariat Daerah
6.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini Rasio	0,285	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan Dinas Sosial,,Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DinasPerhubungan, Kecamatan.
7.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,37	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, , Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
8.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	74,40 (BB)	Setda, Inspektorat dan Baperinda dan seluruh SKPD
		Opini BPK	WTP	BPKPAD, Inspektorat
		Nilai EKPPD	3,5930	Setda dan seluruh SKPD
		Indeks Pelayanan Publik	4.51 (A)	Setda, dan UPP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Setda, dan UPP
9.	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	Indeks Desa Membangun	0,6795	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BPBD

No	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Penyelenggaraan Jalan	159.543.045.600
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.305.291.700
3.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	68.829.900
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.153.412.200
5.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	52.003.120.250
6.	Penataan Bangunan Gedung	81.277.796.000
7.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.031.834.652
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.961.960.000
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.503.402.400
10.	Kawasan Permukiman	977.848.500
11.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	86.649.441.480
12.	Pengelolaan Persampahan	8.042.271.000
13.	Perencanaan Lingkungan Hidup	494.743.750
14.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	857.102.550
15.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.999.751.000
16.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	46.560.000
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	91.556.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
18.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.564.112.334
19.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	298.656.600
20.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	576.944.200
21.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.316.029.350
22.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	22.148.967.250
23.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.051.348.300
24.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12.004.119.850
25.	Penyuluhan Pertanian	4.282.802.500
26.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.176.157.128
27.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.694.375.200
28.	Penanganan Kerawanan Pangan	292.550.500
29.	Pengawasan Keamanan Pangan	78.747.200
30.	Pengembangan UMKM	407.430.000
31.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	46.330.000
32.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	553.510.000
33.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	939.336.100
34.	Pengendalian Izin Usaha Industri	75.530.600
35.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1.026.000.400
36.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.134.445.200
37.	Pengembangan Ekspor	1.673.984.500
38.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	50.600.000
39.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	372.711.400
40.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	116.750.000
41.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.668.212.300
42.	Pemasaran Pariwisata	1.286.234.500
43.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	611.324.900
44.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	107.192.000
45.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	165.448.000
46.	Pelayanan Penanaman Modal	369.722.000
47.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	137.895.000
48.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.837.654.328
49.	Penempatan Tenaga Kerja	458.649.200
50.	Pengelolaan Pendidikan	151.454.591.389
51.	Pengembangan Kurikulum	425.214.000
52.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.701.424.400
53.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	208.720.000
54.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.105.779.648
55.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.746.310.300
56.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	261.972.000

No	Program	Anggaran (Rp.)
57.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	495.527.400
58.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.501.297.300
59.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	771.179.002.690
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	3.548.247.000
61.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.880.208.600
62.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.378.168.400
63.	Pengelolaan Keuangan Daerah	5.817.664.820
64.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.357.365.700
65.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.122.367.000
66.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	113.277.199.300
67.	Pemberdayaan Sosial	5.339.082.700
68.	Rehabilitasi Sosial	3.003.953.100
69.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	14.947.551.900
70.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.239.288.000
71.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	222.020.600
72.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.011.501.100
73.	Penanggulangan Bencana	4.458.399.210
74.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.117.227.700
75.	Pembinaan Sejarah	1.033.733.900
76.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.490.715.400
77.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.940.029.600
78.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	5.543.924.000
	<b>Jumlah</b>	

Parangin, 16 Januari 2024

**BUPATI BALANGAN,**



**H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom**

# LAMPIRAN XIV

## PENGUKURAN KINERJA PK PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

Provinsi / Kabupaten/ Kota  
 Tahun Anggaran

: Kalimantan Selatan / Balangan  
 : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target 2024	Capaian 2023 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023		
				Target	Realisasi	Capaian							
1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	n/a	5,57	4,01	71,99	6,57	46,79	8,57	SEDANG	NAIK	71,99
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	n/a	6,53	15,54	237,98	7,53	163,06	9,53	SANGAT TINGGI	NAIK	237,98
		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	n/a	1,35	8,74	647	2,35	200,92	4,35	SANGAT TINGGI	NAIK	647,41
		4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	n/a	6,45	9,85	152,71	7,45	104,23	9,45	SANGAT TINGGI	NAIK	152,71
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	250,59	48,88%	16,76%	34,28	53,61	22%	75%	SANGAT RENDAH	TURUN	-216,31

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target 2024	Capaian 2023 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023		
				Target	Realisasi	Capaian							
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Usia Harapan Hidup	100,01	68,32	73,69	107,86	73,89	106,92	68,92	SANGAT TINGGI	NAIK	7,85
		7	Angka Harapan Lama Sekolah	99,14	12,85	12,82	99,77	12,98	96,83	13,24	SANGAT TINGGI	NAIK	0,63
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	97,03	8,36	8,03	96,05	8,63	87,57	9,17	SANGAT TINGGI	TURUN	-0,98
		9	Pengeluaran Perkapita	76,10	1.308.553	990.667	75,71	1.341.267	70,30	1.409.168	SEDANG	TURUN	-0,40
6	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10	Indeks Gini Rasio	108,28	0,285	0,258	109,47	0,285	104,45	0,247	SANGAT TINGGI	NAIK	1,19
7	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	36,21	2,4	2,7	87,50	2,37	19,29	14,00	TINGGI	NAIK	51,29

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Target 2024	Capaian 2023 Terhadap 2026	TARGET AKHIR RPJMD	Kategori	Kinerja Naik/Turun 2022-2023	
				Target	Realisasi	Capaian						
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12 Nilai SAKIP	95,23	72,40 (BB)	70,17 (BB)	96,92	74,40 (BB)	89,73	78,20 (BB)	SANGAT TINGGI	NAIK	1,69
		13 Nilai Opini BPK	100,00	WTP	WTP	100	WTP	100,00	WTP	SANGAT TINGGI	KONSTAN	0,00
		14 Nilai EKPPD	99,36	3,5900	2,8600	79,67	3,593	79,44	3,6000	TINGGI	TURUN	-19,69
		15 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	104,00	3,51 (B)	4,01 (-A)	114	4,51 (A)	72,51	4,91 (A)	SANGAT TINGGI	NAIK	10,25
		16 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,18	85	86,88	102,21	86	102,21	85	SANGAT TINGGI	NAIK	1,03
9	Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17 Indeks Desa Membangun	110,58	0,7293	0,7527	103,21	0,6795	107,61	0,70	SANGAT TINGGI	TURUN	-7,37

# LAMPIRAN XV

## RANCANGAN KETERKAITAN RPJMD PENYESUAIAN DAN PK KABUPATEN

RANCANGAN KETERKAITAN RPJMD PENYESUAIAN DAN PK KABUPATEN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	5,57	6,57	4,24	4,59	
				2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,53	7,53	5,36	5,8	
				3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	1,35	2,35	4,92	5,32	
				4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,45	7,45	5,57	6,03	
			2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	48,88	53,61	60	75
2	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Usia Harapan Hidup	68,32	73,89	68,72	68,92	
				7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,36	8,63	8,9	9,17	
			4 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	8	Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	12,98	13,11	13,24	
				5 Meningkatkan Pengeluaran Perkapita	9	Pengeluaran Perkapita	1.308.553	1.341.267	1.374.798	1.409.168
	3 Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan	6 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10	Indeks Gini Rasio	0,285	0,285	0,28	0,275	
				7 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	2,37	2,34	2,3
					8 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	12	Nilai Sakip	72,40 (BB)	74,40 (BB)	76,40 (BB)
	13	Nilai Opini BPK	WTP	WTP		WTP	WTP			
14	Nilai EKPPD	3,5900	3,593	3,6		3,662				
15	Nilai IPP	3,51 (B)	4,51 (A)	4,77 (A)		4,91 (A)				
4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	9 Meningkatkan kualitas SDGS desa	16	Nilai IKM	85	86	88	90		
			17	Indeks Desa Membangun	0,7293	0,6795	0,6895	0,6995		

Kepala Bapperida  
Kabupaten Balangan,  
  
Rakamadi Yusni, S.Sos, M.AP  
NIP. 19701207 199503 1 002